

SERI DIKTAT KULIAH

Pemeriksaan Akuntansi 2

IBNU SUBIYANTO

UNIVERSITAS GUNADARMA

Pemeriksaan Akuntansi 2

PEMERIKSAAN AKUNTANSI 2

Oleh : Ibnu Subiyanto
Design & Lay Out : QX Graphic Design
Diterbitkan pertama kali oleh Gunadarma
© Hak Cipta dilindungi undang-undang
Jakarta 1995

Daftar Isi

| | |
|--|-----------|
| BAB 1 KONSEP AUDITING | 1 |
| A. PROFESI AKUNTAN PUBLIK | 2 |
| B. AUDITING DAN STANDAR PENGAUDITAN | 3 |
| C. PERENCANAAN AUDIT, DAN PENDEKATAN AUDIT | 9 |
| D. OPINI AUDITOR DAN TANGGUNGJAWAB PROFESIONAL | 17 |
| APENDIX | 21 |
| SOAL BAB 1 | 27 |
| BAB 2 AUDIT TERHADAP SIKLUS PENDAPATAN | 33 |
| A. PERMASALAHAN AUDIT TERHADAP SIKLUS PENDAPATAN | 35 |
| B. PEMAHAMAN TERHADAP STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN | 36 |
| C. PENGENDALIAN INTERN TERHADAP TRANSAKSI PENJUALAN KREDIT | 40 |
| D. PENGUJIAN SUBTANSI TRANSAKSI PENERIMAAN KAS | 43 |
| E. PENGUJIAN SUBTANSI TERHADAP SALDO PIUTANG | 47 |
| F. AUDIT TERHADAP PIUTANG WESSEL | 55 |
| SOAL BAB 2 | 57 |
| BAB 3 AUDIT TERHADAP SIKLUS PENGELUARAN | 63 |
| A. BENTUK SIKLUS PENGELUARAN | 64 |
| B. PEMAHAMAN TERHADAP STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN | 66 |
| C. PENGENDALIAN INTERN TERHADAP TRANSAKSI PEMBELIAN | 68 |
| D. PENGENDALIAN INTERN YANG DISARANKAN TERHADAP TRANSAKSI PENGELUARAN KAS | 71 |
| E. PENGUJIAN SUBTANTIF TERHADAP SALDO PLANT ASSETS | 72 |
| F. PENGUJIAN SUBTANSI TERHADAP SALDO UTANG DAGANG | 79 |
| SOAL BAB 3 | 88 |

| | |
|---|-----------|
| BAB 4 AUDIT TERHADAP SIKLUS JASA-JASA TENAGA KERJA | 93 |
| A. SIKLUS JASA-JASA TENAGA KERJA | 94 |
| B. TUJUAN AUDIT DALAM SIKLUS JASA-JASA TENAGA KERJA | 94 |
| C. MATERIALITAS, RISIKO PEMERIKSAAN, DAN STRATEGI PEMERIKSAAN | 95 |
| D. STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN JASA-JASA TENAGA KERJA | 97 |
| E. PENARIKAN RISIKO PENGENDALIAN | 101 |
| F. PENGUJIAN SUBTANSI TERHADAP SALDO BIAYA GAJI | 103 |
| G. KERTAS KERJA AUDIT | 104 |
| SOAL BAB 4 | 105 |

| | |
|---|------------|
| BAB 5 AUDIT TERHADAP SIKLUS PRODUKSI | 109 |
| A. SIKLUS PRODUKSI | 110 |
| B. TUJUAN AUDIT DALAM SIKLUS PRODUKSI | 110 |
| C. MATERIALITAS, RISIKO AUDIT, DAN STRATEGI AUDIT | 111 |
| D. STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN | 112 |
| E. PENGUJIAN SUBTANSI TERHADAP SALDO PERSEDIAAN | 117 |
| SOAL BAB 5 | 125 |

| | |
|--|------------|
| BAB 6 AUDIT TERHADAP SIKLUS INVESTASI | 129 |
| A. GAMBARAN UMUM SIKLUS INVESTASI | 130 |
| B. MATERIALITAS, RISIKO, DAN STRATEGI AUDIT | 132 |
| C. PEMAHAMAN TERHADAP STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN | 133 |
| D. PENGUJIAN SUBTANSI TERHADAP SALDO INVESTASI | 135 |
| SOAL BAB 6 | 141 |

| | |
|--|------------|
| BAB 7 AUDIT TERHADAP SIKLUS SUMBER-SUMBER PENDANAAN | 145 |
| A. TUJUAN AUDIT | 146 |
| B. MATERIALITAS, RISIKO, DAN STRATEGI AUDIT | 148 |
| C. PEMAHAMAN TERHADAP STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN | 148 |
| D. AUDIT SUBTANSI TERHADAP SALDO UTANG JANGKA PANJANG | 149 |
| E. AUDIT SUBTANSI TERHADAP REKENING-REKENING MODAL SAHAM | 155 |
| SOAL BAB 7 | 163 |

| | |
|---|------------|
| BAB 8 AUDIT TERHADAP TRANSAKSI KAS | 167 |
|---|------------|

| | |
|---|-----|
| A. GAMBARAN UMUM TRANSAKSI SIKLUS DAN HUBUNGANNYA | |
| DENGAN SALDO KAS | 168 |
| B. TUJUAN AUDIT TERHADAP SALDO REKENING KAS | 168 |
| C. PENENTUAN RISIKO PENDETEKSIAN | 169 |
| D. PENGUJIAN SUBTANSI TERHADAP SALDO REKENING KAS | 170 |
| SOAL BAB 8 | 182 |

| |
|--|
| BAB 9 PENYEMPURNAAN PEKERJAAN AUDIT |
|--|

| | |
|--|------------|
| DAN TANGGUNGJAWAB POSTAUDIT | 189 |
| A. PENYEMPURNAAN PEKERJAAN AUDIT LAPANGAN | 190 |
| B. EVALUASI TERHADAP PENEMUAN-PENEMUAN PENTING | 195 |
| C. MELAKUKAN KOMUNIKASI DENGAN PIHAK KLIEN | 200 |
| D. TANGGUNGJAWAB TERHADAP POSTAUDIT | 203 |
| E. KESIMPULAN | 204 |
| APENDIX | 205 |
| SOAL BAB 9 | 208 |

| |
|---|
| BAB 10 PELAPORAN TERHADAP STATEMEN |
|---|

| | |
|--|------------|
| KEUANGAN AUDITAN | 213 |
| A. STANDAR PELAPORAN | 214 |
| B. LAPORAN AUDIT BAKU | 221 |
| C. PENYIMPANGAN DARI LAPORAN AUDIT BAKU | 222 |
| D. BERBAGAI KEADAAN YANG MEMPENGARUHI PENYIMPANGAN | |
| DARI LAPORAN AUDIT BAKU | 224 |
| E. JENIS-JENIS LAPORAN KHUSUS YANG DIPERTIMBANGKAN | 230 |
| SOAL BAB 10 | 233 |

Bab 1

Konsep Auditing

(PENGANTAR PEMBAHASAN AUDITING 2)

Dalam bab ini akan dibahas berbagai materi perkuliahan yang telah dibahas dalam perkuliahan pada semester pertama. Uraian dalam bab ini bertujuan untuk penelaahan (review) bagian-bagian penting yang telah dibahas dalam kuliah semester I yang akan digunakan sebagai landasan membahas bahan perkuliahan pada semester II. Bab ini akan membahas:

1. Profesi Akuntan Publik dan Etika Profesi Akuntan Publik
2. Auditing dan Standar Pengauditan
3. Opini auditor dan Tanggungjawab Profesional Akuntan Publik
4. Perencanaan audit, dan Pendekatan Audit
5. Teknik audit, dan Implementasinya dalam Proses Audit
6. Penyusunan Kertas Kerja Audit dan Permasalahannya

A. PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik adalah profesi yang dibentuk karena kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa verifikasi laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi dalam suatu perusahaan. Kebutuhan terhadap jasa verifikasi oleh pihak yang independen tersebut melahirkan bentuk jasa profesional sebagai auditor. Artinya, profesi ini lahir karena adanya kebutuhan masyarakat untuk memberikan opini terhadap perbedaan-perbedaan kepentingan di antara berbagai pihak yang terlibat secara langsung dalam perusahaan. Semua pihak yang berkepentingan (pemegang saham, manajemen, kreditor, dan pemerintah) mempunyai kepentingan yang berbeda-beda terhadap perusahaan. Masing-masing pihak menginginkan diperlakukan secara adil (*fairness*) terhadap kepentingannya tersebut. Perlakuan secara adil dapat terbentuk apabila informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan terhadap peran masing-masing juga disajikan dengan penuh kejujuran. Auditor dalam hal ini, mempunyai peran bagaimana memberikan opini apakah suatu asersi manajemen dalam laporan keuangan yang disajikan dengan penuh kejujuran.

Profesi adalah karya bidang keahlian yang terorganisasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap keahliannya tersebut. Karya sebagai suatu profesi berarti bidang keahliannya tersebut menjadi sumber nafkah hidupnya. Disiplin ilmu yang mendasari suatu profesi biasanya merupakan ilmu terapan. Karena ilmu tersebut digunakan dalam praktik sehari-hari guna menjawab persoalan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi, suatu profesi terbentuk berdasarkan dua hal, yaitu: (1) adanya suatu disiplin ilmu yang menjadi induknya, dan (2) adanya kebutuhan masyarakat.

Sebagai suatu bentuk karya bidang keahlian maka profesi membutuhkan proses pendidikan, latihan dan pengalaman dalam menjalankan profesinya. Pendidikan berarti proses transformasi ilmu kepada orang-orang yang kelak kemudian hari akan menjadi anggota profesi tersebut. Ini berarti untuk bisa masuk dalam profesi seseorang harus dididik dengan persyaratan minimal, agar kelak dapat berperilaku dan berpraktik sesuai dengan karakter yang dibutuhkan. Kedudukan pendidikan menjadi sangat penting dalam suatu profesi, karena dalam pendidikan inilah terbentuk suatu proses regenerasi dalam profesi tertentu.

Latihan pada dasarnya juga merupakan proses pendidikan yang mencakup bagaimana menggunakan teori, teknik, ataupun metoda dalam keadaan nyata. Tekanan pelatihan dalam bentuk memberikan gambaran nyata dunia praktik dalam proses pendidikan seseorang. Latihan dapat berbentuk simulasi, latihan praktikum, *on the job training*, *in house training* dan lain sebagainya. Ini berarti latihan sebagai suatu proses pendidikan yang diberikan pada seseorang guna mempersiapkannya menghadapi praktik yang senyatanya.

Pengalaman menunjukkan berapa lama seseorang telah berkarya dalam menerapkan keahliannya di masyarakat. Disamping pendidikan dan latihan, pengalamanlah yang memberikan gambaran nyata *performance* seseorang dalam meniti kariernya. Pengalaman membentuk seseorang menjadi bijaksana, karena dia pernah merasakan bagaimana fatalnya melakukan kesalahan, nikmatnya menemukan pemecahan masalah, dan bagaimana memenangkan argumentasi serta kebanggaan telah memperoleh rejeki karena keahliannya tersebut.

Sebagai suatu profesi yang terorganisasi maka dalam menjalankan karyanya dibutuhkan aturan permainan serta kode etik. Etik mengatur hubungan dengan sesama anggota dan hubungan dengan masyarakat serta sangsi terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh salah seorang anggota. Ini berarti adanya jaminan bagi masyarakat bahwa para anggota profesi akan bekerja dengan baik dan tidak akan merugikan masyarakat.

Profesi akuntan di Indonesia mengalami perkembangan yang berarti dalam dasawarsa tahun 80. Perjalanan profesi akuntan di Indonesia dapat dikatakan masih sangat muda. Dipihak lain kebutuhan profesi ini meningkat dengan pesat di akhir dasawarsa tahun 1980 ini. Perkembangan ini terlihat secara nyata setelah pemerintah Indonesia melakukan serangkaian pengaturan kembali tata perekonomian yang mengarah pada sistem perekonomian liberal. Dunia usaha maupun para investor semakin membutuhkan informasi yang benar-benar dapat dipercaya, sehingga kalau seseorang menetapkan keputusan terhadap informasi tersebut tidak akan salah.

Sebagai suatu organisasi, Ikatan Akuntan Indonesia mempunyai kelengkapan organisasi yang cukup baik. Berbagai fungsi yang dibutuhkan dalam suatu organisasi profesi telah ada, yang antara lain:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Kode etik profesi Akuntan Indonesia.
3. Dewan Kehormatan IAI. Dewan ini bertugas mengawasi perilaku dan praktik yang dilakukan oleh para akuntan dalam menjalankan tugas profesinya.
4. Pengurus organisasi yang cukup lengkap. Disamping pengurus tetap terdapat pula komite prinsip akuntansi dan komite standar pengauditan. Komite ini bertugas melakukan penyempurnaan dan pemantauan perkembangan praktik profesi di Indonesia.
5. Adanya kongres yang berjalan dengan rutin dan mempunyai program kerja yang jelas.
6. Standar Profesional Akuntan Publik dan Standar Akuntansi Keuangan.

Kelengkapan organisasi tersebut menunjukkan bahwa profesi akuntansi di Indonesia cukup mempunyai otoritas. Meskipun demikian bukan berarti tidak ada masalah sama sekali, mengingat di Indonesia organisasi profesi ini masih dalam pertumbuhan yang sangat dini. Banyak masalah organisasi yang perlu penyempurnaan.

B. AUDITING DAN STANDAR PENGAUDITAN

Difinisi auditing menurut Committee on Basic Auditing Concepts dari American Accounting Association, yang dikutip oleh Kell and Boynton adalah:

“A systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those assertions and established criteria and communicating the results to interested users”

Dalam definisi tersebut terdapat kata kunci; *assertions*, yang artinya suatu pernyataan yang tegas mengenai suatu permasalahan. Dengan pengertian tersebut, laporan keuangan merupakan suatu asersi manajerial terhadap kejadian-kejadian ekonomis dalam perusahaan,

yang dengan sendirinya mempunyai konsekuensi yuridis. Penggunaan kata *assersi* memberikan makna, bahwa manajemen tidak sekedar hanya memberikan informasi atau melaporkan kejadian-kejadian ekonomis, tetapi merupakan suatu *assersi* yang diyakini kebenarannya.

Unsur-unsur yang ditegaskan dalam definisi tersebut di atas adalah,

1. ***Merupakan suatu proses sistematis***, ini menunjukkan bahwa dalam proses pengauditan, auditor mengacu pada sistematis kerja tertentu yang dalam pelaksanaannya menggunakan alat-alat pengukuran dalam mencapai mutu pekerjaan audit.
2. ***Melakukan evaluasi dan menentukan apakah bukti yang secara eksplisit dinyatakan bersifat obyektif***, hal ini berarti bahwasannya obyek audit adalah pernyataan yang dikemukakan secara eksplisit oleh manajemen dalam bentuk laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tertentu. Pernyataan tersebut perlu di verifikasi apakah dinyatakan dengan wajar ataukah tidak, yang oleh karenanya pembuktian terhadap pernyataan tersebut merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan oleh manajemen.
3. ***Obyek audit tentang kejadian dan aktivitas ekonomis***, dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa obyek audit adalah kejadian dan aktivitas ekonomis. Semua bentuk aktivitas dan kejadian ekonomis dapat diukur dalam satuan rupiah (mata uang) yang berlaku dalam negara yang bersangkutan.
4. ***Derajat kesesuaian antara pernyataan eksplisit (assertions) dalam laporan keuangan dengan standar yang berlaku secara umum***, ini berarti auditor melakukan audit terhadap *assertion* yang dibuat oleh klien sendiri. Ini berarti setiap pernyataan eksplisit yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan sudah mempertimbangkan konsekuensi yuridis maupun hal lainnya.
5. ***Pembentukan suatu kriteria untuk mengukur apakah pernyataan eksplisit dalam laporan keuangan sesuai***, berbagai kriteria yang membentuk aturan spesifik yang digunakan untuk mengukur prestasi manajer.
6. ***Menyampaikan hasil yang diperoleh kepada para pemakai (user)***, dengan maksud bahwa setiap kesimpulan dan pernyataan pendapat yang dikemukakan oleh auditor harus disampaikan kepada pihak-pihak yang ikut berkepentingan dalam perusahaan tersebut.

Guna memperbandingkan definisi yang dikemukakan oleh Kell dan Boynton, penulis lain yaitu Alfin A. Arens, memberikan definisi sebagai berikut:

“Auditing is the process by which a competent, independent person accumulates and evaluates evidence about quantifiable information related to a specific economic entity for the purpose of determining and reporting on the degree of correspondence between the quantifiable information”

Unsur-unsur dalam definisi tersebut di atas, adalah:

1. Adanya suatu kriteria yang dibentuk dalam pengauditan.
2. Bahwa obyek auditing adalah informasi akuntansi yang bersifat kuantitatif mengenai suatu unit kesatuan ekonomis.

3. Dalam proses audit dilakukan pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti.
4. Auditor adalah orang yang mempunyai kompetensi sebagai auditor dan bersikap independen dalam menjalankan profesinya.
5. Hasil pekerjaan auditor dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan.

Dengan memperhatikan kedua definisi tersebut, terlihat konteks ruang lingkup auditing. Keduanya sama-sama menggunakan pendekatan bahwa pengauditan merupakan suatu proses evaluasi terhadap pernyataan eksplisit (*assertions*) manajemen dan oleh karenanya dibutuhkan adanya standar operasi audit guna mengukur pernyataan eksplisit manajemen itu tersebut.

Dalam menjalankan kewajiban profesinya, auditor menggunakan standar umum pengauditan (*generally accepted auditing standard*) yang ditetapkan oleh profesi akuntan di suatu negara. Pada umumnya di setiap negara membentuk standar profesi masing-masing dengan memperhatikan lingkungan dan filosofi negara tersebut. Meskipun begitu, standar profesi masing-masing negara tersebut pada umumnya mengacu pada standar profesi akuntan di Amerika Serikat. Oleh karenanya perkembangan standar profesi yang dikeluarkan oleh AAA (American Accounting Association), selalu diikuti oleh asosiasi profesi akuntan di banyak negara lainnya.

Standar pengauditan dipandang perlu agar mutu pekerjaan setiap auditor pada suatu negara mempunyai mutu yang setara. Seperti halnya di banyak negara, profesi Akuntan di Indonesia juga mengacu standar profesinya berdasarkan standar profesi di Amerika Serikat. Di Indonesia saat ini, standar tersebut tertulis dalam buku Standar Profesional Akuntan Publik. Para Akuntan (SPAP) telah mengadabtasi GAAS yang berlaku bagi anggota AAA kedalam buku tersebut. Dalam **Generally Accepted Auditing Standard** dimuat sepuluh standar pengauditan. Sebagai sumber buku SPAP berikut disajikan teks dalam bahasa aslinya.

A. *General Standards (Standar Umum)*

1. *The audit is to be performed by a person or persons having adequate technical training and proficiency as an auditor.*
2. *In all matters relating to the assignment, an independence in mental attitude is to be maintained by the auditor or auditors*
3. *Due profesional care is to be exercised in the performance of the audit and the preparation report*

B. *Standards of Field Work (Standar Pelaksanaan Pemeriksaan)*

4. *The work is to be adequately planned, and assistants, if any, are to be properly supervised.*
5. *A sufficient understanding of the internal control structure is to be obtained to plan the audit and to determine the nature, timing, and extent of tests to be performed.*
6. *Sufficient competent evidential matters is to be obtained through inspection, observation, inquiries, and confirmations to afford a reasonable basis for an opinion regarding the financial statements under audit.*

C. *Standards of Reporting (Standar Pelaporan)*

7. *The report shall state whether the financial statements are presented in accordance with generally accepted accounting principles.*
8. *The report shall identify those circumstance in which such principles have not been consistently observed in the current period in relation to the preceding period.*
9. *Informative disclosures in the financial statements are to be regarded as reasonably adequate unless otherwise stated in the report.*
10. *The report shall either contain in the financial statements of opinion regarding the financial statements, taken as whole, or an assertion to the effect that an opinion cannot be expressed. When an overall opinion cannot be expressed, the reasons therefor should be stated. In all cases where an auditor's name is associated with financial statements, the report should contain a clear-cut indication of the character of the auditor's work, if any, and the degree of responsibility the auditor is taking.*

Rincian penjelasan Standar Profesional Akuntan (Generally Accepted Auditing Standard) yang berlaku dalam praktik adalah sebagai berikut:

- A. General Standard, berisi pasal-pasal mengenai kualifikasi seseorang yang berwenang melakukan audit (pengauditan).
1. Standar 1/1, menunjukkan kompetensi seseorang akuntan yang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan antara lain:
 - a. Mempunyai pendidikan minimal untuk menjalankan profesinya, sesuai dengan UU nomor 34/1954.
 - b. Mempunyai pengalaman dan pendidikan praktik dalam auditing
 - c. Mengikuti *continuing professional education*Perhatikan pula pasal 3, dan 4 kode etik Akuntan Indonesia.
 2. Standar 1/2, menunjukkan independensi auditor dalam setiap menjalankan pekerjaan profesinya sebagai akuntan publik. Sikap merdeka dan tidak memihak ditunjukkan dengan kebebasan dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor. Ada tiga macam independensi:
 - a. *Independence in fact*, yang berarti senyatanya auditor telah menjalankan tugas profesinya dengan obyektif serta menggunakan kemerdekaannya untuk mengambil keputusan.
 - b. *Independence in appearance*, yang berarti dari aspek perilaku dan lingkungan kerja auditor tidak menunjukkan gejala ataupun situasi yang dapat diduga akan menjadikan dirinya berpihak pada salah satu pihak yang berkepentingan.
 - c. *Independence in proficiency*, yang berarti auditor mempunyai keahlian yang memadai untuk mengaudit obyek auditannya.Ke tiga macam independensi tersebut mencerminkan sikap mental yang harus dimiliki oleh seorang auditor. (Bandingkan dengan pasal 12, 13, 14 Kode Etik Akuntan Indonesia)

3. Standar 1/3, mengharuskan akuntan dalam menjalankan tugasnya senantiasa menggunakan kemahiran jabatannya. Kemahiran jabatan (sering pula disebut: keahlian profesional) ini ditunjukkan dalam setiap langkah pekerjaan akuntan yang dilaksanakan dengan hati-hati, cermat, dan menggunakan prosedur pengauditan yang benar. Kemahiran ini berkaitan pula dengan keahliannya dalam menjalankan standar audit. (bandingkan dengan pasal 15, 16, 17, 18 Kode Etik Akuntan Indonesia)

B. Standar Pelaksanaan Audit, memberikan diskripsi pasal-pasal pekerjaan operasional pengauditan baik pada tahap perencanaan audit maupun tahapan pekerjaan lapangan. Standar audit ini terdiri dari tiga, yang antara lain:

1. Standar 2/1, Perencanaan audit menyatakan, bahwa pekerjaan harus direncanakan dengan baik dan jika digunakan asisten, mereka harus diawasi dengan semestinya. Standar ini mengandung dua pengertian: (1) audit harus direncanakan dengan baik (strategi yang tepat) agar dapat memperkirakan ruang lingkup pengujian dan langkah-langkah apa yang harus ditempuh, dan (2) penggunaan asisten sepenuhnya menjadi tanggungjawab akuntan publik (*staff in charges*).
2. Standar 2/2, Pengujian terhadap struktur pengendalian intern, bahwa struktur pengendalian intern harus dipahami dengan memadai, guna menyusun perencanaan audit, dan untuk menentukan bentuk (*nature*), *timing*, dan luasnya pengujian yang akan dilakukan. Struktur pengendalian intern meliputi tiga aspek, yaitu: (1) lingkungan pengendalian, (2) sistem akuntansi termasuk mekanisme internal controlnya, dan (3) prosedur pengendalian.

Struktur pengendalian intern dimaksudkan untuk memperoleh jaminan bahwa:

- a. Semua transaksi yang terjadi dilaksanakan dengan kewenangan yang telah diberikan oleh manajemen baik secara umum maupun secara khusus.
- b. Bahwa semua transaksi yang dicatat:
 - * telah sesuai dengan GAAP atau aturan yang berlaku.
 - * mencerminkan tanggungjawab keberadaan assets perusahaan.
 - * Bahwa sesuatu yang terkait dengan assets (penambahan/pengurangan) telah memperoleh otorisasi dari manajemen.
 - * Apabila diperbandingkan antara tanggungjawab pencatatan kekayaan (assets) dengan existensinya tidak terdapat perbedaan (dapat diverifikasi kebenarannya) dalam kurun waktu tertentu.

Mengingat begitu besar peranan struktur pengendalian intern dalam suatu perusahaan dalam menjamin apakah data keuangan suatu perusahaan dapat dipercayai, maka cukup beralasan apabila auditor menggunakannya sebagai basis dalam pengujian suatu laporan keuangan.

3. Standar 2/3, pengumpulan bukti dan kertas kerja audit harus diperoleh dalam **jumlah yang cukup dan kompeten** melalui inspeksi, pengamatan, wawancara, dan konfirmasi untuk memberikan dasar yang kuat terhadap pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa.

Pengertian bukti, segala informasi yang mendukung angka yang disajikan dalam laporan keuangan. Bukti yang cukup, menyangkut kuantitas (jumlah) dan bukti yang kompeten, menyangkut kualitas (mutu) bukti. Bukti yang cukup kompeten, adalah segala informasi yang telah memenuhi kualitas dan kuantitas pembuktiannya dalam mendukung angka yang disajikan dalam laporan keuangan. Jenis-jenis bukti antara lain: (a) bukti dokumenter, (b) bukti lisan, (c) bukti dari seorang ahli, (b) sistem pengendalian intern sebagai bukti, (d) bukti phisik, (e) analisis ratio/perbandingan, (f) catatan akuntansi, dan (g) perhitungan.

- C. Standar Pelaporan, secara keseluruhan standar ini mengatur teknik penyajian pendapat auditor dalam laporan audit (*opinion paragraph*). Pendapat auditor mengenai hasil pekerjaan profesionalnya disajikan dalam bentuk laporan audit. Laporan ini disajikan setelah auditor melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan stafnya yang terkumpul dalam *audit working papers* yang sering pula disebut kertas kerja audit.
- Standar 3/1, laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia. Kalimat ini menunjukkan bahwa pendapat audit didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan sebagai acuan untuk menilai laporan keuangan klien. Kalimat ini menunjukkan bahwa auditor harus memberikan pendapat (*unqualified* atau *qualified*) atau sebaliknya. Mungkin pula penegasan mengenai hal tersebut tidak dapat dikemukakan. Kalimat kedua merupakan antisipasi atas kalimat pertama, dengan hal-hal yang menyebabkan auditor tidak dapat memberikan pendapat secara keseluruhan.
 - Standar 3/2, laporan audit harus menyatakan apakah standar akuntansi tersebut dalam periode berjalan telah dilaksanakan secara konsisten dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kalimat ini menunjukkan bahwa konsistensi penggunaan prinsip akuntansi yang lazim, menjamin laporan keuangan klien tidak terkandung unsur subyektif.
 - Standar 3/3, pengungkapan informatip dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan keuangan tersebut. Kalimat ini menunjukkan sampai sejauh mana auditor terlibat dan bertanggungjawab atas pengungkapan namanya dalam suatu laporan keuangan. Jadi, apabila auditor ingin mengemukakan sesuatu pengecualian harus dinyatakan dalam mendukung pendapatnya.
 - Standar 3/4, laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau memuat suatu penegasan, bahwa pernyataan demikian tidak diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dikemukakan. Dalam hal nama akuntan publik dihubungkan dengan laporan keuangan, maka laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat audit yang dilakukan.

Dengan memperhatikan standar profesional tersebut, akuntan publik mempunyai dimensi yang luas dalam memberikan layanan kepada masyarakat akuntansi. Hal ini menimbulkan beberapa macam jenis bidang kerja dalam profesi auditor. Jenis-jenis profesi auditor antara lain:

1. **Independent auditors**, yaitu akuntan yang berpraktik memberi layanan umum sebagai akuntan publik. Semua jasa-jasa profesional sebagai auditor ditampung dalam Kantor Akuntan Publik, yang antara lain jasa audit umum, jasa attestasi, jasa penyusunan sistem, dan lain-lain.
2. **Internal auditors**, yaitu akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan yang berfungsi memberikan jasa secara internal untuk melakukan verifikasi informasi keuangan yang digunakan untuk kepentingan pengendalian intern dan pengendalian manajemen. Meskipun akuntan intern memberikan jasa untuk kepentingan intern, tidak berarti Dia secara bebas menggunakan teknik ataupun metode yang dikembangkan sendiri. Segala teknik maupun metode audit untuk kepentingan eksternal auditor berlaku pula untuk kepentingan akuntan intern.
3. **Government auditors**, yaitu para akuntan yang bekerja dalam struktur pemerintahan dengan perannya untuk melakukan verifikasi pertanggungjawaban pelaksanaan budget yang ditetapkan dalam sistem perundangan dalam suatu pemerintahan. Di Indonesia para akuntan pemerintah bekerja di Inspektorat Jendral masing-masing departemen, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

C. PERENCANAAN AUDIT, DAN PENDEKATAN AUDIT

Setiap menjalankan tugasnya sebagai akuntan publik, seorang auditor mempunyai kewajiban untuk membuat perencanaan yang memadai agar langkah-langkah yang akan ditempuh dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mengumpulkan bukti-bukti audit yang cukup memadai dan dapat menjadi dasar pemberian opini auditor. Dalam membuat perencanaan, auditor harus mempertimbangkan terlebih dahulu pendekatan yang akan digunakan dalam proses audit nanti. Dalam menyusun perencanaan, auditor harus mempertimbangkan terhadap: tujuan audit, bagaimana memperoleh bukti pengauditan, bagaimana menyusun kertas kerja audit, dan lain-lain.

Perencanaan audit dilakukan melalui beberapa tahapan seperti terlihat dalam peraga 1.1. Berbagai langkah-langkah perencanaan audit tersebut harus selalu dipertimbangkan oleh auditor yang secara terinci dibahas dalam berbagai bab dan subbab. Sebelum perencanaan disusun auditor harus memperoleh informasi yang memadai guna menentukan strategi auditnya.

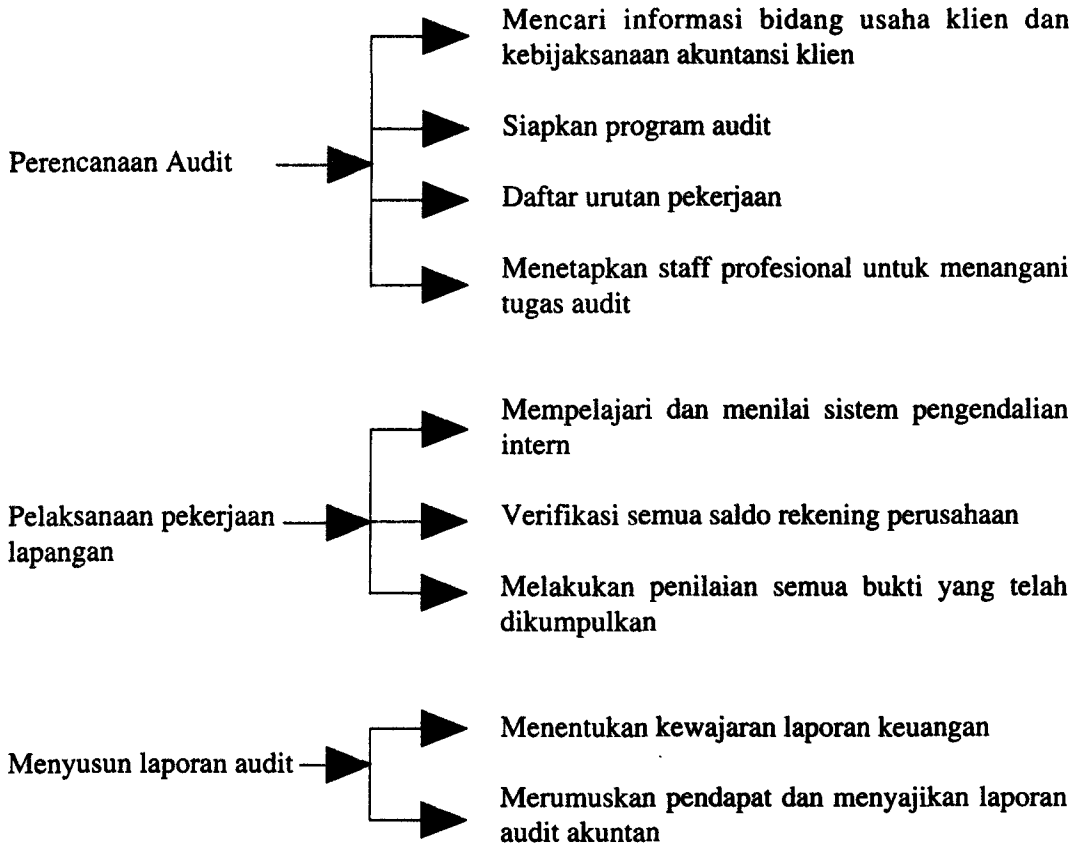
Auditor sering dihadapkan pada klien baru, bahkan seringkali belum memahami seluk-beluk usaha-usaha yang dijalankannya. Sebelum mengambil keputusan mengenai strategi audit yang akan dijalankannya, auditor harus memperoleh informasi berikut ini:

- a. Jenis usaha klien, jenis produk dan jasa yang dihasilkannya, lokasi perusahaan dan karakterisasi operasinya, serta metode pemasaran dan produksinya.
- b. Jenis industri, penataan industri dalam rangka menghadapi perubahan kondisi ekonomi, dan kebijaksanaan serta praktik-praktik dalam industri pada umumnya.
- c. Eksistensi transaksi dengan pihak-pihak lain yang terkait.
- d. Struktur pengendalian intern yang berlaku di perusahaan.
- e. Berbagai bentuk laporan yang dihasilkan untuk berbagai pihak pemegang otoritas peraturan, seperti BAPPEPAM.

Peraga 1.1 Perencanaan Audit

Tahapan Audit

Langkah Audit



Apabila auditor telah melakukan audit terhadap klien untuk kedua atau seterusnya, maka dia harus memperoleh dan mempelajari kertas kerja permanen hasil pekerjaan audit tahun/ beberapa tahun sebelumnya. Auditor harus melakukan penelaahan terhadap perubahan data industri dan data perusahaan yang meliputi:

- a. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
- b. Notulen rapat-rapat pimpinan
- c. Analisis terhadap laporan-laporan yang telah dibuat
- d. Kontrak-kontrak penting dengan pihak lain
- e. Kesesuaian laporan dengan aturan pemerintah, dan lain-lain.
- f. Melakukan wawancara dengan komite audit

Disamping informasi tersebut, Auditor perlu melakukan perjalanan keliling di lokasi pabrik atau kantor. Langkah ini sangat diperlukan guna memahami dimana lokasi bagian-bagian yang operasional, serta mengetahui seberapa banyak fasilitas yang dimiliki perusahaan. Dalam menjalankan perjalanan keliling pabrik, auditor melakukan inspeksi kebenaran informasi yang dikumpulkan sebelumnya.

Semua informasi yang diperoleh harus ditelaah dan dianalisis guna menentukan pilihan teknik, pendekatan serta strategi audit yang akan dijalankan. Berdasarkan pengetahuan tersebut auditor menyusun program audit, yang akan digunakan sebagai pedoman bagi para asisten auditor dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan. Langkah mana yang akan diambil oleh auditor, tergantung preferensi pemecahan masalah-masalah yang dihadapi di lapangan. Langkah selanjutnya auditor harus membuat urutan pekerjaan mengingat audit program saja belum tentu dapat dioperasionalkan. Penyusunan detail urutan pekerjaan sangat membutuhkan pengalaman melakukan audit.

1. Tujuan Audit

Tujuan audit secara keseluruhan terhadap laporan keuangan adalah memberikan pendapat terhadap kewajaran penyajian, baik pengaruhnya secara material, dan kesesuaiannya dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Untuk mencapai tujuan akhir tersebut, auditor harus melakukan proses audit terinci terhadap elemen pendukung laporan keuangan. Masing-masing elemen mempunyai tujuan-tujuan spesifik yang lebih rinci. Oleh karenanya dalam audit terhadap sebagian penyajian elemen-elemen laporan keuangan tersebut harus pula dipahami *financial statement assertions* oleh klien.

Kata *assertions* (diterjemahkan dengan kata **assersi**) memberikan pengertian bahwa dalam statemen keuangan manajemen memberikan suatu **pernyataan yang eksplisit**. Pernyataan eksplisit ini mengandung konsekuensi yuridis bagi pihak yang membuat pernyataan tersebut. Sebagai contoh:

| | |
|---------------------------|---------------|
| Piutang Dagang | Rp.408.000 |
| Cadangan Kerugian Piutang | <u>12.000</u> |
| Piutang Dagang (netto) | Rp 398.000 |

Di dalam pelaporan elemen neraca tersebut manajemen membuat pernyataan yang eksplisit tentang: (1) adanya piutang dagang, dan (2) jumlah yang tepat elemen piutang dagang sebesar Rp398.000. Sebagai konsekuensi dari pernyataan eksplisit, yang secara implisit asseri (assertions) tersebut mengandung makna: (1) bahwasannya semua elemen pendukung piutang dagang telah termasuk di dalamnya. (2) bahwa semua elemen piutang yang dilaporkan tersebut memang hak yang sah secara hukum, dan (3) bahwasannya tagihan-tagihan kepada pihak ketiga tersebut tidak ada unsur-unsur yang membatasinya dan secara efektif dapat ditagih pada saat jatuh tempo nanti. Disamping penyajian jumlah rupiah tersebut, manajemen memberikan suatu penilaian terhadap total piutang dagang dengan membentuk cadangan kerugian piutang. Pencadangan ini dibentuk mengingat asseri manajemen harus bersikap konservatif, mengingat adanya kemungkinan sejumlah debitor mungkin tidak mampu melunasi kewajibannya. Penilaian yang bersifat subyektif tersebut menggunakan metode yang diijinkan oleh standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam keadaan ini auditor harus memberikan penilaian apakah metode yang digunakan layak diterapkan serta apakah metode tersebut diterapkan dengan konsisten dengan periode-periode sebelumnya. Mengingat unsur penilaian ini bersifat subyektif, maka dalam asseri piutang tersebut harus diungkapkan pula metode yang digunakan. Pengungkapan ini dipandang perlu, agar pembaca laporan keuangan mempunyai cara penilaian yang sama dengan penyaji laporan keuangan tersebut.

Asseri laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen mempunyai konsekuensi terhadap tujuan spesifik elemen pendukungnya. Sehubungan dengan pernyataan manajemen tersebut, terkandung maksud untuk memenuhi lima kategori kualitas asseri yang antara lain:

- a. *Existence or occurrence* (diterjemahkan eksistensi atau okurensi)
- b. *Completeness* (diterjemahkan kesempurnaan)
- c. *Rights and obligations* (diterjemahkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban).
- d. *Valuation or allocation* (diterjemahkan penilaian atau alokasi).
- e. *Presentation and disclosure* (diterjemahkan penyajian dan pengungkapan).

Ke lima komponen pembentuk asseri dalam laporan keuangan tersebut mewarnai proses audit terhadap strategi audit selanjutnya. Oleh karena itu dalam subbab ini akan dibahas secara lebih terinci berbagai aspek asseri laporan keuangan yang disajikan manajemen tersebut. Pembahasan mencakup beberapa aspek: (1) penerjemahan dalam bahasa Indonesia beserta alasannya, (2) makna yang terkandung dalam unsur pembentuk asseri, dan (3) bagaimana konsekuensi dalam program audit.

- a. Eksistensi atau okurensi.

Padanan kata *existence* adalah eksistensi sedangkan istilah *occurrence* adalah okurensi, penterjemahan kedua istilah teknis tersebut dengan ide sebagai berikut:

- * *exist* berarti terakui keberadaannya, dengan demikian pengertian existensi menyangkut keberadaan suatu substansi (barang, hak-hak, tagihan dll) diakui benar-benar ada dan menjadi hak ataupun kewajiban seseorang (sekelompok orang). Dengan pengertian tersebut, sulit mencari padanan kata yang cocok dengan istilah *existence*, oleh karena itu istilah tersebut diterjemahkan dengan kata **eksistensi**.

-
-
- * *accur* berarti menunjukkan adanya suatu kejadian, dengan demikian *occurrence* berarti suatu kejadian atau peristiwa yang mendasari terjadinya suatu *assersi*. Peristiwa ataupun kejadian mengandung dimensi historis yang menunjukkan adanya suatu fakta yang tak terhindarkan. Dengan latar belakang ide tersebut, sulit mencari padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia, oleh karenanya istilah teknis tersebut diadopsi dalam bahasa Indonesia dengan kata **okurensi**.

Kedua istilah eksistensi atau *okurensi* menunjukkan adanya kesamaan dimensi historis adanya fakta yang jelas dan tidak dapat dihindarkan terhadap *assersi* manajemen. Hal ini menunjukkan bahwasannya transaksi keuangan dibentuk oleh salah satu atau keduanya. *Assersi* manajemen memberikan tekanan bahwasannya suatu transaksi dibentuk dalam suatu peristiwa kesepakatan dengan pihak lain dan peristiwa itu sendiri menunjukkan terbentuknya perubahan posisi kekayaan yang diakibatkan oleh transaksi tersebut. *Assersi* tentang eksistensi atau peristiwa menyatakan bahwa asset maupun kewajiban yang dinyatakan dalam laporan keuangan memang benar-benar ada pada saat tanggal neraca, dan bahwasannya semua transaksi yang termasuk dalam periode laporan telah dicatat dan membentuk asset maupun kewajiban tersebut.

Sudut pandang auditor terhadap *assersi* eksistensi atau *okurensi* apakah informasi yang disajikan didukung oleh fakta historis tersebut. Dengan demikian segala sesuatu yang berkaitan dengan *assersi* manajemen seharusnya dapat ditelusuri oleh fakta yang nyata ada dan dapat ditemukan dalam alat-alat pembuktian yang dimiliki klien. Auditor menyadari, tidak semua fakta sebagai dasar *assersi* dapat dibuktikan secara fisik keberadaannya. Terdapat beberapa fakta yang menunjukkan adanya peristiwa atau kejadian yang secara nyata dapat digunakan sebagai dasar pembuktian *assersi* manajemen. Sebagai contoh, terbentuknya piutang dagang tidak dapat dibuktikan secara materiil keberadaannya, namun semuanya itu dapat dibuktikan adanya suatu kejadian atau peristiwa yang nyata ada dan terdokumentasikan terhadap adanya perikatan antara klien dengan debitur.

b. Kesempurnaan (*completeness*).

Padanan kata *complete* dalam bahasa Indonesia adalah lengkap, sempurna, dan purna. Mana yang akan dipilih sebagai padanan istilah teknis dari bahasa asing harus dilihat dari konteks pengertian kata-kata tersebut. Dengan mengacu pada induk kata tersebut dan konteks permasalahannya (lihat penjelasan daftar istilah teknis dalam lampiran) penulis menggunakan istilah kesempurnaan. Pertimbangan kata *completeness* diterjemahkan dengan istilah kesempurnaan mengingat kata ini memberikan pengertian terhadap situasi dan kondisi elemen laporan keuangan telah disajikan dalam keadaan seutuhnya tanpa cela. Istilah ini mengandung pengertian bahwa segala elemen pendukung suatu pos (pos-pos) laporan keuangan benar-benar telah diperhitungkan dalam setiap *assersi* manajemen. Pernyataan eksplisit tersebut mengandung dimensi situasi yang telah terjadi di masa yang lalu dan diungkapkan dengan penuh kesempurnaan.

Assersi mengenai keterlengkapan menyatakan bahwa pernyataan eksplisit klien terhadap laporan keuangan benar-benar telah lengkap dan tidak ada unsur-unsur yang sengaja

dimanipulasikan. Assersi keterlengkapan ini menjadi perhatian auditor mengingat banyaknya kasus penyaji laporan keuangan memberi pernyataan lebih atau sebaliknya, Auditor harus memperoleh keyakinan terhadap seberapa jauh keterlengkapan penyajian laporan keuangan sehingga para pembaca laporan keuangan tidak akan salah interpretasi terhadap assersi manajemen.

c. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

Right diterjemahkan dengan kata hak, sedangkan *obligation* diterjemahkan dengan kata kewajiban. Pilihan terhadap kedua istilah ini benar-benar telah berterima umum. Oleh karena itu tidak perlu dijelaskan alasan kenapa menggunakan pilihan kata tersebut. Ide dasar dalam assersi ini, bahwasannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dinyatakan secara eksplisit dalam laporan keuangan pada tanggal neraca memang benar-benar ada. Bagaimanapun juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terjadi pada tanggal neraca, secara hukum dapat dibuktikan eksistensinya dengan adanya bukti-bukti yang mendukung.

d. Penilaian atau alokasi.

Penilaian merupakan terjemahan dari kata *valuation*, sedangkan alokasi merupakan padan kata dari istilah *allocation*. Kedua istilah tersebut sudah digunakan dalam jargon akuntansi, dan oleh karenanya sudah berterima di masyarakat akuntansi di Indonesia. Lingkup pengertian ini, menunjukkan bahwa pernyataan eksplisit mengenai elemen pendukung laporan keuangan (asset, kewajiban, pendapatan, biaya) telah disajikan dalam jumlah yang layak. Penggunaan istilah jumlah yang layak mengingat penyajian dalam elemen neraca dan statemen penghasilan memerlukan penilaian ataupun alokasi. Terhadap elemen aktiva tetap perlu ada alokasi terhadap kos yang telah terjadi di masa yang lalu, sedangkan untuk pos-pos aktiva lancar (non kas) membutuhkan adanya penilaian. Penjelasan ini menunjukkan adanya pos-pos yang harus dilakukan penilaian dan juga adanya pos-pos yang memerlukan alokasi. Oleh karenanya auditor dapat memilih dalam hal apa dia harus menggunakan teknik alokasi dan dalam hal apa pula harus diterapkan penilaiannya.

Konsekuensi program audit yang harus dilakukan adalah (1) auditor perlu memeriksa kesesuaian penyajian suatu pos dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia, dan (2) auditor harus melakukan pengujian apakah perhitungan yang dilakukan klien menghasilkan jumlah-jumlah yang bebas dari kesalahan. Kesesuaian dengan standar memberikan keyakinan bahwasannya kos telah diperhitungkan dengan layak, ada proses matching, dan prinsip-prinsip akuntansi diterapkan dengan konsisten. Perlunya pengujian terhadap perhitungan menunjukkan bahwasannya pekerjaan klerikal telah dilakukan dengan cermat. Dengan memperhatikan hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa assersi penilaian dan alokasi mempertimbangkan tiga aspek: penilaian bruto, penilaian bersih, dan kecermatan perhitungannya.

e. Penyajian dan pengungkapan.

Penyajian merupakan padan kata istilah *presentation*, sedangkan pengungkapan merupakan padan kata *disclosure*. Kedua istilah tersebut sudah digunakan dalam jargon

akuntansi, dan oleh karenanya sudah diterima pada masyarakat akuntansi di Indonesia. Makna dari kedua istilah tersebut menyatakan bahwa pernyataan eksplisit dalam laporan keuangan telah diklasifikasi dengan layak, telah dijelaskan dengan lengkap, dan kesemuanya itu telah diungkapkan.

Penyajian menunjukkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pernyataan dalam laporan keuangan baik secara keseluruhan maupun rincian dari asersinya tersebut. Segala pernyataan manajemen dalam laporan keuangan didasarkan pada standar pelaporan yang berlaku dan dinyatakan dalam jumlah yang sebenarnya. Dalam hal penyajian aktiva tetap misalnya, segala sesuatu yang dinyatakan dalam aktiva tetap telah didasarkan pada standar akuntansi keuangan di Indonesia dan nyata disajikan berdasarkan fakta historis yang tidak terbantahkan (*existence*), kesemua unsur pembentuk aktiva tetap telah dinyatakan dengan lengkap (*completeness*), dan semua aktiva tetap tersebut benar-benar hak klien (*rights*), serta kesemuanya itu telah dinilai dengan metode yang tepat (*valuation*). Penyajian yang memadai tidak akan terwujud apabila keempat kategori asersi laporan keuangan lainnya tidak dapat dilengkapi.

Pengungkapan mengandung dimensi yang berbeda dengan penyajian, karena asersi ini mengandung dimensi substansi dari penyajiannya itu sendiri. Seringkali ditemukan kenyataan, bahwasannya penyajian yang lengkap dan sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku tidak dapat ditafsirkan oleh pembaca laporan keuangan. Ini berarti penyaji laporan keuangan harus memberi makna terhadap asersi yang telah disampaikan dengan informasi tambahan sehingga pernyataan teknis dalam laporan keuangan menjadi dimengerti dan dapat ditafsirkan. Kesediaan manajemen (dan auditor) untuk memberikan pengungkapan yang memadai terhadap laporan keuangan klien membutuhkan kejujuran sikap dan itikad baik untuk tidak berbohong kepada pembaca laporan keuangan. Kejujuran sikap penyaji untuk mengungkapkan fakta-fakta yang memberikan tambahan informasi menjadikan setiap asersi manajemen mempunyai substansi bermakna.

Dari sudut pandang auditor, baik penyajian maupun pengungkapan merupakan dua pengertian yang tidak dapat dipisahkan dalam asersi laporan keuangan. Ini berarti, bagaimanapun penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku, tanpa disertai pengungkapan yang memadai tidak akan dapat diterima oleh auditor. Dua kata tersebut tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.

2. Bukti Pengauditan

Bukti audit, adalah data akuntansi atau informasi pendukung lainnya yang berguna bagi auditor dalam melaksanakan pekerjaan audit. Bukti audit tidak sama dengan bukti transaksi, meskipun bukti-bukti transaksi itu sendiri juga dapat berperan sebagai bukti audit. Hal ini menunjukkan bahwa bukti audit ditinjau dari segi kepentingan auditor, sedangkan bukti transaksi tinjauannya dari kepentingan proses penyusunan laporan keuangan.

Mengingat bukti audit berasal dari dua sumber yaitu data akuntansi dan sumber pendukung maka auditor harus memperhatikan perbedaan di antara kedua sumber tersebut. Sumber data akuntansi antara lain:

-
-
- Buku jurnal,
 - Buku besar dan buku pembantu,
 - Pedoman akuntansi lain yang berhubungan, dan
 - Catatan informal dan memorandum.

Sedangkan sumber informasi yang menguatkan (*corroborating*) adalah:

- Dokumen sumber,
- Konfirmasi dan pernyataan tertulis,
- Informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan inspeksi, dan
- Informasi yang diperoleh dan dikembangkan oleh auditor sendiri.

Sesuai dengan standar pelaksanaan audit yang ketiga dinyatakan, bahwa: “Dalam melakukan pekerjaan audit, auditor harus memperoleh bukti dalam jumlah yang cukup dan kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, wawancara, dan konfirmasi sebagai dasar yang kuat terhadap pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa”.

Dari standar tersebut dapat disimak betapa pentingnya aspek kualitas bukti audit yang mengisaratkan agar memenuhi dua kriteria berikut: dari segi jumlahnya bukti telah dianggap cukup, dan dari segi kualitas mempunyai bobot mutu yang memadai. Bukti dalam jumlah yang cukup, berarti menyangkut besaran kuantitas bukti yang dikumpulkan berdasarkan pertimbangan profesional. Faktor yang dipertimbangkan meliputi: resiko dan materialitas bukti, faktor-faktor ekonomis, ukuran dan karakterisasi populasi.

Bukti yang kompeten, berarti menyangkut kualitas bukti yang dikumpulkan. Kompetensi suatu bukti ditentukan oleh empat aspek, yaitu: relevansi, sumber, waktu berketepatan, dan obyektifitas bukti. Auditor harus menggali bukti-bukti dan memperhatikan kualitas bukti yang dikumpulkannya. Kualitas bukti audit sangat menentukan derajat kepercayaan auditor terhadap pembuktian asersi yang disampaikan oleh manajemen.

Tingkatan kualitas bukti ditinjau dari aspek obyektivitas dan sumber bukti adalah sebagai berikut:

1. Bukti dari luar yang dikirim langsung kepada auditor
2. Bukti dari luar yang dipegang dan disimpan oleh klien
3. Bukti yang terbentuk dikalangan klien sendiri, tetapi dipegang oleh pihak luar
4. Bukti yang terbentuk dikalangan klien sendiri, dan beredar dikalangan klien sendiri

Disamping kualitas bukti yang dikumpulkan, auditor dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan aspek pemrosesan suatu bukti. Aspek pemrosesan bukti audit antara lain:

1. Bukti dihasilkan melalui suatu sistem pengendalian intern
2. Bukti mempunyai relevansi dengan obyek informasi.
3. Bukti diperoleh melalui sumber yang independen.
4. Dari aspek kejadiannya, bukti dibuat dengan ketepatan waktu.

Dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti audit, auditor harus menggunakan teknik ataupun cara-cara tertentu sehingga auditor memperoleh keyakinan terhadap

kelayakan suatu bukti audit. Beberapa teknik audit dalam rangka pengumpulan bukti-bukti audit, antara lain:

1. Pengujian secara terinci terhadap transaksi-transaksi,
 - * selama tahun berjalan
 - * menjelang atau pada tanggal neraca
2. Pengujian secara terinci terhadap saldo rekening,
 - * pada tanggal neraca
 - * sekitar tanggal neraca
3. Penelaahan secara analitikal,
 - * perencanaan audit
 - * pelaksanaan pekerjaan lapangan guna memperoleh informasi pendukung
 - * penyelesaian audit review hasil audit secara keseluruhan

3. Kertas Kerja Audit dan Pekerjaan Lapangan

Sebagian besar aktivitas pengauditan berupa pengumpulan bukti-bukti audit yang dilakukan oleh para asisten ataupun staf auditor. Bukti-bukti audit tersebut dikumpulkan dalam bentuk kertas kerja audit (*working papers*). Dalam menyusun kertas kerja audit hendaknya diperhatikan, bahwa setiap program audit yang tercantum dalam audit program harus dilaksanakan oleh para asisten dan oleh karenanya akan diwujudkan dalam setiap kertas kerja audit. Dalam rangka proses audit di lapangan, para asisten akan membuat berbagai macam/bentuk kertas kerja audit.

Kertas kerja audit mempunyai peranan yang sangat penting untuk menampung segala aspek informasi/bukti-bukti audit baik yang diperoleh dari klien sendiri maupun yang berasal dari pihak eksternal. Kertas kerja merupakan bukti otentik bagi akuntan dalam menjalankan profesinya, yang oleh karenanya mempunyai peranan (1) sebagai alat untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan para asisten, (2) sebagai alat untuk mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan dan pada akhirnya akan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh klien, dan (3) sebagai alat untuk mempertahankan diri apabila ada klim (tuntutan) dari pihak lain yang tidak puas terhadap kesimpulan yang dibuat oleh auditor.

Semua kertas kerja audit harus dibuat selama proses pelaksanaan pekerjaan lapangan. Penegasan ini penting agar para asisten dalam menjalankan pekerjaannya dapat merancang aktivitasnya dengan cermat. Dengan perencanaan audit yang baik, diharapkan para asisten dapat mengumpulkan bukti-bukti yang relevan.

D. OPINI AUDITOR DAN TANGGUNGJAWAB PROFESIONAL

Bentuk baku laporan audit bentuk pendek (*short form report*) menurut Pernyataan Standar Audit (PSA nomor 29) adalah sebagai berikut.

Kami telah mengaudit perusahaan xyz tanggal 31 Desember 19x3 serta laporan rugi laba, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal

tersebut. Laporan keuangan adalah tanggungjawab manajemen perusahaan. Tanggungjawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan xyz tanggal 31 Desember 19x3, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Rincian isi laporan audit terdiri dari tiga paragraf, yaitu: (1) paragraf pendahuluan, (2) paragraf ruang lingkup, dan (3) paragraf pendapat. Dalam hal-hal tertentu, apabila akuntan harus menjelaskan adanya pengecualian ataupun alasan lain, auditor harus memberikan informasi dalam bentuk paragraf penjelasan (*explanatory paragraph*). Rincian isi laporan audit menurut buku SPAP adalah sebagai berikut:

1. Paragraf ke 1, memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Obyek audit adalah neraca, laporan rugi laba (statemen penghasilan), retained earning dan statemen arus kas.
 - b. Bahwa pengujian untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, oleh karenanya pendapat akuntan hanya diperuntukkan periode tersebut saja.
 - c. Bahwa auditor bertugas menguji kewajaran laporan keuangan klien sehingga tanggung-jawab terhadap kewajaran laporan tersebut ada pada klien.
2. Paragraf ke 2 memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa audit dilakukan sesuai dengan standar profesional akuntan publik
 - b. Bahwa dalam menjalankan tugasnya audit atas dasar pengujian (test), bukan atas dasar audit seluruh bukti
 - c. Bahwa pengawasan intern sebagai dasar untuk menentukan luasnya pengujian
 - d. Bahwa pengujian dan prosedur yang digunakan sepenuhnya menjadi pertimbangan akuntan atas dasar pengalaman dan keahliannya.
 - e. Bahwa dalam rangka melakukan pengujian tidak terbatas hanya pada catatan akuntansi klien, tetapi juga ditempuh prosedur lain yang dipandang perlu oleh akuntan
3. Alinea ke tiga berisi perumusan pendapat auditor mengenai kewajaran (atau sebaliknya) suatu laporan keuangan. Isi dari pendapat akuntan sepenuhnya tergantung pada hasil pengujian yang telah dilakukan oleh auditor. Pendapat akuntan pada dasarnya

merupakan kesimpulan yang diperoleh dari analisis terhadap temuan-temuan dalam proses audit.

Perkembangan auditing di USA mengalami perkembangan yang cukup berarti. Sampai dengan awal dekade 90-an, format standar laporan audit telah mengalami perubahan berkali-kali. Sebagai pembandingan terhadap SPAP, berikut ini disajikan format *standard audit report* yang terakhir, sbb:

We have audited the accompanying consolidated balance sheets of VV Company and subsidiaries as of June 30, 1990 and 1989, and related consolidated statements of income, cash flows, and common stock holders equity for each of the three years in the period ended June 30, 1990. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.

We conducted our audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit including examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the consolidated financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of VV Company, and subsidiaries as of June 30, 1990, and 1990, and the results of their operation and their cash flows for the periods stated, in conformity with generally accepted accounting principles.

Berdasarkan format standar pelaporan tersebut, rincian isi laporan audit terdiri dari tiga paragraf, yaitu: (1) paragraf pendahuluan, (2) paragraf ruang lingkup, dan (3) paragraf pendapat. Deskripsi yang dinyatakan dalam masing-masing paragraf tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang sangat berarti dibandingkan dengan laporan audit yang ada dalam buku SPAP.

1. Isi paragraf ke satu menunjukkan gagasan berikut:
 1. Deskripsi mengenai jenis jasa yang diberikan (ditunjukkan dengan kata-kata: kami telah mengaudit).
 2. Bahwa yang diaudit adalah financial statements pada tanggal neraca.
 3. Bahwa yang diaudit adalah suatu entitas.
 4. Bahwa manajemen yang bertanggungjawab terhadap statements tersebut.
 5. Bahwa auditor bertanggungjawab pada opini yang dibuatnya.
2. Paragraf ke dua menyatakan bahwa:
 1. Pengauditan berdasarkan GAAS, yang meliputi:

-
-
- a. audit telah direncanakan dan dilaksanakan guna memperoleh jaminan yang masuk akal, bahwa statements tersebut bebas dari kesalahan yang material.
 - b. Bukti-bukti telah diuji dengan basis pengujian yang memadai.
 - c. bahwa manajemen telah menggunakan prinsip akuntansi yang lazim digunakan dan penaksiran yang digunakan mempunyai peran yang sangat berarti.
 - d. melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap penyajian financial statements.
 2. Auditor meyakini bahwa opini yang dinyatakannya mempunyai basis yang masuk akal.
 3. Paragraf ke tiga, merupakan pernyataan sikap tentang opini auditor terhadap financial statements klien, tentang:
 1. Penyajian dengan wajar, dalam segala akibat yang material.
 2. Posisi keuangan perusahaan pada tanggal neraca.
 3. Hasil-hasil operasi dan aliran kas untuk periode tersebut.
 4. Kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Apendix

PERISTILAHAN TEKNIS AKUNTANSI DAN AUDITING BESERTA PERMASALAHANNYA

1. Pengantar

Praktik akuntansi yang berlaku di Indonesia banyak menggunakan istilah yang sudah terlanjur *salah-kaprah*. Hal ini timbul karena praktik akuntansi yang ada sebagian merupakan warisan praktik di jaman penjajahan Belanda yang di Indonesia-kan dengan tidak mempertimbangkan dari sisi akademik. Praktik akuntansi pada saat itu baru mempertimbangkan aspek dagang semata. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, antara lain:

- a. Ilmu akuntansi merupakan pengetahuan yang masih asing bagi budaya bangsa Indonesia, sehingga belum menjadi kebiasaan sehari-hari. Mengingat memang tidak mempunyai budaya tersebut, masyarakat tidak mempunyai apresiasi peristilahan akuntansi yang terkait. Hal ini menyebabkan sulit mencari padanan kata yang sesuai dengan struktur bahasa Indonesia serta khasanah bahasa secara keseluruhan.
- b. Bahasa Indonesia itu sendiri merupakan bahasa yang sedang tumbuh untuk menjadi bahasa persatuan dan juga bahasa ilmu pengetahuan. Mengingat bahasa Indonesia masih relative muda dibandingkan dengan bahasa dunia lainnya, belum banyak kata-kata ataupun rekayasa kata yang dihasilkan.
- c. Praktik akuntansi di Indonesia sudah terlanjur menggunakan istilah teknis (jargon) yang umum digunakan, meskipun tidak didasarkan kerangka berpikir yang konseptual.

Mengingat praktik ini sudah digunakan secara meluas, dan disamping itu tidak ada upaya melakukan koreksi dari tenaga akademisi generasi penerus kesalahan tersebut berlanjut sampai kini. Tentu saja hal ini akan menimbulkan masalah baik dalam aspek pengajarannya maupun dalam praktik sehari-hari.

Kesalahan peristilahan ini, sebetulnya menyulitkan para pengajar dalam mengupayakan untuk meyakinkan penggunaan istilah-istilah teknis akuntansi kepada para mahasiswa. Disamping itu banyak penulis buku yang tidak menggunakan acuan yang sama dalam memilih kata serta tidak adanya aturan yang memaksa untuk menggunakan suatu peristilahan tertentu. Banyak penulis yang cenderung memaksakan kehendaknya atas suatu peristilahan tertentu. Maksudnya makna suatu istilah dalam bahasa Indonesia tidak dapat mencakup pengertian bahasa asing (bahasa Inggris, terutama) dipaksakan sebagai padanan katanya. Mengingat kata asing tersebut sudah mempunyai pengertian yang bulat, hal tersebut direnggut dan dipaksakan sebagai pengertian yang layak diterima dalam peristilahan bahasa Indonesia. Di sisi yang lain, banyak pengajar yang lebih senang menggunakan istilah asli dalam bahasa Inggris, dan ada pula yang cenderung membentuk peristilahan baru dengan membuat kata serapan. Sebagai akibatnya mahasiswa menerima sesuatu pengertian yang bervariasi, tidak jelas, dan meragukan. Mengingat praktik itu sendiri sudah berjalan cukup lama, mungkin para dosennya sendiri juga tidak menyadari bahwa

istilah yang digunakan tersebut sudah terlanjur salah-kaprah. Hal ini membuahakan pertanyaan, adakah pendekatan pengajaran akuntansi perlu segera dibenahi ? Lalu, dari manakah pembenahan tersebut dimulai ?

Artikel berikut ini menjelaskan begitu sulitnya menjelaskan konsep, istilah teknis akuntansi yang sudah terlanjur salah-kaprah tersebut. Ide tulisan ini banyak datang dari pertanyaan mahasiswa yang “konyol”, tapi sangat menggelitik. Seringkali saya harus belajar berhari-hari untuk mencari jawaban pertanyaan mahasiswa tersebut.

Penulis menyajikan makalah ini dengan menyoroti beberapa hal yang dianggap penting. Menurut hemat saya, masih banyak lagi hal-hal yang perlu disingkapkan untuk membentuk peristilahan akuntansi yang dapat diandalkan dan mudah dipahami oleh berbagai pihak. Makalah ini hanyalah pengantar diskusi untuk membuka kemungkinan penelitian lanjutan dalam menelusuri dan mencari dasar-dasar peristilahan yang memadai.

2. Perbedaan Antara *Report* dengan *Statement*

Audit report yang disajikan oleh auditor berdasar praktik yang berlaku di Amerika Serikat secara jelas membedakan pengertian *report* dan *statement*. Perbedaan ini sangat *significant* mengingat kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang jauh berbeda. Meskipun disadari banyak yang mengabaikannya sehingga menganggapnya sebagai suatu hal yang sama dan semata-mata hanya persoalan semantik belaka. Akibat pandangan semacam ini, akan mengakibatkan oenterjemahan dalam bahasa Indonesia menjadi rancu mengingat makna yang terkandung didalamnya tidak dipahami secara mendalam. Sebagai akibatnya banyak ditemukan pernyataan yang seharusnya menggunakan kata *statement* justru menggunakan kata yang bermakna *report* atau sebaliknya.

Statement dalam bahasa Inggris berarti pernyataan (pengungkapan) mengenai sesuatu informasi dengan disertai tanggungjawab (secara hukum) atas segala sesuatu yang dinyatakannya. Dengan demikian pihak yang memberikan pernyataan mempunyai konsekuensi hukum ataupun bentuk sanksi lainnya apabila informasi yang disampaikan ternyata tidak benar ataupun salah. *Statement* bersifat *einmalig*, maksudnya *statement* hanya akan terjadi sekali saja dan tidak untuk diulang-ulang. Walaupun terjadi *statement* yang sama pada kesempatan yang berbeda maka makna kata tersebut harus dianggap berbeda, artinya diantara dua *statement* yang sama seharusnya berbeda mengingat adanya kondisi dan situasi yang berbeda. Penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa hasil akhir dari suatu proses akuntansi adalah *statement*, bukannya *report*. Dimensi suatu *statement* mengandung konsekuensi sebagai berikut:

1. Bahwa informasi yang disajikan dalam *statement* melalui suatu proses tertentu sehingga kebenaran informasi tersebut benar-benar dijaga oleh si pembuat *statement*.
2. Bahwa pembuat *statement* bertanggungjawab secara penuh atas segala informasi yang disajikannya, sehingga segala akibat atas kesalahan keputusan atas informasi yang diberikan juga menjadi tanggungjawab pembuat *statement*.

3. Bahwa *statement* dibuat untuk situasi dan kondisi tertentu saja, yang tentunya aspek perbedaan waktu akan memberikan makna dan interpretasi yang berbeda.
4. Bahwa *statement* dibuat berdasarkan ketaatan pada asas, tujuan, standar, aturan ataupun bentuk ukuran yang dianggap lazim.

Report berarti penyampaian informasi kepada pihak lain mengenai segala sesuatu yang menjadi tanggungjawabnya. *Report* bisa berwujud *statement* ataupun bentuk pengungkapan lainnya yang gradasinya lebih rendah dari *statement*, misalnya ringkasan kejadian selama satu bulan, ringkasan rapat dan lain-lain. Akuntansi sebagai suatu proses pelaporan, membutuhkan wahana yang disebut *statement*. Oleh karena itu sesuai dengan kebutuhan pelaporan *statement* dapat terdiri dari berbagai macam bentuk.

Sebagai istilah teknis akuntansi (jargon) dalam masyarakat akuntansi di Amerika, kedua istilah tersebut telah digunakan dan diterapkan dengan konsisten sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Berbeda dengan di Indonesia yang berusaha menyusun peristilahan yang tepat, ternyata justru rancu. *Report* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata **laporan**, dari kata lapor dengan akhiran an. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), laporan berarti menyampaikan informasi kepada seseorang, dapat juga berarti segala sesuatu yang dilaporkan. Dipihak lain *statement* juga diterjemahkan dengan kata **laporan**, sehingga diantara kedua jenis istilah tersebut (dalam bahasa Inggris) dianggap mempunyai makna yang sama. Sebagai akibatnya kata laporan boleh digunakan pada posisi manapun. Tentunya hal ini sangat membingungkan siapapun yang mau belajar akuntansi, mengingat sebenarnya tidak ada padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia untuk istilah *statement*.

Beberapa alternatif padanan kata *statement* antara lain: pernyataan, maklumat. Apabila kata *statement* akan diterjemahkan dengan kata **pernyataan** dalam bahasa Indonesia juga dipandang tidak tepat, mengingat kata pernyataan tidak mengandung segi-segi yang melingkupi pengertian *statement* secara utuh.

Perbedaan interpretasi tersebut dapat dilihat dari berbagai literatur asing ataupun praktik yang berlaku di Amerika Serikat dan di Indonesia. Berikut ini akan dibahas mengenai beberapa hal yang terkait dengan kata *statement* dan *report* tersebut.

1. Laporan Audit Akuntan

Berikut ini saya sajikan salah satu contoh laporan audit akuntan untuk PT Sari Husada, Yogyakarta:

alinea 1, ruang lingkup audit:

“Kami telah memeriksa Neraca PT SARI HUSADA Yogyakarta per 31 Desember 1987 dan 1986, Perhitungan rugi laba yang bersangkutan, Laba yang tidak dibagi-kkan serta perubahan posisi keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tersebut.”

alinea 2, opini akuntan:

“..... Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sertakan bersama ini telah menyajikan secara wajar posisi keuangan PT SARIHUSADA Yogyakarta per 31 Desember 1987 dan 1986, hasil operasi serta perubahan posisi keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim yang diterap-kan secara konsisten, kecuali mengenai penilaian kembali aktiva berwujud-nya yang dapat kami setuju”.

alinea 3, tambahan:

“Penjelasan tambahan yang disertakan dalam laporan ini disajikan dengan tujuan untuk analisa tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan pokok”.

Dari kutipan-kutipan terhadap bagian penting laporan akuntan tersebut di atas terlihat bahwa:

- a. Dalam alinea pendapat menyebutkan kata laporan keuangan. tentunya yang dimaksudkan sebagai laporan keuangan adalah objek audit sebagai-mana tersebut dalam alinea pertama.
- b. Alinea tambahan menyebutkan adanya sekelompok laporan yang bukan merupakan laporan keuangan pokok. Pernyataan ini berarti sebenarnya ada laporan keuangan pokok, tetapi ternyata tidak ada penjelasan mana yang termasuk laporan keuangan pokok tersebut serta mana yang bukan merupakan laporan keuangan pokok. Sebab dalam luasnya audit tidak mengungkap adanya laporan keuangan pokok, ini berarti adanya beberapa lampiran laporan pemeriksaan akuntan tersebut harus dianggap sebagai laporan keuangan pokok. Tentunya pernyataan ini menjadikan kabur apa yang dimaksudkan dalam pengertian laporan keuangan tersebut.
- c. Konsistensi dalam laporan audit tersebut tidak ada. Akuntan pemeriksa ternyata tidak menyadari bahwa laporannya sendiri justru tidak ada konsistensi interpretasi terhadap pengertian *statement* dan *report*. Dari penyusunan kalimat semacam itu pembaca laporan audit akuntan tidak akan dapat menyimpulkan apakah obyek audit tersebut laporan keuangan pokok ataukah *statement*. Alinea tersebut tidak menyinggung kedua pengertian *statement* ataupun *report*. Artinya interpretasi apakah hal tersebut laporan ataupun *statement* ataupun pengertian lainnya, diserahkan sepenuhnya kepada pembaca laporan akuntan tersebut.

2. Pembakuan kata dalam laporan akuntan menurut buku NPA

Kerancuan dalam laporan audit akuntan yang saya gambarkan tersebut bukan berarti saya simpulkan sepenuhnya sebagai kesalahan akuntan pemeriksa (*auditor in charge*). Para akuntan di sisi lain harus berpedoman pada pembakuan kata yang disajikan dalam buku NPA. Buku Standar audit akuntan memberikan contoh “*wording*” yang juga kurang baik. Standar pemerisaan akuntan memberikan contoh sbb:

“Kami telah memeriksa neraca perusahaan X per 31 Desember 19x2 dan 19x1 serta perhitungan rugi laba, laba yang ditahan dan laporan perubahan posisi keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal- tanggal tersebut” (halaman 78)

Bandingkan laporan akuntan pada perusahaan yang berdasarkan General Accepted Auditing Standard, sbb:

“We have examined the consolidated balance sheets of the Coca-cola Company and subsidiaries as of Desember 31, 1981 and the related consolidated *statements of income, retained earnings and changes in financial position* for each of the three years in period ended December 31, 1981”. (Kell and ziegler halaman 17)

Berdasarkan GAAS ditunjukkan bahwa *income, retained earning* dan *changes in financial position* adalah *statement*. Kalau akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seharusnya **pernyataan income, pernyataan laba yang ditahan dan pernyataan perubahan posisi keuangan**. Hal ini mengingat *statement* tidak dapat diterjemahkan sebagai laporan.

3. Penerjemahan *statement of income*

Penerjemahan *statement of income* menjadi **Perhitungan Rugi Laba** ataupun **Laporan Rugi Laba** tentunya akan membingungkan pembaca awam. Bagi pemula penterjemahan istilah akuntansi tersebut dianggap aneh. Kenapa tidak disebutkan saja **LAPORAN LABA** bila perusahaan itu memperoleh laba, atau sebaliknya kenapa tidak disebutkan saja **LAPORAN RUGI**, bila suatu perusahaan itu rugi. Masalahnya:

1. *Statement* diterjemahkan sebagai *perhitungan* tentunya menjadi tidak tepat, mengingat tidak ada kaidah bahasa ataupun pedoman yang menunjukkan hubungan kedua kata tersebut. Hal ini merupakan pendapat dari penyaji laporan tersebut tanpa memperhatikan pedoman yang berlaku dan menambah kesalahan-kaprahan tersebut.
2. Perhitungan rugi-laba, dalam kenyataannya perusahaan memperoleh laba kenapa harus memperhitungkan adanya rugi, atau sebaliknya bila perusahaan rugi, kenapa harus memperhitungkan laba. Perhitungan rugi laba sebagai suatu istilah teknis tentu akan mengaburkan pandangan orang awam terhadap arti istilah teknis tersebut. Saya lebih cenderung menterjemahkan **statemen penghasilan** sebagai pengganti istilah *statement of income* mengingat istilah teknis ini lebih pas.

Masalah berikutnya dalam penerjemahan tersebut di atas adalah terjemahan istilah *statement* menjadi laporan. Penerjemahan istilah ini menjadi kurang tepat apabila kita melihat padanan kata laporan dalam bahasa Indonesia adalah *report* dalam bahas Inggris. Dalam bahasa Inggris *report* dan *statement* mempunyai pengertian yang berbeda pula. Pengertian *report* adalah penyampaian informasi kepada pihak tertentu, sedangkan pengertian *statement* adalah pernyataan mengenai suatu keadaan (periksa pembahasan terdahulu).

3. Rekomendasi

Financial reporting atau **laporan keuangan** terdiri dari beberapa *statement (statemen)* yang antara lain: *statement of Financial Position*, *statement of Income*, dan *statement of Changes on Retained Earnings*, kalau kita akan konsekuen dengan pengertian dalam literatur berbahasa Inggris (sebagai satu sumbernya) dalam penerjemahannya, maka dalam bahasa Indonesia juga harus dinyatakan bahwa laporan keuangan terdiri dari:

Statemen Posisi Keuangan sebagai terjemahan *statement of Financial Position*,
Statemen Penghasilan sebagai terjemahan *Statement of Income*, dan
Statemen Perubahan Laba yang Ditahan sebagai terjemahan *Statement of Changes on Retained Earnings*.

SOAL BAB 1

Soal Kelompok A

Dalam kelompok soal berikut ini, saudara diminta memberikan pendapat salah atau benar atas pernyataan berikut ini. Apabila saudara berpendapat salah, berilah tanda S dan apabila betul berilah tanda huruf B dimuka setiap pernyataan tersebut.

- 1. Dipandang dari sudut kepentingan akuntan publik, Auditing merupakan pengujian aktivitas ekonomis yang dilakukan secara obyektif.
- 2. Dalam hal auditor, oleh karena sesuatu hal tidak disetujui melakukan konfirmasi piutang, maka akuntan dapat menempuh prosedur lain yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan.
- 3. Pengertian bukti yang dianggap cukup kompeten, adalah bukti yang ditinjau dari segi jumlahnya dipandang cukup memadai dan apabila ditinjau dari segi kualitas pembuktian dipandang cukup.
- 4. Pendapatan akuntan yang berbunyi sbb:
Pada hemat kami, terkecuali terhadap piutang yang masih dalam persengketaan tersebut dalam lampiran laporan keuangan PT XYZ menyajikan secara wajardst.
adalah jenis pendapat *Unqualified opinion*
- 5. Seorang sarjana akuntansi yang telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam UU nomor 34 tahun 1954 dan tidak bersedia menjadi anggota IAI, berhak memeriksa laporan keuangan klien serta berhak memberikan pendapat akuntan.
- 6. Seorang akuntan pendidik yang telah memenuhi syarat sebagai akuntan dan kebetulan juga sebagai akuntan publik tidak berhak menjalankan profesi sebagai akuntan publik.
- 7. Akuntan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap laporan keuangan klien yang diperiksanya, sungguhpun dia telah memberikan pendapat atas laporan keuangan tersebut.
- 8. *Independence in appearance* adalah sikap akuntan pemeriksa yang dalam kenyataannya memang telah menjalankan tugasnya dengan jujur dan tidak memihak, serta telah patuh menjalankan standar profesional akuntan publik.
- 9. Pasal 1 Kode etik akuntan Indonesia, mengatur tentang siapa sajakah yang harus tunduk atau mengikut kode etik tersebut.
- 10. Luas audit yang tercakup dalam Laporan Audit mencakup pengujian atas segala bukti-bukti yang ada baik bukti fisik maupun bukti non fisik.

Soal Kelompok B

Soal-soal berikut adalah pilihan ganda. Saudara diminta memilih satu alternatif jawaban di antara keempat alternatif jawaban yang tersedia. Apabila diantara ke empat alternatif tersebut tidak ada yang saudara pilih (saudara anggap salah semua atau saudara anggap betul semua) pilih huruf E sebagai pilihan jawaban saudara.

-
-
1. Berikut ini tunjukkan manakah elemen yang sangat dipertimbangkan oleh auditor dalam memberikan pendapat akuntan.
 - A. Auditor judgment.
 - B. Materiality.
 - C. Relative Risk.
 - D. Reasonable assurance.
 2. Tugas operasional, penyimpanan fisik , dan pencatatannya akan dinilai efektif oleh auditor apabila:
 - A. Kode rekening dan penjelasan tersedia dengan rapi.
 - B. Setiap bulan petugas yang bertanggungjawab untuk masing-masing fungsi bekerja secara mandiri (independent).
 - C. Penggolongan rekening dilakukan dengan pendekatan laporan keuangan.
 - D. Penggolongan rekening dilakukan dengan pendekatan arus nilai.
 3. Tujuan pembuatan kertas kerja antara lain sebagai berikut, kecuali:
 - A. Mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap audit.
 - B. Sebagai pendukung penting terhadap akuntan atas laporan keuangan yang dipersiksanya.
 - C. Sebagai pedoman dalam audit berikutnya.
 - D. Sebagai dasar penyusunan laporan audit akuntan.
 4. Kertas kerja terdiri dari beberapa macam berkas. Satu diantara daftar berikut ini tidak termasuk dalam tipe kertas kerja;
 - A. Working trial balance.
 - B. Lead schedule.
 - C. Supporting schedule.
 - D. Journal adjustment.
 5. Dari pernyataan tentang working trial balance berikut, pernyataan yang benar adalah:
 - A. Working trial balance merupakan daftar saldo rekening.
 - B. Working trial balance adalah daftar permulaan yang harus dibuat oleh akuntan untuk memindahkan semua saldo rekening dalam neraca saldo.
 - C. Working trial balance adalah daftar rekening perusahaan yang disiapkan oleh akuntan intern.
 - D. Working trial balance adalah neraca saldo yang dibuat oleh auditor setelah pekerjaan lapangan diselesaikan.
 6. Salah satu kertas kerja berikut ini harus masuk dalam arsip permanen;
 - A. Fotocopy notulen rapat direksi dan pemegang saham.
 - B. Berita acara penghitungan kas.
 - C. Daftar pendukung piutang dagang.
 - D. Surat konfirmasi dari pihak ketiga.
 7. Proses pengauditan dilakukan melalui 6 tahapan, yang tidak termasuk dalam proses audit adalah:
 - A. Mempelajari dan menilai sistem pengawasan intern.

-
-
- B. Menyelesaikan pekerjaan audit dengan meringkas hasil-hasil semua pengujian yang telah dilaksanakan dan menarik kesimpulan-kesimpulan.
- C. Menyelesaikan posting kedalam buku besar dan meringkasnya kedalam working trial balance.
- D. Menerbitkan laporan audit akuntan.
8. Dalam melakukan audit akuntan melakukan beberapa macam pengujian. Yang tidak termasuk dalam jenis pengujian oleh auditor adalah:
- A. Pengujian analitik. B. Pengujian kepatuhan.
- C. Pengujian hipotesis. D. Pengujian substantif.
9. Manfaat pemberian index dalam kertas kerja audit antara lain, kecuali:
- A. Memudahkan penelusuran informasi dari kertas kerja yang satu dengan kertas kerja yang lain.
- B. Memudahkan menemukan jurnal penjualan.
- C. Memudahkan pengecekan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data yang berbeda.
- D. Memudahkan pengecekan informasi antara berbagai kertas kerja dengan laporan audit akuntan.
10. Berikut ini pernyataan mengenai kerahasiaan jabatan. Pernyataan yang benar adalah:
- A. Kerahasiaan jabatan terlekat pada diri setiap akuntan publik dalam menjalankan setiap kegiatan profesionalnya.
- B. Akuntan dilarang memberikan informasi apapun kepada pejabat penting klien, termasuk kepala bagian akuntansinya.
- C. Untuk menjaga kerahasiaan jabatan akuntan tidak boleh mengemukakan pendapatnya mengenai perkembangan ilmu auditing.
- D. Meskipun dengan ketentuan undang-undang, akuntan tidak boleh menyampaikan informasi yang diketahuinya dimuka forum pengadilan.
11. Berikut ini pernyataan mengenai otorisasi. Pernyataan yang benar adalah:
- A. Kesepakatan antara dua pihak mengenai pembagian tugas.
- B. Perintah melakukan tugas yang diwujudkan dalam dokumen.
- C. Tandatangan seorang pejabat perusahaan dalam dokumen yang disetujuinya.
- D. Wewenang yang dimiliki seseorang pejabat perusahaan untuk memutuskan sesuatu masalah sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
12. Engagement letter adalah,
- A. Surat pernyataan dari klien tentang kebenaran laporan keuangan yang akan diperiksa akuntan publik.
- B. Surat pernyataan dari pihak ketiga/saksi ahli mengenai suatu hal yang diminta oleh akuntan publik.
- C. Surat pengikatan diri antara akuntan publik dengan klien dalam kesepakatan audit umum laporan keuangan klien.

-
-
- D. Surat pernyataan bahwa akuntan benar-benar independent dalam melakukan tugasnya.

Soal Kelompok C

Berikut ini disajikan dua pasang pernyataan yang mungkin saling berkaitan dalam satu konteks kalimat majemuk. Saudara diminta menganalisis tiap pernyataan dan hubungan pokok masalah antara pernyataan a dengan pernyataan b. Ada beberapa kemungkinan dari pasangan kalimat tersebut. Kemungkinan pilihan jawaban saudara adalah sbb:

Jawablah A, bila pernyataan a dan b benar dan keduanya saling berkaitan.

Jawablah B, bila pernyataan a dan b benar dan keduanya tidak saling berkaitan.

Jawablah C, bila pernyataan a benar dan b salah.

Jawablah D, bila pernyataan a salah dan b benar

Jawablah E, bila pernyataan a dan b salah.

1.
 - a. Auditor boleh menggunakan metode statistik dalam melaksanakan audit umum terhadap laporan keuangan klien.
 - b. Pengujian secara statistik terhadap informasi keuangan dirancang untuk menemukan kesalahan-kesalahan dalam proses pencatatan.
2.
 - a. *Audit planning* adalah langkah-langkah yang disusun oleh auditor guna melaksanakan tugas audit yang ditugaskan kepadanya.
 - b. Dalam penyusunan perencanaan audit, auditor harus menggunakan kemahiran jabatannya.
3.
 - a. Materialitas adalah suatu justifikasi profesional mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan asersi klien dalam laporan keuangan.
 - b. Justifikasi profesional digunakan oleh akuntan pemeriksa, karena dia telah mempunyai keahlian dan pengalaman yang dipandang cukup dalam bidang profesi akuntan pemeriksa.
4.
 - a. Kertas kerja merupakan mata rantai yang menghubungkan klien dengan laporan audit.
 - b. Laporan audit adalah hasil proses verifikasi obyektif terhadap laporan keuangan klien beserta data pendukungnya yang disampaikan kepada klien dengan disertai pendapatnya.
5.
 - a. Kertas kerja adalah hasil-hasil pekerjaan auditor di lapangan yang terdiri dari kumpulan bukti tertulis, kumpulan dokumen penting, hasil konfirmasi dan lain-lainnya baik bersifat permanen maupun bersifat current.
 - b. Kertas kerja tersebut dikerjakan dan dimiliki oleh akuntan pemeriksa.

-
-
6. a. Kertas kerja dibuat untuk melakukan koordinasi dan mengorganisasi semua tahapan pekerjaan audit.
b. Dalam rangka koordinasi dan pengorganisasian semua tahap audit, kertas kerja dibuat untuk menguatkan kesimpulan-kesimpulan dan kompetensi auditor.
 7. a. Kecakapan teknis dan keahlian profesional seorang auditor akan tercermin dari kertas kerja yang dibuatnya.
b. Keahlian profesional tersebut tercermin dari kelengkapan, ketelitian, kejelasan, kerapian dan apakah kertas kerja tersebut disajikan dengan ringkas.
 8. a. Konfirmasi merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan akuntan memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang bebas.
b. Memperoleh informasi dari pihak lain dapat dilakukan dengan wawancara.
 9. a. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan klien harus dikumpulkan oleh auditor sebagai kertas kerja dan diklasifikasi sebagai current file.
b. Salah satu bentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan adalah perjanjian persekutuan.
 10. a. Pengujian analitik dilakukan dengan mengumpulkan bukti berupa perbandingan dan ratio untuk menguji kewajaran saldo-saldo rekening.
b. Perbandingan dan ratio dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perbandingan berdasarkan data internal dan perbandingan dengan rata-rata industri.
 11. a. Pengujian kepatuhan merupakan prosedur audit yang dirancang untuk memverifikasi apakah struktur pengendalian intern klien telah dilaksanakan dengan layak atau tidak.
b. Pengujian kepatuhan dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap kebenaran penyajian saldo-saldo rekening perusahaan.
 12. a. Verifikasi cutoff merupakan salah satu bentuk dari audit substantif.
b. Verifikasi cutoff harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim.
 13. a. Auditor bertanggungjawab terhadap kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh karyawan klien.
b. Dalam hal auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup terhadap kecurangan pegawai klien dalam suatu pengauditan, maka auditor dianggap melanggar kode etik akuntan Indonesia.
 14. a. Akuntan senantiasa menggunakan kemahiran jabatannya dalam menjalankan segala macam tugas yang dikerjakannya.
b. Kemahiran jabatan adalah setiap langkah ataupun pekerjaan akuntan dilaksanakan dengan hati-hati, cermat, dan menggunakan prosedur pengauditan yang benar.

-
-
15. a. Konfirmasi adalah suatu proses melakukan upaya memperoleh tanggapan dari pihak ketiga yang sepenuhnya merdeka dari tanggungjawab klien dengan jawaban tertulis.
- b. Mengingat begitu besarnya peranan struktur pengendalian intern dalam suatu perusahaan dalam menjamin data keuangan suatu perusahaan dapat dipercayai, sehingga sebagai basis dalam pengujian suatu laporan keuangan.

Bab 2

Audit Terhadap Siklus Pendapatan

PEMBAHASAN BAB INI MELIPUTI:

1. Latar belakang permasalahan audit terhadap siklus pendapatan
2. Pemahaman terhadap struktur pengendalian intern dalam siklus pendapatan
3. Audit terhadap transaksi dalam sistem penjualan kredit
4. Audit terhadap transaksi dalam sistem penerimaan kas
5. Audit terhadap transaksi penyesuai penjualan
6. Audit substansi terhadap saldo piutang

Audit terhadap siklus pendapatan mencakup dua pendekatan yaitu pengujian kepatuhan dan pengujian subtansi. Pengujian kepatuhan bertujuan untuk memahami struktur pengendalian intern terhadap siklus penjualan, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pengujian subtansi. Pengujian subtansi dimaksudkan untuk melakukan verifikasi terhadap kelayakan jumlah rupiah serta kesesuaian penyajiannya dengan prinsip akuntansi yang lazim diterapkan di Indonesia. Kedua pendekatan ini sangat berbeda dalam implementasinya, sehingga program audit untuk kedua pendekatan tersebut juga sangat berbeda.

Sebelum membahas lebih lanjut siklus pendapatan ini, terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian pendapatan dan penghasilan. Pendapatan merupakan terjemahan dari istilah *revenue* yang merupakan pendekatan gross, sedangkan penghasilan merupakan penterjemahan istilah *income* yang merupakan pendekatan netto. Dengan pengertian peristilahan tersebut istilah *revenue cycle* diterjemahkan dengan istilah siklus pendapatan. Istilah penerimaan digunakan untuk menterjemahkan istilah *receipt* dalam *cash receipt*, sehingga *cash receipt* diterjemahkan dengan istilah penerimaan kas.

Dalam bab ini, sistem penjualan tunai tidak dibahas mengingat keterbatasan ruang lingkup pembahasan. Dengan demikian penulisan hanya membahas salah satu aspek yaitu sistem penjualan kredit saja. Sistem penjualan kredit menjadi materi bahasan dengan pertimbangan sebagian besar perusahaan menggunakan mekanisme penjualan kredit. Pembaca buku ini dipersilahkan untuk lebih teliti dalam mengadabtasi audit terhadap sistem penjualan kredit dalam rangka audit terhadap sistem penjualan tunai yang ada pada departement store, pasar swalayan dan lain-lain.

Transaksi penjualan dalam suatu perusahaan mengakibatkan transfer kekayaan (dalam hal ini barang-barang atau jasa-jasa) kepada pihak lain dan mengakibatkan terbentuknya aktiva baru berupa kas atau piutang dagang. Meskipun demikian harus disadari bahwa proses penjualan tidak selalu akan mengakibatkan terbentuknya aktiva baru tersebut, mengingat dalam penjualan sering terjadi kegagalan atau pembatalan dari pihak pelanggan. Oleh karena itu dalam siklus pendapatan ditemukan adanya transaksi penyesuai penjualan (*sales adjustment*). Sebagai akibatnya siklus pendapatan juga terbentuk dari beberapa sistem yang antara lain:

- a. Sistem Penjualan (kredit dan tunai)
- b. Sistem Penerimaan Kas
- c. Penyesuai penjualan yang meliputi potongan penjualan, *return and allowance*, dan rekening *uncollectible*.

Ke tiga subsistem tersebut di atas, secara bersama-sama membentuk siklus pendapatan. Ditinjau dari sudut pandang auditor ketiganya menjadi satu kesatuan proses audit yang dengan sendirinya mudah mengikuti jejak transaksi dari satu sistem ke sistem lainnya.

Rekening-rekening yang terkait dengan siklus pendapatan meliputi:

| | |
|--|--|
| Penjualan (<i>Sales</i>) | Piutang Dagang (<i>account receivable</i>) |
| Kos Penjualan (<i>cost of sales</i>) | Persediaan (<i>inventory</i>) |
| Kas | Potongan Penjualan |

Pencadangan dan kembalian penjualan Kerugian piutang (*bad-debts expence*)
Pencadangan kerugian piutang (*allowance for uncollectible accounts*)

Semua rekening-rekening tersebut di atas dipengaruhi secara langsung oleh transaksi siklus pendapatan. Dengan demikian besarnya jumlah rupiah yang disajikan dalam rekening-rekening tersebut saling berelasi dan saling mempengaruhi. Perubahan jumlah rupiah dalam rekening yang satu akan mempengaruhi rekening yang lain.

A. PERMASALAHAN AUDIT TERHADAP SIKLUS PENDAPATAN

Pembahasan dalam subbab ini meliputi tiga aspek yaitu tujuan audit, materialitas dan risiko audit, dan penelaahan terhadap struktur pengendalian intern.

1. Tujuan Audit

Tujuan audit terhadap transaksi siklus pendapatan adalah untuk memperoleh bukti bahwa saldo-saldo dan transaksi yang terkait dengan siklus pendapatan memperoleh asersi yang bekecukupan (*significant assertion*) dari manajemen. Asersi tersebut menunjukkan derajat tanggung jawab manajemen terhadap informasi keuangan yang secara eksplisit dinyatakan dalam laporan keuangan. Tujuan auditor dalam rangka audit terhadap asersi manajemen tersebut, antara lain:

- a. *Esistensi atau okurensi (existence or occurence)*, yang meliputi:
 - a. Pencatatan transaksi penjualan tercerminkan pada barang-barang yang dikirimkan kepada pembeli dalam periode yang diaudit.
 - b. Pencatatan transaksi penerimaan kas tercerminkan pada penerimaan kas dalam periode penjualan kredit serta penerimaan kas.
 - c. Pencatatan transaksi penyesuai penjualan telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang.
 - d. Pencatatan saldo piutang dagang benar-benar mencerminkan jumlah yang menjadi hak perusahaan untuk periode yang diaudit.
- b. *Kesempurnaan (completeness)*, yang meliputi:
 - a. Semua transaksi penjualan kredit, penerimaan kas, penyesuai penjualan mencerminkan aktivitas yang terjadi dalam periode yang diaudit.
 - b. Piutang dagang meliputi semua klaim kepada pelanggan pada saat tanggal neraca.
 - c. *Hak-hak dan kewajiban (rights and obligations)*,
Piutang dagang benar-benar mencerminkan hak yang secara hukum merupakan tagihan kepada pihak kedua.
 - d. *Penilaian atau alokasi (valuation or allocation)*, yang meliputi:
 - a. Semua transaksi penjualan kredit, penerimaan tunai, penyesuai penjualan telah dicatat dalam jurnal dengan cermat.
 - b. Saldo rekening piutang dagang benar-benar mencerminkan hak netto kepada pelanggan dan jumlahnya cocok dengan saldo buku pembantu piutang.

-
-
- c. Rekening pencadangan kerugian piutang benar-benar mencerminkan adanya penaksiran yang *reasonable* (masuk akal) sehingga perbedaan antara piutang groos dengan piutang netto dapat tergambar dengan masuk akal.
 - e. Presentasi dan pengungkapan (*presentation and disclosure*), yang meliputi:
 - a. piutang dagang diidentifikasi dan diklasifikasi dengan layak dalam neraca.
 - b. Pengungkapan yang memadai terhadap piutang dagang yang digunakan sebagai jaminan.
 - c. Penjualan, potongan penjualan, kembalian penjualan, dan pencadangan penjualan, dan kerugian piutang diidentifikasi dengan cermat dan diklasifikasi dalam statemen penerimaan (*income statement*)

2. Materialitas, Risiko, dan Strategi Audit

Sumber utama pendapatan suatu perusahaan berasal dari transaksi penjualan baik barang maupun jasa. Pendapatan ini merupakan komponen utama dalam membentuk penghasilan (*income*). Proses penjualan barang atau jasa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu penjualan tunai yang menghasilkan penerimaan tunai, dan penjualan kredit yang menghasilkan piutang dagang. Hampir semua operasi perusahaan dilakukan dengan penjualan kredit, dengan tujuan menghasilkan perputaran barang dagangan yang lebih cepat. Hal ini mengakibatkan jumlah saldo piutang dalam neraca menjadi relatif besar. Besarnya saldo piutang tersebut menghasilkan beberapa masalah dalam pengelolaan piutang (tagihan) kepada pihak lain. Permasalahan yang muncul disebabkan oleh kemungkinan adanya piutang yang tidak tertagih, kemungkinan penyajian saldo piutang yang terlalu tinggi, adanya piutang fiktif dan lain-lain.

Dengan keadaan digambarkan seperti di atas kesalahan penyajian piutang dagang mengandung risiko salah saji yang sangat besar. Mengingat tingkat risiko melekat (*inherent risk*) yang sangat tinggi, beberapa perusahaan memperluas prosedur struktur pengendalian intern guna mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut. Dalam beberapa kasus, diperlukan adanya pengurangan yang cukup berarti terhadap risiko pengendalian terhadap eksistensi dan okurensi, kesempurnaan, dan penilaian atau alokasi yang berkaitan dengan asersi terhadap saldo ataupun transaksi siklus pendapatan. Strategi audit yang harus dilakukan oleh auditor dengan pendekatan mencari tingkat risiko pengendalian yang rendah. Langkah-langkah dan pengambilan keputusan digambarkan dalam peraga no 2.1.

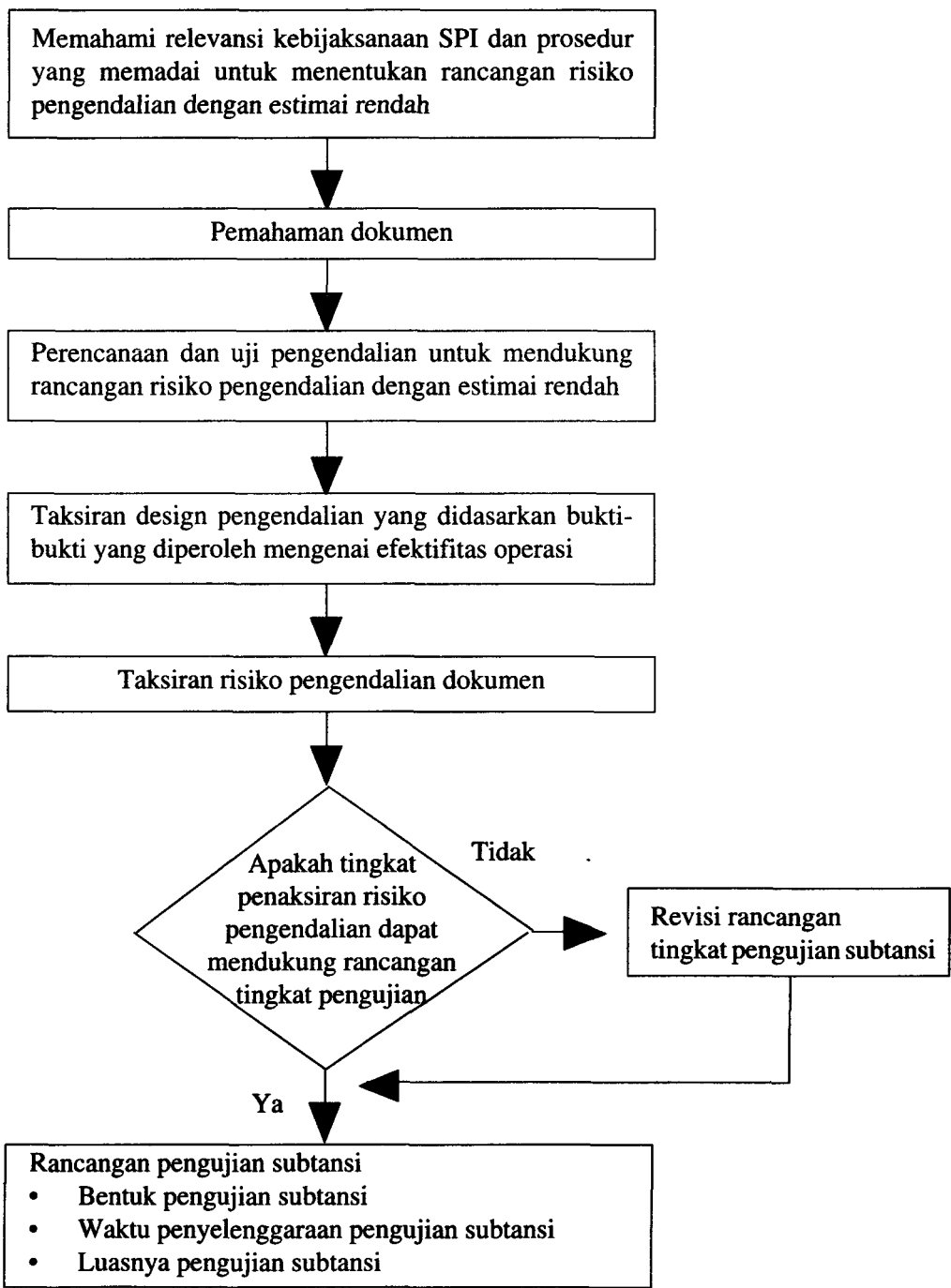
B. PEMAHAMAN TERHADAP STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN

Struktur pengendalian intern siklus transaksi pendapatan meliputi aspek lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian. Terhadap ketiga aspek tersebut auditor harus memperoleh pemahaman sehingga dapat menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu dalam melakukan operasi pengauditan.

1. Aspek Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Pemahaman terhadap lingkungan pengendalian mengharuskan auditor melakukan

Peraga 2.1 Langkah-langkah dalam Pengambilan Keputusan



Sumber: Keu, Hal 287

langkah-langkah awal untuk mempelajari bagan organisasi, review terhadap diskripsi pekerjaan, dan observasi terhadap *performance* karyawan kunci dalam menangani tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Auditor harus mewawancarai (*inquiries*) kepada para pejabat perusahaan untuk mengetahui apa yang menjadi tugas-tugasnya serta wewenang yang dimilikinya dan sampai seberapa jauh tanggungjawabnya. Disamping itu perlu pula diobservasi mengenai jaminan terhadap personel yang menangani penerimaan dan penyimpanan kas. Kebijakan manajemen dalam hal ini akan mendorong karyawan bertindak jujur dan mempunyai integritas yang tinggi pada perusahaan. Apabila karyawan yang menangani transaksi kas beserta penyimpanannya cenderung terancam, dia akan cenderung protektif dan akan bertindak curang. Oleh karena itu mereka perlu diwajibkan menjalankan cuti, adanya rotasi pekerjaan, dan pemeriksaan mendadak dengan maksud agar para personel terdorong untuk bertindak jujur.

Auditor harus mengetahui metode pengendalian manajemen yang digunakan klien. Apakah menggunakan *forecasting* penjualan? Apakah tersedia anggaran yang dapat digunakan untuk mengevaluasi *performance*? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini juga harus diajukan kepada manajer yang bertanggungjawab dalam bidangnya masing-masing.

2. Sistem Akuntansi (*Accounting Systems*)

Pemahaman terhadap sistem akuntansi sangat bermanfaat guna mengetahui metode pengolahan data, dokumen kunci, dan catatan yang digunakan. Gambar 2.2 yang disajikan dalam halaman 41 menunjukkan gambaran ringkas bagaimana suatu transaksi ditangani melalui berbagai prosedur dan penanganan pekerjaan operasional. Flowchart tersebut hendaknya dilihat sebagai suatu contoh suatu sistem yang dikerjakan dengan manual. Sistem semacam ini mengandalkan kecermatan penanganan transaksi akuntansi pada kecermatan pekerjaan klerikal. Sistem biasanya dirancang secara spesifik untuk suatu perusahaan, yang tentunya dalam kasus yang berbeda akan ditemukan sistem yang berbeda pula.

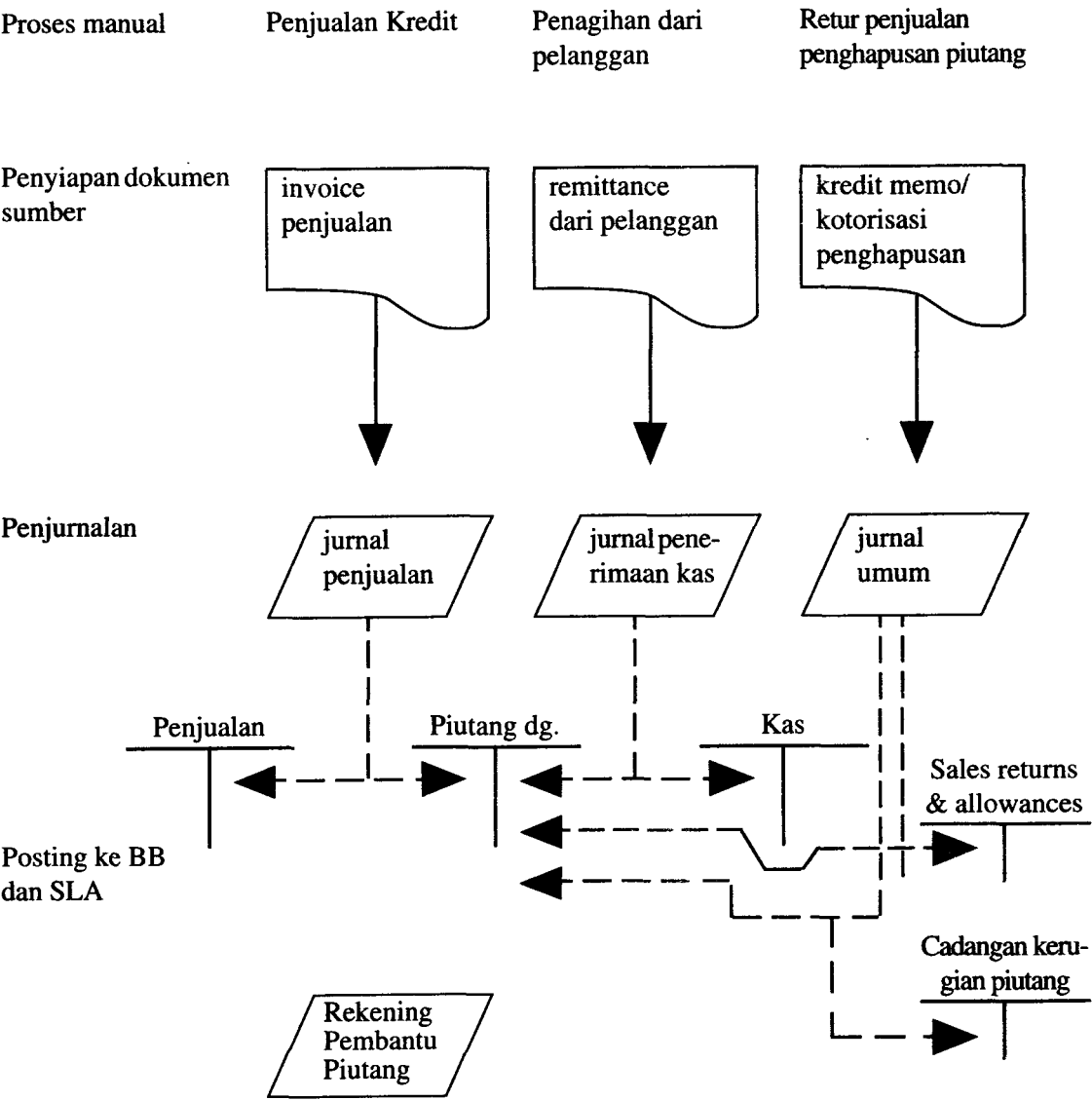
Dalam suatu sistem akuntansi yang berbasis komputer, proses pengolahan informasi akan berbeda, yaitu dengan cara memasukkan semua transaksi atau fakta terlebih dahulu ke komputer. Setelah data dimasukkan (*fill in*), CPU dengan program yang telah dirancang melakukan fungsi-fungsi pekerjaan klerikal yang ada dalam sistem akuntansi manual. Ini berarti proses penjumlahan, pembuatan dokumen, klasifikasi, reklasifikasi rekening, dan pelaporannya dilakukan oleh komputer. Dengan bantuan komputer dan paket program khusus akuntansi, pekerjaan akuntansi menjadi lebih efisien dan menghasilkan informasi yang jauh lebih cepat. Sebagai akibatnya, pada dewasa ini sudah jarang perusahaan menggunakan sistem akuntansi secara manual tersebut. Hampir semua perusahaan besar sudah menggunakan program aplikasi komputer atau secara khusus didesain untuk perusahaan tersebut.

3. Prosedur Pengendalian (*Control Procedure*)

Auditor berkepentingan untuk mengetahui apakah prosedur pengendalian dalam perusahaan klien diterapkan dalam penanganan siklus transaksi pendapatan. Prosedur pengendalian mencakup lima kategori, yaitu: adanya otorisasi yang layak, pemisahan tugas,

adanya dokumen dan catatan, akses dalam pengendalian, dan adanya prosedur pengecekan oleh individu yang berbeda.

Peraga 2.2 Bagan Arus Sistem Akuntansi dalam Penanganan Transaksi



C. PENGENDALIAN INTERN TERHADAP TRANSAKSI PENJUALAN KREDIT

Dalam upaya memahami sistem pengendalian intern terhadap transaksi penjualan kredit ada empat hal yang harus senantiasa diperhatikan, yaitu: (a) Catatan dan dokumen yang digunakan, (b) Fungsi yang terkait dalam prosedur penjualan kredit, (c) *Obtaining and Documenting the Understanding*, dan (d) *Assesing Control Risk*. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap siklus ini, auditor harus memperoleh gambaran yang jelas mengenai sistem yang berjalan, serta berusaha memperoleh keyakinan apakah sistem pengendalian tersebut memang benar-benar dilaksanakan dalam operasi transaksi penjualan kredit. Sistem dan prosedur penjualan disajikan dalam Peraga 2.3.

1. Catatan dan Dokumen Kunci dalam Siklus Pendapatan

Dalam sistem penjualan kredit digunakan berbagai dokumen maupun catatan akuntansi guna mendokumentasikan setiap informasi yang terbentuk dalam transaksi penjualan. Dalam sistem ini terdapat beberapa dokumen ataupun catatan yang pada umumnya digunakan guna membentuk sistem pengolahan informasi akuntansi yang memadai. Dokumen-dokumen maupun catatan akuntansi tersebut antara lain:

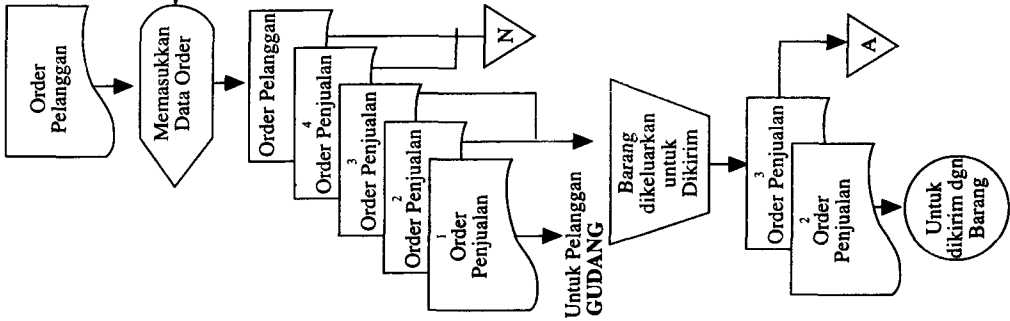
- a. *Customer order*, yaitu dokumen yang dirancang untuk menuliskan pesan pelanggan. Dokumen ini dikeluarkan oleh bagian pemasaran. Dokumen ini diisi oleh pegawai bagian pemasaran (pelayanan konsumen) berdasarkan surat yang diterima dari konsumen atau melalui pemesanan lisan.
- b. *Sales order*, yaitu dokumen yang dirancang untuk menuliskan perintah penjualan dari kepala bagian penjualan kepada pejabat bawahan atau bagian-bagian lain yang terkait.
- c. *Shipping document*, yaitu dokumen yang dirancang untuk menyertai pengiriman barang ke alamat pelanggan. Dokumen ini sangat diperlukan oleh bagian pengiriman barang atau perusahaan pengangkutan (Cargo) yang berfungsi untuk menunjukkan legalitas barang-barang yang dikirim.
- d. *Sales invoice*, yaitu dokumen yang berfungsi untuk memberitahukan kepada pelanggan bahwa pesanan telah direalisasi. Dokumen ini berisi jumlah rupiah, kesepakatan penjualan, tanggal penjualan, serta informasi lain yang berfungsi untuk memperjelas pesanan dari pelanggan.
- e. *Authorized price list*, yaitu dokumen yang berisi daftar harga yang disetujui sebagai dasar penentuan transaksi penjualan.
- f. *Accounts receivable subsidiary ledger*, merupakan catatan yang berisi informasi transaksi dan saldo untuk masing-masing pelanggan.
- g. *Sales journal*, adalah catatan original mengenai semua transaksi penjualan.
- h. *Customer montly statement*, adalah laporan bulan untuk masing-masing pelanggan yang berisi informasi mengenai saldo awal, mutasi dalam satu bulan, serta jumlah rupiah saldo akhir.

2. Fungsi yang Terkait

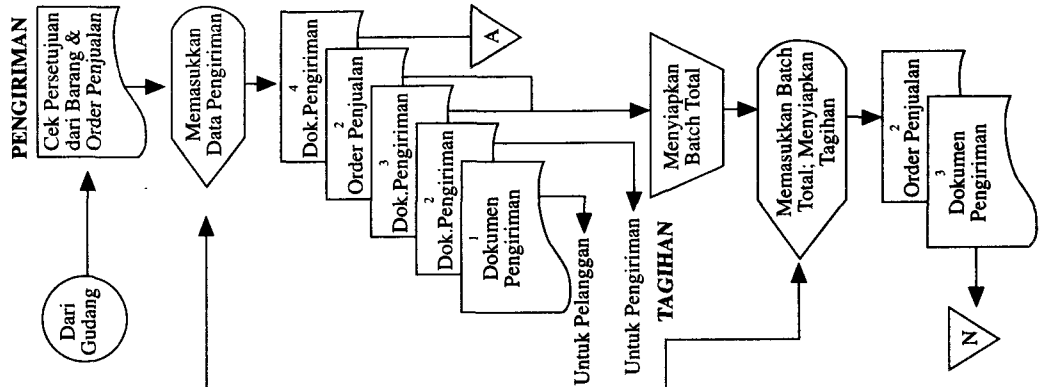
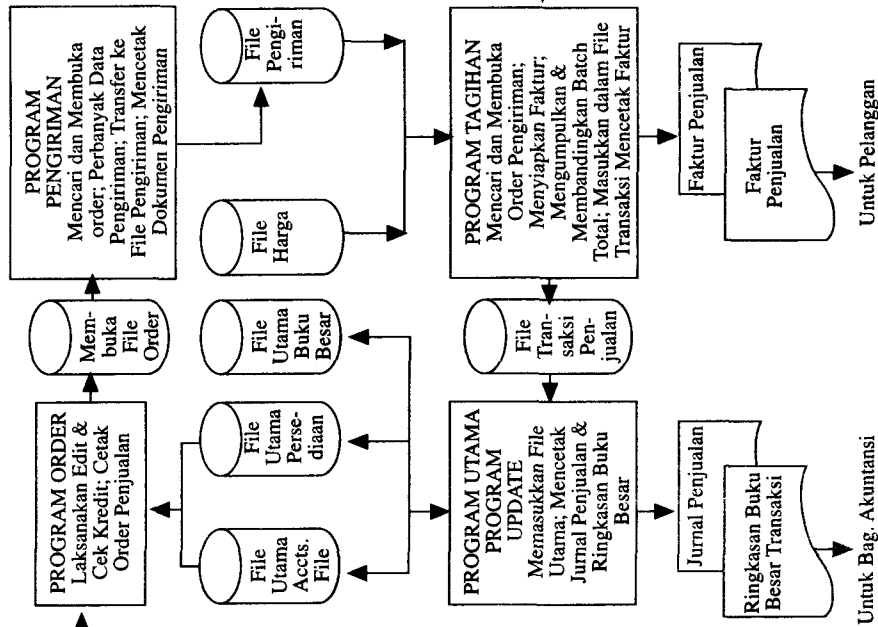
Berbagai fungsi yang terkait dalam transaksi penjualan kredit antara lain:

- a. Penerimaan pesanan dari pelanggan (*accepting customer orders*), pesanan dari pelanggan

PROSES PENJUALAN



PROSES DATA ELEKTRONIK



Peraga 2.3. Sistem dan Prosedur Penjualan

-
- diterima oleh bagian penjualan. Pesanan yang dapat diterima dengan ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen, sehingga proses penerimaan pesanan dengan mudah dapat dilayani dan diawasi oleh pejabat atasan.
- b. Persetujuan kredit (*approving credit*), Fungsi ini memberikan persetujuan terhadap kredit yang diberikan kepada para pelanggan. Manajer kredit merumuskan kebijaksanaan pemberian kredit kepada para pelanggan dengan kriteria yang ditetapkan terlebih dahulu. Pemberian kredit untuk pelanggan baru mialnya, melalui proses seleksi dan pengamatan yang cukup lama. Manajer menetapkan berapa pagu kredit yang diberikan kepada para pelanggan tersebut.
 - c. Penangan penjualan barang (*filling sales orders*), kebijaksanaan umum mengenai penangan penjualan, melarang pengiriman ataupun pengeluaran barang dari gudang tanpa disertai dengan perintah penjualan yang disetujui. Prosedur kendalian semacam ini dimaksudkan agar dapat mengamankan agar tidak terjadi pemindahan barang-barang dari gudang tanpa persetujuan yang berwenang.
 - d. Pengiriman barang (*shipping sales orders*), fungsi ini menangani proses pengiriman barang-barang yang dipesan para pelanggan. Pemisahan fungsi operasi (pengiriman) dengan fungsi penyimpanan (gudang) sangat diperlukan guna menciptakan sistem pengendalian yang memadai. Termasuk dalam fungsi ini adalah pengiriman dokumen pengiriman barang (*bills of lading*)
 - e. Penagihan (*billing customers*), fungsi ini menangani pembuatan invois beserta pengirimannya kepada pelanggan. Dengan kata lain, bagian yang menangani aktivitas billing merupakan kegiatan penagihan kepada para pelanggan. Penagihan akan dilakukan oleh bagian ini dengan terlebih dahulu memperhatikan:
 - * semua barang telah dikirimkan kepada pelanggan,
 - * tagihan hanya untuk barang-barang yang benar-benar telah dikirim, dan
 - * harga-harga telah disetujui oleh pejabat atasan yang berwenang.Dengan memperhatikan proses penagihan mengandung banyak risiko, maka diperlukan pengendalian yang baik guna mengurangi kemungkinan barang dikirim dua kali, penentuan harga yang tidak benar, kesalahan hitung, dan lain sebagainya.
 - f. Pencatatan penjualan (*recording the sales*), fungsi ini ada pada bagian akuntansi yang bertugas melakukan pencatatan secara formal terhadap transaksi penjualan. Fungsi pencatatan dipisahkan dari fungsi operasional agar tercipta pengawasan intern yang memadai.

3. Risiko Pengendalian

Untuk memahami terhadap munculnya risiko pengendalian, auditor harus merujuk tiga langkah yang antara lain: (a) mengidentifikasi kemungkinan salah saji, (b) identifikasi pengawasan yang dapat melindungi dan mendeteksi terhadap salah saji, dan (c) memperoleh pembuktian terhadap pengujian pengendalian. Kemungkinan yang dapat diperhitungkan terhadap risiko pengendalian transaksi penjualan kredit adalah:

- a. Penerimaan pesanan dari pelanggan, kemungkinan salah saji dalam bentuk penjualan dilakukan untuk pelanggan yang tidak disetujui. Dalam hal ini diperlukan pengawasan sebagai berikut:

-
-
- * pelanggan adalah orang yang masuk dalam daftar yang disetujui.
 - * setiap order penjualan harus disetujui pejabat atasan yang berwenang.
- b. Persetujuan kredit, kemungkinan salah saji dalam bentuk penjualan kredit diberikan tanpa dimintakan persetujuan dari pejabat atasan yang berwenang. Dalam hal ini diperlukan pengawasan berikut:
- * bagian kredit harus melakukan pengecekan semua pelanggan baru.
 - * dilakukan pengecekan terhadap batasan pemberian pagu kredit, pada setiap pelanggan.
- c. Penangan penjualan barang, kemungkinan salah saji dalam bentuk barang yang dikeluarkan dari gudang tidak berdasarkan order yang disetujui. Dalam hal ini diperlukan pengawasan terhadap semua barang yang dikeluarkan dari gudang harus memperoleh persetujuan dari pejabat atasan.
- d. Pengiriman barang, kemungkinan salah saji dalam bentuk (a) barang yang dikirim mungkin tidak cocok dengan pesanan dari pelanggan, oleh karenanya diperlukan adanya pengecekan oleh pegawai yang independen untuk mengecek barang-barang yang telah dikirim. (b) pengiriman barang yang tidak diotorisasi, yang dikendalikan dengan teknik pemisahan fungsi pengiriman dan operasinya, dan disamping itu perlu diawasi proses pengiriman tagihan pada para pelanggan.
- e. Penagihan, kemungkinan salah saji dalam bentuk tagihan dibuat untuk penjualan fiktif, demikian juga beberapa transaksi penjualan pengiriman barang tidak diotorisasi pejabat atasan yang berwenang.
- f. Pencatatan penjualan, kemungkinan salah saji dalam bentuk invoice mungkin tidak dicatat dalam jurnal dan buku pembantuannya dan dapat pula invoice dicatat dalam rekening pelanggan yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan pejabat yang independen untuk mengecek proses pembukuan serta dibuat laporan mutasi saldo masing-masing pelanggan secara periodik.

D. PENGUJIAN SUBTANSI TRANSAKSI PENERIMAAN KAS

Transaksi penerimaan kas terbentuk karena adanya operasi penjualan tunai dan pelunasan utang dari para debitur. Disamping ada sumber penerimaan kas dari berbagai transaksi non operasional, misalnya penerimaan dari penjualan aktiva tetap, penerimaan bunga deposito, penerimaan kas dari aktivitas sekunder, dan lain-lain. Semua penerimaan yang berasal dari aktivitas non operasional diakui berdasarkan pendekatan netto, artinya kos yang membentuk penerimaan tersebut langsung diperhitungkan dan dibebankan dalam penerimaan kas tersebut. Pengujian transaksi penerimaan kas meliputi berbagai aspek berikut.

1. Catatan dan Dokumen yang Umum

Dalam sistem penerimaan kas digunakan berbagai dokumen maupun catatan akuntansi guna mendokumentasikan setiap informasi yang terbentuk dalam transaksi penerimaan kas. Dalam sistem ini terdapat beberapa dokumen ataupun catatan yang pada umumnya digunakan membentuk sistem pengolahan informasi akuntansi yang memadai. Dokumen-dokumen maupun catatan akuntansi tersebut antara lain:

-
-
- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| a. Remittance advice | b. Prelist, |
| c. Cash count sheet | d. Daily cash summary |
| e. Validated deposit slip | f. Cash receipts transaction file |
| g. Cash receipts journal | |

Fungsi dan peranan dokumen-dokumen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Remittance advice*, adalah dokumen yang dikirim kepada pelanggan bersamaan dengan invoice penjualan yang akan dikembalikan bersamaan dengan pembayarannya. Dokumen ini berisi nama pelanggan dan nomor rekeningnya, nomor invoice, dan jumlah yang ditagihkan. Jika dokumen ini tidak dikembalikan oleh pelanggan, biasanya ada satu tembusan yang ditinggal.
- Prelist, adalah daftar penerimaan kas (checks) yang diterima melalui surat pos. Di Indonesia pengiriman cek melalui pos tidak lazim. Hal ini sangat berbeda dengan di Amerika Serikat (negara-negara barat) yang masyarakatnya mempunyai kebiasaan menuliskan checks dengan **atas nama** untuk membayar kepada pihak lain.
- Cash count sheet*, yaitu daftar checks dan uang tunai dalam register kas yang digunakan untuk mencocokkan total penerimaan dengan pita yang tercetak dari register kas.
- Daily cash summary*, adalah laporan yang berisi total penerimaan kas yang dibuat oleh kashir penerimaan kas untuk digunakan mendepositokan uang dan cek yang diterima pada suatu hari.
- Validated deposit slip*, daftar yang disiapkan oleh penerima setoran dan dicap oleh bank yang berisi tanggal setoran dan jumlah setoran yang diterima oleh bank. Di Indonesia daftar semacam ini dikirimkan pada hari berikutnya setelah hari setoran. Daftar ini bisa pula disiapkan oleh petugas klien yang melakukan setoran tersebut, yang selanjutnya daftar tersebut harus dicap dan ditandatangani oleh petugas bank yang menerima setoran tersebut.
- Cash receipts transaction file*, file komputer berisi transaksi penerimaan kas yang sudah divalidasi yang dapat diterima untuk diproses. Biasanya digunakan untuk meng-update file induk piutang dagang
- Cash receipts journal*, jurnal penerimaan kas dari penjualan tunai dan pengumpulan atas piutang dagang.

2. Fungsi yang Terkait

Dalam operasi penerimaan kas melibatkan personel dari berbagai bagian sesuai dengan deskripsi tugasnya masing-masing. Aktivitas operasional tersebut tercermin dalam beberapa fungsi pokok penanganan transaksi penerimaan kas. Fungsi-fungsi yang terkait dalam penanganan transaksi penerimaan kas meliputi aktivitas operasional sebagai berikut:

- Penerimaan setoran tunai (*receiving cash receipts*)
- Setoran uang tunai ke bank (*depositing cash in bank*)
- Pencatatan penerimaan (*recording the receipts*)

Ketiga fungsi dalam penanganan transaksi penerimaan kas dibahas dalam uraian berikut ini. Hendaknya dipahami, apabila klien berusaha dalam bidang eceran yang memerlukan

penangan penjualan tunai, maka sistem penerimaan kas akan menghendaki fungsi yang berbeda dengan ketiga fungsi tersebut di atas.

a. Penerimaan setoran tunai (receiving cash receipts)

Proses transaksi penerimaan kas mengandung risiko yang tinggi, mengingat selama proses operasi penerimaan uang tunai sangat mudah berpindah tangan dan mudah tercuri. Oleh karena itu dalam penangan transaksi penerimaan kas diperlukan adanya seperangkat prosedur yang dapat menjamin keamanan uang yang diterima serta pencatatan transaksi penerimaan kas tersebut. Kemungkinan lain tercurinya sejumlah uang terjadi setelah proses transaksi penerimaan uang berlangsung. Oleh karenanya manajemen akan senantiasa memberikan jaminan terhadap terjaganya harta milik yang berupa uang tunai ataupun aktiva lain yang bernilai sebagai uang.

Prosedur penerimaan uang dalam suatu negara tidak akan selalu sama persis dengan negara lainnya. Hal ini mengingat pengaruh lingkungan bisnis dan undang-undang yang berlaku akan mempengaruhinya. Penerimaan kas dapat dilakukan melalui sertoran langsung melalui kasir dan penerimaan cek melalui surat (di Amerika Serikat). Cara pembayaran semacam ini tidak lazim di Indonesia, mengingat kebiasaan dagang dan undang-undang yang melatarbelakangi terbentuknya transaksi juga berbeda. Oleh karenanya auditor di Indonesia juga harus memperhatikan karakterisasi transaksi yang berlaku.

Semua penerimaan langsung sebaiknya menggunakan register kas yang akan memberikan manfaat berikut ini:

- * dapat ditunjukkan secara langsung kepada pelanggan jumlah pembayaran yang dilakukannya.
- * terdapat dua pita tercetak yang satu untuk pelanggan dan yang kedua berada dalam register kas atau terekam di komputer guna kepentingan pengawas.

Dengan adanya register kas ini, pengawasan secara langsung dapat dilakukan terus menerus. Hal ini akan memberikan jaminan bahwasannya semua pembayaran yang dilakukan oleh para pelanggan dapat diikuti dan dijamin kebenarannya.

b. Setoran uang tunai ke bank (depositing cash in bank)

Alternatif setoran dari para pelanggan dilakukan secara langsung ke bank klien. Apabila daerah pemasaran klien cukup luas seperti Indonesia, biasanya perusahaan semacam ini membuka rekening pada beberapa bank yang berfungsi sebagai pengumpul setoran dari para pelanggan (distributor daerah). Situasi bisnis dan karakteristik pasar tersebut menyebabkan perusahaan menjalin kerjasama yang lebih erat dengan pihak bank. Pada beberapa kasus perusahaan harus menangani penerimaan harian dalam jumlah yang sangat besar. Keadaan ini menyebabkan bank bersedia membuka loket penerimaan di kantor perusahaan. Pendekatan ini memberi keuntungan bagi kedua belah pihak, pihak perusahaan terbantu dalam penangan setoran harian dan pihak bank dapat memperoleh dana segar yang dapat diputar dengan segera. Berbagai macam teknik pengumpulan uang dari pelanggan ini harus dipahami oleh auditor, sehingga di lapangan dapat merumuskan strategi audit yang lebih sesuai dengan situasi yang dihadapinya.

Aspek pengendalian yang sangat penting dalam rangka penerimaan kas, mengharuskan penyetoran uang tunai secara langsung ke bank pada hari yang sama dengan penerimaan uang tersebut. Penyetoran uang tunai yang diterima hari itu adalah para petugas penerimaan uang tersebut, mengingat petugas bagian penyetoran tidak ditugas untuk menangan pengeluaran kas. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada uang yang disimpan lebih dari satu hari di brankas perusahaan. Oleh karenanya kasir tidak mungkin menggunakan uang yang diterima hari itu untuk keperluan apapun.

c. Pencatatan penerimaan (*recording the receipts*)

Fungsi pencatatan bertugas melakukan pencatatan semua transaksi penerimaan uang tunai, dan melakukan posting ke jurnal penerimaan kas. Pengendalian terhadap pencatatan ini menyangkut validitas catatan akuntansi yang meliputi ketepatan jumlah yang dicatat, dan apakah informasi yang dicatat merupakan penerimaan yang sesungguhnya. Untuk menjamin ketepatan pencatatan informasi, maka petugas yang menangani dan mempunyai akses dalam proses pencatatan tersebut harus dibatasi. Oleh karena itu, petugas yang melakukan pencatatan adalah individu yang diberi otoritas melaksanakan tugas tersebut.

3. Pemahaman terhadap Pengendalian Intern Penerimaan Kas

Auditor bertanggungjawab terhadap pelaksanaan standar kedua terhadap transaksi penerimaan kas. Memperoleh pemahaman tersebut dilakukan dengan mengajukan kuestioner pengendalian intern terhadap transaksi penerimaan kas. Semua pertanyaan tersebut harus didokumentasikan dalam suatu kertas kerja. Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan antara lain sebagai berikut:

a. Penerimaan setoran tunai, dengan pertanyaan berikut:

1. Apakah register kas digunakan di konter penerimaan uang?
2. Apakah prosedur pengawan periodik selalu dilakukan?
3. Apakah checks diuangkan oleh pegawai yang ditugaskan?
4. Apakah selalu disiapkan prelist terhadap penerimaan cek?

b. Setoran uang tunai ke bank, dengan pertanyaan berikut:

1. Apakah dilakukan pengecekan oleh pihak yang independen terhadap kesesuaian antara penerimaan uang tunai dan cek yang akan disetor ke bank dengan daftar hitungan dan lembar penghitungan kas?
2. Apakah setoran ke bank dilakukan secara langsung setiap hari?

c. Pencatatan penerimaan, dengan pertanyaan berikut:

1. Adakah pemisahan tugas antara pencatat penerimaan kas dengan bagian yang memegang kas.
2. Apakah setiap hari di cek oleh pihak yang independen mengenai jumlah yang dicatat, dibukukan, dan setoran dengan ringkasan kas harian?
3. Apakah selalu disiapkan rekonsiliasi bank oleh pihak yang independen?
4. Adakah statemen bulan untuk pelanggan selalu dikirim?

E. PENGUJIAN SUBTANSI TERHADAP SALDO PIUTANG

Pembahasan pengujian subtansi dalam siklus ini hanya menyangkut pengujian terhadap piutang saja, mengingat pengujian untuk beberapa rekening lainnya akan dibahas dalam siklus yang lain. Pengujian presentasi kos penjualan dan assersi persediaan akan dibahas dalam siklus produksi (bab 5), demikian pula assersi terhadap saldo kas akan dibahas pada bab 8. Meskipun demikian kaitannya dengan siklus pendapatan sangatlah erat, oleh karena itu pada hakekatnya tidak ada sekat yang begitu rigit di antara berbagai siklus. Pembaca buku ini harus memahami, bahwasannya tahapan bahasan ini hanya untuk memudahkan penyampaian konsep berpikir saja, dalam praktik sekat-sekat di antara berbagai siklus harus dikombinasikan dengan situasi lapangan.

Elemen piutang terdiri dari piutang dagang dan piutang wessel (notes). Kedua elemen tersebut secara dominan membentuk piutang perusahaan. Piutang dagang adalah piutang yang timbul dari aktivitas utama perusahaan dalam menjual barang/jasa kepada para distributor atau konsumen langsung. Piutang terbentuk karena berlakunya kesepakatan bisnis dan undang-undang yang berlaku pada suatu negara. Apabila tidak terdapat dasar-dasar hukum yang mendasari timbulnya utang-piutang, maka utang-piutang juga tidak akan ada. Karakter ini menunjukkan bahwa ruang lingkup juridis sangat berperanan dalam menentukan eksistensi piutang (dagang maupun wessel). Auditor harus memperhatikan sisi hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan piutang tersebut.

Perikatan dalam piutang dagang sebatas pada transaksi jual beli barang dan jasa antara klien dengan perusahaan lain, sehingga inisiatif terjadinya perikatan tersebut sangat ditentukan oleh si pembeli. Apabila tidak ada permintaan dari pihak lain untuk menunda pembayaran, maka transaksi piutang dagang juga tidak ada. Disamping itu kesenjangan waktu antara saat terjadinya, proses pengiriman barang, dengan saat penerimaan barang, dan saat realisasi pembayaran seringkali menjadikan masalah penundaan pembayaran tersebut. Dengan melihat keadaan tersebut piutang dagang pada hakekatnya berupa klaim ataupun tagihan kepada pihak lain dalam rangka proses dagang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwasannya Piutang merupakan kekayaan perusahaan yang tidak berwujud (*intangible*), yang keberadaannya dapat dibuktikan melalui dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi diantara kedua pihak atau berdasar pengakuan dari pihak lain.

Keadaan yang digambarkan tersebut, sangat berbeda dengan piutang wessel, yang pada dasarnya merupakan tagihan kepada pihak lain yang timbul sebagai kegiatan utama/kegiatan lain yang diikuti oleh kesediaannya untuk mengikat diri dengan perikatan tertentu. Perikatan di antara kedua belah pihak dilakukan dengan lebih formal. Perikatan yang timbul dilaksanakan dengan akta notariel sehingga kesaksian notaris menjadi dasar pengikatan juridis formal. Perikatan yang diatur meliputi: (a) kesediaan untuk membayar atau melunasi kewajiban. (b) berapa lama tenggang waktu pembayaran yang disepakati, dan (c) kesediaan pihak debitur membayar bunga atas utangnya tersebut. Dengan melihat latar belakang yang berbeda, maka pendekatan auditnya juga akan berbeda pula. Audit subtansi terhadap piutang wessel akan dibahas dalam subbab F berikutnya.

Untuk memberikan gambaran bagaimana klien dalam menyajikan informasi keuangan, berikut disajikan contoh penyajian dalam Neraca auditan (*audited balance sheets*),

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Piutang Dagang | Rp 439.294.400,90 |
| Cadangan kerugian Piutang | <u>10.982.360,00</u> |
| Piutang Dagang (netto) | Rp 428.312.040,90 |

Penjelasan dalam laporan keuangan menunjukkan rincian informasi piutang dagang sbb:

| No | Pelanggan | Jumlah |
|----|----------------------------|--------------------------|
| 1 | Apotik Dewi Solo | Rp 206.900,90 |
| 2 | PT TIGARA | 203.000.500,00 |
| 3 | PT Altron Perkasa | 34.679.000,00 |
| 4 | Rumah Sakit Jiwa Jaya Raya | 1.890.000,00 |
| 5 | PN Aneka Dagang Raya | 44.457.500,00 |
| 6 | Piutang Lain-lain | 15.060.500,00 |
| | Jumlah | Rp 434.294.400,90 |

Daftar piutang tersebut di atas menunjukkan rincian informasi yang selalu ada dalam suatu laporan audit. Oleh karenanya dalam audit terhadap saldo piutang dagang, auditor harus melakukan verifikasi kebenaran rincian piutang dagang tersebut. Masalah yang harus dihadapi, bagaimana auditor meyakini kebenaran angka-angka tersebut di atas. Persoalan tersebut harus dipecahkan dengan pertanyaan berikut: (1) langkah-langkah (dengan teknik tertentu) apa saja yang harus ditempuh? (2) apakah informasi yang dikumpulkan sudah cukup? (3) bagaimana cara mengujinya sehingga akuntan yakin terhadap kebenaran informasi yang diterimanya? dan (4) bagaimana mendokumentasi segala langkah yang dilakukannya dalam kertas kerja pemeriksaan?

Dalam memperoleh keyakinan terhadap assersi dalam statemen keuangan klien, auditor harus melakukan program pemeriksaan sbb:

- Verifikasi kecermatan rekening piutang dagang apakah cocok dengan buku besar (*general ledger control*).
- Gunakan prosedur penelaahan analitikal.
- Lakukan konfirmasi piutang dagang sebagai pihak ketiga yang independen.
- Lakukan vouching catatan piutang dengan dokumen pendukungnya
- Lakukan pengujian terhadap cutoff penerimaan kas
- Lakukan pengujian transaksi setelah tanggal neraca

-
-
- g. Lakukan verifikasi kecermatan daftar umur piutang
 - h. Bandingkan penyajian piutang dagang dalam neraca dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Kedelapan program tersebut harus dikembangkan ke teknik audit yang lebih rinci guna mendeteksi assersi piutang dagang. Rincian program dijelaskan dalam uraian berikut ini.

- a. Verifikasi kecermatan rekening Piutang Dagang apakah cocok dengan buku besar.
Prosedur ini digunakan untuk memperoleh keyakinan terhadap assersi penilaian ataupun alokasi rekening piutang dagang. Alasan program audit ini adalah untuk memperoleh keyakinan apakah saldo piutang dagang dalam buku besar telah cocok dengan total piutang dagang yang disajikan dalam *trial balance*. Apabila auditor menghadapi risiko pendeteksian yang tinggi, maka auditor harus melakukan *scanning* terhadap jumlah yang tidak biasa dan sangat mencurigakan serta melakukan pencocokan dengan daftar tersebut. Sedangkan apabila risiko pendeteksian rendah, maka auditor cukup melakukan verifikasi terhadap saldo pelanggan yang material.
- b. Gunakan prosedur penelaahan analitikal.
Ratio keuangan digunakan pula dalam prosedur penelaahan analitikal terhadap piutang dagang. Prosedur audit ini diterapkan dalam rangka memahami assersi-assersi eksistensi atau okurensi, keterlengkapan, dan assersi penilaian atau alokasi. Berbagai bentuk ratio yang dapat digunakan dalam prosedur analitikal ini, antara lain:
 - tingkat perputaran piutang dagang
 - perbandingan antara piutang dagang dengan utang lancar
 - perbandingan antara piutang tak tertagih dengan penjualan kredit
 - perbandingan antara kerugian piutang dengan piutang yang benar-benar tak tertagih.

Penggunaan ratio ini sangat penting, mengingat pembandingan ratio dengan tahun yang lain ataupun dengan ratio industri yang sejenis akan dapat memberikan petunjuk kemungkinan adanya masalah dalam penyajian piutang dagang tersebut. Gejala yang terlihat dari fluktuasi ataupun perubahan yang begitu mencolok memberi indikasi yang meragukan terhadap penyajian saldo piutang tersebut. Petunjuk yang diperlihatkan oleh berbagai ratio tersebut harus dikembangkan dengan langkah-langkah yang ada dalam program lainnya. Ini berarti pelaksanaan suatu program audit tidaklah berdiri sendiri-sendiri, mengingat kesemuanya merupakan suatu rangkaian prosedur yang pada akhirnya dalam rangka mencapai tujuan yang sama.

- c. Lakukan konfirmasi Piutang Dagang
Konfirmasi piutang dagang adalah bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan secara langsung antara pelanggan secara individual dengan auditor. Prosedur audit ini merupakan prosedur standar yang lazim dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Prosedur konfirmasi mempunyai peranan penting dalam rangka memahami assersi eksistensi atau okurensi penyajian piutang

dagang dalam laporan keuangan klien. Mengingat sumber bukti pencatatan transaksi berasal dari pihak luar perusahaan (pihak ketiga) yang tentunya bersikap independen maka kepercayaan terhadapnya mempunyai derajat kecermatan yang sangat tinggi. Teknik ini sangat penting dalam setiap pelaksanaan audit piutang dagang, sehingga disebutkan dalam standar pelaksanaan audit yang ketiga. Bahkan, sering disebutkan sebagai mandatory procedure dalam pengauditan piutang.

Meskipun prosedur konfirmasi merupakan standar yang lazim dilaksanakan oleh auditor, namun prosedur audit ini dapat tidak dilakukan dengan kondisi dan situasi yang bersifat spesifik. Pengecualian yang layak diterima (berdasar justifikasi profesional) adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah saldo piutang dagang dalam neraca jumlahnya tidak material.
- b. Penggunaan prosedur audit ini justru menjadi tidak efektif. Sebagai contoh, apabila klien hanya menggunakan sebuah distributor tunggal dalam menyalurkan produknya ke pasar.
- c. Adanya ketentuan umum (seperti: undang-undang kerahasiaan bank) yang tidak memungkinkan terlaksananya prosedur audit tersebut.

Dalam menggunakan pengecualian tersebut hendaknya auditor menerapkannya dengan hati-hati (*prudence*), mengingat Dia akan menghadapi risiko tidak dapat memperoleh informasi yang memadai. Ini berarti penerapan dalam praktik benar-benar membutuhkan keahlian dan pengalaman kerja sebagai auditor yang lama. Oleh karena itu, apabila akuntan memutuskan untuk tidak menggunakan prosedur konfirmasi, Dia harus menggunakan prosedur lain yang dipandang dapat mengantisipasi lemahnya prosedur audit yang direncanakannya tersebut.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh auditor dalam melakukan prosedur konfirmasi adalah sebagai berikut:

- a. Penentuan format konfirmasi. Ada dua bentuk teknik konfirmasi yaitu **konfirmasi positif** dan **konfirmasi negatif**. Konfirmasi positif dilakukan dengan cara meminta debitur menjawab permintaan konfirmasi dengan tidak mempertimbangkan apakah catatan saldo utangnya cocok atau tidak dengan jumlah yang diterakan dalam surat konfirmasi. Konfirmasi positif digunakan bila: (1) Jumlah debitur tidak begitu banyak, (2) mutasi transaksi antara klien dengan debitur sering terjadi. Sedangkan konfirmasi negatif dilakukan dengan cara meminta debitur menjawab pertanyaan apabila catatan saldo utangnya tidak cocok dengan jumlah yang diterakan dalam surat konfirmasi. Kadangkala dalam surat jawaban diminta untuk menjelaskan alasan terjadinya perbedaan antara catatan debitur dengan klien. Konfirmasi negatif digunakan bila: (1) Jumlah debitur relatif banyak dan jumlahnya relatif kecil-kecil, dan (2) mutasi transaksi untuk masing-masing debitur relatif jarang. Di antara kedua bentuk konfirmasi tersebut mempunyai keunggulan dan kelemahan sendiri-sendiri, oleh karenanya penggunaannyapun sangat tergantung pada situasi yang ada. Pemilihan di antara kedua teknik konfirmasi ini tergantung pada pertimbangan profesional auditor dalam mengantisipasi risiko tidak menemukan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan.

Agar tujuan konfirmasi dapat dicapai dengan baik, maka diperlukan perencanaan yang matang. Perencanaan konfirmasi piutang dagang meliputi langkah-langkah berikut:

- a. Dapatkan daftar piutang dagang beserta kebijaksanaan akuntansi terhadapnya.
 - b. Tentukan apakah akan menggunakan konfirmasi negatip ataukah konfirmasi positif (lihat contoh peraga 2.4)
 - c. Siapkan surat konfirmasi (biasanya sudah terstandar).
 - d. Mintakan persetujuan kepada direktur keuangan atau pejabat yang berwenang menandatangani surat konfirmasi.
 - e. Kirimkan surat konfirmasi yang telah ditandatangani pejabat klien, yang dalam hal ini hendaknya surat konfirmasi dikirim oleh akuntan pemeriksa sendiri, dan jawabannya langsung dialamatkan langsung pada kantor auditor.
 - f. Lakukan evaluasi terhdap surat konfirmasi yang tidak kembali, tentukan sikap untuk langkah selanjutnya.
- b. Pemilihan waktu yang dianggap tepat untuk mengajukan permintaan konfirmasi. Unsur waktu pengiriman surat konfirmasi dapat mejadi penentu kesuksesan prosedur audit ini. Waktu yang dianggap tepat untuk melakukan konfirmasi sangat tergantung padaantisipasi resiko deteksi. Apabila resiko deteksinya dinilai rendah, maka auditor lebih leluasa menentukan kapan surat konfirmasi akan dikirim kepada pihak ketiga. Sebaliknya apabila resiko deteksinya tinggi, penentuan waktu penyelenggaraan konfirmasi menjadi sangat strategis dalam memperoleh jawaban dari pihak ketiga tersebut.

Sebagai contoh, penyelenggaraan konfirmasi di awal pekerjaan lapangan akan memunculkan kemungkinan prosedur ini dilaksanakan dengan tidak cermat. Mengingat auditor belum memahami masalah yang ada dalam assersi piutang tersebut. Kemungkinan seperti ini harus menjadi pertimbangan selama pekerjaan lapangan berlangsung.

- c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan konfirmasi. Auditor harus mengawasi setiap langkah proses konfirmasi dengan tujuan memperoleh jaminan bahwa pihak ketiga yang dimintai konfirmasi benar-benar pihak yang mempunyai utang kepada klien. Guna menghindarkan kemungkinan terjadinya kolusi antara klien (pegawai klien) dengan debitur, maka pemilihan siapa debitur yang harus dimintai keterangan sepenuhnya menjadi wewenang auditor. Para pegawai klien benar-benar hanya membantu pelaksanaan pengiriman surat konfirmasi tersebut.
- d. Disposisi dan evaluasi hasil konfirmasi. Jawaban konfirmasi seringkali menyajikan informasi yang berbeda dengan informasi yang diperoleh dari pihak klien. Langkah yang harus dipertimbangkan oleh auditor adalah melakukan evaluasi terhadap jawaban konfirmasi dari pihak ketiga tersebut. Auditor harus mengambil keputusan mengenai perbedaan informasi tersebut, apakah mengusulkan membuat adjustment terhadap saldo yang piutang dagang, ataukah auditor harus mendiskusikan kepada manajemen mengenai perbedaan informasi yang sangat material. Apabila diantara auditor dan klien tidak ada kesepakatan auditor harus memberikan catatan tersendiri

Peraga 2.4 Contoh Konfirmasi Piutang Dagang: Konfirmasi Positif

Kepada:

Yth, Saudara Direktur,
PT ACE Tunggal Sarana
Jl. Abimanyu 24
Semarang

Surat ini dikirimkan kepada Saudara dalam rangka pengujian yang dilakukan oleh akuntan publik Handori dan Rekan, guna menegaskan kecermatan catatan-catatan kami. Jadi, tidak dimaksudkan sebagai surat penagihan atas utang Saudara tersebut.

Catatan kami pada tanggal 31 Desember 1993, menunjukkan utang Saudara sebesar Rp 16.200.000. Kami mengharapkan kesediaan Saudara, untuk mengirimkan jawaban tertulis langsung ditujukan kepada Kantor Akuntan Publik tersebut dengan menggunakan slip dibawah surat ini. Amplop disertai alamat surat dan perangko tertempel pada amplop terlampir kami sediakan untuk maksud tersebut. Jika Saudara mengetahui bahwa saldo piutang kami tersebut salah, dimohon untuk mencantumkan detail koreksi atas catatan kami tersebut dalam kolom yang disediakan.

Terima kasih

Direktur Keuangan,

Drs. Hasan Fainusa

..... Potong disini

Jumlah tersebut di atas adalah sesuai dengan catatan kami. Jumlah tersebut tidak sesuai dengan catatan kami dengan rincian sbb :

PT ACE Tunggal Sarana

Direktur Keuangan,

.....

terhadap penyimpangan yang terjadi. Keputusan akhir mengenai hal ini, sepenuhnya menjadi wewenang *auditor in charges*, dalam pemberian opini atas laporan keuangan klien tersebut.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam konfirmasi piutang dagang memberikan keyakinan terhadap asersi eksistensi atau okurensi, keterlengkapan, dan hak dan kewajiban yang terungkap dalam informasi piutang tersebut dalam neraca.

d. Lakukan vouching catatan Piutang dengan dokumen pendukungnya.

Semua dokumen pendukung transaksi penjualan kredit disimpan oleh bagian akuntansi. Auditor perlu mencocokkan apakah saldo piutang yang disajikan oleh klien benar-benar berdasarkan catatan yang dibuat oleh bagian akuntansi dan mencocokkan apakah informasi yang disajikan didukung oleh bukti transaksi yang memadai. Sisi debit dicocokkan pendukung *invois* penjualan seperti; dokumen pengiriman, perintah penjualan, dan pesanan dari pelanggan. Sisi kredit dicocokkan ke *remittance advices* dan otorisasi *sales adjustment*. Pada dasarnya prosedur ini merupakan pelengkap dari prosedur konfirmasi, apabila ternyata konfirmasi tidak ditanggapi oleh debitur klien.

Program audit ini akan memberikan keyakinan terhadap asersi eksistensi dan okurensi piutang dagang.

e. Lakukan pengujian terhadap cutoff transaksi penjualan.

Pengetesan cutoff transaksi penjualan dirancang untuk memperoleh jaminan yang kuat bahwa: (1) semua penjualan dan piutang dagang yang disajikan dalam neraca merupakan transaksi yang benar-benar terjadi selama periode akuntansi yang diaudit, dan (2) bahwasannya jurnal untuk persediaan dan harga pokok penjualan dicatat untuk periode yang sama.

Dalam memilahkan suatu transaksi apakah masuk dalam suatu periode akuntansi, akuntan harus memperhatikan klausula pengiriman barang dagangan kepada konsumen. Apakah menggunakan **FOB destination**, ataukah **FOB shipping point** yang keduanya mempunyai dampak yang sangat berbeda terhadap pengakuan pendapatan maupun timbulnya hak atas piutang pada pihak ketiga. Auditor harus melakukan analisis transaksi mana yang masuk kategori dalam periode akuntansi yang diperiksanya, dan mana yang masuk periode akuntansi berikutnya. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan antara lain:

- (1) Lakukan pengujian dokumen pengiriman barang sebelum dan setelah tanggal neraca, untuk menetapkan kategori tanggal dan perjanjian pengiriman barang.
- (2) Lakukan penelusuran dokumen pengiriman ke catatan penjualan dan persediaan untuk menentukan apakah jurnal pencatatan transaksi telah dilakukan dengan tepat.
- (3) Lakukan inspeksi terhadap dokumen pengiriman barang yang terjadi sebelum dan setelah tanggal neraca, guna menentukan apakah pengiriman barang memang benar-benar dapat dipercaya (*valid*).
- (4) Lakukan wawancara dengan para manager perusahaan

Dengan melaksanakan prosedur audit diatas, auditor akan memperoleh keyakinan apakah assersi eksistensi dan okuransi saldo piutang dapat dipercaya. Langkah-langkah yang ditempuh tersebut harus didokumentasikan dalam kertas kerja pemeriksaan. Komentar dan kesimpulan yang diperoleh harus disajikan dalam tickmark dibawah pemaparan informasi daftar piutang dagang.

- f. Lakukan pengujian transaksi penerimaan kas setelah tanggal neraca.

Pengujian terhadap transaksi penerimaan kas setelah tanggal neraca mempunyai peran yang sangat penting untuk mendeteksi assersi eksistensi atau okurensi, serta sejauhmana keterlengkapan assersi piutang dagang. Setoran yang dilakukan para pelanggan setelah tanggal neraca memberi petunjuk eksistensi piutang dagang secara individual. Demikian sebaliknya tagihan yang seharusnya jatuh tempo setelah tanggal neraca (masih dalam periode audit), namun tidak ada reaksi dari para pejabat perusahaan memberi indikasi adanya piutang dagang fiktif. Dalam praktik, kemungkinan adanya kolusi antara pelanggan dengan perusahaan dengan mudah dapat dilakukan. Situasi semacam ini menjadikan prosedur konfirmasi tidak bermanfaat, mengingat permintaan konfirmasi justru akan menghasilkan informasi palsu dari para pelanggan tersebut. Sebagai alternatif prosedur konfirmasi, seringkali pengujian transaksi setelah tanggal neraca memberikan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan prosedur konfirmasi.

- g. Lakukan verifikasi kecermatan daftar umur piutang.

Daftar umur piutang biasanya disajikan sebagai lampiran laporan keuangan, yang memuat rincian debitor yang terkait dengan terbentuknya piutang dagang. Auditor harus mengecek kembali kecermatan perhitungan daftar tersebut guna memperoleh keyakinan terhadap assersi saldo piutang dagang. Dalam kasus perusahaan menggunakan pengolahan data dengan komputer, pengujian terhadap kecermatan penyajian daftar tersebut diuji dengan paket software audit.

- h. Bandingkan penyajian piutang dagang dalam neraca dengan GAAP

Auditor harus benar-benar memahami standar pelaporan piutang dagang dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, menjadi tugas auditor untuk membandingkan apakah statemen yang disajikan dalam laporan keuangan telah cocok dengan standar akuntansi keuangan yang lazim diterapkan di Indonesia. Auditor perlu memperhatikan bagaimana cara-cara penyajian dan pengungkapannya, baik berupa klasifikasi maupun ungkapan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kesimpulan pembaca laporan keuangan klien. Auditor harus waspada terhadap kemungkinan piutang dagang tersebut telah dijaminakan ataupun kemungkinan telah dijual melalui anjak piutang (*factoring*).

Semua pengujian yang dilakukan dalam program di atas harus didokumentasi dalam kertas kerja pemeriksaan. Semua informasi dan kesimpulan yang diperoleh dalam menjalankan program tersebut dicatat dalam kertas kerja. Bentuk kertas kerja yang dibutuhkan dalam audit ini antara lain:

1. Daftar piutang dan umur piutang
2. Konfirmasi piutang dagang
3. Analisis kolektibilitas piutang dagang (Periksa peraga 2.5)

F. AUDIT TERHADAP PIUTANG WESSEL

Tujuan audit terhadap piutang wessel, pada dasarnya sama dengan tujuan audit terhadap piutang dagang. Ini berarti semua program audit yang berlaku dalam audit piutang dagang berlaku pula bagi pengujian saldo piutang wessel. Namun demikian sifat transaksi piutang wessel yang mempunyai landasan hukum berbeda, menyebabkan perbedaan operasionalnya pula. Perbedaan di antara keduanya, dalam piutang wessel terdapat perjanjian pembayaran bunga. Sebagai konsekuensinya, dalam pemeriksaan piutang wessel diperlukan verifikasi terhadap penghasilan bunga yang timbul dari perikatan dengan debitur. Auditor harus hati-hati, mengingat kemungkinan timbul kolusi di antara pejabat yang bertugas tidak memasukkan penerimaan bunga dari debitur sebagai penghasilan bunga, tetapi justru masuk ke kantong pejabat tersebut.

Prosedur dan teknik pemeriksaan yang digunakan untuk mendeteksi terhadap penghasilan bunga tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Lakukan konfirmasi piutang wessel beserta kewajiban bunganya. Konfirmasi piutang wessel perlu dilakukan, meskipun transaksi ini berdasarkan dokumen yang secara Juridis mengikat si debitur. Langkah ini perlu ditempuh untuk menghindarkan adanya dokumen palsu yang disiapkan oleh staf klien. Disamping itu untuk mendeteksi kemungkinan adanya kecurangan (*collution*).
2. Periksa kemungkinan adanya piutang wessel dimasukkan sebagai piutang dagang atau sebaliknya.
3. Lakukan observasi terhadap semua surat wessel klien.
4. Usut (*trace*) pencatatan transaksi piutang wessel ke dokumen pendukung.
5. Lakukan wawancara mengenai kebijaksanaan akuntansi terhadap penghasilan bunga.

Kelima langkah tersebut melengkapi program audit yang sama dengan audit terhadap piutang dagang. Bentuk kertas kerja yang dibutuhkan dalam pemeriksaan piutang wessel, antara lain:

1. Daftar piutang wessel dan bunganya, kertas kerja ini menunjukkan informasi sbb:
 - a. Kapan transaksi tersebut terjadi,
 - b. Nama debitur beserta alamatnya,
 - c. Jumlah rupiah transaksi piutang wessel,
 - d. Besarnya bunga,
 - e. Analisis keyakinan akuntan pemeriksa terhadap saldo tersebut.
 - f. Langkah-langkah yang telah dibuat.
2. Jawaban surat konfirmasi terhadap piutang wessel
3. Analisis kolektibilitas piutang wessel

Berbagai teknik audit dan prosedur yang digunakan dalam audit piutang wessel adalah sama dengan audit terhadap piutang dagang. Oleh karena itu berbagai prosedur audit tersebut tidak perlu dibahas lagi.

**Piutang Dagang berdasar Saldo dan Umurnya
(dalam ribuan rupiah)
31 Desember 1993**

W/P nomor tgl
 Disiapkan tgl
 Diperiksa tgl

| No | Nama Perusahaan | Persentase Saham | Jumlah Saham | Kurs Saham | Total Nilai Saham |
|----|-----------------------|------------------|--------------|------------|--|
| 1 | ACE Manunggal | 2,528 | 2016 | 12,425 | 1 c 16,970 N ↓ 11,240 Ø |
| 2 | Bangkit Motor PT | | 15,823 | 10,425 | 2 c 26,248 N ↓ 18,412 Ø |
| 3 | Bangkalan Jaya | 1,888 | 723 | 343 | 3 c 10,994 N ↓ 7,430 Ø |
| 4 | Hingga Motor PT | 501 | 7,401 | 33,450 | 4 c 73,577 N ↓ 60,243 Ø |
| 5 | Hartono Constructions | | 3,318 | 4,225 | 5 c 8,043 N ↓ 8,043 |
| 6 | Hastin Bahari | | | 4,321 | 4,321 N ↓ 4,321 |
| 7 | Indah Kita Paper | 1,225 | 1,048 | 3,274 | 5,547 N ↓ 5,547 4,240 |
| 8 | Ibrahim GMBH | 7,799 | 20,245 | 40,214 | 6 c 68,258 N ↓ (1,286) 66,972 60,274 Ø |
| 9 | Kalem Sejahtera | 2,285 | 4,830 | 10,240 | 7 c 17,355 N ↓ 17,355 11,248 Ø |
| 10 | Rajawali Unggul | 2,615 | 12,025 | | 8 p 14,640 N ↓ 14,640 4,218 |
| 11 | Toyoza Resto | 4,040 | 2,241 | 4,224 | 9 c 10,505 N ↓ 10,505 6,425 Ø |
| 12 | Matra Motor | | 3,024 | 2,124 | 5,148 N ↓ 5,148 4,012 |
| 13 | National Electrics | 3,825 | 571 | 9,247 | 10 c 25,067 N ↓ 25,067 8,417 Ø |
| 14 | Jumlah | 8,829 | 38,598 | 93,085 | 146,161 285,387 196,159 |

☐ Tidak bisa di konfirmasi
☒ Ditelusur ke buku pembantu
☒ Cek penjualan kebawah dan kesamping
☒ Ditelusur ke jurnal penerimaan kas
☐ dan di uji ke semi house advice

© Credit memo 12/1 '94
A JE. 7 dilhat daftar jurnal
Db. Sales Return
Cr. Account Receivable > 1.286.00

SOAL BAB 2

Saudara diminta untuk memberikan tanggapan terhadap pernyataan-pernyataan berikut ini, dan memberikan penilaian apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Berikan tanda S apabila pernyataan tersebut saudara anggap salah sedangkan tanda B apabila benar.

Soal Kelompok A

- 1. Siklus pendapatan ditinjau dari sudut pandang auditor meliputi penanganan transaksi penjualan atau pemberian jasa kepada pihak lain sampai dengan realisasi pendapatan menjadi modal operasional.
- 2. Tujuan auditor melakukan konfirmasi terhadap saldo piutang dagang kepada para debitur perusahaan adalah untuk menentukan: (a) eksistensi saldo piutang, (b) kecermatan penyajian saldo piutang, dan (c) kesempurnaan asseri manajemen dalam laporan keuangan.
- 3. Manajemen bertanggungjawab terhadap asseri piutang dagang dalam laporan keuangan, oleh karena itu pembuatan daftar saldo piutang beserta penjelasan mengenai rincian saldo-saldo tersebut oleh klien dengan maksud mempermudah proses pengauditan.
- 4. Fungsi bagian penagihan dalam menjalankan kewajibannya antara lain mempersiapkan dan mengirimkan invoice penjualan kepada klien apabila barang-barang yang dipesan pelanggan telah dikirimkan dengan disertai bukti pengiriman barang (faktur pengiriman barang).
- 5. Dalam rangka mencapai tujuan audit untuk penilaian atau alokasi piutang dagang, auditor bermaksud memperoleh keyakinan bahwa semua piutang dagang yang disajikan dalam neraca merupakan tagihan netto yang benar-benar dapat direalisasi dari para pelanggan.
- 6. Penerimaan kas merupakan aktivitas operasional yang tidak tercakup dalam siklus pendapatan, terkecuali bila penerimaan tersebut merupakan realisasi pelunasan utang dari para pelanggan.
- 7. Dalam rangka penanganan pengiriman barang kepada konsumen, auditor mungkin akan menemukan kesalahan penanganan transaksi yang menunjukkan bahwa jumlah barang yang dikirim ternyata tidak sama dengan barang yang dipesan pelanggan, untuk mendeteksi kemungkinan tersebut auditor akan melakukan pengujian apakah bukti-bukti transaksi penjualan diperiksa oleh pihak yang independen.
- 8. Eksistensi atau peristiwa yang membentuk transaksi siklus pendapatan mencerminkan bahwa: (a) semua catatan transaksi penjualan mencerminkan jumlah barang-barang yang dikirim selama periode yang diaudit, (b) pencatatan transaksi penerimaan kas mencerminkan penerimaan periode yang diaudit baik yang bersumber dari penjualan tunai maupun penjualan kredit, dan (c) pencatatan saldo piutang dagang mencerminkan tagihan kepada pelanggan pada saat tanggal neraca.
- 9. *Aged trial balance*, adalah daftar saldo piutang yang menunjukkan jangka waktu tagihan yang belum terlunasi untuk masing-masing pelanggan.

- 10. Auditor memilih penggunaan teknik konfirmasi negatif untuk memperoleh penegasan dari pihak ketiga apabila: (1) saldo piutang dagang untuk masing-masing pelanggan berjumlah relatif material, (b) jumlah pelanggan (distributor) tidak banyak, dan (c) aspek lingkungan operasi perusahaan mendukung penggunaan teknik tersebut.

Soal Kelompok B

Soal pilihan ganda: pilihlah jawaban yang paling benar di antara empat alternatif jawaban yang tersedia. Apabila tidak ada jawaban yang benar pilihlah alternatif jawaban E dalam lembar jawaban Saudara.

1. Penelusuran *bills of lading* ke *sales invoice* bertujuan untuk memperoleh pembuktian bahwa:
 - a. Pengiriman barang-barang kepada konsumen telah dibuatkan invoice.
 - b. Pengiriman kepada konsumen telah dicatat sebagai penjualan
 - c. Pencatatan penjualan menunjukkan adanya pengiriman
 - d. Invoice penjualan telah dikirim
2. Penghapusan terhadap kerugian piutang dalam siklus pendapatan menghendaki adanya otorisasi dari pejabat yang berwenang, pejabat tersebut adalah:
 - a. Bendaharawan (*treasurer*)
 - b. Kepala Bagian Penjualan
 - c. Bagian Billing
 - d. Kepala bagian Piutang
3. Auditor harus mempertimbangkan diskripsi pekerjaan kasir yang berkaitan dengan kewajiban yang saling melengkapi (mengganti) yang berlaku pada lingkungan manajemen masyarakat barat (USA), jika kasir menerima *remittance* dari *mailroom* dan juga harus menyiapkan:
 - c. *daily deposits slip*
 - a. pembuatan daftar check secara individual
 - b. bank rekonsiliasi bulanan
 - d. *remittance advice*
4. Dalam rangka melakukan updating file piutang dagang berkomputer, yang manakah diantara pernyataan berikut yang menunjukkan penggunaan *batch control* untuk memverifikasi kecermatan *posting cash remittance* ?
 - a. jumlah penjualan bersih
 - b. jumlah penyetoran kas dikurangi potongan yang diberikan kepada konsumen
 - c. jumlah penyetoran kas ditambah potongan yang diberikan kepada konsumen
 - d. jumlah penjualan bersih ditambah potongan yang diberikan kepada konsumen
5. Jika auditor ingin melakukan penelaahan terhadap *credit rating* para pelanggan terhadap tunggakan pelanggan, ini bermaksud untuk membuktikan asersi manajemen tentang,
 - a. presentation and disclosure
 - b. eksistensi dan peristiwa
 - c. penilaian atau alokasi
 - c. hak-hak atau kewajiban

-
-
6. Dalam suatu sistem pengendalian intern yang baik, petugas yang ditugasi menjalankan fungsi evaluasi apakah pelanggan boleh menunda pembayaran adalah:
 - a. Bagian penjualan.
 - b. Bagian Kredit.
 - c. Bagian penagihan.
 - d. Bagian Kas Masuk.
 7. Berikut ini daftar kemungkinan kesalahan dalam penyajian piutang dagang dalam laporan keuangan oleh klien. Yang tidak termasuk dalam daftar kesalahan tersebut adalah:
 - a. Prinsip akuntansi yang lazim tidak diterapkan secara konsisten.
 - b. Ketidaktepatan pisah-batas (cutoff) pencatatan transaksi.
 - c. Perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh para karyawan klien tidak cermat.
 - d. Sistem pengendalian intern yang tidak dipatuhi.
 8. Kesalahan dalam penanganan transaksi penjualan terjadi karena beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah:
 - a. Order penjualan mungkin tidak cermat penghitungan kuantitas maupun pengetikan jenis barangnya.
 - b. Penjualan dengan risiko kredit yang tidak diperhitungkan.
 - c. Penjualan tidak disertai dengan bukti penyeteroran uang dari perusahaan.
 - d. Kegiatan penjualan ditangani oleh beberapa orang yang ahli dalam bidangnya secara bersama-sama.
 9. Praktek yang sehat dalam suatu siklus pendapat apabila memenuhi beberapa aturan berikut. Kecuali:
 - a. Surat order pengiriman bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh bagian order penjualan.
 - b. Penggunaan *prenumbered credit memmos* dipertanggungjawabkan oleh bagian sales order.
 - c. Faktur penjualan bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh bagian penagihan.
 - d. Secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan rekening kontrol piutang dalam buku besar.
 10. Tujuan evaluasi terhadap struktur pengendalian intern piutang dagang, adalah:
 - a. Mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh klien.
 - b. Menentukan apakah SPI telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga informasi yang dihasilkan benar-benar dapat dipercaya sebagai dasar menentukan risiko pengendalian dan risiko deteksi saldo piutang dagang.
 - c. Guna memenuhi kode etik akuntan Indonesia sehingga auditor terhindar dari dakwaan malpraktik.
 - d. Mengurang biaya pemeriksaan.

-
-
11. Penulusuran *bill of lading ke invoice* penjualan menghasilkan pembuktian, bahwa:
 - a. Pengiriman kepada pelanggan telah di-invoice-kan
 - b. Pengiriman kepada pelanggan telah dicatat sebagai penjualan
 - c. Pencatatan penjualan telah dikirimkan
 - d. Invoice penjualan telah dikirimkan
 12. Akibat-akibat yang mungkin terjadi terhadap prosedur dan kebijakan pengendalian intern yang tidak efektif dalam siklus pendapatan adalah:
 - a. pencatatan transaksi yang menyalahi aturan dalam rekening pembantu akan mengakibatkan pengiriman barang tertunda.
 - b. Upaya menghilangkan dokumen pengiriman tidak akan terdeteksi, yang akan menyebabkan penyajian yang lebih rendah dalam rekening sediaan.
 - c. Persetujuan akhir terhadap kredit memo oleh pejabat di bagian penjualan memungkinkan para pegawai merancang defalkasi.
 - d. Berbagai bentuk transaksi fiktif akan dicatat, menyebabkan rekening pendapatan menjadi lebih rendah dan pencatatan piutang menjadi lebih tinggi.
 13. Prosedur pemberian persetujuan yang layak dalam siklus pendapatan, biasanya memberikan persetujuan terhadap penghapusan piutang ragu-ragu oleh pejabat dalam departemen :

| | |
|-------------|-------------------|
| a. treasuri | b. penjualan |
| c. billing | d. piutang dagang |
 14. Auditor harus mempertimbangkan diskripsi pekerjaan kasir terhadap isi kewajiban yang melengkapi apabila kasir menerima remittance dari mailroom dan juga mempersiapkan:

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| a. daftar cek individual | b. bank rekonsiliasi bulanan |
| c. slip setoran harian | d. remittance advices |
 15. Pertanyaan berikut mengenai Pengendalian intern. Tunjukkan pertanyaan mana yang harus dijawab TIDAK, apabila pengungkapan bahwa kasir mengalihkan penerimaan di konter dari pelanggan untuk digunakan dan dihapuskan dari piutang sebagai piutang ragu-ragu ?
 - a. Apakah selalu dibuat daftar pemerincian piutang dagang secara periodik oleh pejabat yang bertanggungjawab ?
 - b. Apakah pencatatan dalam jurnal disetujui oleh pejabat yang bertanggungjawab ?
 - c. Apakah penerimaan-penerimaan diberikan secara langsung oleh pejabat yang bertugas membuka surat ?
 - d. Apakah remittance advice, surat-surat, ataupun amplop yang diterima perusahaan telah dipisahkan dan diberikan secara langsung kepada bagian akuntansi ?
 16. Dalam meng-update file piutang dagang berkomputer, manakah yang menggunakan batch control untuk memverifikasi kecermatan posting cash remittance ?
 - a. Jumlah penjualan bersih

-
-
- b. Penjumlahan setoran kas dikurangi dengan potongan yang diberikan kepada pelanggan
 - c. Penjumlahan setoran kas ditambah dengan potongan yang diberikan kepada pelanggan
 - d. Penjumlahan penjualan bersih ditambah dengan potongan yang diberikan kepada pelanggan
17. Auditor bermaksud melakukan review terhadap rating kredit dengan piutang dagang yang diliquent (?) dengan maksud memperoleh pembuktian terhadap pernyataan manajemen mengenai:
- a. presentasi dan pengungkapannya
 - b. eksistensi atau okurensinya
 - c. hak-hak dan kewajiban-kewajibannya
 - d. peneliaian atau alokasinya
18. Auditor melakukan penelaahan terhadap cut-off penjualan yang dilakukan klien, langkah ini dimaksudkan untuk mendeteksi terhadap:
- a. Kemungkinan adanya penjualan tahun ini yang tidak dicatat.
 - b. Adanya Lapping terhadap piutang dagang di akhir periode.
 - c. Barang-barang tidak diotorisasi yang dikembalikan sebagai kredit.
 - d. pengeseran potongan penjualan.

Soal kelompok C

Dari kedua pernyataan tersebut, saudara diminta menentukan kategori berikut:

- A. Pernyataan a benar dan pernyataan b benar dan keduanya merupakan satu ide yang dapat dirangkaikan.
 - B. Pernyataan a benar dan pernyataan b benar dan keduanya tidak merupakan satu ide yang dapat dirangkaikan.
 - C. pernyataan a salah dan pernyataan b benar
 - D. Pernyataan a benar dan pernyataan b salah
1. a. Konfirmasi saldo piutang dagang merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan akuntan memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang bebas.
- b. Memperoleh informasi dari pihak lain dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada para debitur.
2. a. Siklus pendapatan adalah siklus akuntansi yang meliputi beberapa subsistem yang terdiri dari sistem penjualan, sistem retur penjualan, sistem penerimaan kas dan sistem penghapusan piutang.
- b. Pengujian kepatuhan terhadap siklus pendapatan dilakukan dengan membuat kuis sistem pengendalian intern dan untuk selanjutnya dievaluasi mengenai kelayakannya.
3. a. Dokumen sumber dalam sistem penerimaan kas terdiri atas surat order pengiriman, surat muat, surat perintah pembayaran, memo kredit dan bukti kas masuk.

-
-
- b. Sistem penjualan memerlukan dokumen pendukung yang terdiri dari surat order pengiriman, *bill of lading* dan laporan penerimaan barang.
 4.
 - a. Pengujian analitik dilakukan dengan mengumpulkan bukti pemeriksaan yang berupa perbandingan atau ratio untuk menguji kewajaran saldo-saldo rekening.
 - b. Perbandingan dan ratio dalam rangka pengujian substantif piutang dagang dilakukan dengan membuat (a) perbandingan dengan ratio industri, (b) perbandingan dengan total penjualan selama periode audit, dan (c) utang dagang yang timbul dari aktivitas operasional perusahaan.
 5.
 - a. Pengujian kepatuhan merupakan prosedur pemeriksaan yang dirancang untuk melakukan verifikasi apakah sistem pengawasan intern klien telah dilaksanakan dengan layak atau tidak.
 - b. Audit terhadap saldo piutang dagang tidak mempunyai relevansi dengan melakukan penelitian terhadap kebenaran penyajian saldo-saldo rekening perusahaan.
 6.
 - a. Verifikasi cutoff merupakan salah satu bentuk dari pemeriksaan substantif dalam audit terhadap saldo piutang pada tanggal neraca.
 - b. Verifikasi cutoff harus dilaksanakan oleh auditor sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
 7.
 - a. Siklus pendapatan adalah siklus akuntansi yang terdiri dari sistem penjualan, sistem retur penjualan, sistem penerimaan kas dan sistem penghapusan piutang.
 - b. Pengujian substantif terhadap sistem penerimaan kas pada dasarnya merupakan pengujian kepatuhan yang dilakukan dengan membuat kuis sistem pengendalian intern dan untuk selanjutnya dievaluasi mengenai kelayakannya.
 8.
 - a. Dokumen sumber yang secara formal harus ada dalam sistem penjualan terdiri dari surat order pengiriman, surat muat, faktur penjualan, memo kredit dan bukti kas masuk.
 - b. Sistem penjualan memerlukan dokumen pendukung yang terdiri dari surat order pengiriman, *bill of lading* dan laporan penerimaan barang.
 9.
 - a. Auditor tidak bertanggungjawab terhadap kecurangan-kecurangan yang sedang dilakukan oleh karyawan klien pada saat dilakukan penghitungan fisik kas yang ada ditangan kashir.
 - b. Dalam hal auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup terhadap kecurangan pegawai klien dalam suatu pengauditan, maka auditor dianggap melanggar kode etik akuntan Indonesia.
 10.
 - a. Dalam rangka audit terhadap saldo piutang dagang, auditor harus melakukan konfirmasi yang dalam praktiknya diserahkan pada masing-masing auditor untuk memilih teknik apa yang dianggapnya tepat.
 - b. Auditor memilih penggunaan teknik konfirmasi negatip untuk memperoleh penegasan dari pihak ketiga apabila: (1) saldo piutang dagang untuk masing-masing pelanggan berjumlah relatif material, (b) jumlah pelanggan (distributor) tidak banyak, dan (c) aspek lingkungan operasi perusahaan mendukung penggunaan teknik tersebut.

Bab 3

Audit Terhadap Siklus Pengeluaran

DALAM BAB INI AKAN DIBAHAS:

1. Identifikasi tujuan audit terhadap transaksi siklus pengeluaran dan saldo yang tertentu dari transaksi tersebut.
2. Menjelaskan berbagai fungsi dan struktur pengendalian intern yang disarankan untuk penanganan transaksi-transaksi pembelian dan pembayaran kas.
3. Menjelaskan bagaimana standar pelaksanaan pekerjaan lapangan yang kedua dalam transaksi pembelian dan pengeluaran kas.
4. Memberi petunjuk berbagai faktor yang dipertimbangkan terhadap tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk property, plant, equipment, dan utang dagang.
5. Bagaimana mendesign dan melakukan program audit substantansi terhadap property, plant beserta equipment, dan utang dagang.
6. Melakukan identifikasi berbagai hubungan *financial statement assertion(s)* dengan pengujian substantansi.

Dalam pembahasan bab ini perlu diperhatikan peristilahan teknis yang berkaitan dengan siklus pengeluaran berikut ini:

- *expendicture*, diterjemahkan dengan istilah pengeluaran.
- *plant and equipment*, diterjemahkan dengan istilah pabrik dan perlengkapan.
- *account payable*, diterjemahkan dengan istilah utang dagang.
- *current liabilities*, diterjemahkan dengan istilah utang lancar.

Berbagai istilah tersebut diterjemahkan dari pengertian jargon bahasa Inggris. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan istilah (jargon) akuntansi, dalam bahasa Indonesia tidak tersedia istilah teknis yang cukup sehingga dalam disiplin akuntansi seringkali sulit menemukan padan-kata yang tepat. Hal ini disebabkan dalam bahasa Indonesia tidak mempunyai latar belakang budaya akuntansi. Sebagai akibatnya terpaksa dibentuk peristilahan baru dengan cara mengadopsi istilah teknis yang asli dalam peristilahan teknis akuntansi. Dengan kesamaan pengertian tersebut pembaca buku ini akan mempunyai wawasan dan pemahaman yang sama.

A. BENTUK SIKLUS PENGELUARAN

Siklus pengeluaran meliputi aktivitas yang berhubungan dengan akuisisi dan pembayaran *plant asset*, barang-barang dan jasa-jasa. Dalam siklus ini terdapat dua transaksi, yaitu transaksi pembelian dan transaksi pembayaran kas. Transaksi pembayaran gaji sebetulnya merupakan siklus pengeluaran, mengingat transaksi tersebut mempunyai karakteristik yang spesifik dibahas secara terpisah dalam bab 4. Demikian halnya transaksi yang berkaitan dengan investasi pada surat-surat berharga akan dibahas dalam bab tersendiri.

Transaksi pembelian dan pengeluaran kas mempengaruhi sejumlah rekening sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Persediaan barang dagangan | 6. Kembalikan pembelian |
| 2. Persediaan bahan baku | 7. Potongan pembelian |
| 3. Biaya dibayar dimuka | 8. Berbagai jenis biaya |
| 4. Plant asset | 9. Utang dagang |
| 5. Asset lain-lain (misal: aktiva tak berwujud) | 10. Kas |

Kesepuluh rekening tersebut di atas terpengaruh oleh aktivitas transaksi pembelian dan pengeluaran kas. Di antara kesepuluh rekening tersebut, hanya dua rekening (kembalikan pembelian dan potongan pembelian) saja yang dilaporkan dalam statemen penghasilan. Kenyataan ini menunjukkan pengaruh terbesar transaksi dalam siklus ini adalah perubahan komposisi aktiva dan kewajiban perusahaan. Kesemua ini akan tercermin dalam Neraca.

1. Tujuan Audit dalam Siklus Pengeluaran

Tujuan spesifik audit dalam setiap siklus perlu dirumuskan agar dapat menjadi pedoman bagi staf auditor dalam menjalankan pekerjaannya di lapangan. Pentingnya perumusan tujuan ini, guna mengantisipasi kemungkinan pelaksanaan audit tidak sesuai dengan program

audit yang dirancang sebelumnya. Para pelaksana audit di lapangan dapat mengantisipasi dengan menyesuaikan aktivitasnya dengan rumusan tujuan audit yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Tujuan audit dalam siklus pengeluaran yang terbentuk dari pernyataan eksplisit manajemen, antara lain:

a. Eksistensi dan Okurensi

- Pencatatan utang dagang merupakan jumlah yang menjadi kewajiban peru-sahaan pada tanggal neraca.
- Pencatatan plant asset menunjukkan aktiva yang benar-benar digunakan dalam operasi pada tanggal neraca.
- Pencatatan transaksi pembelian menunjukkan bahwa barang-barang, aktiva produktif, dan jasa-jasa yang diterima dalam periode yang diaudit.
- Pencatatan transaksi pengeluaran kas benar-benar terjadi untuk periode yang diaudit dan benar dibayarkan kepada suplier dan kreditor.

b. Kesempurnaan

- Utang dagang meliputi keseluruhan jumlah yang menjadi tanggungjawab perusahaan kepada penjual barang-barang atau pemberi jasa pada tanggal neraca.
- Penambahan rekening-rekening *property*, *plant*, dan *equipment* terbentuk dari transaksi yang terjadi dalam periode yang tercakup dalam laporan keuangan.
- Pencatatan pembelian dan pengeluaran kas meliputi semua transaksi yang terjadi dalam periode yang tercakup dalam laporan keuangan.

c. Hak dan Kewajiban

- Utang dagang adalah kewajiban perusahaan yang sah pada tanggal neraca.
- Perusahaan memang secara sah mempunyai hak terhadap semua *property*, *plant*, and *equipment* pada saat tanggal neraca.

d. Penilaian atau Alokasi

- Utang dagang yang dinyatakan dalam neraca jumlahnya dinilai dengan benar.
- Semua aktiva tetap (kecuali Tanah) dinyatakan dalam neraca sebesar kos dikurangi dengan akumulasi depresiasi.
- Pencatatan semua biaya-biaya dalam statemen penghasilan, telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang lazim diterapkan di Indonesia.

e. Penyajian dan Pengungkapan

- Utang dagang dan *plant assets* telah diidentifikasi dan disajikan dengan layak dalam Neraca.
- Pengungkapan informasi yang dipandang penting telah dinyatakan dalam laporan keuangan dengan layak.

Tujuan tersebut di atas secara rinci dijabarkan dalam program audit baik dalam program pengujian kepatuhan maupun program pengujian subtansi. Sebelum auditor merumuskan program pengujian terlebih dahulu harus dipahami berbagai risiko yang timbul dalam

pengujian siklus ini. Pemahaman terhadap risiko audit, menyebabkan auditor dapat merumuskan strategi audit yang tepat.

2. Materialitas Risiko Audit, dan Strategi Audit

Transaksi dalam siklus pengeluaran kadangkala tidak hanya berpengaruh secara individual pada hanya satu rekening saja, tetapi dapat berpengaruh pada lebih satu transaksi. Kemungkinan lain adalah rekening-rekening tersebut terbentuk dari siklus yang lainnya, sehingga auditor hanya akan menemukan risiko deteksi yang sangat rendah pada siklus ini tetapi sebetulnya dalam siklus lain terdapat tingkat risiko yang semakin tinggi. Faktor-faktor risiko melekat yang berhubungan dengan transaksi-transaksi siklus pengeluaran meliputi:

- a. Seberapa banyak volume transaksi.
- b. Kemungkinan adanya pembelian dan pengeluaran kas yang tidak diotorisasi.
- c. Kemungkinan adanya pembelian aktiva yang tidak memadai.
- d. Dalam kasus kapitalisasi kos atau penentuan biaya periodik harus mempertimbangkan terhadap aspek kesinambungan dalam akuntansinya.

Ke empat faktor tersebut sangat menentukan seberapaakah tingkat risiko melekat dalam transaksi siklus ini. Menghadapi kemungkinan tersebut, auditor harus merumuskan strategi dengan menggabungkan tingkat risiko pengendalian yang rendah dan pengujian substansi dalam siklus pengeluaran.

B. PEMAHAMAN TERHADAP STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN

Auditor harus memahami ketiga aspek struktur pengendalian intern yang ada dalam transaksi siklus pengeluaran, yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian. Pemahaman tersebut sangat berguna dalam menentukan strategi audit dalam rangka pengujian substansi.

1. Lingkungan Pengendalian

Auditor harus memahami struktur organisasi klien yang berkaitan dengan aktivitas siklus pengeluaran ini. Sebagai contoh: semua proses pembelian barang-barang dibawah kendali Direktur Operasi, pencatatannya dibawah kendali Kontroler, sedangkan proses pengeluaran kas dibawah kendali Direktur Keuangan. Demikian halnya bagaimana pengaturan pembelian aktiva tetap (*capital expenditures*) dan kebijaksanaan investasi strategis lainnya akan dipertimbangkan bagaimana pelaksanaannya. Untuk memperoleh pemahaman terhadap bagan organisasi, auditor harus melakukan wawancara (*inquiry*) kepada manajemen.

Metode pengendalian manajemen yang diterapkan dalam siklus pengeluaran meliputi penggunaan budget. Beberapa perusahaan menyiapkan anggaran kas, biaya operasi, dan pengeluaran modal. Risiko pengendalian akan menjadi berkurang apabila manajemen telah menyelenggarakan berbagai metode yang memadai dalam rangka mengembangkan anggaran dalam operasinya. Adanya berbagai bentuk laporan seperti adanya laporan variasi antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya, menunjukkan bahwa klien telah berhasil dalam

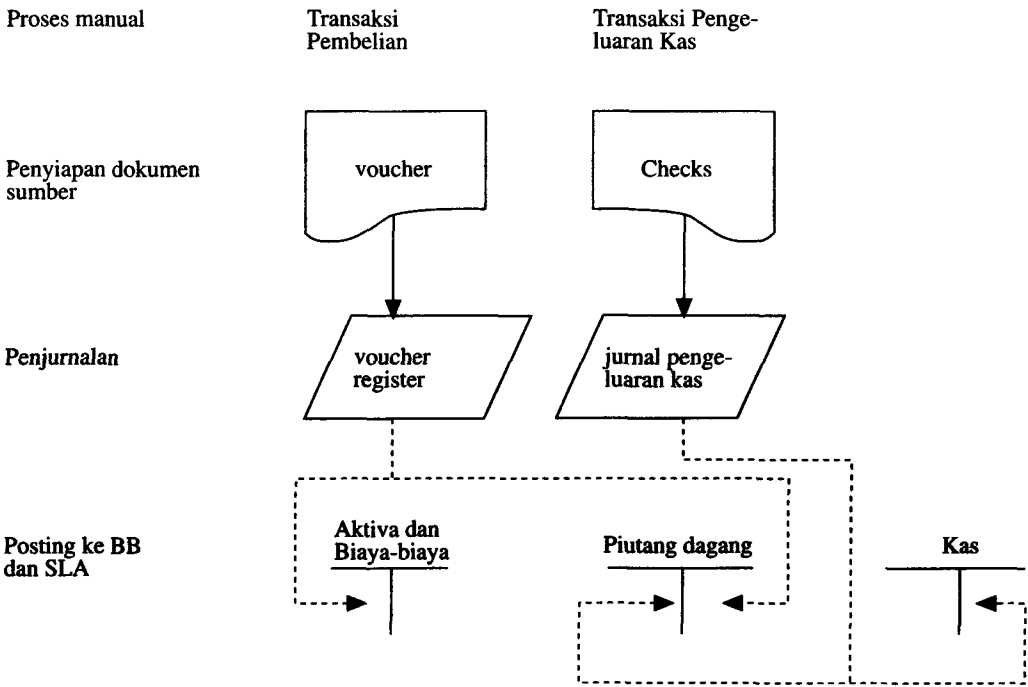
mengembangkan sistem operasi anggaran. Hal ini menjadikan auditor berkeyakinan adanya risiko melekat dengan derajat yang rendah.

Adanya praktik serta kebijaksanaan personalia yang pelaksanaannya memberi jaminan hanya personel yang kompeten dan mempunyai integritas saja yang ditugasi menangani transaksi pembelian dan pengeluaran kas. Dalam berbagai kasus perusahaan menunjukkan, petugas-petugas yang menangani transaksi pembelian tidak loyal dan mempunyai integritas yang rendah pada perusahaan. Sebagai akibatnya perusahaan dipaksa membeli barang-barang dengan kualitas rendah, adanya pembelian fiktif, adanya pembelian barang yang tidak diotorisasi, dan lain-lain. Kebijakan personalia yang tidak tepat cenderung mengakibatkan meningkatnya risiko pengendalian.

2. Sistem Akuntansi

Pemahaman terhadap sistem akuntansi menyebabkan auditor harus mempelajari metode pengolahan data, dokumen-dokumen kunci, serta catatan yang digunakan dalam penanganan transaksi siklus pengeluaran. Untuk itu auditor harus mempelajari manual akuntansi, bagan alir sistem akuntansi, dan melakukan wawancara dengan petugas bagian akuntansi untuk mengetahui proses pengolahan transaksi dalam siklus pengeluaran. Gambar 3.1 di halaman berikut ini menunjukkan bagaimana arus dokumen dan bagan prosedur penangan transaksi dalam siklus pengeluaran tersebut.

Peraga 3.1 Gambaran Transaksi Pemrosesan Siklus Pengeluaran (manual systems)



3. Prosedur Pengendalian

Auditor harus memahami bagaimana kecenderungan ke lima kategori prosedur pengendalian dalam operasi transaksi siklus pengeluaran ini. Kelima kategori tersebut antara lain: adanya otorisasi yang memadai, (b) adanya pemisahan tugas, (c) adanya dokumen dan catatan akuntansi, (d) adanya akses ke arah pengendalian, dan (e) pengecekan yang dilakukan oleh personel yang independen. Auditor harus melakukan evaluasi apakah prosedur pengendalian dalam perusahaan benar-benar telah berjalan dengan baik. Prosedur pengendalian yang tidak memenuhi ke lima kriteria tersebut mempunyai kecenderungan risiko audit yang tinggi.

C. PENGENDALIAN INTERN TERHADAP TRANSAKSI PEMBELIAN

Dalam subbab ini akan dibahas bagaimana dokumen-dokumen kunci serta catatan akuntansi yang akan digunakan dalam transaksi yang terkait dengan proses pembelian. Auditor dalam mempelajari proses transaksi ini bertujuan untuk (1) pemahaman terhadap struktur pengendalian intern, dan (2) bagaimana akses terhadap risiko pengendalian dalam transaksi pembelian.

1. Dokumen-dokumen Kunci dan Catatan Akuntansi

Semua dokumen kunci dan catatan akuntansi yang dibutuhkan dalam siklus ini terlihat dalam bagan alir yang disajikan dalam peraga 3.1 di halaman 72. Dokumen-dokumen kunci dan catatan akuntansi yang digunakan dalam siklus ini antara lain:

- a. Permintaan pembelian (*purchase requisition*), yaitu dokumen permintaan pembelian dari departemen yang membutuhkan barang/jasa. Dokumen ini dibuat oleh pimpinan departemen/bagian yang membutuhkan diajukan kepada Bagian Pembelian.
- b. Perintah Pembelian (*purchase order*), yaitu perintah untuk membeli suatu barang atau jasa-jasa dari pihak lain. Perintah pembelian dikeluarkan oleh pimpinan bagian pembelian. Biasanya untuk pembelian dengan risiko investasi yang tinggi diputuskan oleh pejabat dengan level direksi.
- c. Laporan Penerimaan barang (*receiving report*), yaitu laporan yang dibuat oleh bagian penerimaan barang. Laporan ini dibuat beberapa rangkap dan disampaikan/ diinformasikan kepada departemen/bagian yang membutuhkan, bagian pembelian, dan arsip.
- d. Invois suplier (*vendor invoice*), adalah dokumen yang dikirim oleh supplier yang berisi pemberitahuan mengenai pengiriman barang yang dipesan. Atas dasar dokumen ini bagian pembelian mempersiapkan proses pembayaran kepada supplier tersebut. Bagian akuntansi menggunakan dokumen ini sebagai dasar pencatatan transaksi pembelian dan pengakuan adanya utang.
- e. Surat perintah pembayaran (*voucher*), adalah dokumen yang dipersiapkan oleh bagian utang (pembelian) guna membayar kewajiban perusahaan yang telah jatuh tempo. Dokumen ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (setingkat direksi, atau eselon satu) yang berisi perintah kepada bagian keuangan yang berisi perintah membayar sejumlah uang kepada supplier.

-
-
- f. Ringkasan surat perintah pembayaran (*voucher summary*), adalah laporan yang berisi ringkasan pembayaran yang telah dilakukan.
 - g. *Voucher register*, adalah daftar yang berisi perintah pembayaran yang akan dilakukan oleh bagian keuangan. Voucher register disiapkan oleh bagian keuangan berdasarkan perintah pembayaran yang telah diotorisasi.
 - h. *Open purchase order file*, merupakan arsip perintah pembelian kepada pelanggan, yang pelayanan jasa ataupun barang yang dipesan belum direliasi.
 - i. *Purchase transaction file*, arsip yang berisi data untuk voucher yang disetujui untuk pembelian yang telah diterima.
 - j. *Unpaid voucher file*, arsip yang berisi voucher yang telah disetujui beserta dokumen pendukungnya untuk barang-barang dan jasa-jasa yang telah diterima dan dicatat.
 - k. *Paid voucher file*, Adalah arsip untuk semua voucher yang telah dibayar.
 - l. *Account payable master file*, file komputer yang berisi data voucher yang telah disetujui dan belum dibayar.

2. Berbagai Fungsi yang Terkait

Semua transaksi yang berkaitan dengan penanganan pembelian terdiri dari beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemohon barang-barang dan jasa-jasa, fungsi ini berkaitan dengan inisiatif permintaan terhadap barang-barang ataupun jasa. Permintaan dilakukan oleh bagian lain yang membutuhkan bahan-bahan untuk proses produksi atau operasi lainnya. Permintaan pembelian biasanya diotorisasi oleh pejabat atasan dengan memperhatikan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. Penyiapan *purchase order*, fungsi ini berkaitan dengan penyiapan order pembelian yang dilakukan oleh bagian pembelian. Biasanya setiap perusahaan membangun kebijaksanaan yang spesifik dalam mengamankan barang-barang yang dibelinya. Informasi yang ditulis dalam formulir perintah harus diisi dengan teliti dan cermat mengenai jumlah barang, jenis barang kualitas barang, dan lain sebagainya.
- c. Penerimaan barang-barang, fungsi ini berkaitan dengan penerimaan barang-barang yang dikirim dari para suplier. Dalam melakukan penerimaan barang, kepala bagian penerimaan mencocokkan perintah pembelian dengan faktur pengiriman barang dan hasil pengecekan barang-barang yang diterimanya. Penerimaan barang harus memperhatikan dengan cermat mengenai kualitas barang yang diterimanya. Semua barang yang diterima dilaporkan dalam dokumen Laporan Penerimaan Barang (LPB), dengan formulir yang dibuat dengan bernomor urut tercetak.
- d. Penyimpanan barang-barang yang diterima, fungsi ini berkaitan dengan aktivitas penyimpanan dan penjagaan barang-barang yang dimiliki di gudang perusahaan. Kepala bagian gudang harus menjaga agar personel yang ditugaskan saja yang diijinkan masuk ke dalam lokasi gudang.
- e. Penyiapan pembayaran voucher, fungsi ini berhubungan dengan penyiapan dokumen pembayaran kepada supplier, dan disiapkan oleh bagian utang dagang. Pengendalian terhadap fungsi ini meliputi:

- * Kesesuaian antara receiving report dan purchase order dengan vendor invoice.
- * Kecermatan penghitungan invoice dari supplier.
- * Adanya persetujuan dari pejabat atasan yang berwenang.
- * Adanya pengecekan oleh pihak yang independen

Pembuatan voucher didasarkan pada dokumen-dokumen pendukung yang antara lain, laporan penerimaan barang, Perintah Pembelian, dan Permintaan Pembelian.

- f. Pencatatan utang, adalah fungsi akuntansi yang mencatat semua transaksi pembelian barang atau jasa-jasa. Persoalan yang harus diperhatikan, apakah pencatatan barang-barang yang dibeli dilakukan oleh pihak yang independen.

3. Pemahaman terhadap Pengendalian Intern dan Pendokumentasiannya.

Dengan memperhatikan sistem pengendalian tersebut di atas, auditor harus merumuskan risiko pengendalian guna merumuskan strategi audit substansi. Untuk setiap fungsi dalam proses pembelian mengandung potensi salah saji, yang oleh karenanya harus diidentifikasi kemungkinan pengendalian yang harus dilakukan klien. Disamping itu harus pula melihat kemungkinan terhadap pengujian terhadap pengendaliannya apabila timbul kemungkinan salah saji dalam tiap fungsi tersebut,

- a. Pemohon barang-barang dan jasa-jasa, kemungkinan salah saji dalam bentuk membengkakkan jumlah barang yang dibutuhkan, yang harus diatasi dengan pengendalian dengan prosedur otorisasi khusus terhadap setiap permintaan barang dan jasa. Auditor melakukan pengujian dengan wawancara mengenai prosedur yang ditetapkan.
- b. Penyusunan *purchase order*, kemungkinan adanya pembelian barang yang tidak disetujui, yang harus diatasi dengan adanya bukti persetujuan terhadap setiap permintaan pembelian, Auditor melakukan pengujian apakah setiap perintah pembelian didasarkan pada permintaan pembelian yang disetujui.
- c. Penerimaan barang-barang, kemungkinan barang-barang yang diterima bukan barang yang dipesan dan kemungkinan adanya jumlah yang salah, poduk rusak/cacad yang sengaja diterima. Hal ini harus dikendalikan dengan cara setiap penerimaan barang harus dihitung, diperiksa kualitasnya, dan dicocokkan dengan perintah pembelian. Auditor harus melakukan pengujian apakah dokumen pembelian cocok dengan perintah pembelian dan melakukan observasi mengenai performance petugas bagian penerimaan.
- d. Penyimpanan barang-barang yang diterima, kemungkinan adanya barang yang disimpan diluar gudang milik perusahaan, yang harus dikendalikan dengan membatasi jumlah personel yang diijinkan memasuki wilayah gudang klien. Auditor dapat melakukan observasi terhadap personel yang mempunyai akses ke gudang.
- e. Penyusunan pembayaran voucher, kemungkinan timbulnya voucher yang dibuat untuk barang-barang yang tidak dipesan, yang harus dikendalikan dengan cara pencocokan antara perintah pembelian dengan invois penjualnya. Pengujian yang dilakukan auditor dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen pendukung.
- f. Pencatatan utang, kemungkinan adanya voucher yang tidak dicatat, yang harus dikendalikan dengan pengecekan oleh orang yang independen mengenai ringkasan daftar voucher harian dengan voucher register.

D. PENGENDALIAN INTERN YANG DISARANKAN TERHADAP TRANSAKSI PENGELUARAN KAS

Pembahasan terhadap pengendalian intern transaksi pengeluaran kas meliputi beberapa aktivitas, antara lain:

1. Dokumen dan catatan yang digunakan.

- a. *Check*, yaitu dokumen perintah pembayaran sejumlah uang kepada bank.
- b. *Check summary*, yaitu laporan tentang ringkasan check yang telah dikeluarkan dalam suatu periode.
- c. *Cash disbursements transaction file*, yaitu file yang berisi informasi pembayaran cek untuk penjual atau pihak lain yang digunakan untuk memasukkan kedalam rekening utang dagang dan buku besar.
- d. *Cash disbursement journal or check register*. Merupakan catatan formal terhadap pengeluaran cek untuk pihak lain.

2. Fungsi-fungsi yang terkait.

Fungsi-fungsi yang terkait dengan pengeluaran kas ada dua, yaitu fungsi pembayaran utang dan fungsi pencatatan pengeluaran kas. Kedua fungsi tersebut di atas tidak boleh dilakukan oleh individu yang sama atau ditangani oleh satu bagian yang sama. Penjelasan mengenai kedua fungsi diuraikan sebagai berikut.

- a. Pembayaran utang. Fungsi ini bertanggungjawab terhadap semua pembayaran utang dagang. Biasanya pembayaran diotorisasi oleh pejabat atasan yang berwenang untuk memberi persetujuan terhadap pelunasan kewajiban perusahaan. Mengingat banyaknya kemungkinan terjadinya salah saji dalam fungsi ini, perlu diinventaris cara pengendalian berikut ini:
 - * Terhadap check yang dikeluarkan harus ditunjuk orang yang bertanggungjawab untuk menandatangani.
 - * Pencocokan antara check yang ditulis dengan total voucher yang diproses untuk dibayar dilakukan oleh individu yang bebas.
 - * Apabila suatu check sudah dibayarkan, semua voucher dan dokumen pendukungnya harus diberi cap **lunas**.
 - * Check harus diberi nomor urut tercetak
 - * Akses terhadap blanko check dan stempel hanya diotorisasi untuk orang yang sangat terbatas.
- b. Pencatatan pengeluaran kas. Fungsi ini berkaitan dengan pencatatan semua pelunasan utang dagang beserta kewajiban perusahaan lainnya. Agar kecermatan proses pencatatan dapat dilakukan dengan baik, maka diperlukan langkah pengendalian berikut ini:
 - * Pengawasan oleh pihak yang bebas terhadap kesesuaian jumlah yang dijurnal dengan masukan utang dagang dengan ringkasan yang diterima oleh bendaharawan.
 - * Pengecekan oleh pihak yang bebas mengenai ketepatan waktu pencatatan secara periodik dibandingkan dengan tanggal pencatatan jurnal pengeluaran kas.
 - * Rekonsiliasi bank oleh pihak yang bebas.

3. Pemahaman terhadap Risiko Pengendalian

Dalam upaya untuk memahami risiko pengendalian dalam transaksi pengeluaran kas, auditor harus mempelajari sistem pengeluaran kas yang berlaku. Gambaran umum transaksi pengeluaran kas disajikan dalam peraga 3.3.

Dalam memahami risiko pengendalian yang timbul dalam transaksi pengeluaran kas harus memperhatikan kemungkinan-kemungkinan salah saji, kendalian yang dibutuhkan, serta kemungkinan pengujian yang harus dilakukan berikut ini:

a. Terhadap transaksi Pembayaran Utang

1. Kemungkinan adanya pengeluaran cek untuk pembelian yang tidak disetujui, harus dikendalikan dengan cara penandatanganan cek melakukan penelaahan terhadap kelengkapan pendukung voucher dan persetujuannya. Auditor dapat melakukan pengujian dengan cara observasi apakah penanda tangan cek melakukan pengecekan dengan bebas terhadap dokumen pendukungnya.
2. Kemungkinan voucher dibayar dua kali, dikendalikan dengan pemberian cap terhadap voucher dan dokumen pendukungnya bila telah dibayar. Auditor dapat melakukan pengujian apakah semua pembayaran telah diberi cap.
3. Check mungkin dibayarkan untuk jumlah yang salah, dikendalikan dengan pengecekan oleh pihak yang bebas mengenai kesesuaian jumlah dalam check dengan vouchernya.
4. Check mungkin dirubah setelah ditandatangani, dikendalikan dengan pengecekan pemberian tanda cek yang dikirim. Auditor dapat melakukan pengujian dengan melakukan wawancara tentang prosedur pengiriman check, dan observasi proses pengiriman check.

b. Terhadap transaksi pengeluaran kas

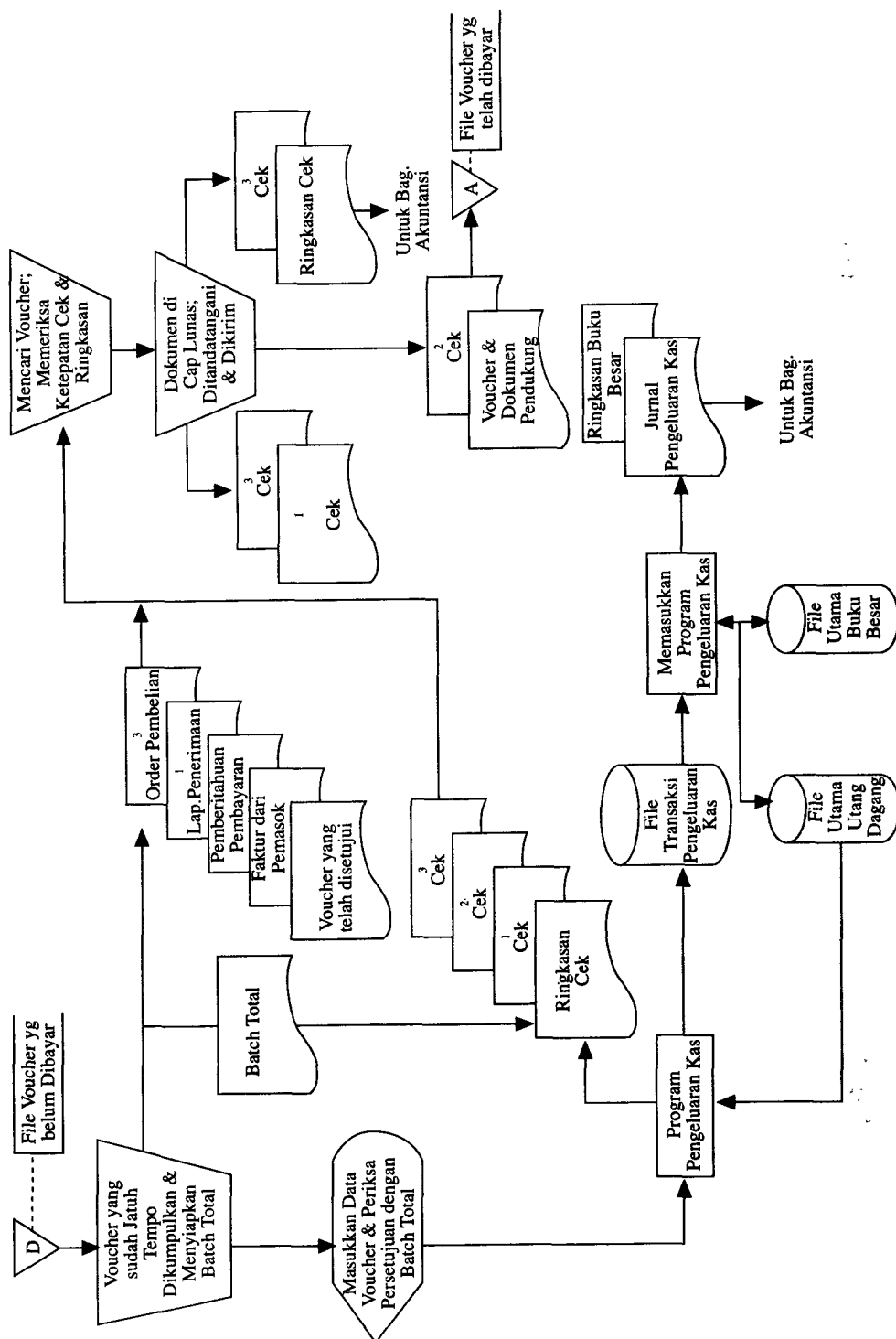
1. Check mungkin tidak dicatat, dikendalikan dengan checks yang bernomorurut tercetak. Auditor melakukan pengujian terhadap penggunaan dokumen bernomorurut tercetak.
2. Kesalahan-kesalahan dalam pencatatan checks, dikendalikan dengan pembuatan rekonsiliasi bank secara periodik oleh pihak yang bebas. Auditor dapat melakukan pengujian terhadap bank rekonsiliasi.
3. Checks tidak dicatat dengan segera, dikendalikan dengan oleh pihak yang bebas untuk mencocokkan tanggal check dan tanggal pencatatannya. Pengujian yang dilakukan dengan memperlihatkan kembali adanya kebebasan dalam pengecekan.

E. PENGUJIAN SUBTANTIF TERHADAP SALDO PLANT ASSETS

Semua aktiva yang termasuk dalam kategori aktiva tetap adalah semua aktiva tetap berwujud yang digunakan dalam rangka operasi perusahaan. Termasuk dalam kategori ini adalah: (1) Tanah, bangunan, *equipment*, *furniture* dan *fixtures*, (2) *leasholds* dan (3) akumulasi depresiasi. Disamping itu perlu diperhatikan pula hubungannya dengan biaya-

VOUCHER PEMBAYARAN

BENDA HARA



Peraga 3.2 Arus Dokumen Sistem Pengeluaran Kas

biaya yang terkait dengan pengoperasian semua bentuk aktiva tetap tersebut, yang berupa biaya penyusutan, biaya reparasi, dan biaya sewa untuk *operating leases*.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka audit terhadap masing-masing kategori aktiva tetap tersebut, adalah:

1. Tanah, elemen tanah yang dimaksud adalah tanah yang digunakan dalam rangka operasi perusahaan. Dengan demikian tanah yang tidak digunakan dalam rangka kegiatan operasional tidak masuk dalam kategori tanah termaksud. Jadi tanah yang dimaksudkan dalam audit ini adalah tanah yang digunakan untuk lokasi pabrik, lokasi bangunan, gudang dan lain-lain. Semua tanah yang dimiliki perusahaan dan belum digunakan dalam kegiatan operasional (sesuai dengan kegiatan pokok perusahaan) masuk dalam kelompok Aktiva lain-lain.
2. Bangunan, elemen bangunan yang dimaksudkan adalah semua bangunan yang dibangun dan dimiliki perusahaan sendiri untuk kegiatan operasi utama perusahaan. Bangunan yang dimiliki perusahaan tetapi tidak digunakan untuk operasi utama perusahaan harus diperlakukan lain.
3. Equipment, pengertian equipment berkaitan dengan semua peralatan (baik bergerak maupun yang statik) untuk kegiatan operasi utama perusahaan. Peralatan yang bergerak dikenal sebagai otomotive sedangkan peralatan tak gerak disebut mesin-mesin (di pabrik).
4. Furniture, adalah perlengkapan kerja di kantor yang dengan mudah dipindahkan. Misalnya, meja kerja, tempat duduk, mebelair, dll
5. Fixture, adalah perlengkapan kerja di kantor yang terlekat dengan fungsi ruang kantor itu sendiri. Sebagai contoh, alat penyejuk (non central AC), peralatan sirkulasi udara, penyekat ruang, hiasan dinding dll.
6. Leasehold, adalah hak-hak sewa yang dimiliki perusahaan atas sesuatu aktiva tetap yang digunakan dalam kegiatan operasi utama perusahaan.

Elemen-elemen tersebut di atas membetuk aktiva tetap yang operasional dalam perusahaan. Semua aktiva tetap yang tidak operasional harus dikategorikan sebagai cadangan, dan oleh karenanya diklasifikasi sebagai aktiva lain-lain. Auditor harus menyadari kekhasan audit terhadap aktiva tetap yang pendekatannya sangat berbeda dengan audit terhadap jenis aktiva yang lain.

1. Perbandingan Audit Aktiva Tetap dengan Aktiva Lancar

Pemeriksaan substantif terhadap aktiva tetap berbeda dengan aktiva lancar. Auditor dalam melakukan audit harus memperhatikan apakah audit dilakukan untuk audit Akuntan yang pertama kalinya ataukah untuk audit yang kedua atau berikutnya. Dalam audit yang pertama kalinya auditor harus menekankan pada bukti-bukti pemilikan aktiva tetap. Pembuktian pemilikan aktiva tetap berdasarkan bukti yang mendukung transaksi perolehan aktiva tetap tersebut. Pembuktian ini dimaksudkan pula untuk meyakinkan bahwa semua aktiva tetap benar-benar milik klien. Dalam audit untuk periode selanjutnya didasarkan pada kertas kerja permanen yang telah dikumpulkan pada tahun buku yang lalu.

Perbedaan penting antara audit aktiva tetap dan aktiva lancar adalah:

1. Frekuensi transaksi aktiva lancar sangat sering, sedangkan untuk aktiva tetap sangat jarang.
2. Pemeriksaan terhadap aktiva tetap diarahkan pada mutasi transaksi aktiva tetap dalam periode akuntansi yang diperiksa. Mutasi aktiva tetap disebabkan oleh penambahan aktiva tetap baru, adanya renovasi/overhaul, penjualan/pemberhentian aktiva tetap, dan penilaian kembali suatu aktiva tetap karena alasan tertentu.
3. Ketelitian pisah batas sangat penting bagi audit terhadap aktiva lancar, sebaliknya untuk aktiva tetap tidak begitu penting.

Pemahaman terhadap kekhasan pengauditan ini harus dipertimbangkan auditor, mengingat pendekatan yang akan digunakan juga akan bersifat spesifik.

2. Program Audit terhadap Aktiva Tetap

Secara umum audit terhadap aktiva tetap bertujuan melakukan verifikasi terhadap kecermatan pekerjaan klerikal yang terdiri dari penyiapan dokumen, pengisian formulir pengecekan, otorisasi dan pencatatan transaksi itu sendiri. Secara keseluruhan auditor bermaksud mendapatkan informasi apakah semua aktiva yang disajikan dalam laporan keuangan klien didasarkan pada bukti-bukti selayaknya. Guna mencapai tujuan tersebut auditor harus melakukan penelusuran kembali terhadap proses pembentukan transaksi, pencatatan, sampai tersajikannya informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Namun demikian dalam asseri rekening-rekening aktiva tetap banyak aspek yang harus dipertimbangkan oleh auditor, sehingga verifikasi terhadap kecermatan pekerjaan klerikal saja tidak cukup digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan terhadap asseri aktiva tetap. Penyajian informasi keuangan harus pula disertai dengan perumusan kebijaksanaan akuntansi dan penilaian terhadap rekening aktiva tetap. Dalam rangka pengujian substantif, auditor harus mempertimbangkan hal-hal yang bersifat spesifik tersebut.

Program audit terhadap saldo-saldo rekening aktiva tetap antara lain:

1. Melakukan verifikasi terhadap kecermatan dan kecocokan antara buku pembantu dengan saldo plant assets
2. Lakukan prosedur penelaahan analitikal.
3. Lakukan inspeksi terhadap penambahan aktiva tetap.
4. Lakukan pengujian terhadap dokumen-dokumen pemilikan dan kontrak-kontrak lease.
5. Lakukan penelusuran terhadap penghentian pemakaian aktiva tetap.
6. Lakukan analisis terhadap pencatatan transaksi reparasi.
7. Lakukan penelaahan terhadap jurnal akumulasi depresiasi.
8. Dalam hal audit untuk pertama kalinya, auditor harus melakukan penyelidikan mengenai hak pemilikan terhadap aktiva tetap.
9. Bandingkan penyajiannya dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

-
1. Melakukan verifikasi terhadap kecermatan dan kecocokan antara buku pembantu dengan saldo plant assets

Setiap langkah awal pengujian terhadap saldo rekening neraca adalah mencocokkan jumlah rupiah saldo tersebut dengan daftar pendudukannya. Ini berarti auditor harus mengecek kecermatan perhitungannya baik penjumlahan kebawah maupun penjumlahan kesamping daftar aktiva tetap. Dalam kasus aktiva tetap ini, bandingkan antara aktiva tetap yang operasional beserta penyusutannya dengan jumlah rupiah saldo dalam neraca. Dengan program ini, auditor melakukan pembuktian terhadap asersi penilaian dan alokasi saldo utang dagang dalam neraca.

2. Lakukan prosedur penelaahan analitikal.

Lakukan prosedur penelaahan analitikal guna mengetahui hubungannya dengan rekening lain yang terkait. Prosedur audit ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh gambaran mengenai jalannya operasi pada periode yang diperiksa. Beberapa ratio yang dapat digunakan antara lain:

- * perputaran aktiva tetap.
- * rate of return aktiva tetap.
- * perbandingan aktiva tetap terhadap modal saham.
- * perbandingan biaya reparasi terhadap penjualan bersih.

Berbagai ratio tersebut dibandingkan dengan ratio tahun lalu atau ratio industri. Berbagai ratio tersebut dapat menjadi petunjuk adanya masalah dalam penyajian aktiva tetap dalam neraca, terutama terhadap fluktuasi yang sangat mencolok. Oleh karena itu, gejala yang tersebut harus diperhatikan dan ditelusuri melalui program audit lainnya. Berbagai ratio tersebut untuk memperoleh pembuktian terhadap asersi eksistensi atau okurensi, kesempurnaan, dan penilaian atau alokasi aktiva tetap.

3. Lakukan inspeksi terhadap penambahan aktiva tetap.

Penambahan aktiva tetap dapat diketahui melalui daftar inventaris kekayaan perusahaan dengan dibandingkan dengan saldo rekening-rekening aktiva tetap. Auditor harus memeriksa dokumen yang mendasari pemilikan aktiva tetap, antara lain dapat berupa transaksi kontrak pembangunan, dokumen penerimaan barang, sertifikat penggunaan, pajak impor, polis asuransi, dan lain-lain. Untuk memperoleh informasi mengenai perubahan aktiva tetap, auditor harus melakukan langkah berikut:

- * Lakukan analisis terhadap notulen rapat direksi mengenai penambahan aktiva tetap.
- * Lakukan inspeksi terhadap penambahan aktiva tetap.
- * Lakukan wawancara dengan pejabat yang bertanggung jawab terhadap tambahan aktiva tetap mengenai alasan penambahannya.
- * Penelaahan dokumen pembelian aktiva tetap (baru).
- * Lakukan penelusuran terhadap bukti-bukti penambahan aktiva dan penjualan atau penghentian pemakaian aktiva tetap.

Auditor harus memperoleh keyakinan bahwa transaksi perolehan aktiva tetap benar-benar terjadi di masa yang lalu, dan secara obyektif dapat dibuktikan kebenarannya. Inspeksi terhadap setiap penambahan aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan bertujuan mencocokkan kebenaran informasi dengan keadaan fisik yang sebenarnya.

4. Lakukan pengujian terhadap dokumen-dokumen pemilikan dan kontrak-kontrak lease.

Semua pemilikan aktiva tetap pada dasarnya disertai dokumen pemilikannya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, seperti pemilikan tanah dengan akte tanah, kendaraan bermotor dengan BPKB, dan lain sebagainya. Demikian juga terhadap mesin-mesin dan harta tak gerak yang bernilai material lainnya. Terhadap individual aktiva bernilai kecil seperti perlengkapan kantor, dokumen pendukungnya adalah invoice yang diberi cap pelunasan pembayarannya.

Dalam hal-hal pembelian aktiva tetap berjumlah besar, seringkali pembelian dilakukan dengan kerjasama khusus baik dengan pembuat mesin-mesin atau dengan pihak ketiga lainnya. Misalnya, pembelian aktiva tetap dengan jaminan hipotik, pembelian dengan kontrak lease, pembelian dengan perjanjian kredit investasi, dan lain-lain. Auditor harus membaca dan memahami isi kontrak perjanjian dengan pihak ketiga tersebut, sebagai dasar penentuan pengungkapan dalam laporan keuangan.

5. Lakukan penelusuran terhadap penghentian pemakaian aktiva tetap.

Aktiva tetap yang secara teknis maupun ekonomis sudah tidak dapat digunakan lagi dalam proses operasi harus dihentikan pemakaiannya. Ada berbagai cara penghentian pemakaian aktiva tetap, misalnya dengan tukar tambah, dijual kepada pihak lain yang membutuhkan, atau disimpan di gudang barang-barang bekas pakai. Semua keputusan penghentian pemakaian suatu aktiva tetap diputuskan oleh pejabat atasan atau setingkat direksi, yang oleh karenanya akan disertai memorandum mengenai penghentian pemakaian tersebut. Langkah-langkah yang ditempuh dalam program pengujian substansi ini, antara lain:

- * lakukan analisis penyajian rekening pendapatan lain-lain yang berasal dari penjualan aktiva tetap,
- * lakukan penelusuran terhadap dokumen penghentian pemakaian aktiva tetap ke catatan akuntansi,
- * lakukan penelaahan terhadap kebijaksanaan pengasuransian aktiva tetap, dan
- * lakukan wawancara kepada manajemen mengenai penghentian pemakaian aktiva tetap.

6. Lakukan analisis terhadap pencatatan transaksi reparasi.

Biaya reparasi aktiva tetap seringkali sangat sulit dikendalikan oleh manajemen. Bahkan pos anggaran reparasi menjadi obyek utama dalam melakukan kolusi diantara para pejabat atasan, yang oleh karenanya auditor harus melakukan pemeriksaan dengan hati-hati dan cermat.

7. Lakukan penelaahan terhadap jurnal akumulasi depresiasi.

Penelaahan terhadap jurnal pencatatan akumulasi depresiasi dengan tujuan untuk menguji apakah pembebanan biaya depresiasi dilakukan dengan cermat, masuk akal, dan diterapkan dengan konsisten. Auditor harus memperoleh keyakinan mengenai metode depresiasi yang digunakan klien apakah dinilai dengan tepat. Penilaian sangat penting untuk menunjukkan kewajaran penyajian informasi aktiva tetap dengan maksud agar nilai buku aktiva tetap menggambarkan keadaan yang masuk akal. Oleh karenanya auditor harus memperhatikan perhitungan penyusutan aktiva tetap dengan benar, serta memperhatikan penghitungan biaya-biaya yang timbul dalam pengoperasian aktiva tetap. Langkah-langkah audit yang digunakan adalah:

- * Verifikasi kecermatan daftar aktiva tetap ke buku pembantu dan buku besar.
- * lakukan verifikasi pencatatan depresiasi sebagai akibat penambahan dan penghentian pemakaian aktiva tetap,
- * lakukan penghitungan kembali biaya depresiasi aktiva tetap dalam periode audit,
- * lakukan penghitungan kembali akumulasi depresiasi sampai saat laporan keuangan disusun, dan
- * Melakukan wawancara dengan manajemen untuk memperoleh penjelasan umum mengenai metode yang digunakan untuk menghitung depresiasi aktiva tetap.

8. Dalam hal audit untuk pertama kalinya, auditor harus melakukan penyelidikan mengenai hak pemilikan terhadap aktiva tetap.

Hak-hak pemilikan atas suatu aktiva tetap dapat dilihat dari dokumen-dokumen kepemilikan dan surat perjanjian sewa-beli. Disamping itu dalam kaitannya dengan aktiva tetap yang ditunjukkan klien, mungkin saja aktiva tersebut masih dalam keadaan dijaminkan kepada pihak lain. Dengan demikian aktiva tetap tersebut diikat sebagai jaminan atas kewajiban pada pihak lain. Pemilikan aktiva tetap tersebut tidak sepenuhnya dibawah kendali manajemen. Prosedur audit yang digunakan adalah:

- * Penelaahan notulen rapat pimpinan. dengan langkah ini, diharapkan dapat memahami berbagai aspek kebijaksanaan yang ditempuh oleh direksi dalam pengelolaan aktiva tetap perusahaan. Penelaahan ini dimaksudkan pula untuk mengetahui kebijaksanaan akuntansi terhadap aktiva tetap.
- * Inspeksi terhadap dokumen-dokumen pemilikan aktiva tetap.
- * Pengujian terhadap kontrak sewa-beli (*leasing*). Analisis ini bertujuan mengetahui latar belakang perjanjian kontrak sewa-beli. Auditor harus mengetahui kategori kontrak sewa beli dengan *lessor company*, apakah *capital leases* ataukah *operating leases*. Hal ini agar auditor dapat memberikan perlakuan akuntansi yang tepat atas perjanjian kontrak tersebut.
- * Lakukan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk mengetahui hak-haknya atas aktiva yang dijaminkan kepadanya.

Disamping itu, auditor biasanya melakukan perjalanan keliling menginspeksi untuk semua vasilitas yang dimiliki klien. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan

yang cukup luas dan mendalam bagaimana aktiva perusahaan digunakan dalam operasinya dan apabila auditor melihat perubahan-perubahan yang ada dalam metode operasi maupun vasilitas yang dimiliki klien dapat melakukan tindakan-tindakan yang perlu.

9. Bandingkan penyajiannya dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Kewajaran penyajian dan pengungkapan dalam neraca, dilakukan dengan membandingkan assersi manajemen terhadap utang dagang dengan standar pelaporan yang ditetapkan seperti dinyatakan standar akuntansi keuangan yang lazim. Perbandingan ini mengandung dimensi yang luas karena adanya kebijaksanaan akutansi maupun penilaian yang dilakukan oleh klien terhadap penyajian dan pengungkapan saldo aktiva tetap. Auditor secara khusus harus memperhatikan terhadap perlakuan depresiasi aktiva tetap dalam statemen penghasilan, dan kemungkinan penjaminan pada pihak ketiga. Seringkali aktiva yang dijaminakan tidak diungkapkan dalam laporan keuangan, yang akan mengakibatkan pembaca laporan menkadi salah tafsir terhadap kekayaan bersih perusahaan.

3. Kertas kerja pemeriksaan

Ada beberapa kertas kerja yang harus dibuat oleh auditor dalam rangka audit terhadap pos aktiva tetap. Kertas kerja audit yang digunakan dalam audit aktiva tetap biasanya terdiri dari:

- a. Kertas Kerja Utama, yang berisi ringkasan hasil pemeriksaan.
- b. Kertas kerja pendukung, yang terdiri dari:
 - * Daftar aktiva tetap, yang berisi rincian aktiva tetap (seluruhnya) beserta proses pembuktian yang dilakukan oleh akuntan pemeriksa.
 - * Daftar surat konfirmasi, dalam hal-hal khusus untuk aktiva tetap yang di hipotikkan.
 - * Surat Representasi (kalau diperlukan)
- c. Kertas kerja permanen, yang terdiri dari:
 - * Kertas kerja audit tahun sebelumnya.
 - * Surat perjanjian utang jangka panjang

Peraga 3.3 menunjukkan bagaimana suatu kertas kerja harus disusun oleh auditor beserta stafnya.

F. PENGUJIAN SUBTANSI TERHADAP SALDO UTANG DAGANG

Curent liabilities (CL) diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai utang lancar. Penerjemahan istilah tersebut sebenarnya kurang tepat mengingat *curent* tidak sinonim dengan istilah lancar. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan dengan pengertian lancar ataupun jangka waktu dalam hubungannya dengan *curent liabilities*. Maksudnya CL, sebenarnya berkaitan dengan utang yang pada tanggal neraca segera akan dibayar (harus dilunasi). Mengenai jangka waktunya tidak ditunjukkan dengan jelas dan tidak menunjukkan kreterium sumber ataupun arus dana.

Komponen yang membentuk utang lancar terdiri dari beberapa elemen. Elemen yang masuk utang lancar, antara lain:

Peraga 3.3 Daftar Tetap dan Akumulasi Depresiasi

PT METAL INDUSTRI

Daftar Aktiva Tetap dan Akumulasi Depresiasi
Daftar Utama

31 Desember 1993

W/P nomor 5
Disiapkan RI tgl 4/2 '94
Direvisi: SPT tgl 12/2 '94

[illegible]

W Telusur ke buku besar dan kertas kerja 31/12/1992

F cek penjumlahan

Ⓕ Cek penjumlahan kebawah dan kesamping

-
1. *Account Payable*, di-Indonesiakan dengan istilah utang dagang. Istilah inipun mengandung kelesmahan, karena mengandung pengertian yang rancu. *Account* berarti jumlah yang tercantum dalam suatu dokumen, rekening, atau hitungan. *Payable*, berarti kewajiban, atau harus dibayar pada saat tertentu. Jadi, *Account Payable* mengandung pengertian sejumlah kewajiban yang harus dibayar pada suatu saat tertentu. Pengertian ini akan menjadi rancu kalau dikaitkan dengan istilah utang dagang. Karena alasan berikut:
 - * Sering dijumpai pembayaran yang harus segera dilakukan tidak didasarkan atas transaksi dagang, tetapi disebabkan alasan lainnya.
 - * Pengertian utang dagang harus ditafsirkan sebagai utang yang timbul dari kegiatan utama perusahaan. Jadi, transaksi yang timbul, selain dari transaksi utama seharusnya tidak masuk dalam pengertian utang dagang, misalnya pembayaran terhadap premi asuransi yang segera akan jatuh tempo.
 2. *Notes Payable*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan istilah utang wessel. Istilah ini mengandung pengertian sejumlah wessel yang pada tanggal neraca segera dibayar oleh perusahaan. Semua kewajiban tertulis, dengan disertai perikatan tertentu yang berkaitan dengan pembayaran bunga dan jangka waktu pembayaran masuk dalam pengertian utang wessel tersebut. Landasan hukum, yang membentuk utang wessel sangat bervariasi, antara lain; promess, acceptasi, wessel dan lain-lain.
 3. Utang Pajak, adalah kewajiban yang terhutang kepada negara atas sejumlah kewajiban pajak yang dibebankan kepada perusahaan. Bentuk pajak ini bermacam-macam, antara lain: Pajak Perseroan (PPH badan), Pajak penghasilan (PPH 21), dan lain-lain.
 4. Utang Gaji dan Upah, adalah sejumlah kewajiban pada para karyawan perusahaan yang belum sempat terbayarkan sampai tanggal laporan keuangan. Utang semacam ini timbul karena pembayaran gaji dalam satu bulan tertentu dibayarkan pada bulan berikutnya.
 5. Utang yang segera jatuh tempo lainnya. Jenis dari utang semacam ini bermacam-macam.

Semua bentuk utang bersifat tak berwujud (*intangible*), hal ini mengakibatkan munculnya risiko deteksi yang cukup tinggi. Apalagi bukti-bukti eksistensi dan peristiwa terbentuknya utang tersebut sepenuhnya datang dari pihak luar. Hal ini menyebabkan kemungkinan untuk menghapuskan atau menggelapkan bukti-bukti kepemilikan mudah dilenyapkan. Beberapa permasalahan dalam audit utang lancar dibahas berikut ini.

1. Timbulnya *Current Liabilities* dan masalahnya. Beberapa masalah yang mungkin muncul dalam audit terhadap utang lancar harus benar-benar dipahami staf auditor yang bekerja di lapangan. Permasalahan tersebut antara lain:
 - a. Proses transaksi, sumber terjadinya transaksi CL, dapat timbul dari kalangan intern perusahaan dan dapat pula dari kalangan ekstern. Dari aspek eksternal, CL timbul karena operasi perusahaan yang berupa pertukaran kekayaan perusahaan. Dari aspek internal, karena perusahaan belum menyelesaikan kewajiban yang segera harus dibayarkan kepada karyawan/staf perusahaan sendiri.

-
-
- b. Masalah pelik yang dihadapi dalam audit CL, adalah jenis utang ini mudah dimanipulasikan oleh klien. Alasannya, kreditur adalah pihak luar yang tidak ada hubungan sama sekali, sehingga transaksi yang terjadi dengannya tidak akan diketahui oleh akuntan pemeriksa. Setidaknya auditor akan sulit menemukan bukti-bukti yang mendukung kewajiban klien pada kreditur tersebut.
 - c. Timbul karena perubahan status dari utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek. Hal ini terjadi untuk utang jangka panjang yang segera jatuh tempo pada periode akuntansi mendatang.
 - d. Kewajiban yang ditimbulkan karena proses waktu, misalnya kewajiban yang timbul dari biaya bunga (bila perusahaan mempunyai utang jangka panjang)
2. Perbedaan audit terhadap utang lancar dan piutang lancar.
- Perbedaan karakteristik audit terhadap utang lancar dengan piutang lancar adalah:
- a. Penyajian rekening piutang dagang cenderung overstated, sedangkan rekening utang dagang cenderung understated. Hal ini dimaksudkan agar, curen ratio menjadi lebih baik.
 - b. Untuk mengetahui kebenaran eksistensi utang dagang sangat sulit. Kesulitan ini timbul karena klien cenderung mengaburkan adanya sejumlah kewajiban kepada pihak lain, mengingat inisiatip transaksi dari pihak internal. Dipihak lain eksistensi saldo piutang dagang lebih mudah diketahui, karena inisiatip transaksi datang dari pihak luar.
 - c. Sering kali timbul utang bersyarat (contingent liabilities) sedangkan piutang dagang tidak.
3. Tujuan audit terhadap utang lancar dan teknik pemeriksaannya
- Audit dalam menjalankan tugasnya melakukan verifikasi catatan akuntansi (*traceback procedure*) semua transaksi pembentukan utang lancar. Program audit terhadap saldo-saldo rekening utang dagang antara lain:
1. Melakukan verifikasi terhadap kecermatan dan kecocokan antara buku pembantu dengan saldo utang dagang.
 2. Lakukan prosedur penelahaan analitikal.
 3. Lakukan konfirmasi utang dagang
 4. Lakukan penulusuran catatan utang ke dokumen-dokumen pendukungnya.
 5. Lakukan pengujian cutoff pembelian.
 6. Lakukan pengujian cutoff pengeluaran kas.
 7. Lakukan pengujian terhadap pembayaran setelah tanggal neraca.
 8. Lakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya utang yang tidak dicatat.
 9. Bandingkan penyajiannya dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
1. Melakukan verifikasi terhadap kecermatan dan kecocokan antara buku pembantu dengan saldo utang dagang.
- Setiap langkah awal pengujian terhadap saldo rekening neraca adalah mencocokkan jumlah rupiah saldo tersebut dengan daftar pendukunngnya. Ini berarti auditor harus

mengecek kecermatan perhitungannya baik penjumlahan kebawah maupun penjumlahan kesamping. Dalam kasus utang dagang ini, bandingkan antara daftar utang yang belum terbayar dengan jumlah rupiah saldo dalam neraca. Dengan program ini, auditor melakukan pembuktian terhadap assersi penilaian dan alokasi saldo utang dagang dalam neraca.

2. Lakukan prosedur penelaahan analitikal.

Lakukan prosedur penelaahan analitikal guna mengetahui hubungannya dengan rekening lain yang terkait. Beberapa ratio yang dapat digunakan antara lain:

- * pembelian kredit dengan utang dagang serta arus pembayaran ke kreditur tertentu.
- * perbandingan utang dagang dengan utang lancar.
- * hitunglah tingkat perputaran utang dagang.

Berbagai ratio tersebut dibandingkan dengan ratio tahun lalu atau ratio industri. Berbagai ratio tersebut dapat menjadi petunjuk adanya masalah dalam penyajian utang dagang dalam neraca, terutama terhadap fluktuasi yang sangat mencolok. Oleh karena itu, gejala yang tersebut harus diperhatikan dan ditelusuri melalui program audit lainnya. Berbagai ratio tersebut untuk memperoleh pembuktian terhadap assersi eksistensi atau okurensi, kesempurnaan, dan penilaian atau alokasi utang dagang.

3. Lakukan konfirmasi utang dagang

Dalam prosedur audit terhadap utang dagang auditor disarankan membuat konfirmasi kepada para kreditur perusahaan. Bentuk surat konfirmasi disajikan pada peraga 3.5 di halaman berikut ini. Kekhasan dalam teknik audit ini, adalah hasil konfirmasi belum tentu memberikan derajat kepercayaan yang tinggi meskipun sumber informasi dari pihak luar perusahaan. Permasalahan yang timbul, informasi adanya utang dagang datangnya dari klien sendiri. Jadi, sepenuhnya pengungkapan terhadap utang dagang tergantung pada kejujuran klien. Auditor akan sulit menemukan bukti-bukti audit kalau transaksi utang tersebut memang sengaja dihilangkan, atau dirahasiakan.

Di negara-negara yang mempunyai aturan dagang sangat ketat, penggunaan uang berasal dari korupsi ataupun kejahatan dilarang keras (hukumannya berat). Hal seperti ini menimbulkan adanya perusahaan yang berfungsi sebagai “alat pencuci uang” (money laundering). Dengan teknik laundering yang canggih, utang kepada perusahaan tersebut tidak akan disajikan dalam neraca.

Peraga 3.4 Contoh Surat Konfirmasi Utang Dagang

Yogyakarta, 3 Maret 1994

Kepada:
Yth, Direktur PT BCG
Jl. Pasar Minggu Kecil 24
Karta sura

Dengan hormat,

Dimohon kesediaan Saudara untuk mengirimkan informasi secara langsung kepada Kantor Akuntan Publik Hanjana dan Rekan mengenai kewajiban kami kepada Saudara untuk statemen keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1993. Beberapa informasi yang diharapkan adalah:

- Jumlah yang belum dilunasi Rp
- Jumlah yang telah jatuh tempo Rp
- Jumlah yang dalam komitmen pembelian Rp
- Jelaskan bila ada jaminan kolateral dalam pembelian tersebut

Guna menjawab informasi tersebut, berikut ini disampaikan amplop beralamat kantor akuntan publik tersebut beserta perangko. Tanggapan Saudara secepatnya sangatlah kami harapkan.

Terima kasih

Direktur Keuangan,

Sukotjo, SE

Peraga 3.5 Format surat konfirmasi utang dagang

Kepada:

Supplier PT ARCOMEL

Jl. Juanda 103, Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan audit laporan keuangan kami yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Saija dan Adinda, kami mohon kesediaan Saudara untuk memberi informasi langsung kepada auditor kami tersebut mengenai jumlah kewajiban kami sampai tanggal 31 Desember 1993. Informasi yang diharapkannya adalah:

Jumlah yang belum jatuh tempo

Jumlah yang telah jatuh tempo

Jumlah yang masuk dalam komitmen pembelian

Rincian jaminan yang diberikan

Jawaban atas informasi tersebut diatas dimasukkan dalam amplop tertutup dan dimohon untuk dikirimkan langsung kepada alamat kantor akuntan kami.

Terima kasih

Hormat kami,

Controller

Di Indonesia, kemungkinan timbulnya utang yang tidak disajikan dalam neraca juga ada, terutama bagi perusahaan menengah dan kecil yang sedang mengalami kesulitan likuiditas. Biasanya perusahaan semacam ini meminjam uang kepada para rentenir dengan bunga yang amat tinggi (minimal 5 % per bulan). Aktivitas meminjam dari bank fiktif semacam ini melanggar undang-undang perbankan di Indonesia. Sehingga transaksinya cenderung dilakukan secara sembunyi dan tersamar. Disamping itu, bagi klien yang menggunakan pinjaman semacam ini memberikan kredibilitas yang rendah. Dengan uraian tersebut di atas, konfirmasi utang dagang justru seringkali memberikan dampak sebaliknya. Konfirmasi utang dagang justru dilakukan kepada kreditor yang bersaldo kecil. Logikanya adalah, klien yang ingin memperbaiki gambaran (citra) bonafiditas perusahaan akan cenderung memperkecil saldo klien. Salah satu alternatif yang ditempuh adalah dengan memperkecil saldo utang dari para kreditor perusahaan. Dengan demikian saldo utang yang jumlahnya relatif besar justru menunjukkan informasi yang sebenarnya, sedangkan utang yang bersaldo kecil perlu mendapat perhatian lebih.

4. Lakukan penelusuran catatan utang ke dokumen-dokumen pendukungnya.

Program ini dilakukan auditor guna melakukan verifikasi catatan akuntansi (*traceback procedure*), ke dokumen-dokumen pendukung.

5. Lakukan pengujian cutoff pembelian.

Proses pengiriman suatu barang membutuhkan waktu yang cukup lama dan terikat dengan perjanjian mengenai tanggungjawab terhadap risiko kecelakaan ataupun risiko kerusakan di perjalanan. Perjanjian atas dasar kontrak F.O.B shipping point akan berbeda dengan destination. Oleh karena itu, diakhir periode seringkali timbul permasalahan berkaitan dengan pengakuan terhadap hak atas barang yang masih dalam proses pembelian dan pengiriman tersebut. Apabila pada saat tanggal neraca barang sudah dikirim dengan disertai perjanjian FOB shipping point, maka dianggap klien sudah mempunyai hak atas barang yang dikirim tersebut, serta mempunyai kewajiban berupa utang pada penjual. Jadi, klien harus sudah mengakui sebagai pembelian dan sekaligus mengakui adanya utang dagang.

6. Lakukan pengujian cutoff pengeluaran kas.

Program ini sangat penting untuk memperoleh keyakinan terhadap kecermatan penyajian rekening kas dan utang dagang dalam neraca. Auditor perlu membuktikan kebenaran tanggal cutoff terhadap transaksi utang dagang dan pembayaran kas.

7. Lakukan pengujian terhadap pembayaran setelah tanggal neraca.

Pembayaran yang terjadi setelah tanggal neraca seringkali dapat digunakan sebagai petunjuk adanya utang yang terjadi dan terbentuk di akhir periode. Ini berarti, apabila nama kreditor pada tanggal neraca tidak dilaporkan oleh klien, dan pada periode setelah tanggal neraca terjadi pembayaran kepadanya, serta diawal periode tidak terdapat transaksi utang piutang dengannya, dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan penelitian adanya utang yang tidak dicatat. Langkah yang ditempuh dalam program ini

ialah membandingkan daftar kreditur pada saat tanggal neraca dengan jurnal pengeluaran kas yang terjadi pada periode setelah tanggal neraca. Ini berarti menguji apakah transaksi-transaksi pembayaran kas setelah tanggal neraca merupakan utang pada akhir periode yang sengaja tidak dicantumkan dalam neraca.

8. Lakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya utang yang tidak dicatat.

Auditor dipandang perlu menyelidiki kemungkinan manajemen dengan sengaja tidak menyajikan sejumlah kreditur dalam neraca. Bahkan mungkin sekali klien mempunyai utang bersyarat yang sengaja (tidak sengaja), tidak siungkapkan dalam laporan keuangan. Diperlukan langkah-langkah tertentu, yang antara lain: .

- a. Auditor harus memeriksa terhadap notulen rapat direksi untuk mengetahui adanya utang bersyarat guna memperoleh keyakinan terhadap timbulnya utang dagang ataupun utang wessel, ataupun yang lainnya.
- b. Lakukan penyelidikan secara mendalam terhadap ketidak-cocokan dokumen-dokumen, perintah pembelian, laporan penerimaan barang, dan invois guna memperoleh indikasi adanya utang yang tidak disajikan dalam laporan keuangan.
- c. Lakukan wawancara dengan personel yang ditugasi menangani pembelian dan akuntansi mengenai adanya invois yang tidak dicatat. Auditor harus memperoleh jawaban yang jelas mengenai alasan terjadinya hal tersebut.
- d. Lakukan penelaahan terhadap anggaran pembelian aktiva, perintah kerja, dan kontrak pembangunan sebagai penunjuk adanya jumlah yang tidak dicatat.

9. Bandingkan penyajiannya dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Kewajaran penyajian dan pengungkapan dalam neraca, dilakukan dengan membandingkan asersi manajemen terhadap utang dagang dengan standar pelaporan yang ditetapkan seperti dinyatakan standar akuntansi keuangan yang lazim. Perbandingan ini mengandung dimensi yang luas karena adanya kebijaksanaan akuntansi maupun penilaian yang dilakukan oleh klien. Sebagai contoh, timbulnya utang dagang sebagai realisasi pembayaran utang jangka panjang. Adanya persekot pembayaran, dan lain-lain.

SOAL BAB 3

/soal Kelompok A

Dalam soal berikut ini Saudara diminta untuk menilai pernyataan-pernyataan berikut. Berilah tanda S, bila pernyataan tersebut salah, dan sebaliknya berilah tanda B, bila pernyataan tersebut benar.

- 1. Assersi terhadap saldo Utang Dagang merupakan tanggungjawab manajemen, oleh karena itu auditor harus melakukan pengujian terhadapnya serta meletakkan salah-saji kepadanya.
- 2. Assersi manajemen dalam hal eksistensi dan peristiwa yang membentuk transaksi dalam siklus pengeluaran bermaksud agar (a) pencatatan utang dagang merupakan jumlah yang menjadi kewajiban perusahaan pada tanggal neraca, (b) pencatatan transaksi pengeluaran kas benar-benar terjadi untuk periode yang diaudit, dan (c) pencatatan plant assets menunjukkan aktiva yang benar-benar digunakan dalam operasi sampai saat tanggal neraca.
- 3. *Inherent risks* yang terbentuk dalam transaksi siklus pengeluaran antara lain: (a) seberapa banyak volume transaksi dalam satu bulan, (b) kemungkinan terhadap munculnya pembelian dan pengeluaran yang tidak diotorisasi, dan (c) kemungkinan adanya pembelian aktiva tetap yang tidak memadai.
- 4. Assersi manajemen terhadap penyajian dan pengungkapan transaksi siklus pengeluaran dalam laporan keuangan bermaksud agar utang dagang dan aktiva tetap telah diidentifikasi dan disajikan dengan layak dalam neraca, serta pengungkapan informasi penting telah dinyatakan dalam laporan keuangan dengan layak.
- 5. Semua bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional dalam periode yang diaudit harus dimasukkan dalam unsur pembentuk aktiva tetap, serta disajikan dalam neraca.
- 6. Furniture, adalah perlengkapan kerja di kantor yang secara fisik mudah dipindah-pindah serta disajikan dalam neraca sebagai aktiva operasional.
- 7. Untuk memperoleh keyakinan kesempurnaan pengungkapan assersi manajemen dalam laporan keuangan, auditor membuat program audit sebagai berikut: (a) melakukan perjalanan keliling untuk melakukan inspeksi semua fasilitas yang dimiliki klien, (b) membuat analitical review, (c) melakukan review terhadap jurnal pencatatan transaksi depresiasi dan analisis terhadap biaya reparasi.
- 8. Prosedur audit yang digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap kewajaran penilaian ataupun alokasi penyajian aktiva tetap dalam laporan keuangan antara lain: (a) verifikasi terhadap kecermatan penghitungan penyusutan aktiva tetap dalam periode audit, dan (b) bandingkan penyajian elemen aktiva tetap dengan prinsip akuntansi yang lazim.
- 9. Kesempurnaan assersi manajemen dalam laporan keuangan diverifikasi dengan program audit berikut: (a) lakukan konfirmasi terhadap saldo-saldo utang berjumlah

material, (b) lakukan pengujian transaksi pembayaran kas setelah tanggal neraca yang berkaitan dengan pembayaran utang dagang, dan (c) lakukan penyelidikan terhadap kemungkinan timbulnya utang dagang yang tidak dinyatakan dalam neraca.

- 10. Prosedur konfirmasi terhadap utang dagang yang terjadi sampai dengan tanggal neraca, merupakan prosedur audit yang wajib dalam setiap pelaksanaan tugas general audit.

Soal Kelompok B

Pilihlah satu jawaban yang paling benar di antara empat alternatif jawaban berikut ini. Bila tidak ada alternatif jawaban yang tepat pilihlah huruf e dalam lembar jawaban saudara.

1. Auditor melakukan pemeriksaan terhadap faktur-faktur pembelian mesin, dengan tujuan untuk menentukan apakah:
 - a. Mesin yang dibeli tersebut apakah benar-benar ada.
 - b. Penilaian rekening mesin telah ditentukan secara wajar.
 - c. Pengungkapan dalam laporan keuangan telah memadai.
 - d. Apakah mesin tersebut dipakai sebagai jaminan utang.
2. Tujuan auditor melakukan analisis atas biaya reparasi dan pemeliharaan sebagai pendukung atas prosedur lain, bertujuan:
 - a. Mendapatkan keyakinan bahwa pengeluaran yang terkait terhadap suatu aktiva tetap telah dicatat dengan layak.
 - b. Memperoleh keyakinan bahwa pengeluaran modal telah mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang.
 - c. Pengeluaran yang tidak dapat dikapitalisir telah diperlakukan sebagai biaya.
 - d. Semua jawaban diatas benar.
3. Akuntan pemeriksa hendaknya melakukan konfirmasi dalam pemeriksaan aktiva tetap. Saran tersebut dilakukan bila:
 - a. Aktiva tetap tersebut sedang dalam persiapan pemakaian.
 - b. Aktiva tetap tersebut tidak ada di lokasi perusahaan.
 - c. Aktiva tetap tersebut dalam penguasaan pihak lain.
 - d. Aktiva tetap tersebut dalam perjalanan.
4. Fokus pemeriksaan aktiva tetap dan aktiva lancar sangat berbeda. Fokus pemeriksaan aktiva tetap adalah:
 - a. Harga pokok aktiva tetap yang disajikan pada tanggal neraca.
 - b. Mutasi aktiva tetap yang terjadi selama periode yang diperiksa.
 - c. Kemungkinan penyajian aktiva tetap yang terlalu tinggi dalam laporan keuangan.
 - d. Nilai aktiva tetap pada tanggal neraca.

-
-
5. Dalam melaporkan rekening aktiva tetap hendaknya memperhatikan standard pelaporan berikut:
 - a. Aktiva tetap harus dipecah ke dalam golongan rekening tersendiri jika jumlah tiap golongan material.
 - b. Pengeluaran modal harus dianggarkan dan diawasi melalui suatu sistem otorisasi dan pelaporan
 - c. Perhitungan fisik aktiva tetap harus dilakukan secara periodik.
 - d. Catatan terperinci mengenai aktiva tetap harus diselenggarakan oleh si pengusaha.
 6. Akuntan melakukan penyelidikan kemungkinan penghentian pemakaian aktiva tetap yang tidak dicatat dengan cara:
 - a. Mengidentifikasi aktiva yang ada dipabrik dan menelusurnya ke catatan akuntansi.
 - b. Memeriksa dokumen-dokumen pendukung reparasi dan pemeliharaan.
 - c. Menguji cukup-tidaknya biaya reparasi.
 - d. Menguji apakah terdapat pendapatan lain-lain yang berasal dari penghapusan nilai residu atau penjualan barang bekas.
 7. Program pemeriksaan berikut ini bertujuan untuk menguji penilaian atau alokasi pos aktiva tetap, kecuali:
 - a. Analisa biaya pemeliharaan.
 - b. Usut pencatatan penambahan aktiva tetap.
 - c. Telaah pencatatan akumulasi depresiasi.
 - d. Uji kontrak leasing.
 8. Berikut ini disebutkan dokumen-dokumen kunci yang digunakan untuk melakukan transaksi dalam siklus pengeluaran, kecuali:
 - a. *receiving report*
 - b. *purchase requisition*
 - c. *vendor invoice*
 - d. *client invoice*
 9. Berikut ini disebutkan catatan dan/atau buku-buku yang digunakan untuk menangani transaksi siklus pengeluaran, kecuali:
 - a. *unpaid voucher file*
 - b. *voucher register*
 - c. *account payable ledgers*
 - d. *account payable controls*
 10. Berbagai fungsi yang terlibat untuk menangani transaksi pembelian adalah, kecuali:
 - a. *preparing purchase order*
 - b. *receiving the goods*
 - c. *recording the liability*
 - d. *approving credit*
 11. Piutang Dagang adalah sama-sama aktiva tak berwujud, tetapi rekening piutang tidak masuk kedalam rekening Aktiva Tak Berwujud karena:
 - A. Piutang Dagang adalah aktiva lancar.
 - B. Piutang Dagang merupakan klaim pada pihak ketiga.
 - C. Piutang Dagang timbul dari transaksi penjualan barang dagangan.
 - D. Piutang dagang sulit diamortisasikan.

-
-
12. Akuntan melakukan penyelidikan terhadap aktiva tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional, dengan cara:
- A. Melakukan observasi terhadap daftar inventaris aktiva tetap.
 - B. Memeriksa dokumen-dokumen pendukung reparasi dan pemeliharaan.
 - C. Menguji cukup-tidaknya biaya reparasi.
 - D. Menguji apakah terdapat pengeluaran lain-lain yang berkaitan dengan proses akuisisi aktiva tetap.
13. Auditor harus membandingkan ratio yang dibuat pada tahun yang diaudit dengan ratio industri atau ratio untuk tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal penyajian saldo utang dagang, salah satu ratio yang digunakan adalah:
- A. perbandingan antara piutang wessel dengan utang dagang.
 - B. perbandingan antara piutang tak tertagih dengan penjualan kredit.
 - C. perbandingan antara utang dagang dengan utang lancar.
 - D. tingkat perputaran utang lancar.
14. Auditor harus memahami dan memperoleh pembuktian terhadap penghentian pemakaian aktiva tetap. Langkah-langkah audit yang harus ditempuh adalah, kecuali:
- A lakukan analisis penyajian rekening pendapatan lain-lain yang berasal dari penjualan aktiva tetap,
 - B lakukan penelusuran terhadap dokumen penghentian pemakaian aktiva tetap ke catatan akuntansi,
 - C Lakukan penelaahan terhadap kebijaksanaan pengasuransian aktiva tetap.
 - D Lakukan wawancara kepada manajemen mengenai penambahan aktiva tetap.
15. Sebagian besar kertas kerja audit dalam pengujian saldo rekening aktiva tetap antara adalah dokumen permanen. seperti:
- A. Kontrak perjanjian *instalement lease*.
 - B. Memorandum pemakaian aktiva tetap.
 - C. Dokumen pembelian aktiva tetap dengan perjanjian hipotik.
 - D. Reimbursement voucher.

Bab 4

Audit Terhadap Siklus Jasa-jasa Tenaga Kerja

BAB INI AKAN MEMBAHAS:

- A. Siklus Audit terhadap jasa-jasa tenaga kerja
- B. Tujuan Audit terhadap jasa-jasa tenaga kerja
- C. Materialitas, Risiko Pemeriksaan, dan Strategi Pemeriksaan
- D. Struktur pengendalian intern jasa-jasa tenaga kerja
- E. Assesing control risk
- F. Pengujian substantansi terhadap saldo biaya gaji

A. SIKLUS JASA-JASA TENAGA KERJA

Siklus jasa-jasa tenaga kerja meliputi semua bentuk kompensasi yang diberikan kepada seluruh aktivitas tenaga kerja yang dipekerjakan perusahaan. Berbagai bentuk kompensasi tenaga kerja antara lain: gaji (upah), insentip lembur, komisi, bonus, dan berbagai bentuk fasilitas pada personel (dana pensiun, asuransi, kesehatan, dan lain-lain). Berbagai bentuk pembayaran kompensasi kepada karyawan perusahaan termasuk dalam siklus penggajian ini. Rekening-rekening yang terbentuk dalam siklus ini antara lain:

1. Kompensasi pokok (meliputi gaji, upah, insentip, dan macam-macam tunjangan karyawan)
2. Pajak atas gaji/upah karyawan
3. Biaya tenaga kerja langsung
4. Biaya tenaga kerja tidak langsung (biaya overhead pabrik)
5. Utang atas gaji/upah karyawan
6. Gaji dibayar dimuka (uang muka gaji)

Transaksi dalam siklus ini berhubungan dengan transaksi dua siklus lainnya. Pembayaran gaji/upah dan pembayaran pajak atas gaji/upah berhubungan dengan transaksi pengeluaran kas dalam siklus pengeluaran (periksa pembahasan dalam bab 3). Siklus produksi berhubungan dengan proses distribusi biaya overhead pabrik kepada produk dalam proses dan pembebanan kepada produk jadi (dibahas pada bab 5). Dengan demikian pembahasan dalam bab ini harus pula memperhatikan kedua sistem yang terbentuk pada kedua siklus tersebut.

B. TUJUAN AUDIT DALAM SIKLUS JASA-JASA TENAGA KERJA

Audit terhadap transaksi penggajian beserta rekening yang terkait dengannya, antara lain:

1. Eksistensi atau okurensi (*occurrence*) terbentuknya transaksi.
 - * Pencatatan transaksi penggajian mencerminkan kompensasi semua jasa-jasa yang terjadi untuk periode yang diliput oleh periode laporan keuangan.
 - * Pencatatan semua biaya-biaya penggajian mencerminkan kewajiban pajak yang berasal dari kompensasi dalam periode yang diaudit.
 - * Saldo utang pajak ataupun pajak yang dibayar dimuka mencerminkan jumlah yang menjadi kewajiban pada tanggal neraca.
2. Kesempurnaan (*completeness*) pencatatan transaksi.
 - * Pencatatan biaya gaji beserta pajaknya mencakup keseluruhan biaya-biaya jasa-jasa karyawan selama tahun yang diaudit.
 - * Saldo utang pajak ataupun pajak yang dibayar dimuka mencerminkan jumlah yang menjadi kepada pemerintah pada tanggal neraca
3. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban perusahaan.
 - * Saldo utang pajak ataupun pajak yang dibayar dimuka merupakan kewajiban yang sah bagi perusahaan pada tanggal neraca

4. Penilaian atau alokasi.

- * Perhitungan setiap pembayaran terhadap biaya penggajian dan peringkasan catatannya dilakukan dengan cermat.
- * Perhitungan terhadap saldo utang pajak ataupun pajak yang dibayar dimuka pada tanggal neraca telah diperhitungkan dengan cermat.
- * Biaya penggajian di pabrik telah diklasifikasi dengan cermat menjadi biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tak langsung.
- * Perhitungan terhadap pajak atas upah telah diperhitungkan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

5. Penyajian dan pengungkapan.

- * gaji dan pajak atas gaji telah diidentifikasi dan diklasifikasi dalam laporan keuangan dengan layak dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- * Rekening utang pajak dan utang gaji telah diklasifikasi sebagai utang lancar dalam laporan keuangan pada saat tanggal neraca.

Prosedur yang digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan tersebut dijelaskan dalam subbab berikut ini.

C. MATERIALITAS, RISIKO PEMERIKSAAN, DAN STRATEGI PEMERIKSAAN

Kecurangan dalam pembuatan daftar gaji menjadi perhatian auditor. Kecurangan semacam ini timbul dari (a) adanya pegawai fiktif yang dimasukkan dalam daftar gaji, dan (2) kemungkinan kesalahan yang disengaja dalam menyusun klasifikasi daftar gaji, ini berarti ada karyawan yang dihitung dengan tarif yang lebih tinggi. Disamping adanya kecurangan tersebut, akuntan harus memperhatikan ketelitian perhitungan, sejak penghitungan waktu hadir, insentif, sampai dengan pembuatan daftar gaji dan pembuatan cek gaji.

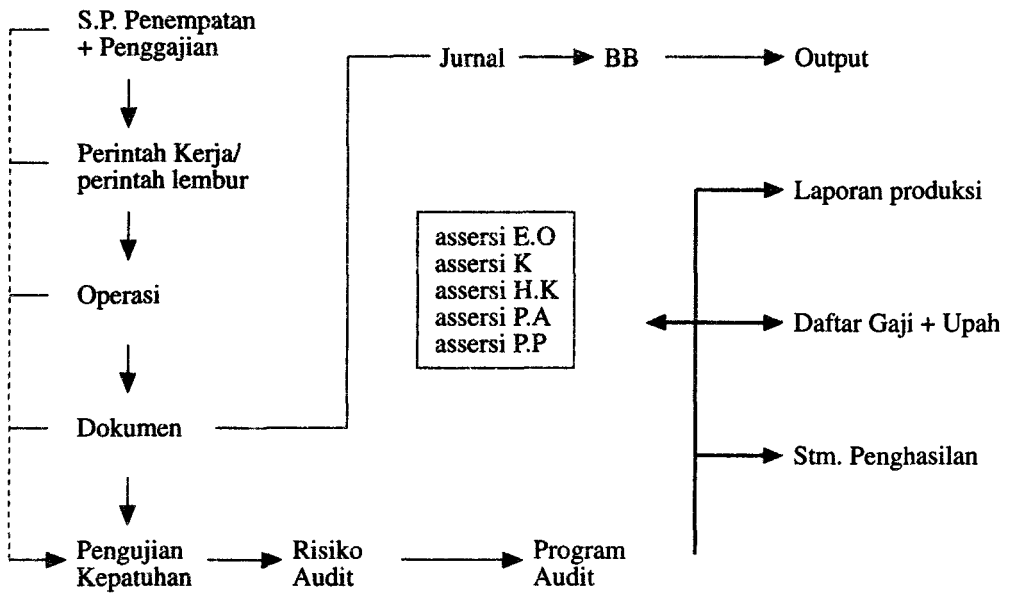
Dalam setiap perusahaan, periode pembayaran gaji dilakukan secara berbeda-beda tergantung pada karakter bisnisnya masing-masing. Pada umumnya pembayaran gaji untuk para buruh dilakukan secara mingguan, sedangkan pembayaran gaji untuk karyawan staff dilakukan secara bulanan atau tengah-bulanan. Disamping itu, apabila perusahaan membayarkan bonus ataupun insentif jasa produksi mungkin pula dibayarkan dengan periode catur wulan, semesteran dan seterusnya. Segala cara pembayaran tersebut mempunyai akibat sendiri-sendiri terhadap risiko kesalahan dalam pemeriksaan.

Berbagai aspek risiko di atas akan mempengaruhi strategi audit siklus jasa-jasa tenaga kerja ini, oleh karena itu hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah:

- a. Risiko audit yang utama timbul dari pemrosesan transaksi penggajian.
- b. Perusahaan pada umumnya memperluas cakupan pengendalian intern untuk transaksi penggajian.
- c. Saldo utang gaji pada akhir tahun kadangkala tidak material.

Pertimbangan strategis tersebut, mengharuskan auditor menggunakan pola pengujian transaksi seperti terlihat dalam gambar 4.1 yang disajikan di halaman berikut ini.

Peraga 4.1 Pola Pengujian Transaksi



Teknis audit yang disarankan:

1. Verifikasi kecermatan penyajian berbagai saldo, daftar, dan buku pembantu.
2. Terapkan prosedur analitikal.
3. Lakukan Inspeksi proses penghitungan daftar gaji dan upah.
4. Hitung kembali dan lakukan pengujian terhadap daftar gaji dan upah.
5. Bandingkan penyajian statemen dengan GAAP.

D. STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN JASA-JASA TENAGA KERJA

1. Aspek Struktur Pengendalian Intern

Auditor harus memahami struktur pengendalian intern dalam aktivitas pembayaran gaji. Ketiga unsur pengendalian intern harus dipahami, agar dapat menentukan risiko audit yang bakal dihadapinya. Aspek pengendalian yang harus diperhatikan oleh Auditor adalah:

- a. **Lingkungan pengendalian**, sangat dipengaruhi sistem perekonomian yang berlaku. Dalam menerapkan sistem penggajian ini dipengaruhi oleh kesepakatan kerja dengan organisasi buruh setempat. Dari segi operasi jasa-jasa tenaga kerja, kecermatan pencatatan transaksi jasa tenaga kerja sangat menentukan kecermatan catatan akuntansi. Dalam masalah penggajian ini manajer personalia menghadapi masalah yang sangat pelik, karena pada dasarnya transaksi tenaga kerja terjadi setiap saat bersamaan dengan operasinya perusahaan. Dalam praktik yang sehat untuk operasi perusahaan diperlukan adanya anggaran yang secara formal diikuti oleh manajemen, dan disamping itu penentuan standard ataupun tarip yang berlaku dalam kompensasi jasa tenaga kerja sangat dibutuhkan.
- b. **Sistem Akuntansi**, mencerminkan proses penanganan transaksi penggajian dalam operasi perusahaan. Auditor harus memahami sistem yang digunakan untuk menangani transaksi jasa-jasa tenaga kerja, beserta aspek pengendaliannya. Dalam perusahaan modern dewasa ini, aktivitas jasa-jasa tenaga kerja diolah dengan bantuan komputer, dengan memperhatikan tingkat keruwetan yang sangat tinggi dalam transaksi ini. Hal yang harus diperhatikan terutama berkaitan dengan sistem yang sedang berlangsung (*existing the systems*), mengingat sistem akuntansi yang dirancang kadangkala tidak berlaku. Dalam pelaksanaan operasi sistem penggajian sering kali kekuatan berbagai kepentingan individual mengalahkan sistem yang dirancang oleh manajemen.
- c. **Prosedur pengendalian**, menghendaki pelaksanaan 5 aspek kategorisasi sistem pengendalian intern dalam operasi perusahaan. Kelima kategori tersebut meliputi otorisasi yang memadai, dokumen dan buku-buku catatan, pemisahan tugas, akses kendalian, dan pengecekan oleh pihak yang independen.

2. Dokumen dan Catatan Akuntansi

Dokumen-dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur penggajian antara lain sebagai berikut:

- a. **Personel authorization**, adalah surat keputusan yang berisi penempatan dan penugasan seseorang karyawan dalam posisi dan jabatan tertentu.
- b. **Clock card**, adalah formulir daftar hadir karyawan (presensi)
- c. **Time ticket**, adalah formulir yang digunakan untuk mencatat waktu kerja seseorang karyawan atas penugasannya pada jabatan dan pekerjaan tertentu.
- d. **Payroll Register**, adalah laporan yang berisi informasi penggajian seluruh karyawan perusahaan. Dalam daftar ini dihitung berapa gaji atau upah seseorang karyawan.
- e. **Payroll check**, adalah dokumen yang berisi perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang sebagai kompensasi yang diserahkan kepadanya.

-
-
- f. **Labor cost distribution summary**, adalah laporan yang berisi jumlah pembayaran gaji setiap periode untuk setiap klasifikasi rekening gaji.
 - g. **Employee personnel file**, merupakan data permanen yang berisi risalah kerja setiap karyawan yang memuat: kapan mulai bekerja, riwayat penempatan kerja dan kariernya, evaluasi terhadap prestasi kerja, riwayat penggajian yang pernah diperolehnya, dan lain-lain).
 - h. **Personnel data master file**, adalah arsip data personel berkomputer yang termutakhir (*current*) yang berisi keseluruhan aspek pokok dalam sistem penggajian, misalnya: perhitungan gaji, diskripsi kerja, potongan-potongan, gaji karyawan, dan lain-lain.
 - i. **Employee earnings master file**, adalah arsip data personel berkomputer mengenai penghasilan masing-masing karyawan, potongan-potongan, dan gaji bersih sampai dengan saat (tanggal) tertentu.

3. Fungsi

Fungsi personalia melibatkan aktivitas bagian-bagian lain yang berkaitan dengan pemberian kompensasi kepada seseorang karyawan perusahaan. Kerjasama di antara berbagai bagian tersebut menunjukkan fungsi tertentu yang antara lain:

- a. *Hiring employees*, fungsi ini berkaitan dengan proses penempatan karyawan pada suatu unit kerja. Penempatan seseorang dalam unit kerja dengan suatu surat keputusan, dengan disertai penetapan mengenai klasifikasi pekerjaan, penetapan tarip gaji, dan otorisasi pembayaran gaji kepada seseorang karyawan.
- b. *Authorizing payroll changes*, adalah fungsi personalia yang berkaitan dengan penetapan struktur gaji/upah seseorang beserta perubahannya dalam sistem penggajian perusahaan. Penetapan perubahan tarip gaji/upah dengan suatu surat keputusan pejabat yang berwenang. perubahan tarip ini disebabkan adanya kenaikan berkala, kenaikan pangkat, promosi jabatan, ataupun alasan lainnya.
- c. *Preparing attendance and timekeeping data*, adalah fungsi personalia yang berkaitan dengan pencatatan kehadiran seseorang dalam kantor atau pabrik, dan pencatatan aktivitas seseorang di unit kerjanya masing-masing. Fungsi ini sangat rawan mengingat aktivitas pencatatan harus dilaksanakan dari waktu ke waktu. Bagian personalia harus mengamankan agar kartu hadir benar-benar digunakan oleh pemegang kartu. Demikian pula pencatatan aktivitas kerja di tempat kerjanya masing-masing, harus diawasi oleh bagian personalia. Sebagai contoh: perintah lembur seringkali dimanipulasi dengan kerjasama antara para bawahan dengan atasannya masing-masing.
- d. *Preparing the payroll*, adalah fungsi personalia yang berkaitan dengan penyiapan daftar gaji seluruh karyawan perusahaan. Bagian personalia menyiapkan daftar gaji berdasarkan informasi dari kartu hadir dan catatan waktu kerja setiap individu karyawan. Data tersebut diolah dengan memperhatikan tarip yang telah ditetapkan untuk setiap individu karyawan.
- f. *Recording the payroll*, adalah fungsi akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan semua transaksi penggajian. Proses pencatatan ini dilakukan setelah bagian akuntansi menerima dokumen-doku-men yang berkaitan dengan pembayaran gaji. Dalam proses pencatatan

ini dibebankan biaya-biaya yang terjadi selama satu periode akuntansi, serta pengakuan terhadap hutang gaji.

- g. *Paying the payroll*, fungsi ini berkaitan dengan pembayaran gaji kepada setiap individu karyawan. Pada dasarnya fungsi ini dibawah kendali kashir perusahaan, namun dalam praktik dibentuk tersendiri kashir pembayaran gaji. Dalam perusahaan besar, pembayaran gaji dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak bank dengan membentuk rekening gaji dan upah. Dengan demikian pembayaran gaji/upah karyawan ditangani langsung oleh bank, sedangkan bagian keuangan dan kashir menangani transfer keseluruhan uang yang akan dibayarkan sebagai gaji/upah tersebut.
- h. *Filling payroll tax returns*, fungsi ini berkaitan dengan penanganan pembayaran pajak untuk setiap individu karyawan (di Indonesia, berdasarkan PPh 21). Bagian personalia harus melakukan pembayaran pajak penghasilan tersebut tepat waktu untuk menghindari denda keterlambatan, penggunaan dana yang menyimpang, atau tindak kejahatan.

Berbagai aktivitas dalam sistem penggajian tersebut dapat dilihat dalam gambar 4.2.

4. Pemahaman terhadap dokumentasi transaksi penggajian

Dengan memperhatikan sistem dan prosedur penggajian seperti tergambar dalam peraga 4.2 tersebut, auditor harus melakukan evaluasi struktur pengendalian intern berbagai transaksi pembayaran gaji. Auditor harus melakukan observasi, wawancara, dan review dokumentasi pembayaran gaji untuk memahami apakah sistem yang ditetapkan manajemen dapat berjalan ataukah tidak. Sistem yang digambarkan dalam peraga tersebut menggunakan pengolahan informasi berbasis komputer, yang tentunya akan berbeda dengan proses manual. Meskipun keduanya sangat berbeda yang lebih dipentingkan bagi Auditor adalah proses pengambilan keputusan, operasi transaksi, dan proses pengolahan informasi yang dihasilkan. Hal ini menuntut pengamatan yang cermat bagaimana keseluruhan proses tersebut terkontrol dalam suatu sistem yang terpadu. Adanya unsur pengendalian yang memadai akan memberikan keyakinan semua proses yang dijalankan dalam sistem tersebut telah berjalan sebagaimana aturan yang ditetapkan. Oleh karenanya auditor harus menanyakan melalui wawancara dengan personel-personel yang bertanggungjawab terhadap berbagai fungsi yang terkait dalam sistem personalia. Beberapa contoh pertanyaan disajikan berikut ini:

Fungsi

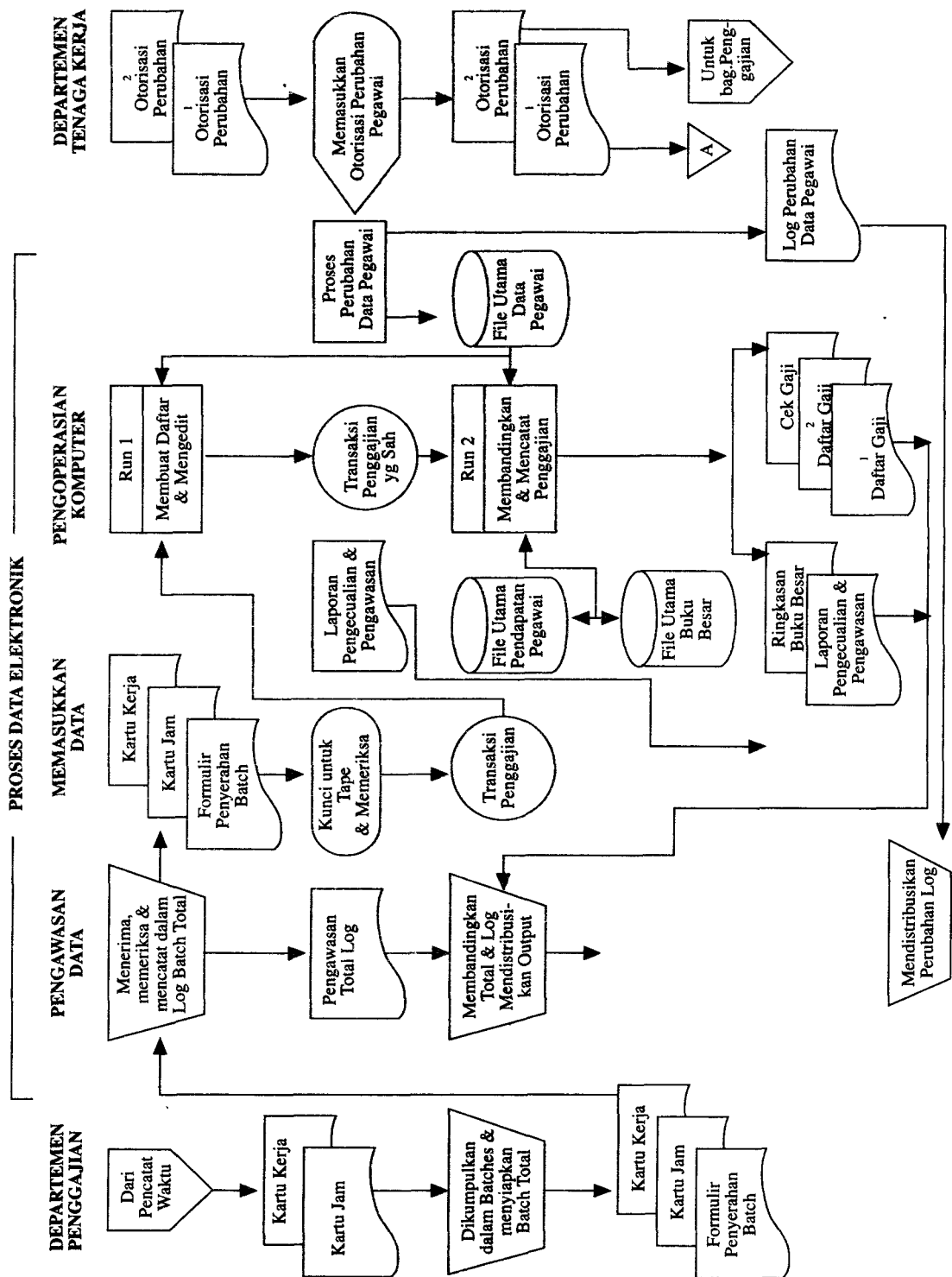
Contoh Pertanyaan

Hiring employees

- Apakah surat penempatan kerja disiapkan oleh petugas departemen tersebut?
- Apakah akses pada personnel data master file hanya dibatasi untuk petugas yang bertanggungjawab saja?

Otorisasi perubahan gaji

- Apakah setiap perubahan terhadap tarif maupun potongan gaji telah disetujui oleh pejabat yang berwenang?



| | |
|--|--|
| Penyiapan daftar hadir dan data waktu kerja | <ul style="list-style-type: none"> - Apakah penggunaan kartu hadir diawasi dengan baik? - Apakah setiap waktu kerja serta jam kerja yang dilaporkan telah memperoleh persetujuan dari pengawas? |
| Penyiapan daftar gaji | <ul style="list-style-type: none"> - Apakah total jam kerja setiap batch produksi beserta daftar gajinya telah diverifikasi? - Apakah data kunci telah diverifikasi dan di edit dalam electronic data processing? |
| Pencatatan penggajian | <ul style="list-style-type: none"> - Apakah laporan pengendalian dan pengecualian-pengecualian direviem dengan data control - Apakah daftar gaji disimpan dalam departemen penggajian dan dibandingkan dengan data asli mengenai operasi tiap batch. |
| Pembayaran gaji, dan perлиндungan klaim gaji | <ul style="list-style-type: none"> - Apakah daftar-daftar gaji, potongan gaji dan lainnya, serta dalam hubungannya dengan check gaji, apakah diverifikasi oleh pejabat yang independen. |

Contoh pertanyaan tersebut harus disesuaikan dengan kasus yang terjadi dalam suatu perusahaan, mengingat tidak ada perlakuan yang seragam dalam pola penggajian. Dalam praktik audit, ternyata akan ditemukan bahwasannya setiap perusahaan mempunyai kekhasan sendiri-sendiri, mengingat adanya perbedaan budaya, filosofi produksi, tingkat kesulitan proses produksi beserta risikonya, serta berbagai aspek lainnya. Dengan kekhasannya masing-masing, auditor harus secara kreatif merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik guna mendeteksi bagaimana operasi sistem penggajian tersebut berjalan. Kemampuan Auditor menggali permasalahan manajerial yang ada, akan sangat membantu kelancaran proses audit.

E. PENAKSIRAN RISIKO PENGENDALIAN

Proses penaksiran risiko pengendalian (*assesing control risk*) untuk transaksi pembayaran gaji dimulai dengan identifikasi potensi salah saji (*potential misstatements*) dan cara pengendalian yang diperlukan. Berdasarkan identifikasi tersebut auditor dapat menemukan kemungkinan pengujian yang akan dilakukan. Bagaimana bentuk dan langkah-langkah tersebut terlihat dalam uraian berikut.

a. *Hiring employees*, mempunyai risiko berikut:

- * **Potensi salah saji**, adanya pegawai fiktif yang dimasukkan ke dalam daftar gaji.
- * **Cara pengendalian**, setiap penempatan karyawan baru pada suatu unit kerja harus ada otorisasi dari departemen personalia.
- * **Bentuk pengujian**, auditor harus melakukan pengujian terhadap setiap bentuk otorisasi penempatan pegawai.

b. *Authorizing payroll changes*,

- * **Potensi salah saji**, kemungkinan munculnya pegawai menerima kenaikan gaji tidak sesuai dengan kenaikan tarif yang ditetapkan.

-
- * **Cara pengendalian**, Semua tarip perubahan harus diotorisasi oleh bagian personalia.
 - * **Bentuk pengujian**, Lakukan wawancara bagaimana prosedur yang berkaitan dengan persetujuan pemberian kenaikan tarip gaji/upah.
- c. *Preparing attendance and timekeeping data,*
- * **Potensi salah saji**, kemungkinan adanya pegawai yang dibayar tetapi tidak masuk kerja, atau jam kerjanya tidak sesuai.
 - * **Cara pengendalian**, penggunaan kartu hadir dan *time tickets* yang penggunaannya disupervisi oleh pegawai bagian personalia.
 - * **Bentuk pengujian**, Lakukan observasi prosedur penggunaan kartu hadir dan lakukan pengujian terhadap *time tickets* apakah selalu diawasi penggunaannya oleh petugas yang independen.
- d. *Preparing the payroll,*
- * **Potensi salah saji**, kemungkinan transaksi penggajian mungkin dicatat dengan memasukkan data yang salah atau palsu.
 - * **Cara pengendalian**, kunci verifikasi terletak dalam data entry dan pengecekan terhadap data penggajian yang sudah ada.
 - * **Bentuk pengujian**, lakukan observasi terhadap prosedur data entry, dan lakukan pengujian terhadap sesuatu yang dianggap menyimpang.
- e. *Recording the payroll,*
- * **Potensi salah saji**, kemungkinan proses pencatatan transaksi penggajian memang salah.
 - * **Cara pengendalian**, Hal-hal yang merupakan pengecualian dan laporan kendalian di telaah dengan dasar data control.
 - * **Bentuk pengujian**, Lakukan wawancara dengan pejabat yang ditugasi untuk mengetahui bagai persiapan pencatatan sehingga terjadi pengecualian tersebut.
- f. *Paying the payroll and protecting unclaimed wages,*
- * **Potensi salah saji**, kemungkinan cek gaji diberikan kepada orang yang tidak berhak.
 - * **Cara pengendalian**, perlu adanya pegawai yang khusus menangani penyerahan cek gaji/uang tunai.
 - * **Bentuk pengujian**, lakukan pengamatan langsung bagaimana praktik yang berlaku dalam pembagian cek gaji ataupun pembayaran gaji karyawan.
- g. *Filling payroll tax returns,*
- * **Potensi salah saji**, kemungkinan pajak penghasilan tidak ditangani dengan tepat waktu.
 - * **Cara pengendalian**, harus ditunjuk personel yang bertanggungjawab terhadap pembayaran pajak penghasilan atas gaji seluruh karyawan.
 - * **Bentuk pengujian**, Lakukan wawancara tentang prosedur penanganan pembayaran pajak penghasilan.

Analisis tersebut harus dipertimbangkan oleh auditor dalam penentuan langkah-langkah audit selanjutnya. Oleh karenanya harus dipertimbangkan dalam program audit subtansi. Bagaimana bentuk implementasi pengujiannya akan dibahas dalam subbab berikut ini.

F. PENGUJIAN SUBTANSI TERHADAP SALDO BIAYA GAJI

Pengujian subtansi terhadap saldo biaya gaji terdiri dari dua tahap, pertama penentuan risiko deteksi, dan kedua perumusan program audit. Dalam hal risiko deteksi dalam audit terhadap saldo gaji dan upah sangat dipengaruhi oleh bagaimana assersi manajemen sendiri, terutama dalam hal alokasi atau penilaiannya, mengenai eksistensi ataupun peristiwa pembentukannya, maupun proses pencatatannya itu sendiri. Pengujian subtansi terhadap assersi penggajian meliputi tiga aspek yaitu: (1) penerapan prosedur analitikal, (2) rekalkulasi rekening akrual, dan (3) verifikasi kompensasi para ofiser. Dalam program audit ini, prosedur telaah analitikal menjadi sangat relevan untuk diterapkan.

1. Penerapan prosedur analitikal. Pembedingan dengan elemen-elemen lain dalam laporan keuangan maupun standar yang berlaku dalam suatu industri sangat penting untuk memberi petunjuk terhadap kesalahan pencatatan yang disengaja maupun tidak. Dalam prosedur ini harus dibuat telaah berikut:
 - a. Bandingkan biaya gaji periode ini dengan saldo tahun lalu dan dengan jumlah yang dianggarkan.
 - b. Bandingkan saldo utang gaji akrual dengan saldo tahun lalu
 - c. Bandingkan total biaya gaji dengan penjualan bersih dan bandingkan pula dengan tahun yang lalu:
 - d. Bandingkan utang biaya gaji dengan total biaya gaji dan bandingkan pula dengan tahun yang lalu.
 - e. Lakukan rekonsiliasi total biaya gaji dengan jumlah yang dilaporkan dalam payroll tax return.

Apabila terdapat fluktuasi yang tidak diperkirakan sebelumnya dari prosedur tersebut, auditor harus memperoleh bukti guna mendukung terhadap assersi eksistensi dan okurensinya, kesempurnaannya, dan penilaian ataupun alokasinya.

2. Penghitungan kembali terhadap utang biaya gaji. Penghitungan kembali sangat penting dilakukan terhadap utang biaya gaji mengingat dalam praktik rekening tersebut digunakan untuk menampung penyimpangan ataupun selisih dalam pembayaran gaji dan upah. Assersi manajemen sering dinyatakan terlalu besar dibanding keadaan yang sebenarnya. Disamping itu harus pula diperhatikan mengenai konsistensi metode kalkulasi akrual dari periode ke periode.
3. Verifikasi kompensasi yang dibayarkan kepada para pimpinan (officers) perusahaan. Biasanya hal ini menyangkut hal yang sangat sensitif, namun karena kekuasaan ada ditangan mereka maka potensi kecurangan pada pusat-pusat kekuasaan dalam perusahaan akan menjadi sangat besar. Auditor harus cermat membandingkan antara gaji dan tunjangan yang disetujui untuk dibayarkan pada pejabat pimpinan tersebut.

Dalam banyak hal pengauditan terhadap komponen biaya gaji dan upah, harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Para manajer perusahaan memegang kekuasaan dan otoritas dalam menggerakkan operasi perusahaan, disisi lain mereka juga mempunyai kepentingan terhadap gaji, bonus dan segala bentuk kompensasi. Kecenderungan melebih-lebihkan jasa maupun prestasi mereka menyebabkan munculnya kecenderungan manipulasi perhitungan kompensasi yang diperhitungkan mereka. Oleh karena itu, auditor terlebih dahulu harus memahami kebijaksanaan yang diambil dalam hal pemberian kompensasi kepada para manajer perusahaan tersebut. Hal-hal yang penting dan sangat rawan dalam perhitungan kompensasi gaji manajer (dan terutama direksi), harus mendapat perhatian *auditor in charges* sendiri, dan tidak boleh didelegasikan kepada para asisten auditor.

G. KERTAS KERJA AUDIT

Ada beberapa kertas kerja pemeriksaan yang harus dipersiapkan oleh auditor dalam rangka pemeriksaan biaya-biaya tenaga kerja. Beberapa kertas kerja pemeriksaan yang dibuat antara lain:

1. Ringkasan biaya tenaga kerja
2. Ringkasan kebijaksanaan umum berdasar notulen rapat direksi mengenai berbagai keputusan tenaga kerja.

SOAL BAB 4

Soal Kelompok A

Dalam soal berikut ini Saudara diminta untuk menilai pernyataan-pernyataan berikut. Berilah tanda S, bila pernyataan tersebut salah, dan sebaliknya berilah tanda B, bila pernyataan tersebut benar.

- 1. Assersi terhadap saldo biaya gaji dan upah merupakan tanggungjawab manajemen, oleh karena itu auditor tidak perlu lagi melakukan pengujian terhadap eksistensi saldo utang gaji maupun biaya gaji yang disajikan dalam laporan keuangan klien.
- 2. Assersi manajemen dalam hal eksistensi dan peristiwa yang membentuk transaksi dalam siklus jasa-jasa tenaga kerja berhubungan dengan kedua siklus lainnya yaitu: siklus pengeluaran dan siklus produksi.
- 3. **Inherent risks** yang terbentuk dalam transaksi siklus jasa-jasa tenaga kerja, berhubungan dengan kemungkinan salah saji saldo biaya gaji dan upah.
- 4. Assersi manajemen terhadap penyajian dan pengungkapan transaksi biaya tenaga kerja dalam laporan keuangan ditunjukkan oleh rincian biaya gaji dan upah yang disajikan sebagai penjelasan pos-pos laporan rugi-laba.
- 5. Semua biaya tenaga kerja yang tidak operasional dalam proses produksi untuk periode yang diaudit harus dimasukkan dalam unsur pembentuk kos produk yang diselesaikan dalam proses yang bersangkutan dan disajikan dalam neraca.
- 6. Dalam memahami komponen biaya tenaga kerja, auditor perlu mengadakan penelaahan terhadap perjanjian perburuhan yang ditetapkan bersama antara majikan (manajemen) dengan wakil-wakil buruh atau serikat sekerja yang diakui.
- 7. Untuk memperoleh keyakinan terhadap eksistensi biaya gaji yang disajikan dalam laporan keuangan, auditor membuat program audit sebagai berikut: (a) melakukan perjalanan keliling untuk melakukan inspeksi semua vasilitas kerja yang dimiliki klien untuk mebuat suatu produk, (b) membuat analitical review terhadap biaya gaji periode ini, dan (c) melakukan review terhadap jurnal pencatatan transaksi depresiasi dan analisis terhadap biaya reparasi.
- 8. Prosedur audit yang digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap saldo utang gaji karyawan, auditor harus mengadakan penghitungan kembali terhadap pembayaran gaji dan upah serta melakukan analisis perbandingan utang gaji dan upah pada bulan-bulan yang lalu serta besarnya saldo utang pada periode yang lalu.
- 9. Dalam melakukan evaluasi sistem pengendalian intern klien, akuntan tidak perlu memperhatikan apakah karyawan kantor patuh menggunakan kartu jam hadir mengingatkan para karyawan kantor menangani pekerjaan yang memperoleh kompensasi secara bulanan dan tidak memerlukan perhitungan tarif standard.
- 10. Prosedur konfirmasi terhadap utang gaji dan upah yang terjadi sampai dengan tanggal neraca tidak perlu dilakukan, mengingat sumber informasi dari kalangan intern perusahaan sendiri.

Soal Kelompok B

Pilihlah satu jawaban yang paling benar di antara empat alternatif jawaban berikut ini. Bila tidak ada alternatif jawaban yang tepat pilihlah huruf e dalam lembar jawaban saudara.

1. Auditor melakukan penelusuran terhadap bukti kartu hadir dan *time tickets* dengan tujuan untuk menentukan apakah:
 - a. pembayaran gaji tersebut benar-benar ada.
 - b. Penilaian rekening utang gaji dan biaya gaji disajikan secara wajar.
 - c. Pengungkapan dalam laporan keuangan telah memadai.
 - d. Apakah karyawan memang bekerja di pabrik dengan semestinya.
2. Tujuan auditor melakukan analisis atas biaya gaji dan upah dengan memperbandingkan dengan distribusi dan alokasi biaya tenaga kerja tidak langsung serta pembebanannya kepada produk yang dihasilkan, bertujuan untuk:
 - a. menentukan bahwa pembayaran gaji tersebut benar-benar ada.
 - b. Penilaian rekening utang gaji dan biaya gaji disajikan secara wajar.
 - c. Pengungkapan dalam laporan keuangan telah memadai.
 - d. Apakah karyawan memang bekerja di pabrik dengan semestinya.
3. Auditor hendaknya melakukan konfirmasi dalam pemeriksaan terhadap piutang kepada karyawan. Saran tersebut tidak perlu dilakukan mengingat:
 - a. Para karyawan adalah unsur internal perusahaan yang kejujurannya dijamin.
 - b. Hasil konfirmasi tidak memberikan tambahan informasi yang meyakinkan auditor, dan sisamping itu klien cenderung akan menyajikan informasi dengan layak.
 - c. Tidak ada prosedur standar yang menghasruskannya.
 - d. Tidak ada jawaban yang tepat
4. Dalam rangka pengauditan sistem penggajian yang berkomputer, Auditor harus selalu melakukan pengketesan terhadap data yang digunakan, untuk melakukan pengujian terhadap:
 - a. adanya nomor karyawan yang hilang.
 - b. kelayakan terhadap persetujuan lembur yang diberikan oleh supervisor.
 - c. *time tickets* yang digunakan untuk nomor job yang salah.
 - d. kecocokan antara jumlah jam yang dilaporkan dalam *clock cards* dengan *time tickets*.
5. Fungsi *preparing attendance and timekeeping data* mempunyai potensi melakukan kesalahan (potential misstatement) berikut:
 - a. Para pekerja mungkin dibayar untuk jam kerja yang tidak pernah dilakukannya.
 - b. Adanya pegawai fiktif yang diperhitungkan tan sepengetahuan departemen personalia.
 - c. Cek pembayaran gaji tidak diterimakan kepada pegawai yang berhak.
 - d. Adanya penerapan tarif standar yang fiktif.

-
-
6. Prosedur pengendalian intern yang efektif terhadap fungsi pengajian, meliputi:
- Mencocokkan antara jumlah angka dalam job time tickets dengan job reports yang dibuat oleh pegawai yang bertanggungjawab terhadap poduk khusus.
 - Melakukan verifikasi kecocokan antara job time tickets dengan employee clock card.
 - Pencatatan dalam journal pembayaran gaji dan upah oleh pegawai yang melaporkan kepada supervisor di dapartemen personalia.
 - Penghitungan terhadap tarip yang disetujui oleh supervisor di departemen personalia.
7. Program pemeriksaan berikut ini bertujuan untuk menguji apakah disposisi pembebanan kompensasi jasa tenaga kerja pada produk telah memadai, **kecuali**:
- lakukan penelusuran kepada bukti-bukti transaksi pembayaran gaji beserta dokumen pendukungnya.
 - Lakukan analisis terhadap penghitungan gaji dan upah dengan membandingkan dengan bulan yang lalu atau periode sebelumnya.
 - lakukan pengetesan terhadap perhitungan gaji dan upah apakah besarnya biaya gaji didasarkan pada tarip yang berlaku.
 - lakukan pengujian apakah utang gaji telah memperhatikan jam lembur karyawan.
8. Berikut ini disebutkan dokumen-dokumen kunci yang digunakan untuk melakukan transaksi dalam siklus jasa-jasa tenaga kerja, **kecuali**:
- personel authorization*
 - payroll tax returns*
 - vendor invoice*
 - time tickets*
9. Berikut ini disebutkan catatan dan/atau buku-buku yang digunakan untuk menangani transaksi siklus pengeluaran, **kecuali**:
- unpaid payroll file*
 - payroll register*
 - employee personel file*
 - employee data master file*
10. Berbagai fungsi yang terlibat untuk menangani transaksi pembelian adalah, **kecuali**:
- preparing the payroll*
 - hiring employees*
 - recording the payroll liability*
 - recording the payroll*

Bab 5

Audit Terhadap Siklus Produksi

BAB INI AKAN MEMBAHAS:

1. Bentuk siklus produksi dalam suatu perusahaan manufacturing
2. Perumusan tujuan audit terhadap siklus produksi
3. Materialitas, risiko audit, dan perumusan strategi audit
4. Pemahaman terhadap struktur pengendalian intern dalam siklus produksi pada perusahaan manufaktur
5. Bagaimana program pengujian substantansi terhadap saldo persediaan

A. SIKLUS PRODUKSI

Siklus produksi berkaitan dengan proses pengubahan bahan baku menjadi produk jadi. Aktivitas produksi bermula dengan permintaan bahan baku dan bahan-bahan lainnya untuk diproses dalam pabrik dan diakhiri dengan penyerahan produk jadi ke gudang. Dalam siklus ini terjadi interaksi antara jasa-jasa tenaga kerja, peralatan produksi, dan bahan baku dan pembantu yang akan diolah menjadi produk baru yang mempunyai nilai guna lebih tinggi.

Komponen persediaan terdiri dari; persediaan bahan baku, persediaan bahan setengah jadi (persediaan produk dalam proses), persediaan produk jadi dan persediaan supplies. Ke empat kategori persediaan tersebut terbentuk dalam perusahaan *manufacturing*. Komposisi untuk perusahaan dagang ataupun perusahaan jasa akan berbeda dengan perusahaan *manufacturing*. Apapun bentuk perusahaan klien prosedur dan teknik yang digunakan dalam pemeriksaan pada dasarnya akan sama. Masalah adalah dalam perusahaan *manufacturing* pemeriksaan terhadap produk dalam proses mungkin lebih rumit. Hal ini mengingat untuk mengetahui berapa komposisi penyelesaian suatu produk diperlukan justifikasi dari para ahli untuk menentukan berapa besarnya tingkat penyelesaian suatu produk.

Pencatatan transaksi akuntansi biaya bermula dari penyerahan bahan baku dan pembantu diakhiri dengan penyerahan produk yang diselesaikan ke gudang. Hal ini berbeda dengan pendekatan dalam pengauditan, yang membagi aktivitas audit dalam beberapa siklus audit. Transaksi pencatatan pembelian bahan diaudit melalui siklus pembelian; transaksi yang mempengaruhi tenaga kerja langsung dan overhead pabrik diaudit melalui siklus jasa-jasa tenaga kerja; transaksi yang mempengaruhi pencatatan produk dalam proses, persediaan produk jadi dan produk dalam proses diaudit melalui siklus produksi; dan transaksi yang membentuk kos produk terjual dan piutang dagang diaudit melalui siklus pendapatan. Proses akuntansi biaya beserta siklus audit yang mempengaruhinya digambarkan dalam peraga 5.1.

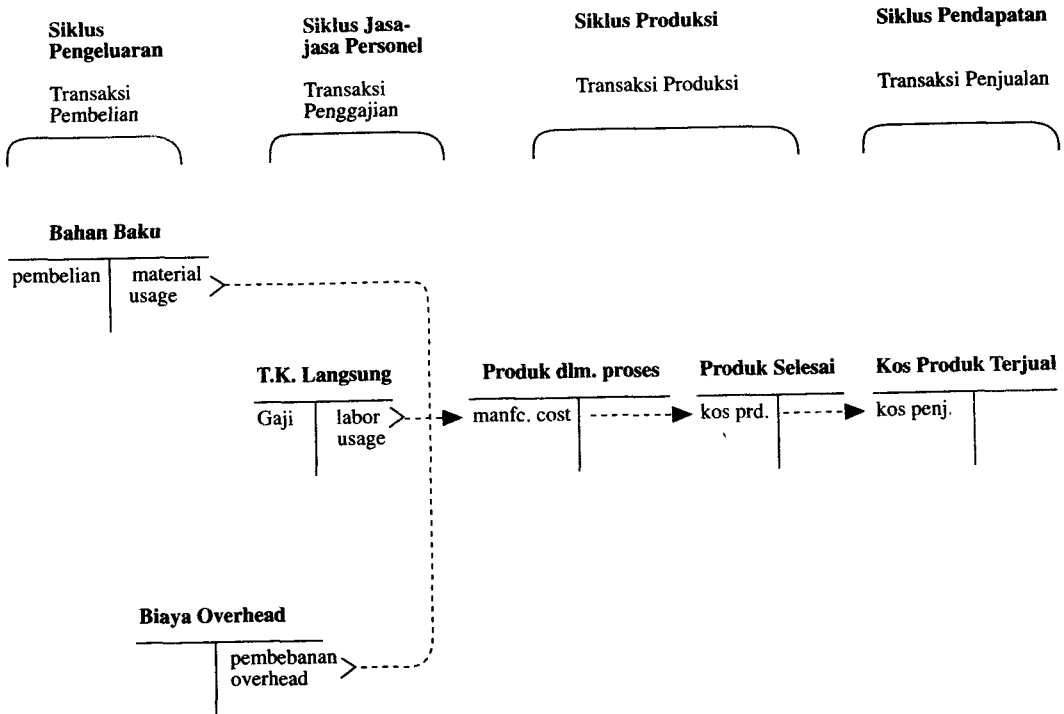
B. TUJUAN AUDIT DALAM SIKLUS PRODUKSI

Tujuan khusus audit terhadap siklus produksi adalah untuk memperoleh keyakinan terhadap penyajian informasi persediaan produk jadi yang dimiliki perusahaan dan berapakah kos produk terjual (*cost of goods sold*). Tujuan ini antara lain:

- a. Kos produk terjual mencerminkan kos produk yang telah dikirimkan kepada pembeli dalam periode yang diaudit.
- b. Kos produk terjual mempertimbangkan pengaruh dari semua transaksi penjualan dalam periode ini.
- c. Kos produk terjual menggunakan basis metode aliran kos yang dapat diterima serta diterapkan dengan konsisten.
- d. Kos produk terjual diklasifikasi dengan layak dalam statemen penghasilan, dan penggunaan metode aliran kos telah diungkapkan.

Prosedur yang diterapkan dalam audit terhadap siklus produksi ini akan dijelaskan dalam subbab berikut.

Peraga 5.1 Hubungan Siklus Produksi dengan Siklus Transaksi Lainnya



C. MATERIALITAS, RISIKO AUDIT, DAN STRATEGI AUDIT

Dalam perusahaan manufacturing berapa nilai persediaan dan kos produk terjual (*cost of goods sold*), biasanya mempunyai peranan penting dalam penyajian dalam neraca maupun statemen penghasilan. Dalam siklus transaksi akuntansi biaya, auditor harus menyadari bahwa transaksi ini dibentuk oleh transaksi intern yang memberi indikasi adanya risiko melekat dalam proses audit. Proses produksi yang dibentuk terhadap usulan pihak intern perusahaan mempunyai kemungkinan dipalsukan dengan tujuan untuk memperbaiki posisi informasi keuangan atau mungkin pula ada usaha-usaha melakukan penyelewengan. Sebagai akibatnya, auditor harus menerima keadaan bahwa semua transaksi produksi pada dasarnya merupakan sumber kesalahan yang material dalam penyajian laporan keuangan dengan menanggung risiko salah saji yang sangat tinggi.

Kepercayaan terhadap hal tersebut diatasi dengan usaha untuk memahami struktur pengendalian intern dalam perusahaan apakah sudah cukup memadai. Apabila tingkat keyakinan Auditor sangat tinggi maka Dia berani mengambil risiko kemungkinan timbulnya salah saji dalam penyajian informasi keuangan. Sebaliknya bila derajat kepercayaan Auditor rendah, maka Dia sangat hati-hati dalam mempertimbangkan kemungkinan timbulnya salah saji tersebut.

Auditor harus memperhatikan bahwa volume transaksi ini biasanya tinggi. Disamping itu besaran kos produk terjual mempunyai peranan yang dominan dalam statemen penghasilan. Sebagai akibatnya akuntan harus mempertimbangkan kemungkinan timbulnya kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Mengingat risiko ini sangat tinggi, maka auditor harus mempunyai pemahaman yang mendalam terhadap struktur pengendalian intern perusahaan (klien). Seberapa jauh pemahaman auditor, kesemuanya itu tergantung pada strategi yang dirumuskannya sendiri. Apabila dimungkinkan proses audit harus mempertimbangkan pula terhadap keefektipan biaya yang harus dikeluarkan oleh auditor.

D. STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN

Pembahasan terhadap struktur pengendalian intern dalam perusahaan didasarkan pada ketiga aspek pengendalian yang meliputi: lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian. Rincian dari ketiga aspek pengendalian dibahas berikut ini.

1. Lingkungan Pengendalian

Dalam struktur organisasi perusahaan yang bergerak dalam bidang manufacturing, pejabat yang bertanggungjawab dalam proses produksi adalah wakil direktur produksi (direktur produksi). Pejabat ini yang bertanggungjawab mulai dari perencanaan dan pengendalian produksi. Metode pengendalian manajemen yang diterapkan antara lain meliputi: (1) penganggaran, (2) penandingan antara rencana produksi beserta hasilnya serta menyampaikan laporannya kepada setiap manager yang bertanggungjawab, dan (3) menyelidiki penyimpangan yang terjadi serta memutuskan tindakan koreksi yang dipandang perlu.

Kebijaksanaan yang berkaitan dengan personnel mempertimbangkan kriteria yang diperlukan departemen produksi, pelatihan kerja, dan kriteria promosi serta pemberian kompensasi menjadi tanggungjawab pimpinan departemen ini. Oleh karena itu segala aspek yang berkaitan dengan kebijaksanaan operasional bagi para karyawan pabrik tidak hanya menjadi tanggungjawab bagian personalia, tetapi juga menjadi tanggungjawabnya pula.

2. Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi dalam perusahaan manufacturing meliputi buku besar (*controlling account*) dan catatan pembantu untuk bahan baku, produk dalam proses, dan produk jadi. Termasuk dalam sistem akuntansi ini berupa subsistem akuntansi biaya dengan memperhatikan metode pengumpulan biayanya, yaitu metode pesanan dan metode proses. Bagaimana cara pengumpulan biaya-biaya dalam suatu periode akuntansi tergantung pada design sistem pengumpulan biayanya.

3. Prosedur Pengendalian

Prosedur pengendalian yang dibentuk dalam sistem ini, meliputi adanya otorisasi yang layak, adanya dokumen dan catatan yang memadai, adanya pemisahan tugas, adanya akses terhadap pengendalian, dan adanya pengecekan oleh individu yang independen terhadap semua transaksi produksi. Auditor harus memperhatikan bagaimana prosedur pengendalian tersebut telah dioperasikan oleh klien.

4. Dokumen-dokumen dalam Siklus Produksi

Berikut disajikan daftar dokumen yang diperlukan dalam penangan siklus produksi yang antara lain:

- a. *Production order* (perintah produksi), yaitu perintah produksi yang menunjukkan berapa banyak suatu produk harus diproduksi, serta spesifikasi produk yang dibuat. Perintah produksi dapat berupa *job order method*, maupun perintah berkelanjutan (*continuous*) dan dikeluarkan oleh Kepala Bagian Produksi (atau pejabat di atasnya).
- b. *Material requirement report* (laporan penggunaan bahan), adalah dokumen yang berisi daftar permintaan bahan baku atau bahan lainnya yang akan digunakan untuk suatu proses produksi.
- c. *Materials issue slip* (kartu pengeluaran bahan), merupakan perintah tertulis yang dikeluarkan oleh bagian produksi (atau oleh PPC) persetujuan mengeluarkan barang-barang yang dibutuhkan dalam berproduksi.
- d. *Time ticket* (kartu catatan waktu kerja), adalah kartu yang digunakan untuk mencatat aktivitas seorang karyawan di tempat kerjanya masing-masing.
- e. *Move ticket* (kartu pemindahan barang), adalah memo yang dibuat untuk memindahkan produk yang masih dalam proses dari departemen yang satu ke departemen berikutnya.
- f. *Daily production activity report* (laporan aktivitas produksi harian), adalah laporan harian yang dibuat untuk melaporkan berapa produk yang dibuat dalam satu hari kerja. Laporan ini dibuat oleh kepala bagian produksi atau para supervisor produksi.
- g. *Completed production report* (laporan produksi yang diselesaikan), adalah laporan yang berisi penegasan bahwa proses produksi yang diperintahkan oleh dokumen perintah produksi telah dilaksanakan.
- h. *Inventory subsidiary ledgers* (buku pembantu persediaan), adalah catatan yang dimiliki oleh bagian akuntansi mengenai berbagai macam persediaan barang-barang yang dimiliki perusahaan.

5. Fungsi-fungsi yang Terkait

Semua penanganan proses produksi dan pencatatan transaksi produksi meliputi berbagai fungsi dibawah departemen produksi, yang antara lain:

- a. Perencanaan dan Pengendalian Produksi, fungsi ini bertanggungjawab untuk menyusun rencana produksi dan pengendaliannya. Semua perintah produksi yang dikeluarkannya menggunakan formulir bernomor urut tercetak didasarkan pada pesanan dari para pelanggan. Perintah produksi dilengkapi dengan dokumen permintaan bahan, sukucadang, bahan pembantu, dan perlengkapan aproduksi lainnya. Apabila produksi ini didasarkan pada pesanan khusus dari pelanggan, maka kopi perintah produksi tersebut dikirimkan kepada pelanggan. Dalam hal ini, bagian PPC bertanggungjawab pula terhadap penggunaan bahan dan waktu kerja, dan melakukan penelusuran kemajuan penyelesaian pesanan sampai produk yang dipesan benar-benar selesai.
- b. Pengeluaran bahan baku, fungsi ini melaksanakan pengeluaran bahan berdasarkan dokumen yang dibuat oleh bagian PPC yang disebut *materials requisition slips*. Dalam slips ini dijelaskan mengenai jenis barang yang dibutuhkan, berapa banyak bahan yang

dibutuhkan, untuk pesanan nomor berapa, dan untuk departemen mana barang-barang tersebut akan digunakan, serta siapa penanggungjawab terhadap penggunaan bahan tersebut.

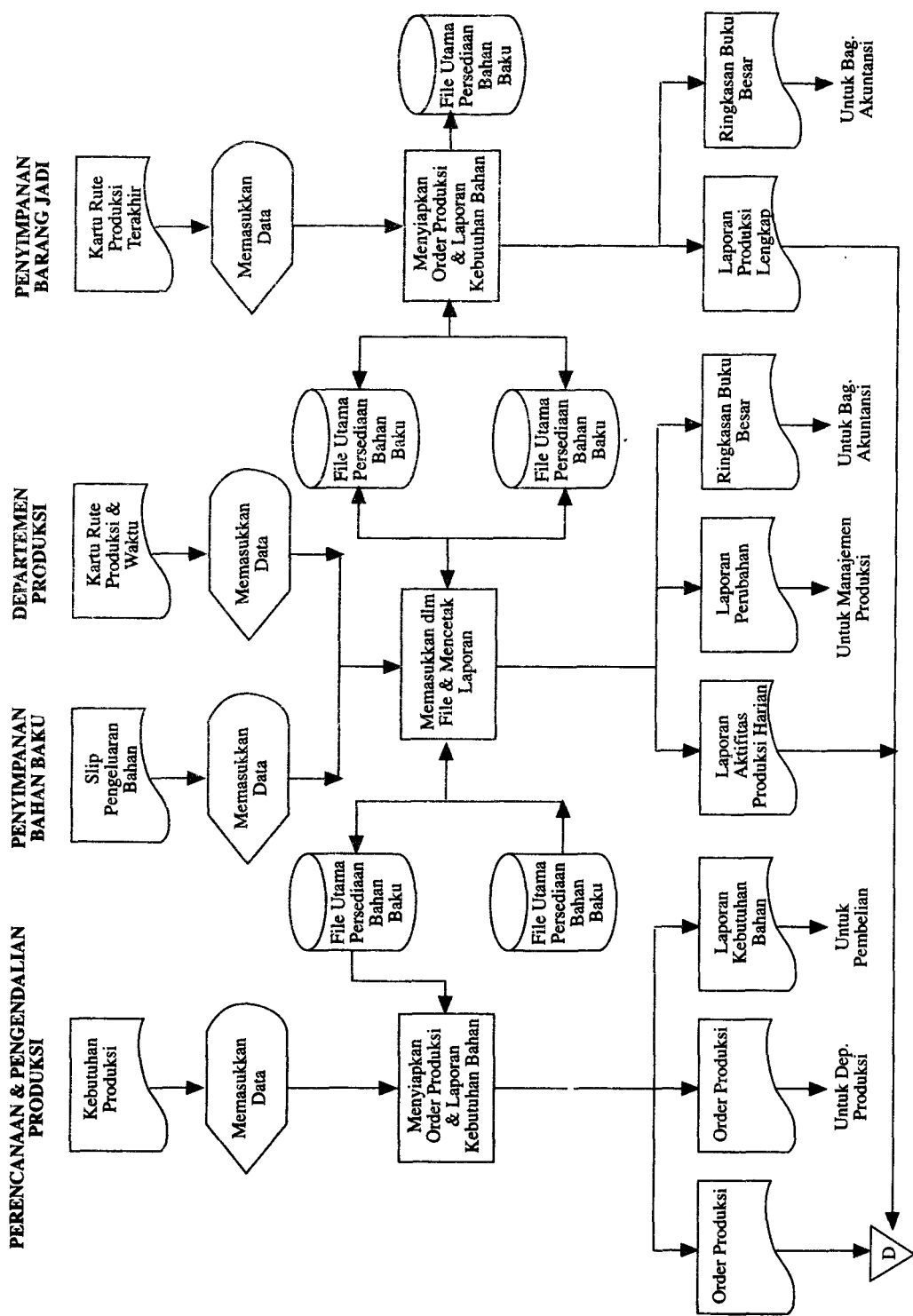
- c. Pemrosesan produk dalam departemen produksi, pemrosesan suatu produk ditangani oleh para pekerja dan dicatat dalam *time tickets*. Dokumen ini diperiksa oleh supervisor (mandor) dan harus dicocokkan dengan data yang ada dalam kartu hadir untuk menegaskan kebenaran apa yang dikerjakan oleh setiap pekerja pabrik. Apabila produk telah diselesaikan dan telah diperiksa oleh supervisor yang bertanggungjawab, maka produk tersebut segera dikirim ke departemen berikutnya dengan *moving tickets* dan akan diterima oleh petugas di departemen berikut dengan memberikan tanda penerimaannya.
- d. Penyerahan produk yang sudah terselesaikan ke gudang produk jadi, fungsi ini terkait dengan penyerahan produk selesai di gudang produk jadi. Semua penyerahan produk selesai ke gudang diakhiri dengan penerimaan produk tersebut dengan disertai tanda penerimaan dengan membubuhkan tanda tangan pejabat gudang pada *moving tickets*.
- e. Perlindungan terhadap persediaan produk yang sedang diproses, semua bahan-bahan yang berada di pabrik adalah bahan-bahan yang mudah dicuri atau rusak. Semua barang-barang tersebut harus diamankan dengan baik, yang oleh karenanya orang-orang yang berhubungan dengannya harus dibatasi. Perlindungan terhadap produk dalam proses dilengkapi dengan fasilitas untuk mengadakan pengawasan tempat produksi oleh para pengawas dan satuan pengamanan pabrik.
- f. Pembebanan dan pencatatan kos produk yang diselesaikan, fungsi ini berkaitan dengan aktivitas berikut:
 - (1) pembebanan bahan baku langsung dan buruh langsung kepada produk dalam proses.
 - (2) Penentuan biaya overhead pabrik kepada produk dalam proses.
 - (3) Penyerahan kos diantara departemen produksi.
 - (4) penyerahan kos produk terselesaikan kepada produk selesai.
- g. Pemeliharaan kebenaran saldo persediaan, fungsi ini berkaitan dengan aktivitas pengecekan oleh orang yang independen terhadap persediaan bahan, produk dalam proses dan produk jadi dengan buku besar yang berhubungan dengannya.

Masing-masing fungsi tersebut di atas mempunyai peranan dalam menghasilkan salah saji yang material. Auditor harus memahami pentingnya peran masing-masing fungsi tersebut, sehingga perlu perumusan pertanyaan yang tepat sasaran dalam kaitannya dengan operasinya. Daftar berikut ini menunjukkan bagaimana rumusan pertanyaan yang berkaitan dengan ketujuh fungsi tersebut di atas.

- a. Perencanaan dan Pengendalian Produksi, dengan pertanyaan:
 - a. apakah semua perintah produksi telah disetujui bagian PPC?
 - b. apakah formulir perintah produksi dengan nomor tercetak dihitung dengan tepat penggunaannya?
 - c. Apakah semua laporan aktivitas produksi harian dan laporan produk jadi telah direview oleh bagian PPC?

-
-
- b. Pengeluaran bahan baku,
 - a. Apakah setiap pengeluaran barang-barang dari gudang untuk keperluan produksi disertai dengan dokumen pengeluaran bahan yang ditandatangani pejabat yang berwenang?
 - b. Apakah ringkasan penggunaan bahan termasuk dalam laporan produksi harian?
 - c. Pemrosesan produk dalam departemen produksi,
 - a. Apakah setiap proses produksi dicatat dalam time ticket untuk mencatat aktivitas karyawan di unit terkait?
 - b. Apakah ringkasan penggunaan tenaga kerja beserta waktu kerjanya telah termasuk dalam laporan produksi harian?
 - d. Pemindahan produk yang sudah terselesaikan ke produk jadi,
 - a. Apakah penyerahan produk jadi ke gudang produk jadi telah diterima dan disertai dokumen penyerahan produk jadi tersebut?
 - b. Apakah penyerahan produk jadi di gudang diterima oleh pejabat yang berwenang menerimanya serta telah menandatangani dokumen yang dibutuhkan?
 - e. Perlindungan terhadap persediaan produk yang sedang diproses,
 - a. Apakah setiap akses terhadap persediaan bahan-bahan baku dan produk jadi dilakukan oleh pejabat yang berwenang?
 - b. Apakah setiap pemindahan bahan ataupun produk jadi dalam proses produksi disertai dengan dokumen pemindahan barang?
 - f. Pembebanan dan pencatatan kos produk yang diselesaikan,
 - a. Apakah penerapan tarip biaya overhead atau biaya standard telah mendapat persetujuan manajemen?
 - b. Apakah setiap penyimpangan yang terjadi dalam proses produksi dilaporkan dengan cepat oleh pejabat yang bertanggungjawab guna menentukan penyelidikan sebab-sebabnya serta penentuan follow-upnya.
 - c. Apakah data yang digunakan untuk penyiapan jurnal alokasi biaya produksi pada produk dalam proses telah dicocokkan dengan data dari laporan produksi harian?
 - d. Apakah data yang digunakan untuk menyusun jurnal transfer produk yang telah diselesaikan kepada persediaan produk jadi telah dicocokkan dengan laporan penyelesaian produksi?
 - g. Pemeliharaan kebenaran saldo persediaan
 - a. Apakah pengecekan oleh pejabat yang independen dilakukan terhadap catatan pembantu dengan catatan yang ada dalam buku besar?
 - b. Apakah pengecekan perhitungan oleh pejabat yang independen dilakukan terhadap persediaan produk jadi yang masih ditangan dengan jumlah yang tercatat?

Guna memahami aspek pengolahan transaksi yang terjadi, dihalaman 125 berikut ini disajikan peraga bagan alir transaksi dalam siklus produksi.



Peraga 5.2 Bagan Alir Transaksi Produksi

E. PENGUJIAN SUBTANSI TERHADAP SALDO PERSEDIAAN

Dalam perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan persediaan timbul dari pembelian barang dagangan dari perusahaan lain. Dalam perusahaan manufacturing persediaan timbul dari aktivitas pembelian bahan baku yang menghasilkan persediaan bahan baku, dan aktivitas produksi yang menghasilkan persediaan produk dalam proses dan persediaan produk jadi. Pengauditan terhadap elemen persediaan membutuhkan perencanaan yang teliti dengan mempertimbangkan karakterisasi aktivitas perusahaan di atas. Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam pengauditan ini, agar diperoleh jaminan bahwa pengujian yang dilakukan dengan efisien dan efektif dalam memperoleh bukti-bukti yang kompeten serta saldo yang dinyatakan dengan benar. Dalam rangka mencapai tujuan akhir tersebut, pengujian subtantip harus dirancang dengan memperhatikan adanya risiko deteksi.

1. Permasalahan teknis dalam audit persediaan

Dalam melakukan pengujian subtansi persediaan, auditor akan menghadapi berbagai masalah-masalah yang bersifat spesifik. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pemeriksaan persediaan adalah sbb:

- a. Auditor tidak akan mengetahui secara detail mengenai kualitas dan kuantitas barang-barang yang disimpan digudang klien. Hal ini mengingat akuntan bukan seorang ahli yang mengetahui dengan pasti mengenai barang-barang yang disimpan oleh klien. Mengingat auditor dalam melakukan pemeriksaan hanya berdasarkan catatan akuntansi belaka, maka detail informasi kuantitas maupun kualitas barang-barang tersebut berada pada pihak lain yaitu klien sendiri ataupun tenaga profesional lain yang diminta bantuan untuk menegaskan kebenaran kuantitas maupun kualitas barang yang ada digudang. Konsekuensi dari kelemahan tersebut maka auditor harus melakukan langkah-langkah berikut:
 - a. Memperoleh *position defence* dari klien ataupun jasa profesi lain mengenai kebenaran barang-barang yang disimpan digudang klien. Wujudnya adalah surat pernyataan mengenai keberadaan barang-barang yang disimpan di gudang klien.
 - b. Akuntan harus melakukan pengamatan terhadap prosedur penghitungan fisik barang-barang yang disimpan di gudang klien.
- b. Barang-barang yang masuk kategori persediaan klien dapat disimpan dan berada dimana-mana tidak terbatas dalam gudang klien saja. Misalnya;
 - a. Persediaan barang dagangan yang berada dalam status konsinyasi (baik sebagai *consignor* maupun *consignee*). Sebagai *consignee* barang-barang yang disimpan digudang klien sebetulnya merupakan barang dagangan yang pemilikannya ada pada pihak ketiga. Seringkali klien mengaku barang konsinyasi sebagai barang milik klien, maka disajikan dalam neraca sebagai persediaan pihak klien. Informasi ini menunjukkan persediaan barang dagangan akan overstated. Sebaliknya sebagai *consignor*, maka barang dagangan yang dimilikinya berada ditangan pihak lain. auditor tidak mengetahui apakah barang yang ditangan *consignee*-nya telah laku atau belum. Keadaan ini seringkali sangat dikacaukan dengan barang-barang dagangan yang statusnya sebagai barang yang harus diretur.

-
-
- b. Persediaan barang dalam proses pengiriman (terutama barang impor maupun ekspor). Terhadap barang-barang yang masih dalam proses pengiriman akan sangat dipengaruhi oleh perjanjian pengiriman dengan pihak pembeli/ penjual. Dalam hubungannya sebagai importir, apabila pengiriman barang dengan FOB Shipping point, maka sejak barang tersebut lepas dari pelabuhan si pengirim maka barang tersebut sudah termasuk barang yang dikuasai oleh klien. Sebaliknya bila menggunakan FOB Destination, maka barang tersebut baru dikuasai oleh klien sejak barang tersebut tiba di gudang klien (pelabuhan klien). Masalah yang sama akan ditemukan dalam kedudukan klien sebagai eksportir.
 - c. Persediaan barang yang disimpan di gudang pihak lain (misalkan disimpan di gudang pelabuhan maupun di gudang EMKL). Seringkali barang yang diimpor untuk sementara waktu disimpan terlebih dahulu di gudang milik EMKL sambil menunggu pemeriksaan oleh aparat beacukai (Customs Service). Pada umumnya pemeriksaan membutuhkan waktu beberapa hari kerja. Barang-barang tersebut boleh masuk ke wilayah pabean suatu negara, setelah memperoleh ketetapan dari aparat beacukai. Apabila diperoleh kasus ini, auditor harus membuat konfirmasi kepada pihak EMKL.
 - d. Persediaan barang yang masih dalam proses produksi. Barang-barang yang masuk dalam proses produksi kesemuanya dianggap melekat dan berada di dalam mesin-mesin pabrik. Untuk mengetahuinya akuntan harus melakukan analisis arus masuk bahan-bahan dan keluarnya produk jadi dari departemen produksi.

Hal-hal di atas menunjukkan bahwa barang-barang yang dikuasai klien tidak selalu berada ditangan klien tersebut. Oleh karenanya auditor harus memperoleh keyakinan status kepemilikan persediaan barang yang disajikan oleh pihak klien. Langkah yang ditempuh dalam butir pertama tidaklah cukup, auditor seyogyanya membuat surat konfirmasi mengenai persediaan barang yang berada ditangan pihak ketiga.

- c. Auditor hanya melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti tertulis saja. Kebenaran penulisan transaksi penerimaan dan pengeluaran barang, beserta dokumen pendukungnya sangat bergantung pada sistem yang dikembangkan oleh klien sendiri. Kejujuran klien dalam mencatat transaksi sangat dipengaruhi sistem pengendalian intern klien. Oleh karenanya pengujian terhadap kepatuhan klien pada sistem yang dikembangkan sendiri mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karenanya, auditor harus melakukan evaluasi sistem pengendalian intern terhadap persediaan.

2. Penentuan Risiko Deteksi

Dalam menentukan risiko deteksi yang dapat diterima, auditor harus melakukan identifikasi terhadap setiap golongan transaksi yang berpengaruh pada rekening persediaan. Transaksi-transaksi yang terbentuk oleh aktivitas persediaan adalah pembelian bahan dan penjualan produk jadi.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, auditor harus mempertimbangkan adanya risiko melekat (*inherent risk*) dan risiko pengendalian (*control risk*) untuk setiap pengungkapan

saldo persediaan. Faktor-faktor yang memungkinkan timbulnya risiko salah saji maupun adanya unsur kesengajaan dalam asersi saldo persediaan harus dipertimbangkan.

3. Program Audit yang Dianjurkan

Dalam merancang program audit, auditor harus mempertimbangkan kesesuaian program tersebut dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam menyusun audit program berikut ini tujuan yang dirumuskan dijabarkan dalam program audit. Perumusan program audit harus mempertimbangkan teknik audit yang dapat diterapkan dalam pengujian substansi elemen persediaan ini. Rincian program audit adalah sbb:

- a. Verifikasi kecermatan semua daftar dan catatan perpetual apakah cocok dengan saldo persediaan.
- b. Lakukan prosedur analitikal
- c. Lakukan pengamatan terhadap penghitungan fisik persediaan (opname)
- d. Lakukan konfirmasi kepada pemilik gudang pihak ketiga
- e. Lakukan pengecekan ulang pencatatan pembelian pada dokumen pendukungnya
- f. Pertimbangkan bukti-bukti yang ditemukan dalam pengujian cutoff terhadap pembelian maupun penjualan
- g. Lakukan wawancara kepada manajemen mengenai kepemilikannya
- h. Review data mengenai kualitas persediaan
- i. Lakukan pengujian inventory pricing
- j. Bandingkan penyajian statemen persediaan dengan standar penyajian laporan keuangan yang berlaku.

Kesepuluh program audit tersebut di atas mencerminkan langkah-langkah pengauditan dalam memverifikasi asersi saldo persediaan dalam neraca. Detail dan teknik audit guna mendukung program audit tersebut dibahas dalam uraian berikut.

- a. ***Verifikasi kecermatan semua daftar dan catatan perpetual apakah cocok dengan saldo persediaan.***

Pengujian terhadap kecermatan perhitungan semua catatan akuntansi dilakukan dengan mencocokkan jumlah-jumlah berbagai daftar dengan saldo persediaan yang ada dalam buku besar. Lakukan penelusuran saldo yang dicantumkan dalam neraca, ke buku besar, jurnal pembelian, dan dokumen-dokumen pendukung. Tentukan kecocokan saldo yang dicantumkan tersebut dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Auditor harus melakukan pengecekan ulang semua penjumlahan kebawah dan kesamping. Dalam program ini, auditor harus memperoleh keyakinan terhadap reabilitas catatan akuntansi yang berkaitan dengan persediaan klien.

- b. ***Lakukan pengujian dengan prosedur analitikal.***

Prosedur pengujian analitikal dilakukan dengan beberapa ratio berikut ini:

1. ratio laba kotor terhadap penjualan bersih
2. perputaran persediaan atau perbandingan antara kos barang terjual dengan rata-rata persediaan

-
-
3. ratio persediaan terhadap total kuren asset
 4. tingkat perputaran persediaan selama satu tahun (365 hari)

Disamping itu, dapat pula diperbandingkan dengan data lainnya misalnya dengan data periode sebelumnya, budget periode audit, statistik industri dan lain-lain. Teknik audit ini memberikan petunjuk terhadap pembuktian eksistensi dan peristiwa transaksi, keterlengkapan assersi, dan penilaian ataupun alokasinya.

c. ***Lakukan pengamatan terhadap penghitungan fisik persediaan (stock opname).***

Auditor harus melakukan pengamatan terhadap prosedur penghitungan fisik persediaan yang dilakukan oleh klien. Prosedur ini harus dilakukan apabila saldo persediaan dalam laporan keuangan jumlah yang material. Mengingat persoalan teknis dalam penghitungan fisik persediaan sangat rumit, maka auditor dipandang perlu melakukan observasi bagaimana proses penghitungan barang-barang yang ada digudang (sendiri atau pihak lain) dilakukan oleh klien.

Beberapa langkah yang harus dipertimbangkan oleh auditor adalah:

1. Waktu pengujian dan seberapa luas pengujiannya, Kapan waktu yang dianggap tepat untuk melakukan observasi sangat tergantung pada sistem persediaan klien serta seberapa efektifitas pengendalian intern yang berlaku. Sistem persediaan dengan periodical systems dan perpetual systems mempunyai masalah yang berbeda, sehingga perbedaan sistem tersebut harus mendapat perhatian selayaknya.
2. Rancangan inventory taking, memahami bagaimana klien melakukan penghitungan persediaan yang ada ditangan dilakukan melalui daftar petunjuk pelaksanaan penghitungan persediaan. Juklak ini meliputi: (1) nama pegawai pelaksana, (2) tanggal penghitungan, (3) lokasi penghitungan, (4) detail cara-cara penghitungan, (5) kartu penghitungan dan kartu ringkasan yang digunakan, (6) dan pemisahan barang-barang yang bukan milik klien. Berdasarkan informasi yang diperoleh, auditor melakukan penilaian terhadap prosedur dan juklak yang digunakan oleh klien. Penilaian ini terutama untuk mengetahui apakah prosedur dan juklak tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh para petugas yang independen.
3. Pemeriksaan kembali hasil penghitungan fisik persediaan. Auditor harus melakukan pengketesan kembali terhadap hasil-hasil perhitungan yang dilakukan klien terhadap seluruh barang-barang yang terdaftar sebagai persediaan. Auditor harus menentukan langkah-langkah yang dipandang tepat mengingat banyaknya masalah-masalah teknis di lapangan. Pengalaman teknis di lapangan akan sangat berarti dalam memahami kemungkinan adanya ketidakberesan dalam assersi dalam persediaan tersebut.
4. Penggunaan sample statistik, pemeriksaan kembali hasil penghitungan fisik persediaan harus dilakukan oleh auditor. Dalam hal jumlah dan jenis bahan-bahan yang ada digudang klien senganat banyak, auditor tidak mungkin menggunakan prosedur yang telah dilakukan klien. Dalam hal ini pengecekan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan sample statistik. Auditor harus memperoleh keyakinan bahwa prosedur dan juklak yang berkaitan dengan penghitungan fisik persediaan memang telah memadai.

5. Observasi terhadap persediaan awal, penghitungan saldo awal persediaan sangat penting dalam menentukan berapa saldo persediaan akhir yang wajar. Hal ini sangat penting dalam kasus auditor baru pertama kali melakukan audit pada suatu perusahaan. Persoalan yang berkaitan dengan informasi saldo awal dari auditor lain, harus dijelaskan secara tuntas, agar laporan audit yang menjadi tanggungjawabnya tidak salah saji. Ini berarti dalam audit yang pertamakali, auditor harus mendapatkan fakta yang jelas mengenai eksistensi saldo awal tersebut.
6. Pengaruh terhadap laporan audit, bilamana observasi penghitungan persediaan telah selesai dilakukan auditor, maka kesesuaian terhadap standar audit harus menjadi pertimbangan.

d. ***Lakukan konfirmasi kepada pemilik gudang pihak ketiga***

Program ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi, kesempurnaan penyajian dan hak-hak yang terlekat dalam asersi persediaan beserta rekening yang terkait dengannya. Konfirmasi kepada pihak ketiga dilakukan dalam hal ditemukan kasus berikut ini, (a) terdapat produk yang masih dalam proses pengiriman kepada perusahaan charge, (b) terdapat barang yang masih dalam status konsinyasi dan (c) barang yang disimpan di gudang pihak ketiga, dan (d) adanya kemungkinan persediaan dijamin kepada pihak ketiga. Teknik pengujian ini dilakukan dengan melakukan konfirmasi secara tertulis kepada pihak ketiga yang secara langsung bertanggungjawab mengurus penyimpanan dan pengiriman barang-barang milik klien. Begitu pula kreditor yang meminta sejumlah barang-barang sebagai agunan kredit yang diberikan, harus pula dimintai keterangan mengenai seberapa besar dan bagaimana wujud tanggungjawab klien mengenai jaminan dalam penjaminan hartanya tersebut.

e. ***Lakukan pengecekan ulang pencatatan pembelian pada dokumen pendukungnya***

Auditor harus memperoleh keyakinan bahwa eksistensi persediaan yang dicantumkan dalam neraca, sudah meliputi keseluruhan barang-barang yang menjadi hak perusahaan. Oleh karena itu semua pembelian yang dilakukan perusahaan dalam rangka akuisisi persediaan harus disertai dokumen pendukung yang memadai. Kecenderungan penciptaan transaksi fiktif dalam transaksi pembelian sangat mudah terjadi, terutama apabila dilakukan kolusi dengan pihak luar (supplier). Lengkapnya dokumen-dokumen pendukung tersebut dimaksudkan untuk mendukung keabsahan transaksi pengeluaran kas.

f. ***Pertimbangkan bukti-bukti yang ditemukan dalam pengujian cutoff terhadap pembelian maupun penjualan***

Pisah batas transaksi pembelian bahan-bahan baku dan hak-hak klien terhadap kepemilikannya merupakan persoalan yang sangat rumit. Hal ini terjadi karena akuisisi bahan-bahan memerlukan proses waktu, terutama untuk bahan yang harus diimpor dari luar negeri. Auditor harus memperoleh kepastian transaksi mana yang dapat diakui sebagai hak klien terhadap asersi persediaan dalam neraca dan sebaliknya transaksi mana yang harus diperhitungkan sebagai adjustment karena belum dapat diterima sebagai hak klien terhadap barang-barang yang dipesannya. Adanya klausula transaksi

pembelian FOB destination ataupun FOB shipping point merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam penilaian persediaan. Dalam program ini berarti auditor harus membuktikan kewajaran penilaian persediaan dan memperoleh keyakinan ketepatan pisah batas (cutoff) transaksi persediaan.

g. ***Lakukan wawancara kepada manajemen mengenai kepemilikannya***

Program audit ini dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauhmana hak-hak yang terlekat dalam assersi persediaan serta bagaimana penyajian serta pengungkapannya. Wawancara diperlukan mengingat proses pemindahan barang (penjualan) dari perusahaan kepada pihak lain tidak bisa diselesaikan begitu saja secara serta merta. Proses pengiriman barang membutuhkan waktu, terutama apabila barang tersebut harus diekspor ke luar negeri, atau dikirim ke pulau lain. Adanya perbedaan waktu saat pengiriman barang dan saat realisasi penjualan menyebabkan status perpindahan hak antara perusahaan dengan pembeli perlu dipertegas. Kejadian dan fakta seperti ini, hanya diketahui oleh pejabat perusahaan yang bertanggungjawab dalam fungsinya tersebut. Untuk memahami bagaimana proses perpindahan hak antara klien dengan pembeli, auditor perlu melakukan wawancara dengan memperhatikan kasus demi kasus. Dengan demikian auditor dapat menentukan sikap manakah transaksi yang mempengaruhi penjualan ataupun sebaliknya. Materi wawancara kepada para pejabat perusahaan meliputi: (a) kebijaksanaan akuntansi klien, (b) kebijaksanaan asuransi terhadap persediaan yang dimiliki klien, dan (c) adanya persediaan yang dijamin.

h. ***Review data mengenai kualitas persediaan***

Prosedur ini dimaksudkan untuk melakukan penilaian ataupun alokasinya. Langkah ini dilakukan untuk menentukan apakah semua barang-barang memang benar-benar siap jual, dapat digunakan, atautkah siap dikonsumsi. Sebaliknya auditor harus memahami kemungkinan adanya barang-barang yang sudah kadaluwarsa, barang rusak/cacad, dan barang yang lamban perputarannya dimasukkan dalam unsur persediaan barang. Langkah teknis audit yang dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut, antara lain:

1. Lakukan wawancara dengan pejabat yang bertanggungjawab mengenai kebijaksanaan operasional produksi.
2. Verifikasi terhadap perhitungan kos produk terjual, dan produk dalam proses.
3. Verifikasi terhadap penghitungan produk dalam proses, produk rusak, dan produk cacat.
4. Lakukan testing terhadap persediaan yang lambat perputarannya.
5. Mintalah *representation letter* dari client.
6. Lakukan pengujian terhadap sample transaksi untuk periode tertentu baik jumlah maupun kualitasnya.

i. ***Lakukan pengujian terhadap inventory pricing***

Prosedur ini dimaksudkan untuk melakukan penilaian ataupun alokasinya. Langkah ini dilakukan antara lain: (a) menentukan apakah pricing persediaan dilakukan secara konsisten, dan (b) membandingkan unit yang digunakan dengan dokumen pendukungnya. Kedua

langkah ini menunjukkan bahwasannya auditor harus melakukan testing terhadap penilaian persediaan yang dilakukan oleh klien. Tentu saja verifikasi ini tidak terbatas hanya pada persediaan produk jadi saja, tetapi juga meliputi produk rusak, produk cacat, dan produk kadaluwarsa. Langkah ini sebetulnya untuk mengantisipasi kecenderungan barang-barang yang tidak pantas digunakan sebagai alat pembuktian untuk menaikkan nilai persediaan dalam neraca. Atau kemungkinan lain adanya unsur kecurangan yang dilakukan oleh para karyawan perusahaan dengan memalsukan produk yang tidak pantas.

j. ***Bandingkan penyajian statemen persediaan dengan standar penyajian laporan keuangan yang berlaku.***

Program audit ini bertujuan untuk menilai apakah **penyajian dan pengungkapannya** telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini berarti auditor harus memperoleh keyakinan terhadap penyajian rekening persediaan dalam neraca maupun kos barang terjual yang disajikan dalam statemen penghasilan, mengenai kesesuaian penyajian dan pengungkapannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Teknik audit dalam program ini adalah: (1). pengujian kesesuaian klasifikasi persediaan dengan prinsip akuntansi yang lazim, dan (2). Apakah semua informasi telah diungkapkan secara lengkap (*full disclosure*)

4. Kertas Kerja Audit

Dalam menjalankan pekerjaan pengauditan, para asisten auditor harus membuat kertas kerja audit. Kertas kerja yang dibutuhkan dalam pemeriksaan elemen-elemen persediaan antara lain:

- a. Kertas kerja utama (*lead schedule*),
- b. Kertas kerja pendukung (*suporting schedule*)
 1. Daftar persediaan
 2. Surat konfirmasi dari pihak ketiga
 3. Surat representasi dari klien atau pihak profesional.
 4. Analisis perhitungan persediaan produk dalam proses.

Salah satu contoh kertas kerja audit disajikan dalam peraga 5.3 yang disajikan di ahalaman berikut.

Peraga 5.3 Kertas Kerja Penghitungan Phisik Persediaan

Disiapkan oleh.....tgl.....

Diperiksa oleh.....tgl.....

Test Penghitungan Bahan Baku PT. METAL INDUSTRI

| No. Tag. | No. Inv. Sheet | Persediaan | | Penghitungan | | Perbedaan |
|--|-------------------|------------|-------------|--------------|-------|-----------|
| | | Nomor | Uraian | Klien | Audit | |
| 6531 | 15 | 1-42-003 | Plate blk. | 125 | √ | 125 |
| 8340 | 18 | 1-83-012 | Plate 1/4" | 93 | √ | 93 |
| 1.483 | 24 | 2-11-004 | Kabel | 1.321 net | √ | 1.325 net |
| 4486 | 26 | 2-28-811 | Ketup | 220 | √ | 220 |
| 3334 | 48 | 4-26-204 | Plate Sapng | 424 | √ | 424 |
| 8502 | 64 | 7-44-310 | Kabel 1/2" | 276 net | √ | 276 net |
| 8844 | 68 | 7-72-460 | Kabel 3/8" | 419 | √ | 419 |
| 6295 | 92 | 3-48-260 | Plate Muka | 96 | √ | 96 |
| Semua perbedaan tersebut telah dikoreksi oleh klien. Pengaruh atas kesalahan tersebut tidak material dibandingkan jumlah sediaan yang ada. | | | | | | |

- √ Telurusi ke kartu ringkasan persediaan klien (FF-4), tidak di koreksi terhadap perbedaan yang ditemukan tersebut.

SOAL BAB 5

Soal Kelompok A

Dalam soal berikut ini Saudara diminta untuk menilai pernyataan-pernyataan berikut. Berilah tanda S, bila pernyataan tersebut salah, dan sebaliknya berilah tanda B, bila pernyataan tersebut benar.

- 1. Assersi terhadap saldo rekening persediaan dalam neraca merupakan tanggungjawab manajemen, oleh karena itu auditor tidak perlu lagi melakukan pengujian terhadap eksistensi rekening tersebut.
- 2. Assersi manajemen dalam hal eksistensi dan peristiwa yang membentuk transaksi dalam siklus produksi berhubungan dengan kedua siklus lainnya yaitu: siklus pengeluaran dan siklus jasa-jasa tenaga kerja.
- 3. *Inherent risks* yang terbentuk dalam transaksi siklus produksi berhubungan dengan kemungkinan salah saji assersi saldo rekening persediaan dalam laporan keuangan yang diaudit.
- 4. Assersi manajemen terhadap penyajian dan pengungkapan transaksi kos produksi dalam laporan keuangan ditunjukkan oleh rincian biaya produksi yang disajikan sebagai penjelasan pos-pos laporan rugi-laba.
- 5. Semua biaya bahan pembantu yang tidak secara langsung digunakan dalam proses produksi untuk periode yang diaudit harus dimasukkan dalam unsur pembentuk kos produk yang diselesaikan dalam proses yang bersangkutan dan disajikan dalam neraca.
- 6. Dalam memahami komponen biaya produksi, auditor perlu mengadakan penelaahan terhadap struktur biaya produksi yang terjadi dalam periode yang diaudit. Oleh karena itu auditor harus melakukan telaah terhadap ratio biaya produksi terhadap penjualan bersih periode ini dan dibandingkan dengan ratio yang sama pada periode audit sebelumnya.
- 7. Untuk memperoleh keyakinan terhadap eksistensi kos produk terjual yang disajikan dalam laporan keuangan, auditor membuat program audit sebagai berikut: (a) melakukan perjalanan keliling untuk melakukan inspeksi semua fasilitas kerja yang dimiliki klien untuk membuat suatu produk, (b) membuat *analitical review* terhadap biaya produksi periode ini, dan (c) melakukan review terhadap jurnal pencatatan transaksi depresiasi dan analisis terhadap biaya reparasi.
- 8. Prosedur audit yang digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap saldo rekening persediaan, dilakukan dengan mengadakan penghitungan kembali terhadap hasil perhitungan yang dilakukan oleh klien. Dalam hal ini, auditor harus mengambil inisiatif untuk mengadakan observasi terhadap perhitungan yang dilakukan oleh klien.
- 9. Dalam melakukan evaluasi sistem pengendalian intern klien, auditor tidak perlu memperhatikan apakah karyawan pabrik patuh menggunakan kartu jam hadir mengingat besarnya upah karyawan tersebut memerlukan perhitungan tarif standar sebagai salah satu komponen kos produk terjual.

-
- 10. Prosedur konfirmasi terhadap barang-barang yang disimpan di gudang pihak lain tidak perlu dilakukan oleh auditor, mengingat sumber informasi komponen persediaan bersumber dari kalangan intern perusahaan sendiri.

Soal Kelompok B

Pilihlah satu jawaban yang paling benar di antara empat alternatif jawaban berikut ini. Bila tidak ada alternatif jawaban yang tepat pilihlah huruf e dalam lembar jawaban saudara.

1. Auditor melakukan pemeriksaan terhadap faktur-faktur pembelian bahan baku dan bahan pembantu, dengan tujuan untuk menentukan apakah:
 - a. Bahan-bahan yang dibeli tersebut apakah benar-benar ada.
 - b. Penilaian rekening persediaan telah ditentukan secara wajar.
 - c. Pengungkapan dalam laporan keuangan telah memadai.
 - d. Apakah persediaan tersebut dipakai sebagai jaminan utang.
2. Tujuan auditor melakukan analisis atas biaya produksi sebagai pendukung atas prosedur lain, bertujuan:
 - a. memudahkan pekerjaan audit berikutnya.
 - b. mengetahui adanya perputaran produk jadi yang lamban perputarannya.
 - c. Memberikan arah ataupun petunjuk kepada auditor, agar lebih memberikan perhatian terhadap perubahan-perubahan (fluktuasi) yang tidak biasa.
 - d. Memberikan rekomendasi terhadap prosedur audit lain yang dipandang perlu.
3. Auditor hendaknya melakukan konfirmasi dalam pemeriksaan terhadap saldo rekening persediaan. Saran tersebut tidak perlu dilakukan mengingat:
 - a. Semua bahan-bahan baku dan pembantu pada saat tanggal neraca telah berada dalam kekuasaan dan kendalian klien.
 - b. Hasil konfirmasi tidak memberikan tambahan informasi yang meyakinkan auditor, dan disamping itu klien cenderung akan menyajikan informasi dengan layak.
 - c. Tidak ada prosedur standar yang mengharuskannya.
 - d. Tidak ada jawaban yang tepat
4. Fokus pemeriksaan terhadap rekening persediaan, dimaksudkan agar auditor memperoleh keyakinan bahwa:
 - a. Semua barang atau bahan yang termasuk dalam kategori persediaan bahan berada dalam penguasaan klien sampai saat dilakukan penghitungan fisik persediaan.
 - b. Klien telah menggunakan inventory pricing yang layak
 - c. Penyajian persediaan dalam statemen penghasilan telah memadai.
 - d. Semua bahan-bahan rusak dan cacat telah diperhitungkan dalam persediaan.
5. Tujuan struktur pengendalian intern siklus produksi adalah memberikan jaminan bahwa semua transaksi yang berhubungan dengannya telah ditangani dengan selayaknya serta telah dicatat, dan disamping itu:

-
-
- a. dilakukan pula verifikasi internal oleh pihak yang independen.
 - b. semua transfer ke produk selesai telah didokumenkan dalam laporan produksi lengkap dan laporan kendalian kualitas.
 - c. Perintah produksi telah bernomor-urut tercetak dengan ditandatangani oleh pengawas.
 - d. produk dalam proses dan produk selesai telah ditangani dengan selayaknya.
6. Auditor melakukan wawancara kepada manajemen mengenai kepemilikan bahan-bahan dan kemungkinan adanya persediaan yang tidak dicatat dengan tujuan:
- a. memperoleh keyakinan terhadap assersi hak dan kewajiban dari informasi.
 - b. memperoleh keyakinan terhadap assersi keterlengkapan informasi.
 - c. memperoleh keyakinan terhadap assersi penyajian dan pengungkapan informasi.
 - d. jawaban a dan c benar
7. Auditor melakukan observasi terhadap persediaan yang dikuasai klien, baik berupa bahan baku dan pembantu, produk dalam proses, maupun produk jadi. Teknik yang digunakan dalam program audit ini meliputi langkah berikut, **kecuali**:
- a. Auditor melakukan penilaian apakah prosedur penghitungan yang ditentukan manajemen telah memadai.
 - b. Apakah penghitungan dilakukan oleh petugas yang independen dan dilakukan sesuai dengan petunjuk penghitungan yang ditetapkan.
 - c. Auditor melakukan penghitungan dilakukan bersama-sama dengan klien.
 - d. Apakah dokumen-dokumen yang digunakan dalam penghitungan telah diverifikasi dan cocok dengan catatan persediaan.
8. Berikut ini disebutkan dokumen-dokumen kunci yang digunakan untuk melakukan transaksi dalam siklus produksi, **kecuali**:
- a. *time tickets*
 - b. *purchase requisition*
 - c. *materials requarement*
 - d. *moving tickets*
9. Berikut ini disebutkan catatan dan/atau buku-buku yang digunakan untuk menangani transaksi siklus produksi, **kecuali**:
- a. *complite production report*
 - b. *inventory register*
 - c. *inventory subsidiary ledgers*
 - d. *daily production activity report*
10. Berbagai fungsi yang terlibat untuk menangani transaksi dalam siklus produksi adalah, **kecuali**:
- a. *production insurance*
 - b. *planning, production, and controls*
 - c. pengeluaran bahan
 - d. penanganan dan pemrosesan produk

Bab 6

Audit Terhadap Siklus Investasi

DALAM BAB INI AKAN DIBAHAS:

1. Identifikasi tujuan audit terhadap transaksi dan saldo yang terbentuk oleh siklus investasi.
2. Menjelaskan penerapan struktur pengendalian intern terhadap transaksi siklus investasi.
3. Menjelaskan pendekatan yang digunakan auditor dalam menjalankan standar pelaksanaan pekerjaan lapangan kedua untuk transaksi dan saldo yang terbentuk oleh siklus investasi.
4. Menunjukkan bagaimana pengujian substantansi terhadap saldo maupun setiap asersi yang relevan dari siklus investasi.

A. GAMBARAN UMUM SIKLUS INVESTASI

Dalam bab ini akan dibahas siklus investasi yang meliputi investasi saham dan investasi obligasi. Dalam kenyataannya masih terdapat berbagai bentuk investasi lainnya, misalnya dalam bentuk surat-surat berharga, dan berbagai bentuk penanaman modal lainnya. Namun, bentuk investasi lainnya tidak dibahas dalam konteks permasalahan ini. Siklus ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. Dalam hubungannya dengan siklus pendapatan, siklus investasi menghasilkan aliran kas masuk yang berasal dari bunga, dan keuntungan penjualan surat berharga. Dalam hubungannya dengan siklus pengeluaran, siklus investasi mengeluarkan uang untuk membeli surat-surat berharga itu sendiri.

Pemahaman terhadap ruang lingkup aktivitas investasi sangat berguna bagi auditor dalam menyusun rencana audit. Hal ini mengingat strategi dan proses pengambilan keputusan investasi untuk setiap perusahaan berbeda-beda. Investasi secara garis besar dikelompokkan dalam investasi saham dan investasi obligasi (bonds), meskipun sering pula ditemukan kasus investasi pada perusahaan lain dalam bentuk piutang jangka panjang.

Transaksi siklus investasi mempengaruhi rekening berikut:

Marketable Equity Securities

Marketable Debt Securities

Investments in Stocks (and Bonds)

Interest (Dividend) Revenue

Earnings from Investments under Equity Method

Gains (Losses) on Sales of Investments

1. Gambaran Umum Investasi dalam Saham

Investasi dalam bentuk saham mempunyai latar belakang penyertaan dalam rangka penguasaan atas perusahaan lain sebagai *majority interest* atau sebagai *minority interest*. Melalui investasi yang ditanamkan pada perusahaan lain tersebut, klien akan memperoleh dividen yang diterima pada tanggal tertentu. Investasi saham pada perusahaan yang belum go public (bermasyarakat) mempunyai masalah yang berbeda dengan perusahaan yang sudah mengalami go public. Pada perusahaan yang belum go public berarti perusahaan tersebut adalah perusahaan tertutup. Ini berarti saham perusahaan tersebut hanya beredar di kalangan terbatas saja. Sebagai akibatnya nilai pasar saham tersebut tidak akan mengalami fluktuasi seperti halnya saham perusahaan yang sudah go public.

Peredaran saham perusahaan yang sudah go public, dilakukan melalui bursa saham (pasar modal). Di Indonesia, umumnya jumlah saham yang beredar di masyarakat dengan proporsi yang kecil. Ini berarti nilai pasar saham tersebut sangat dipengaruhi oleh para investor lain yang mempunyai kepentingan lebih besar. Mengingat nilai pasar saham yang diedarkan di pasar selalu mengalami fluktuasi, maka penilaian atas saham yang dicantumkan dalam neraca juga dipengaruhi oleh harga pasar saham tersebut. Sebagai pemegang saham mayoritas, maka posisi klien dapat menentukan arah kebijakan perusahaan. Pembayaran dividen juga sangat dipengaruhi oleh keputusan klien. Dalam keadaan seperti ini, pihak

klien dapat menggunakan Equity Method dalam melakukan pencatatan transaksi investasi dalam saham.

Dalam kedudukan investor sebagai pemegang saham minoritas, maka klien akan bersikap konservatif. Hal ini mengingat pengambilan keputusan pembagian deviden tidak bisa dipengaruhi, sehingga klien harus memperhatikan langkah-langkah yang ditempuh oleh pemegang saham mayoritas. Sebagai akibatnya klien tidak kuasa mempengaruhi kepentingan pemegang saham mayoritas, menyebabkan bagian akuntansi harus menggunakan *cost method* dalam melakukan pencatatan transaksi investasi.

Apabila klien mempunyai beberapa jenis saham, maka auditor harus hati-hati mengenai hak-hak yang terlekat dalam saham-saham yang dimilikinya. Di samping investasi dilakukan atas saham biasa, kadangkala dilakukan pula investasi untuk saham preferensi. Preferensi (keistimewaan) yang diberikan dalam saham tersebut sangat tergantung pada klausula masing-masing saham. Preferensi diberikan untuk pembayaran saham, preferensi pada saat likuidasi, atau kedua-duanya. Saham preferensi dimaksudkan memberikan jaminan tertentu kepada para pemegang saham tersebut.

2. Gambaran Umum Investasi dalam Obligasi

Investasi dalam bentuk obligasi pada hakekatnya adalah piutang dalam jangka panjang kepada pihak lain dengan disertai pengikatan **notariel**. Biasanya obligasi dibeli di pasar modal (bursa efek) melalui para pialang. Harga beli obligasi kadangkala diperoleh di atas atau di bawah nilai nominalnya. Bila terjadi pembelian di atas nilai nominal berarti terdapat premium atas obligasi tersebut. Sedangkan bila harga beli dibawah nilai nominalnya, maka akan terjadi discount atas obligasi tersebut. Piutang semacam ini dengan disertai kesanggupan pihak emiten (dalam hal ini sebagai nasabah) untuk melunasi kewajibannya dengan ditambah bunga yang ditawarkannya. Investasi obligasi terjadi karena klien ingin menanamkan kelebihan dananya untuk memperoleh penghasilan bunga.

Investasi obligasi mempunyai tujuan spesifik yang sangat berbeda dengan investasi sementara (*short terms investment*). Investasi semacam ini dilakukan dengan tujuan pengamanan dana yang tersisa (dan belum dipakai) untuk jangka panjang. Misalnya, tersedia dana yang disisihkan untuk perluasan operasi perusahaan tiga tahun yang akan datang. Pada perusahaan asuransi investasi dalam bentuk obligasi dianggap aman, sebelum benar-benar digunakan untuk membayar risiko yang dipertanggungkan. Kedua macam investasi ini mempunyai keunggulan dan kelemahan sendiri-sendiri. Investasi saham sering mengandung risiko yang sangat tinggi dengan keuntungan yang tinggi pula, sedangkan investasi dalam bentuk obligasi dipandang aman tetapi hasilnya mungkin tidak sebesar investasi dalam saham. Apapun pilihan manajemen dalam memanfaatkan dana yang menganggur, auditor harus memahami latar belakang keputusan yang diambil manajemen tersebut.

3. Tujuan Audit

Tujuan audit dalam rangka kelima kategori asersi statemen keuangan dalam transaksi siklus investasi antara lain:

1. Eksistensi dan okurensi

- * Pencatatan saldo investasi dalam neraca mencerminkan jumlah investasi yang benar-benar ada pada saat tanggal neraca.
- * Pendapatan dari investasi, *gains, and losses* yang dihasilkan dari transaksi investasi dan kejadian yang terjadi untuk periode akuntansi yang diaudit.

2. Kesempurnaan

- * Semua bentuk investasi telah disajikan dalam neraca
- * Semua transaksi investasi serta kejadian yang mempengaruhinya telah dimasukkan dalam statemen penghasilan dalam bentuk pendapatan investasi, dan *gains and losses*.

3. Hak dan kewajiban

- * Semua investasi yang ada, benar-benar dimiliki oleh klien

4. Penilaian atau alokasi

- * Semua bentuk investasi disajikan dalam neraca berdasarkan kos perolehan, kepemilikannya, atau dengan nilai pasar dengan memadai.
- * Pendapatan investasi, *gains, and losses* telah disajikan dalam jumlah yang wajar.

5. Penyajian dan pengungkapan

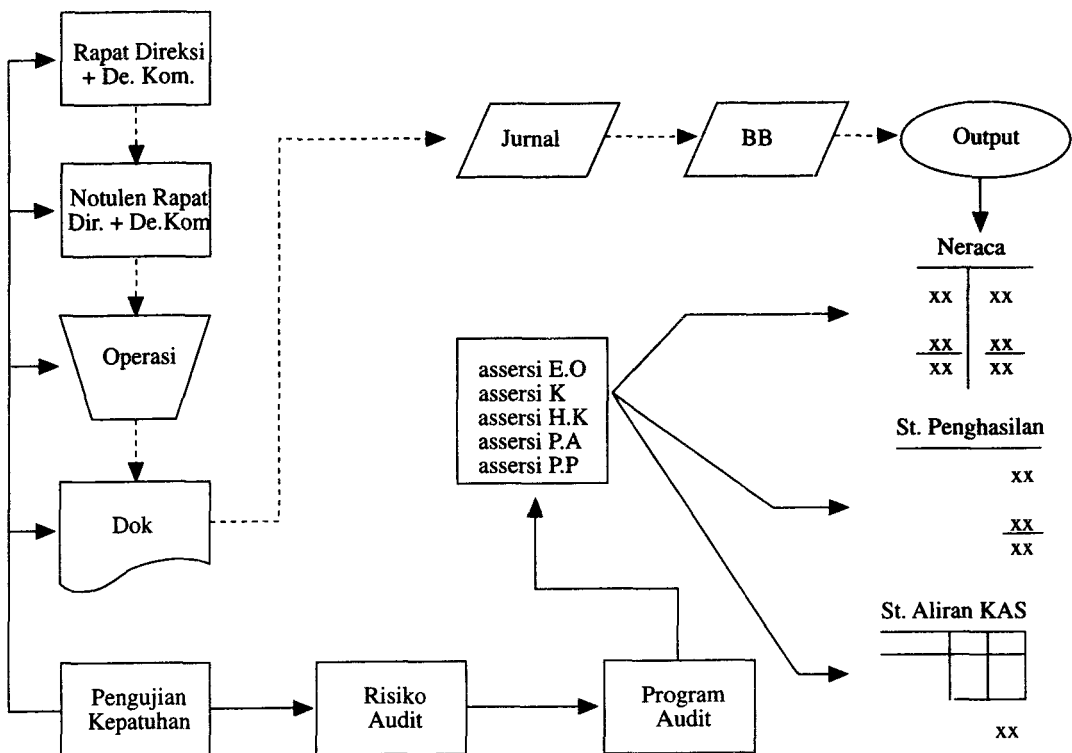
- * Saldo investasi telah diidentifikasi dan diklasifikasi dengan layak dalam laporan keuangan.
- * Dasar-dasar penilaian investasi dan jaminan investasi secara kolateral telah diungkapkan dengan secukupnya.

Pola pengujian transaksi dalam siklus Investasi guna mencapai tujuan tersebut di atas digambarkan dalam peraga 6.1 yang disajikan di halaman berikut. Dalam peraga tersebut digambarkan hubungan antara proses pengambilan keputusan oleh pimpinan, operasi transaksi, sampai dengan assersi informasi dalam statemen keuangan dengan proses audit yang harus dilakukan. Proses audit harus mencakup kesemua aspek tersebut sehingga Auditor memperoleh keyakinan terhadap assersi manajerial dalam informasi keuangan.

B. MATERIALITAS, RISIKO, DAN STRATEGI AUDIT

Surat-surat berharga dalam kaitannya dengan investasi jangka panjang mungkin sangat material untuk disajikan dalam neraca maupun statemen penghasilan. Transaksi ini bagi manajemen mengandung risiko yang sangat tinggi meskipun kejadiannya relatif jarang, oleh karena itu manajemen puncak selalu ikut terlibat untuk menanganinya. Mengingat transaksi investasi jangka panjang relatif sedikit dan juga melibatkan manajemen puncak, berakibat sistem pengendalian intern menjadi sangat efektif. Dengan kondisi semacam itu, maka risiko melekat yang terbentuk dari volume transaksi sangat kecil.

Strategi audit dalam siklus ini sangat tergantung pada frekuensi transaksi investasi itu sendiri. Bilamana transaksi investasi relatif sedikit pada umumnya akan lebih efisien



Peraga 6.1 Pola Pengujian Transaksi dalam Siklus Investasi

untuk menggunakan pendekatan substantif dalam audit tersebut dan juga digunakan pengujian kendali untuk melihat risiko kendali pada tingkat yang rendah. Sebaliknya bilamana transaksi investasi relatif sering terjadi, akan lebih efisien untuk menggunakan pengujian kendali untuk memperoleh bukti yang mendukung risiko kendali dengan tingkat yang rendah.

C. PEMAHAMAN TERHADAP STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN

Dalam dunia praktik dalam suatu perusahaan penerapan struktur pengendalian intern berbeda-beda. Lingkungan kendali yang terkait dengan siklus transaksi investasi melekat menjadi satu dalam pengendalian internnya. Sebagai contoh kasus: pemegang otoritas dan pihak yang bertanggungjawab terhadap transaksi investasi ditugaskan kepada bendaharawan perusahaan. Keadaan ini terpaksa dilakukan mengingat tidak ada pejabat yang mempunyai pengetahuan yang memadai dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut.

Auditor harus memahami kategori prosedur kendali yang diterapkan dalam transaksi investasi ini. Hal-hal berikut harus diperhatikan dalam membentuk pengendalian intern yang memadai. Misalnya: (1) setiap transaksi memperoleh persetujuan yang memadai, (2) Adanya pemisahan yang jelas terhadap fungsi-fungsi pelaksanaan (operasi), pencatatan dan

penyimpanan, (3) setiap transaksi didukung oleh dokumen pendukung, (4) dokumen sekuritas disimpan dalam **safety deposit box** yang aksesnya hanya dilakukan oleh person yang ditugaskan, dan (5) penghitungan sekuritas dilakukan oleh orang yang independen dan secara periodik dicocokkan dengan saldo catatannya.

1. Catatan-catatan dan dokumem-dokumen yang digunakan

- a. Sertifikat saham, dokumen ini menunjukkan jumlah saham yang dimiliki klien sebagai salah satu pemegang saham. Dokumen-dokumen ini memberikan pembuktian terhadap assersi eksistensi dan okurensinya
- b. Sertifikat obligasi, dokumen ini menunjukkan jumlah obligasi yang dimiliki klien sebagai pemegang obligasi. Dokumen-dokumen ini memberikan pembuktian terhadap assersi eksistensi dan okurensinya
- c. Bond indenture, kontrak yang memberikan pernyataan atau janji sarat-sarat obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang mengeluarkan obligasi.
- d. Broker's advise, dokumen yang dikeluarkan oleh pialang yang memberi spesifikasi mengenai harga pertukaran dalam transaksi investasi. Dokumen ini merupakan sumber utama pencatatan transaksi investasi, serta memberikan pembuktian terhadap assersi penilaian atau alokasinya.
- e. Book of original entry, buku jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terkait dalam investasi.
- f. Investment subsidiary ledger, merupakan buku pembantu investasi yang digunakan untuk mencatat berbagai jenis portfolio investasi maupun bentuk sekuritas.

2. Fungsi-fungsi yang terkait

Berikut ini disajikan beberapa fungsi yang terkait dalam siklus investasi beserta aspek pengendaliannya:

- a. Pembelian sekuritas, pembelian dilaksanakan berdasarkan otorisasi manajemen puncak.
- b. Penerimaan penghasilan periodik, *checks dividend* maupun bunga harus langsung disetorkan ke bank.
- c. Penjualan sekuritas, penjualan sekuritas dilakukan berdasarkan otorisasi manajemen dan semua penerimaan checks harus disetorkan secara langsung ke bank.
- d. Pencatatan transaksi sekuritas, semua transaksi dan kejadian yang menjadi latar belakangnya dicatat dengan cermat mengenai jumlah, klasifikasi, dan periode akuntansinya.
- e. Pengamanan sekuritas, semua sekuritas harus disimpan dalam almari besi atau tempat penyimpanan yang aman, dan disamping itu semua personel yang mempunyai akses dengan penyimpanan tersebut dibatasi.
- f. Pemeliharaan kecermatan buku besar pembantu, saldo catatan dalam buku besar pembantu dibandingkan dengan jumlah sekuritas yang ada secara berkala.

Semua bentuk sekuritas jangka panjang maupun marketable security adalah obyek pengujian subtansi dan pengujian pengendalian intern yang oleh karenanya perlu digunakan

prosedur yang sama. Terkecuali ada hal-hal yang bersifat khusus. Dalam rangka menyusun strategi audit substansi, auditor harus mempunyai keyakinan bahwa struktur pengendalian intern klien mencukupi sebagai dasar perencanaan audit. Pemahaman ini dalam rangka untuk identifikasi potensi salah saji serta mendesign pengujian yang tepat.

D. PENGUJIAN SUBTANSI TERHADAP SALDO INVESTASI

Lengkapnyanya penyajian rekening investasi dalam laporan keuangan klien harus diuji kebenarannya. Kadangkala klien menyajikan rekening investasi secara berlebihan kadangkala kurang dari seharusnya (*under stated*). Pengujian kesempurnaan dalam penyajian rekening investasi dilakukan dengan analisis terhadap hasil notulen rapat direksi. Hal ini mengingat sumber pengambilan keputusan mengenai investasi berada ditangan top manager. Baik pembelian suatu saham maupun penjualan saham berada ditangan manajemen puncak. Realisasi pembelian ataupun penjualan saham/obligasi hanya sebagai pelaksanaan keputusan para anggota dewan direksi atau sering disebut **Chief Executive Officer (CEO)**.

Masalah yang harus dipertimbangkan dalam audit substansi saldo rekening investasi, adalah penyajian rekening sangat dipengaruhi oleh metode penilaiannya. Standar akuntansi memungkinkan klien menggunakan metode *lower-of-cost-or-market* dalam asersi investasi saham/obligasi atau metode penilaian lainnya. Demikian halnya terhadap investasi obligasi dimungkinkan adanya premium maupun discount. Dengan kemungkinan permasalahan tersebut, auditor harus pula memperhatikan risiko pendeteksian dengan tingkat yang sama dengan risiko melekat.

Auditor harus membuat program audit substansi dalam rangka asersi saldo investasi. Daftar berikut ini merupakan langkah-langkah minimal yang harus dikerjakan dalam rangka memperoleh keyakinan terhadap asersi investasi saham/obligasi.

1. Verifikasi terhadap kecermatan berbagai saldo, daftar, dan buku pembantu.
2. Terapkan prosedur analitis.
3. Inspeksi penghitungan sekuritas yang ditangan.
4. Konfirmasi sekuritas pada pihak lain.
5. Lakukan penelusuran ke rekening investasi.
6. Hitung kembali pendapatan yang telah diterima.
7. Penelaahan dokumentasi harga pasar saham.
8. Bandingkan penyajian statemen dengan GAAP.

Program audit tersebut di atas akan memberikan pembuktian seberapa derajat reabilitas asersi investasi dalam laporan keuangan. Penjelasan mengenai rincian program audit substansi terhadap siklus investasi akan dijelaskan dalam subbab berikut ini.

1. Verifikasi terhadap kecermatan berbagai saldo, daftar, dan buku pembantu.

Dalam melaksanakan program ini klien diminta menyiapkan daftar investasi yang terdiri dari daftar sekuritas yang dimiliki perusahaan dan daftar sekuritas yang telah dijual di pasar modal pada periode yang diaudit. Daftar-daftar ini harus diverifikasi oleh auditor mengenai kecermatan penghitungannya serta kecocokannya dengan saldo rekening investasi dalam

buku besar dan buku pembantunya. Pengujian ini memberikan pembuktian terhadap asersi penilaian atau alokasi saldo rekening investasi.

2. Terapkan prosedur analitikal.

Prosedur pengujian analitikal dilakukan dengan memperbandingkan saldo rekening investasi dengan rekening lainnya atau total assets baik untuk periode yang sama maupun dengan periode yang lalu. Disamping itu dapat pula dibandingkan dengan anggaran untuk periode yang bersangkutan. Adanya fluktuasi diantara berbagai ratio tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk adanya faktor-faktor yang tidak dapat diprediksikan. Auditor harus memahami latar belakang terjadinya fluktuasi tersebut. Ratio yang sering digunakan adalah:

- a. ratio investasi dengan total asset
- b. rate return on investment ratios

Prosedur analitikal ini akan memberi pembuktian terhadap asersi eksistensi atau okurasi, keterlengkapan, dan penelian atau alokasinya.

3. Inspeksi penghitungan sekuritas yang ada ditangan.

Pelaksanaan program pengujian ini biasanya dilakukan secara simultan bersamaan dengan penghitungan kas maupun *negotiable instruments*. Dalam rangka melakukan inspeksi sekuritas, auditor harus mengamati masalah-masalah berikut ini: (a) nomor sertifikat tiap saham, (b) nama pemilik saham, (c) diskripsi sekuritas yang ada, (d) jumlah saham/obligasi, dan noma perusahaan yang mengeluarkan. Berbagai data yang dikumpulkan tersebut harus dicatat sebagai bagian analisis oleh auditor dalam rekening investasi (periksa peraga 6.2 di halaman berikut). Data pembelian saham tahun lalu harus dibandingkan dengan kertas kerja audit yang dibuat pada tahun lalu. Apabila keduanya timbul perbedaan nomor sertifikat menunjukkan adanya transaksi sekuritas yang tidak diotorisasi.

Dalam proses penghitungan investasi ini, auditor harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. pemegang/penyimpan sekuritas harus hadir saat penghitungan berlangsung.
- b. setelah penghitungan selesai harus diserahkan langsung kepada pemegang sekuritas dengan disertai tanda terima.
- c. semua sekuritas harus dalam pengawasan auditor sampai penghitungan dinyatakan selai dan lengkap.

Sebelum penghitungan dimulai auditor harus memperoleh informasi dengan maksud:

- a. Melakukan observasi atas sejumlah dokumen investasi yang dimiliki oleh klien.
- b. Mengecek kebenaran otentitas dokumen investasi. Pengecekan ini dilakukan dengan meneliti ciri-ciri yang dikeluarkan perusahaan emiten. Periksalah apakah dokumen yang dimilikinya mendukung kepemilikan klien atas sejumlah investasi yang dilaporkannya.

Sekuritas yang ada dalam penguasaan klien mungkin sekali disimpan pada situasi dan lokasi yang berbeda (tidak berada diruang kasir). Dalam keadaan demikian ini, maka auditor harus mempertahankan kesamaan waktu penghitungannya. Upaya yang dapat dilakukan

Peraga 6.2 Contoh Kertas Kerja Sekuritas Marketable Equity

PT METAL INDUSTRI
Sekuritas Marketable Equity
31 Desember 1993

| Distribusi | nomor sertifikat | tanggal pembelian | jumlah saham | bid/ saham (rupiah) | saldo 1/1/93 (rupiah) | jumlah saham (rupiah) | penye- lahan (rupiah) | saldo 31/12/93 (rupiah) | bid per saham 31/12/93 | total harga 31/12/93 | dividen income (rupiah) |
|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| PT Semen Cibinong | C-2779 | 21/4/92 | 900 | 22,00 | 19.800 ✓ | | | 19.800 ✗ | 24,50 # | 22.050 ^ | 675 (x) |
| PT Metropolitan | M82931 | 21/9/92 | 500 | 33,20 | 16.600 ✓ | | 16.000 Ø | | | | 127 (x) |
| PT Kiat Indah | 5-4942 | 14/2/93 | 200 | 18,50 | | 3.700 Ø | | 3.700 ✗ | 17,00 # | 3.400 ^ | |
| Mersin Corp. | S-7336 | 19/7/92 | 400 | 27,25 | 10.900 ✓ | | | 10.900 ✗ | 29,25 # | 11.700 ^ | 120 (x) |
| Jumlah | | | | | 47.300 ✓ | | 16.600 | 34.400 ✓ | | 37.150 | 922 |

✓ Telurusi ke kertas kerja tahun lalu

✓ Telurusi ke saldo buku besar

F Cek jumlah ke bawah

(R) Cek jumlah ke bawah dan ke samping

^ Cek perkalian

Ø Cocokkan dengan otorisasi dekom dan brokers advices

Harga pasar menurut "Warta Ekonomi" 1/1 1994

(x) Tarip deviden di cek kestandar, telusuri penerimaan deviden ke masing-masing jurnal penerimaan

adalah selama penghitungan belum selesai, maka setiap penghitungan berhasil diselesaikan, segera akan dilakukan penyegelan di tempat penyimpanan uang tersebut. Baru kemudian, setelah seluruh penghitungan dapat diselesaikan, maka secara bersama-sama para staf klien diinstruksikan boleh membukanya.

Program audit ini memberikan pembuktian assersi terhadap eksistensi atau okurensi, kesempurnaan, dan hak-hak dan kewajiban.

4. Konfirmasi sekuritas pada pihak ketiga.

Melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak yang mengeluarkan dokumen investasi tersebut dengan tujuan untuk memperoleh kepastian mengenai saldo investasi klien. Konfirmasi dilakukan dengan meminta jawaban tertulis dari pihak emiten ataupun pedagang efek yang berperan sebagai perantara pembelian saham tersebut. Dalam hal investasi dilakukan pada perusahaan yang tertutup (tidak go public), maka auditor akan sulit untuk menjalankan prosedur konfirmasi. Paling tidak bonafiditas jawaban surat konfirmasi dapat diragukan. Oleh karena itu auditor harus melakukan prosedur lain yang dipandang perlu dengan cara melakukan penelitin arus kas yang ditransfer ke perusahaan anak tersebut. Begitu pula sebaliknya deviden yang masuk ke perusahaan tersebut dapat digunakan sebagai indikasi adanya penguasaan atas perusahaan anak tersebut.

Suatu perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham yang sama, sebenarnya tidak menunjukkan indikasi bahwa perusahaan lain adalah anak perusahaan klien, sepanjang tidak ada transfer dana darinya. Transfer dana yang berasal dari deviden pemegang saham bukan merupakan indikasi perusahaan lain tersebut sebagai anak perusahaan klien. Oleh karena itu auditor harus memperoleh informasi mengenai berapa banyak penguasaan klien terhadap saham yang dikeluarkan oleh emiten, jenis saham apa saja yang dimilikinya, serta sejak kapan saham-saham tersebut dimiliki oleh klien.

Kadangkala sekuritas dikuasai oleh kreditor sebagai jaminan kolateral, atau ditempatkan dalam pengampunan pihak lain atas perintah pengadilan. Dalam keadaan semacam itu, maka konfirmasi dimaksudkan untuk memperoleh kepastian siapakah pemegang sekuritas tersebut pada saat tanggal neraca. Informasi ini sangat penting guna menentukan pengungkapan rekening investasi tersebut dalam statemen keuangan. Dengan mempertimbangkan berbagai keadaan tersebut, maka tanggapan atas prosedur konfirmasi dapat memberikan pembuktian terhadap assersi kesempurnaan dalam statemen keuangan.

5. Lakukan penelusuran jurnal ke rekening investasi.

Kecermatan pekerjaan klerikal, dapat dilihat dari kecocokan antara dokumen pendukung, pencatatan transaksi dan penyajiannya dalam laporan keuangan. Oleh karena itu untuk memperoleh keyakinan terhadap pekerjaan klerikal dilakukan dengan melakukan *traceback procedure*. Jadi saldo investasi yang disajikan oleh klien dalam neraca ditelusuri ke buku besar, jurnal pembelian, jurnal penjualan dan dokumen-dokumen pendukungnya.

Investasi saham dapat ditentukan dengan metode ekuitas, yang dalam hal ini memberikan keyakinan bahwa manajemen benar-benar mempertimbangkan investasi dalam perusahaan tersebut. Seberapakah penguasaan saham sangat menentukan kepentingan klien, yang oleh

karenanya diperlukan wawancara dengan manajemen mengenai keadaan tersebut. Mengingat besarnya saham sangat menentukan kebijaksanaan atas perusahaan lain tersebut, auditor harus memperoleh pembuktian mengenai transformasi kepentingan dalam perusahaan tersebut serta alasan yang tepat dalam menyajikan pengungkapan dalam statemen keuangan.

6. Hitung kembali pendapatan yang telah diterima.

Penghasilan yang diterima dari investasi harus diverifikasi melalui dokumen pendukungnya dan dilakukan penghitungan kembali. Prosedur pembayaran deviden berbeda dengan pembayaran bunga obligasi, yang oleh karenanya verifikasi terhadap deviden dan bunga dilakukan dengan cara yang berbeda pula. Deviden diterima setelah didaftarkan terlebih dahulu kepada investee. Pendaftaran ini dilakukan setelah pengumuman oleh investee mengenai jumlah rupiah deviden per lembar saham. Sebaliknya penerimaan bunga obligasi, dilakukan setelah ditagihkan kepada investee. Prosedur ini terlihat dalam kertas kerja yang disajikan dalam peraga 6.2, yang ditunjukkan dengan pencocokan daftar yang disajikan oleh klien. Berbagai penjelasan dan kesimpulan yang diambil terlihat dalam catatan kertas kerja yang disajikan dibawahnya. Catatan atas prosedur ini terlihat dari daftar deviden income, yang dihitung berdasarkan pengumuman pembagian deviden oleh investee.

Dalam hal investasi dilakukan terhadap obligasi, maka auditor harus pula menghitung kembali berapa pendapatan yang diperoleh dari bunga obligasi tersebut. Verifikasi dilakukan untuk menentukan apakah perhitungan bunga obligasi yang dilakukan klien telah cocok dengan tingkat bunga yang ditetapkan oleh investee, dan disamping itu perlu pula dicocokkan rancangan penghitungan amortisasi *premium* dan *discount* yang dipersiapkan oleh klien.

Progran pengujian subtansi ini dimaksudkan untuk membuktikan assersi penilaian dan alokasi serta kesempurnaan penghasilan bunga. Disamping itu, juga akan memberikan pembuktian terhadap assersi eksistensi dan okurensi dan hak-hak dan kewajiban terhadap piutang bunga.

7. Penelaahan dokumentasi harga pasar saham.

Semua sekuritas yang dimiliki perusahaan pada dasarnya mengalami fluktuasi harga di pasar bursa. Harga saham yang beredar di lantai bursa pada umumnya mengalami situasi naik dan kadang kala turun. Perubahan harga-harga tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai keadaan perekonomian secara keseluruhan dan juga permintaan ataupun penawaran di lantai bursa. Perubahan harga saham tersebut tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh investee ataupun klien. Keadaan ini menunjukkan, nilai saham di lantai bursa akan turun naik sejalan dengan perkembangan harga saham yang berlaku di pasar bursa.

Mempertimbangkan adanya perkembangan yang selalu berubah di lantai bursa, maka auditor harus mengamati harga-harga saham yang terjadi di pasar bursa dan mengikuti perubahan-perubahannya sebagai dasar penentuan kos investasi saham. Perkembangan harga saham dapat dilihat dari publikasi resmi yang dikeluarkan oleh pengelola bursa saham, atau publikasi dari lembaga lain yang otoritasnya diakui. Dengan adanya informasi ini, auditor dapat melakukan penilaian terhadap kewajaran assersi rekening investasi saham.

8. Bandingkan penyajian statemen keuangan dengan GAAP.

Pengungkapan adalah tinjauan kelayakan penyajian informasi yang disajikan oleh klien dalam suatu laporan keuangan ditinjau dari aspek standar pelaporan. Dalam hal ini, akuntan pemeriksa harus memperoleh keyakinan adakah penyajian laporan keuangan telah memenuhi standar yang berlaku, dalam hal ini prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Penyajian saldo rekening investasi yang memadai meliputi identifikasi dan klasifikasi berbagai jenis investasi yang disajikan dalam neraca dan bagaimana realisasi pendapatannya dalam bentuk keuntungan atau kerugian yang disajikan dalam statemen penghasilan.

SOAL BAB 6

Soal Kelompok A.

Dari pernyataan dalam soal-soal berikut ini, tentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Apabila pernyataan tersebut salah berilah tanda S, dan apabila benar berilah tanda B.

- 1. Investasi saham merupakan rekening yang digunakan untuk menampung semua pengeluaran perusahaan sehubungan dengan kebijaksanaan perusahaan dalam menginvestasikan dana-dana baik investasi diluar perusahaan maupun didalam perusahaan.
- 2. Auditor dalam menyusun perencanaan audit terhadap rekening investasi tidak perlu memperhatikan kebijaksanaan akuntansi yang dibuat klien, mengingat prinsip akuntansi Indonesia telah menegaskan mengenai hal tersebut.
- 3. Dalam rangka memahami terhadap risiko pengendalian dalam siklus investasi, auditor perlu melakukan penyujian kepatuhan terhadap struktur pengendalian intern siklus investasi.
- 4. Guna mengetahui apakah rekening investasi yang disajikan dalam neraca benar-benar ada, auditor antara lain perlu melakukan prosedur audit: melakukan observasi terhadap surat-surat berharga (*securities*) yang dimiliki klien untuk periode yang di audit.
- 5. Semua penghasilan yang ditimbulkan dari investasi perusahaan harus dihitung kembali baik untuk penghasilan bunga maupun penghasilan deviden, prosedur audit semacam ini bertujuan untuk melakukan verifikasi kecermatan perhitungan penyajian elemen investasi dalam laporan keuangan.
- 6. Dalam rangka mengetahui metode penilaian beserta *costing*-nya, auditor perlu mempelajari notulen rapat direksi dan melakukan wawancara langsung kepada direksi atau pejabat yang ditugasi menangani pembelian saham atau obligasi.
- 7. *Safeguarding securities*, adalah fungsi yang terbentuk dalam penanganan transaksi dalam siklus investasi.
- 8. Dalam hal jumlah transaksi investasi menyangkut berbagai macam saham atau obligasi yang berasal dari berbagai macam perusahaan yang telah **go publik**, maka klien tidak dibenarkan membentuk *investment subsidiary ledger*.
- 9. Dalam pembelian surat-surat berharga dari perusahaan yang **go publik** untuk kepentingan investasi, perusahaan harus selalu menggunakan jasa pihak brokers (pialang); sebagai akibatnya untuk mengetahui eksistensi dan memperoleh keyakinan terhadap hak-hak yang dimiliki klien atas surat-surat berharga yang dimilikinya auditor harus melakukan konfirmasi kepada para brokers yang telah memberi layanan pada klien tersebut.
- 10. Pengungkapan rekening-rekening investasi harus didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang lazim, oleh karenanya auditor harus menyusun program pemeriksaan terhadap pembandingan penyajian investasi dengan Prinsip Akuntansi Indonesia.

Soal Kelompok B.

Soal-soal berikut ini adalah soal pilihan ganda. Tentukan jawaban yang Saudara anggap paling benar di antara empat alternatif jawaban yang tersedia, dan apabila di antara alternatif jawaban tersebut tidak ada yang benar tuliskan jawaban E dalam lembar jawaban Saudara.

1. Dalam audit terhadap siklus investasi, auditor akan menemukan dokumen-dokumen berikut ini, **kecuali**:
 - a. *brokers advice*.
 - b. sertifikat saham.
 - c. *voucher register*.
 - d. *bond certificates*.
2. Fungsi-fungsi yang terkait dalam penanganan transaksi siklus investasi antara lain, **kecuali**:
 - a. fungsi pembelian saham dan obligasi.
 - b. pencatatan dan pengakuan transaksi investasi saham dan piutang jangka panjang.
 - c. penerimaan bunga dan deviden.
 - d. pembayaran bunga dan deviden.
3. Dalam rangka membuktikan bahwa saldo pos investasi benar-benar ada, auditor harus melakukan langkah-langkah audit:
 - a. melakukan konfirmasi pada para *brokers* (pialang).
 - b. melakukan observasi terhadap sertifikat surat-surat berharga yang dimiliki.
 - c. melakukan wawancara kepada kepala bagian akuntansi terhadap kebijaksanaan pembelian surat-surat berharga.
 - d. melakukan penelusuran terhadap notulen catatan rapat pimpinan terhadap kebijaksanaan investasi.
4. Auditor perlu mempelajari struktur pengendalian intern terhadap siklus investasi dengan tujuan:
 - a. memperoleh keyakinan terhadap reabilitas catatan akuntansinya.
 - b. menentukan tingkat risiko deteksi dalam audit substansi terhadap pos investasi.
 - c. menentukan tingkat risiko pengendalian dalam audit kepatuhan.
 - d. semua jawaban a, b, dan c di atas benar
5. Ruang lingkup audit terhadap siklus investasi, meliputi:
 - a. transaksi rekening investasi dalam piutang jangka panjang dan saham.
 - b. rekening investasi dan rekening kas.
 - c. rekening investasi, rekening modal, dan penghasilan.
 - d. semua jawaban a, b, dan c di atas tidak ada yang benar.
6. prinsip akuntansi yang lazim, terhadap penyajian pos modal adalah, **kecuali**:
 - a. metode penilaian terhadap pos investasi beserta kebijaksanaan akuntansinya harus diungkapkan.
 - b. rekening investasi saham disajikan dengan memberi disclosure terhadap komposisi penguasaan saham terhadap perusahaan lain.

-
- c. rekening investasi modal saham beserta penjelasan yang harus diungkapkan dalam neraca dengan klasifikasi yang sesuai dengan PAI.
- d. jawaban a dan b di atas benar
7. Dalam rangka audit terhadap elemen rekening piutang jangka panjang auditor harus melakukan observasi apakah rekkening pembantu dan catatan akuntansi menunjukkan informasi yang sama serta dapat memberikan kejelasan perhitungannya. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh petunjuk bahwa:
- apakah piutang jangka panjang dinyatakan understated.
 - discount on bond payable, dinyatakan understated.
 - premium on bond payable, dinyatakan understated.
 - penghasilan bunga dalam periode audit dinyatakan over stated.
8. Semua transaksi-transaksi yang membentuk investasi dalam perusahaan, harus ditelusur ke:
- catatan rapat dewan komisaris.
 - jurnal penerimaan kas.
 - jurnal pengeluaran kas.
 - jumlah sertifikat saham dan investasi obligasi.
9. Dividen payable merupakan rekening yang digunakan untuk mencatat:
- penghasilan dari investasi saham.
 - penghasilan dari investasi obligasi.
 - tagihan kepada perusahaan yang mengeluarkan obligasi.
 - semua jawaban a, b, dan c di atas salah.
10. Program audit yang dilakukan dengan membuat kalkulasi kembali terhadap daftar surat-surat berharga, bertujuan:
- verifikasi eksistensi terhadap pos investasi.
 - mengetahui kecermatan penyajian pos investasi dalam neraca beserta penilaiannya.
 - menentukan kebenaran pengungkapan pos investasi.
 - menentukan hak-hak perusahaan terhadap semua investasi yang dicantumkan dalam neraca.
11. Dokumen-dokumen berikut ini akan saudara peroleh dalam melakukan pemeriksaan pos investasi, kecuali:
- Notulen rapat Direksi
 - Brokers advice*
 - Cancelled checks*
 - Cash remittance advice*
12. Untuk membuktikan eksistensi pemilikan surat-surat berharga, auditor dapat melakukan prosedur berikut, **kecuali**:
- Inspeksi surat-surat berharga yang ada.
 - Hitung surat berharga yang ada.
 - Telusur kembali pencatatannya ke rekening investasi.
 - Konfirmasi kepada pihak lain yang berkepentingan.

-
-
13. Perbedaan investasi jangka panjang dengan investasi jangka pendek dilihat dari:
- Tujuan mengadakan investasi
 - Ujud fisik
 - Materialitas dana yang diinvestasikan
 - Periode waktu perputaran investasi
14. Kertas kerja pemeriksaan untuk perhitungan fisik surat berharga harus memuat informasi berikut, **kecuali**:
- Nomor sertifikat.
 - Jumlah lembar surat berharga atau nilai nominalnya.
 - Harga pasar surat berharga.
 - Tanggal pengeluaran surat berharga.
15. Kesalahan dalam penanganan transaksi penjualan surat-surat berharga terjadi karena beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah:
- Order penjualan mungkin tidak cermat dalam penghitungan kuantitas maupun penulisan jenis surat berharga yang dijual.
 - Penjualan surat berharga dengan risiko kredit yang tidak diperhitungkan.
 - Penjualan surat berharga tidak menggunakan jasa para pialang.
 - Kegiatan penjualan ditangani oleh beberapa orang yang ahli dalam bidangnya secara bersama-sama.

Bab 7

Audit Terhadap Siklus Sumber-Sumber Pendanaan

DALAM BAB INI AKAN DIBAHAS:

1. Identifikasi tujuan audit transaksi dan saldo yang terbentuk oleh siklus sumber-sumber pendanaan.
2. Menjelaskan penerapan struktur pengendalian intern terhadap transaksi siklus sumber-sumber pendanaan.
3. Menjelaskan pendekatan yang digunakan auditor dalam menjalankan standard pelaksanaan pekerjaan lapangan untuk transaksi dan saldo yang terbentuk oleh siklus sumber-sumber pendanaan.
4. Menunjukkan bagaimana pengujian subtansi terhadap saldo maupun setiap assersi yang relevan yang timbul dari siklus sumber-sumber pendanaan.

Dalam bab ini akan dibahas siklus sumber-sumber pendanaan keuangan (*financing*), dengan ruang lingkup pembahasan mencakup semua aspek penghimpunan dana dan modal perusahaan. Dengan demikian siklus ini mempengaruhi dua aspek yaitu (a) pembentukan kewajiban yang berjangka waktu pelunasan lebih dari satu tahun, dan (b) pembentukan kepemilikan perusahaan (modal saham). Transaksi yang berhubungan dengan utang jangka panjang antara lain berupa: obligasi, wessel jangka panjang, hipotik (*mortgages*), bond premium (*discount*), *interest expense*, dan *gain(loss) on retirement of bonds*. Sedangkan transaksi yang berkaitan dengan modal saham antara lain: saham preferensi, saham biasa, saham treasury, *paid-in capital*, *retained earnings*, deviden, *dividend payable*. Baik dalam transaksi utang jangka panjang maupun dalam transaksi modal saham mempunyai tujuan audit yang sama, serta struktur pengendalian intern dengan konfigurasi yang tidak jauh berbeda.

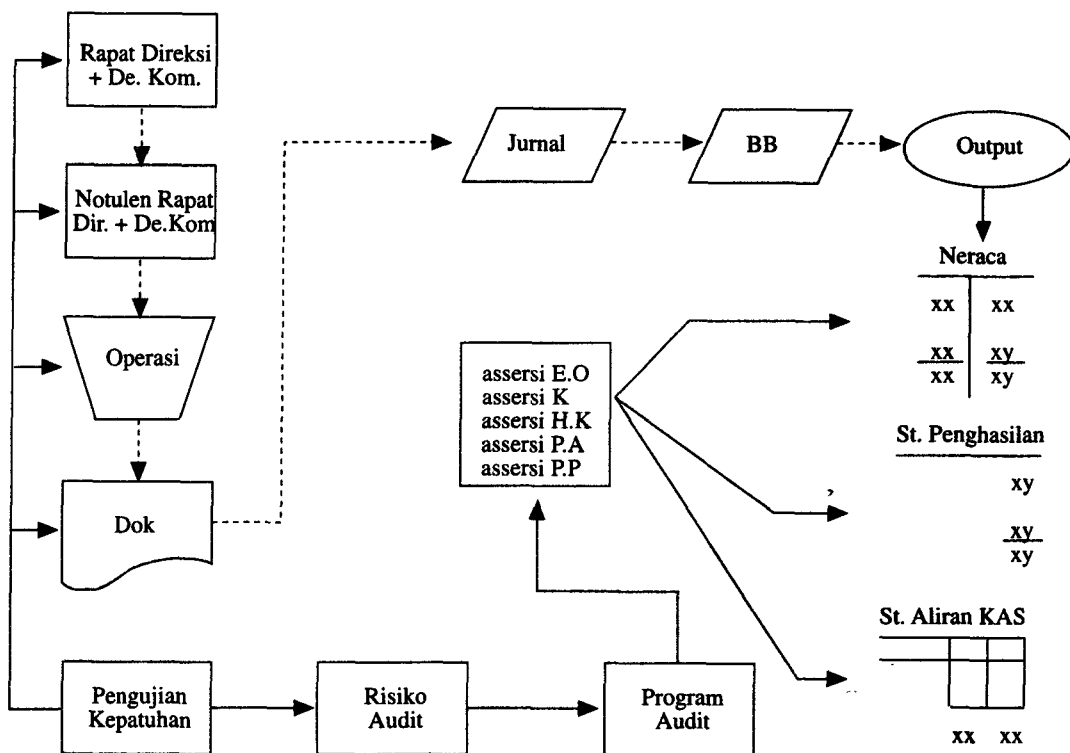
A. TUJUAN AUDIT

Tujuan audit dalam siklus sumber-sumber pendanaan ini antara lain:

1. Eksistensi atau okurensi pembentukan transaksi
 - * Pencatatan terhadap saldo-saldo utang jangka panjang dan modal saham pada saat tanggal neraca benar-benar nyata.
 - * Pembayaran deviden dan biaya bunga obligasi yang timbul dan terbentuknya transaksi dalam periode ini dinyatakan.
2. Kesempurnaan
 - * Rekening utang jangka panjang mencerminkan semua kewajiban kepada kreditor jangka panjang pada saat tanggal neraca.
 - * Rekening modal saham mencerminkan hak-hak para pemilik terhadap semua aktiva pada saat tanggal neraca.
 - * Semua transaksi utang jangka panjang dan transaksi modal saham dalam tahun yang dilaporkan telah dicatat.
3. Hak dan kewajiban
 - * Rekening utang jangka panjang mencerminkan jumlah yang secara hukum dimiliki oleh para kreditor dan piha lain yang berkepentingan pada saat tanggal neraca.
 - * Rekening modal saham mencerminkan hak yang secara hukum dimiliki para pemegang saham pada saat tanggal neraca.
4. Penilaian atau alokasi
 - * Penilaian terhadap rekening utang jangka panjang dan modal saham didasarkan pada prinsip akuntansi yang lazim di terapkan di Indonesia (di USA disebut GAAP).
5. Presentasi dan pengungkapan
 - * Rekening utang jangka panjang dan modal saham telah diidentifikasi dan diklasifikasi secara layak dalam neraca.

- * Semua kesepakatan, perjanjian dan rancangan pelunasan terhadap utang jangka panjang telah dijelaskan dan diungkapkan dalam laporan keuangan.
- * Semua fakta yang berkaitan dengan pengeluaran saham (yang meliputi par atau stated value) telah memperoleh persetujuan terhadap jenis saham dan pengeluarannya, dan jumlah saham yang dipegang sebagai saham treasury atau adanya opsi saham telah diungkapkan.

Pola pengujian transaksi dalam siklus pendanaan guna mencapai tujuan tersebut di atas, digambarkan dalam peraga 7.1 yang disajikan dalam halaman ini. Dalam peraga tersebut digambarkan hubungan antara proses pengambilan keputusan manajemen sampai dengan asseri manajerial dalam statemen keuangan dengan proses audit yang seharusnya dilaksanakan.



Peraga 7.1 Pola Pengujian Transaksi dalam Siklus Pembelian

B. MATERIALITAS, RISIKO, DAN STRATEGI AUDIT

Dalam pembahasan risiko audit beserta penyusunan strategi pengauditan, auditor harus mempertimbangkan karakterisasi dan ruang lingkup bisnis klien masing-masing. Hampir semua perusahaan besar, struktur utang jangka panjang mempunyai kedudukan yang dominan. Hal ini disebabkan pendanaan perusahaan besar berasal dari berbagai pihak termasuk masyarakat banyak. Kemampunan menghimpun dana sedemikian besar disebabkan kepercayaan masyarakat yang tinggi pada perusahaan besar sehingga dana yang ditempatkan dirasakan aman. Demikian halnya komponen yang membentuk modal saham dalam suatu perusahaan besar mempunyai posisi yang sangat dominan pula. Mutasi yang terjadi dalam kedua kelompok rekening ini sangat material mempengaruhi komposisi kekayaan perusahaan. Oleh karenanya neraca perusahaan harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terbentuk dari transaksi siklus pendanaan tersebut.

Risiko terhadap kemungkinan kesalahan penanganan dan pencatatan transaksi siklus pendanaan biasanya rendah. Dalam beberapa kasus, aspek operasional yang mungkin menimbulkan permasalahan adalah pembayaran bunga obligasi dan pembayaran deviden (kadang kala ditangani oleh pihak luar, antara lain bank, pialang, pedagang efek). Semua transaksi yang berkaitan dengan proses pendanaan ini (saat penerimaan uang dan saat pemberian kompensasi bunga dan deviden) selalu harus memperoleh persetujuan dari dewan komisaris atau para pemegang saham. Hal ini disebabkan pembayaran bunga obligasi maupun kas deviden tunai dilakukan secara berkala sesuai dengan terms dalam surat obligasi maupun saham biasa. Dengan situasi tersebut, risiko terhadap kemungkinan adanya penyimpangan dalam transaksi tersebut menjadi sangat rendah.

Dalam perancangan strategi audit terhadap rekening-rekening yang terbentuk oleh transaksi dalam siklus ini, harus diperhatikan adanya ide terbentuknya transaksi dari dalam perusahaan sendiri. Dengan demikian titik tolak dari langkah-langkah auditor adalah memperoleh keyakinan terhadap proses pengambilan keputusan direksi dalam membentuk transaksi siklus ini.

C. PEMAHAMAN TERHADAP STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN

Dalam upaya memahami struktur pengendalian intern dalam siklus ini, tidak jauh berbeda dengan siklus investasi yang dibahas dalam bab 6. Setiap langkah dalam memahami struktur pengendalian intern meliputi: (1) pemahaman terhadap segala catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang digunakan oleh klien dalam menangani transaksi siklus pendanaan, dan (2) pemahaman terhadap fungsi-fungsi yang terkait dalam penanganan transaksi siklus pendanaan tersebut. Rincian pembahasan kedua hal tersebut adalah:

1. Catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang digunakan

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam siklus pendanaan ini secara keseluruhan sama dengan dokumen dalam siklus investasi. Hanya saja, tinjauan dokumen dalam aspek pendanaan ditinjau dari sisi perusahaan yang mempunyai kewajiban kepada kreditor atau hak-hak para pemilik. Pembahasan pengertian dokumen-dokumen tersebut sama dengan pembahasan dokumen dalam bab 6 sebelumnya.

Perbedaan yang akan ditemukan dengan dokumen dalam bab 6 adalah berita acara pemusnahan surat berharga. Dokumen ini diperlukan mengingat pada saat semua obligasi telah dilunasi, maka surat-surat obligasi tersebut harus ditarik kembali. Padahal penarikan kembali obligasi tidak selalu bersamaan dengan saat jatuh tempo yang mengakibatkan surat obligasi tersebut pada dasarnya masih aktif, dan oleh karenanya harus dimusnahkan. Pemusnahan dokumen yang sudah tidak terpakai tersebut untuk menghindarkan penyalahgunaan oleh pihak-pihak internal maupun eksternal yang bertanggungjawab terhadap perusahaan. Pemusnahan surat-surat berharga tersebut dengan cara dibakar atau cara lain yang dapat menghilangkan fungsi surat berharga tersebut. Mengingat begitu berarti peran surat berharga tersebut, maka pemusnahannya harus disertai berita acara pemusnahan dokumen surat-surat berharga. Berita acara ini berisi dokumen apa saja yang dimusnahkan, berapa banyak jumlah dokumen yang dimusnahkan, kapan dimusnahkan, dan siapa petugas yang memusnahkannya.

2. Fungsi-fungsi yang terkait

Fungsi yang terkait dalam pengendalian penanganan transaksi siklus pendanaan meliputi:

- * Pengeluaran modal saham atau obligasi.
- * Pembayaran bunga obligasi dan deviden tunai.
- * Pelunasan obligasi dan pembelian kembali saham.
- * Pencatatan transaksi-transaksi pendanaan.
- * Pemegang buku besar obligasi dan modal saham dan pemeliharaan kecermatan pencatatannya.

Fungsi pengeluaran, pembayaran bunga/deviden, pelunasan obligasi maupun pembelian kembali saham treasury pada dasarnya independen, namun keputusan terhadap hal tersebut langsung berada ditangan direksi, dewan komisaris, atau para pemegang saham. Otoritas masing-masing telah tertulis dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan. Masing-masing fungsi tersebut hanya pelaksana operasional dari keputusan para pengambil keputusan perusahaan.

D. AUDIT SUBTANSI TERHADAP SALDO UTANG JANGKA PANJANG

Utang jangka panjang diikat dengan perjanjian khusus, yang biasanya diketahui oleh rapat direksi dan dewan komisaris perusahaan. Sumber transaksi utang jangka panjang berasal dari:

1. Pinjaman dari lembaga keuangan (baik bank maupun nonbank).
2. Pinjaman dari masyarakat yang diperoleh melalui pasar modal.

Pinjaman dari lembaga keuangan diperoleh dengan jalan (1) pinjaman berjangka dengan ketentuan kredit yang disepakati antara debitur dan kreditur dan (2) pinjaman hipotik. Bentuk pinjaman dari lembaga keuangan bank (LKB) akan berbeda dengan pinjaman dari lembaga keuangan nonbank (LKNB). Hal ini mengingat segmentasi pasar LKB dan LKNB sangat berbeda. Pinjaman hipotik (LKNB) adalah pinjaman yang disertai jaminan atas suatu aktiva

tetap yang dibelanjai dari dana pihak kreditur. Selain itu dapat pula berupa kontrak leases antara perusahaan dengan lembaga leasing.

Pinjaman yang berupa dana dari masyarakat berbentuk obligasi (*bond*). Obligasi dikeluarkan oleh klien dengan janji pelunasan pinjaman beserta kewajiban membayar bunga obligasi tersebut. Kewajiban tersebut akan dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman obligasi diedarkan melalui pasar modal (bursa efek), sehingga mekanisme transaksi antara masyarakat dengan perusahaan (klien) diatur dan diawasi oleh Security Exchange Commision (di Indonesia, oleh BAPEPAM). Utang jangka panjang kepada masyarakat ini dapat berbentuk:

1. *Convertible bond*, yaitu obligasi yang dijanjikan dapat ditukar dengan saham perusahaan. Dalam hal ini ditukar dengan saham biasa.
2. *Serial bond*, adalah obligasi yang dikeluarkan secara berseri. Serial dikeluarkan untuk jenis sahamnya maupun pola angsuran obligasinya.
3. *Regular bond*, adalah obligasi biasa yang tidak dilekati dengan keistimewaan dalam pengeluaran obligasinya.

1. Masalah khusus dalam audit utang jangka panjang

Sifat-sifat khas utang jangka panjang, menyebabkan auditor harus pula memahaminya dengan lebih mendalam kekhasan bentuk-bentuk utang jangka panjang tersebut. Masalah-masalah tersebut antara lain:

- a. Utang jangka panjang dari pihak bank. Sifat bank dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan adalah menekankan pada pengembalian melalui angsuran yang pasti dan bunga bank yang telah disepakati bersama. Disamping itu pihak bank menginginkan adanya jaminan apabila terjadi pengingkaran dari klien. Oleh karena itu pinjaman semacam ini pasti disertai akta perjanjian dan pengikatan sejumlah aktiva sebagai jaminan pinjaman tersebut. Mengingat pinjaman semacam ini dalam jumlah besar dan berlaku dalam kurun waktu yang lama, maka otorisasi pinjaman tersebut berada ditangan komisaris. Bahkan untuk perusahaan tertentu, pinjaman jangka panjang harus disetujui oleh rapat pemegang saham, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan.

Contoh penyajian utang jangka panjang dalam penjelasan pos neraca PT SHD dalam laporan keuangan per 31 Desember 1986 adalah sbb:

Saldo kewajiban jangka panjang adalah sbb:

| | |
|--|---------------------|
| - Dalam negeri, kepada Bank Bumi Daya Cabang Yogyakarta, yaitu Kredit Investasi UHT | Rp114.000.000 |
| - Luar Negeri, kepada Alfa Laval South East Ptl. Ltd. (DM) | |
| Total kewajiban jangka panjang | <hr/> Rp114.000.000 |

Kredit Investasi UHT, merupakan utang kepada Bank Bumi Daya untuk investasi pabrik, UHT dengan maksimum kredit Rp1.130.000.000 bunga 13,5 % setahun, yang diangsur setiap triwulan (3,375 %). Perjanjian kredit berlaku sejak tanggal 25 Mei 1982 sampai 25 Mei 1988, dengan jaminan penyerahan hak milik secara fiducia (lihat penjelasan nomor 22).

Berdasarkan penjelasan dan pengungkapan terhadap penyajian pos utang jangka panjang tersebut di atas dapat diketahui bahwa:

- a. terdapat kewajiban jangka panjang yang segera jatuh tempo yang terdiri dari utang dalam negeri sebesar Rp228.000.000 dan utang luar negeri sebesar Rp475.697.819 (Hal ini dapat dilihat dari penjelasan atas laporan keuangan nomor 23). Kedua golongan utang tersebut segera akan dilunasi pada tahun 1987 (setelah tanggal neraca).
- b. utang jangka panjang yang segera akan jatuh tempo tersebut harus dibuatkan jurnal penyesuaian. Auditor harus membuat usulan adjustmen atas sejumlah utang yang segera akan jatuh tempo tersebut, kalau klien tidak melakukannya.
2. Utang jangka panjang dari LKNB. Sifat-sifat utang jangka panjang yang berasal dari LKNB, hampir sama dengan utang yang bersumber dari bank. Sehingga masalah yang dihadapi dalam kasus ini maupun teknik yang digunakan dalam audit jenis utang jangka panjang ini sama dengan butir ke satu di atas. Perbedaan yang mungkin terjadi hanya dalam aspek operasional di lapangan saja, sebab prinsip-prinsip dasarnya samasekali tidak berbeda.
3. Utang Obligasi. Utang obligasi adalah utang yang berasal dari dana masyarakat. Obligasi dikeluarkan dengan persetujuan para pemegang saham dalam suatu rapat pemegang saham. Hal ini dilakukan mengingat pengeluaran surat obligasi dimaksudkan untuk melakukan pembiayaan suatu project investasi yang bersifat khusus. Dalam rapat pemegang saham diputuskan mengenai (1) bentuk surat obligasi, (2) berapa besarnya utang yang akan dibuat, (3) berapa besarnya nilai nominal per lembar saham, (4) jangka waktu peminjaman dana dan (5) berapa besarnya bunga obligasi. Kelima butir masalah tersebut merupakan kebijaksanaan jangka panjang, oleh karenanya memerlukan persetujuan dari para pemegang saham. Untuk kebijaksanaan Jangka pendek diperlukan persetujuan dari dewan Komisaris, misalnya; (1) pemilihan underwriter, (2) alokasi penggunaan dana, dan (3) kebijaksanaan pelunasaannya. Hal-hal yang bersifat operasional ditangani secara langsung oleh Direksi, misalnya; (1) penentuan tanggal pengedaran surat obligasi, (2) tanggal pembayaran bunga dan angsuran, (3) kebijaksanaan akuntansi terhadap obligasi yang dikeluarkan, dan (4) Penetapan fee underwriter, dll.

2. Program audit terhadap utang jangka panjang

Dalam rangka audit utang jangka panjang, maka auditor harus menyusun program audit sebagai berikut:

- a. Lakukan verifikasi terhadap kecermatan saldo-saldo, berbagai daftar dan buku pembantunya.
- b. Terapkan prosedur analitis.

-
-
- c. Lakukan penelaahan terhadap otorisasi beserta kontrak-kontraknya.
 - d. Lakukan konfirmasi atas utang jangka panjang.
 - e. Lakukan vouching terhadap jurnal rekening utang jangka panjang
 - f. Lakukan penghitungan kembali terhadap biaya bunga
 - g. Bandingkan penyajiannya dengan Standar Akuntansi keuangan yang berlaku.

Rincian program audit utang jangka panjang dijelaskan dalam uraian rinci sebagai berikut.

- a. Lakukan verifikasi terhadap kecermatan saldo-saldo, berbagai daftar dan buku pembantunya.

Langkah awal dalam audit utang jangka panjang adalah melakukan verifikasi kecermatan hitungan berbagai daftar pendukung baik perkaliannya, penjumlahan kesamping dan penjumlahan kebawah. Selanjutnya cocokkan hitungan yang sudah diperiksa (dan benar) dengan saldo-saldo yang disajikan dalam statemen keuangan. Pengujian dalam program ini bermaksud melakukan penilaian terhadap asersi penilaian dan alokasi.

- b. Terapkan prosedur analitikal.

Lakukan analisis adakah angka yang disajikan dalam neraca didukung oleh kebijaksanaan yang dirumuskan oleh manajemen. Proses analisis ini dilakukan dengan membuat perbandingan diantara berbagai elemen yang terkait dengan penyajian utang jangka panjang. Analisis ratio yang digunakan antara lain:

1. ratio utang jangka panjang terhadap aktiva.
2. biaya bunga terhadap total utang jangka panjang
3. biaya bunga terhadap penghasilan bersih

Setiap ratio dibandingkan baik secara internal maupun eksternal (ratio industri). Apabila ditemukan adanya fluktuasi yang cukup menonjol, hal tersebut sebagai petunjuk adanya hal-hal yang harus dicermati oleh auditor.

- c. Lakukan penelaahan terhadap otorisasi beserta kontrak-kontraknya.

Proses pengambilan keputusan merupakan bagian yang amat vital dalam setiap transaksi sumber pendanaan perusahaan, oleh karenanya akan selalu melibatkan para pengambil keputusan tertinggi dalam suatu perusahaan. Tekanan dalam program audit ini antara lain:

- * Periksa lah persetujuan dari dewan komisaris perusahaan atas transaksi utang jangka panjang tersebut. Dokumen-dokumen permanent yang mendasari kebijaksanaan klien terhadap surat obligasi harus dipelajari dan dipahami oleh auditor.
- * Lakukan analisis atas penilaian terhadap penyajian utang jangka panjang klien. Periksa lah adakah saldo yang disajikan dapat menggambarkan kebijaksanaan yang diambil oleh dewan komisaris perusahaan.
- * Auditor perlu melakukan analisis, adakah penilaian serta alokasi atas utang obligasi tersebut telah dilakukan dengan layak.

Otorisasi yang diberikan oleh dewan komisaris ataupun rapat pemegang saham biasanya dalam bentuk notulansi rapat, yang dalam hal ini akan dikukuhkan dengan suatu keputusan final berupa surat keputusan. Semua ikatan yang dilakukan direksi dengan pihak luar harus didasarkan pada keputusan yang diambil tersebut. Penyimpangan terhadap keputusan yang berpengaruh material, harus didiskusikan dengan direksi, untuk memperoleh penjelasan kenapa direksi mengambil keputusan yang menyimpang.

d. Lakukan konfirmasi atas utang jangka panjang.

Proses konfirmasi dalam elemen utang jangka panjang dilakukan secara langsung dengan pemberi pinjaman (*lenders*) atau *bond trustee*. Bentuk surat konfirmasi utang jangka panjang tidak jauh berbeda dengan bentuk konfirmasi utang jangka pendek. Perbedaan yang harus ditegaskan dalam konfirmasi ini, terutama penegasan mengenai status utang tersebut sampai saat tanggal neraca, serta transaksi-transaksi yang terjadi setelahnya. Rincian ini sangat diperlukan untuk melihat adanya kemungkinan pembentukan transaksi luar biasa pada periode subsequent. Dengan demikian dalam konfirmasi ini, Auditor melakukan pengecekan dari pihak ketiga yang independent baik melalui konfirmasi tertulis maupun wawancara langsung mengenai eksistensi utang jangka panjang. Disamping itu, Auditor dapat melakukan wawancara dengan penasihat hukum klien mengenai pengeluaran surat obligasi.

e. Lakukan vouching terhadap jurnal rekening utang jangka panjang

Setiap pengeluaran obligasi berakibat terhadap penerimaan kas. Dalam hal ini harus ditelusuri apakah transaksi kas masuk yang terjadi benar-benar telah dicatat dalam jurnal maupun buku-buku yang ada. Oleh karena itu Auditor harus melakukan pengujian kembali (*trace back procedure*) atas transaksi yang mendukung pengeluaran obligasi. Apabila diperlukan auditor dapat pula melakukan pengujian atas beberapa atribut transaksi dengan *sampling audit*. Verifikasi kesempurnaan. Dalam hal ini harus dipahami, cara penjualan obligasi antara satu perusahaan yang satu dengan lainnya tidak selalu sama. Utang yang dijamin dengan hipotik, tentu akan berbeda dengan utang yang dijamin atas kepercayaan. Begitu pula utang dari bank ataupun lembaga keuangan juga akan berbeda dengan bentuk pinjaman sindikasi. Perbedaan-perbedaan ini hendaknya dipahami oleh Auditor, agar dirinya dapat memberikan justifikasi yang memadai terhadap penyimpangan yang ditemukannya.

f. Lakukan penghitungan kembali terhadap biaya bunga

Sebagai akibat dikeluarkannya utang obligasi atau keputusan mengenai utang jangka panjang lainnya menyebabkan timbulnya kewajiban bunga pada kreditor. Oleh karena itu, pengamatan terhadap pengeluaran kas yang terkait dengan pembayaran bunga obligasi harus mendapat perhatian. Mengingat utang semacam ini berjangka panjang, maka auditor harus memperhatikan perkembangan transaksi selama periode akuntansi yang di audit maupun sesudahnya. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain:

* Pengujian terhadap kecermatan pekerjaan klerikal dengan melakukan analisis terhadap proses transaksi utang jangka panjang.

- * Lakukan penghitungan kembali terhadap saldo utang jangka panjang dan biaya bunga yang timbul, serta lakukan perbandingan di antara ke dua pos tersebut dan tentukan kewajarannya.
- * Lakukan analisis terhadap perlakuan angsuran utang jangka panjang yang segera akan jatuh tempo pada periode akuntansi mendatang. Auditor harus meyakini bahwa utang jangka panjang yang segera akan jatuh tempo telah disajikan sebagai utang lancar pada saat tanggal neraca.

Langkah-langkah dalam prosedur ini dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan terhadap asersi eksistensi atau okurensi, hak-hak dan kewajiban, dan penilaian atau alokasinya.

g. Bandingkan penyajiannya dengan Standar Akuntansi keuangan yang berlaku.

Auditor harus melakukan penilaian atas pengungkapan utang jangka panjang dalam laporan keuangan klien, apakah telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Hal-hal yang perlu diamati sehubungan dengan penyajian utang jangka panjang, adalah:

- * Saldo utang jangka panjang disajikan sebesar nilai utang yang harus dibayarkan kepada kreditur. Jadi bunga dan angsuran yang sudah dibayarkan tidak perlu dimasukkan dalam rekening utang jangka panjang.
- * Jaminan atas aktiva yang dikaitkan dengan utang jangka panjang tersebut harus diungkapkan dalam neraca (disclosure).
- * Angsuran utang jangka panjang yang segera akan jatuh tempo pada periode akuntansi mendatang, harus disajikan sebagai utang kuren.
- * Jaminan atas aktiva yang dikaitkan dengan utang jangka panjang tersebut harus diungkapkan dalam neraca (disclosure).

Auditor melakukan pengecekan kembali apakah saldo utang obligasi yang disajikan dalam neraca telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim di Indonesia. Prinsip akuntansi yang lazim dalam hal utang obligasi adalah:

- Utang obligasi disajikan dalam neraca sebesar nilai nominalnya serta dicantumkan kapan tanggal jatuh temponya.
- Premi ataupun diskonto obligasi harus disajikan, dan dijelaskan pula mengenai kebijaksanaan amortisasinya.
- Treasury bond dan authorized bond harus diungkapkan, agar pembaca laporan dapat mengetahui berapa banyak obligasi yang telah beredar, serta apakah obligasi tersebut memang bonafid.

3. Kertas kerja yang harus dibuat

Auditor harus membuat kertas kerja pemeriksa yang disesuaikan dengan jenis utang jangka panjang perusahaan. Persoalan yang penting harus dipahami, sebagian besar kertas kerja pendukung berisi arsip permanent. Oleh karenanya proses pengumpulan bukti audit yang paling penting adalah saat audit yang pertama kali. Lengkapnya pengumpulan bukti audit tersebut akan mendukung audit pada periode berikutnya. Pada audit periode berikutnya (oleh kantor akuntan yang sama), perhatiannya adalah pada mutasinya saja.

Jenis kertas kerja yang harus dibuat oleh auditor, adalah:

1. Kertas kerja utama
2. Kertas kerja pendukung, yang terdiri dari:
 - a. Daftar utang jangka panjang
 - b. Surat-surat konfirmasi
3. Kertas kerja permanen
 - a. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan
 - b. Surat perjanjian utang jangka panjang
 - c. Notulen rapat direksi atau dewan komisaris.

Salah satu contoh kertas kerja disajikan di halaman 168 berikut ini, berupa Utang Obligasi beserta bunganya.

Peraga 7.2 Kertas Kerja Utang Jangka Panjang dan Biaya Bunga

PT METAL INDUSTRI

Utang Jangka Panjang dan Utang Bunga

31 Desember 1993

| Deskripsi | Saldo 1/1/93 | Paid 1993 | Perolehan 1993 | Saldo 31/12/93 | Saldo 1/1/94 | Biaya bunga | Paid 1994 | Saldo 31/12/93 |
|--|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|
| Utang Wessel kpd Bank NL, peluna- san Rp 100.000 per tnn, s.d. 1/7/95 | 300.000 | | 100.000 | 200.000 | 15.000 | 25.000 | 30.000 | 10.000 |
| Utang Wessel kpd National Bank, jatuh tempo pada 1/9/95 | | 250.000 | | 250.000 | | 7.500 | | 7.500 |
| Jumlah | 300.000 | 250.000 | 100.000 | 450.000 | 15.000 | 32.500 | 30.000 | 17.500 |

E. AUDIT SUBTANSI TERHADAP REKENING-REKENING MODAL SAHAM

Audit terhadap modal berkaitan dengan rekening yang menunjukkan kekayaan bersih suatu perusahaan. Bentuk rekening modal sangat tergantung pada bentuk badan hukum perusahaan. Pada dasarnya ada empat macam bentuk badan hukum suatu perusahaan, yaitu: (1) Perusahaan perseorangan (firma), (2) Perusahaan Persekutuan (CV), (3) Perseroan Terbatas (PT), dan (4) Koperasi. Teknik penyajian informasi rekening modal untuk masing-

masing jenis perusahaan akan berbeda-beda. Alasannya rekayasa hukum yang mendasari terbentuknya perusahaan juga berbeda-beda.

1. Masalah khusus dalam audit Modal Saham

Dalam audit terhadap rekening modal saham, auditor harus mencermati segala aspek yang terkait dengan perubahan modal. Pemahaman terhadap permasalahan yang bersifat khusus dalam pembentukan rekening modal ternyata berbeda-beda untuk setiap jenis perusahaan dan bentuk badan hukumnya. Kekhasan permasalahan ini harus dipelajari dan dipahami agar dapat mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul dalam berbagai jenis perusahaan tersebut.

a. Audit terhadap rekening modal pada perusahaan perseorangan (firma)

Perusahaan perseorangan (firma), pemilikan modalnya dimiliki oleh perseorangan (seorang atau beberapa orang saja). Dalam perusahaan semacam ini, setiap mutasi kekayaan perusahaan berpengaruh langsung pada rekening modal. Rekening modal dalam perusahaan perseorangan, terdiri dari rekening Modal, dan rekening Prive.

Auditor harus memperhatikan mutasi kekayaan perusahaan yang digunakan untuk kepentingan individu pemilik perusahaan. Oleh karenanya, berapa besarnya rekening prive yang telah diambil perusahaan merupakan cerminan kekayaan yang diambil/ digunakan oleh si pemilik. Dengan memperhatikan kondisi (dan budaya setempat), proses audi terhadap rekening modal untuk perusahaan perseorangan di Indonesia justru sangat sulit, mengingat batas antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan sangat kabur. Sebagai akibatnya auditor juga sulit untuk menilai, manakah pengeluaran yang masuk kategori kepentingan pribadi si pemilik dan manakah kepentingan perusahaan. Eksistensi rekening modal, sangat ditentukan oleh kecermatan pencatatan transaksi perubahan modal. Dengan demikian derajat kepercayaan terhadap kecermatan pekerjaan klerikal sangat dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Intern dalam perusahaan tersebut. Jadi, Compliance Test memegang peranan yang sangat vital.

b. Audit terhadap rekening modal pada persekutuan

Perusahaan yang berbentuk persekutuan modalnya dimiliki oleh lebih dari satu orang yang bergabung dalam sebuah perusahaan. Identitas kepemilikan masing-masing individu dalam perusahaan persekutuan sangat menonjol. Oleh karenanya mutasi kekayaan dalam perusahaan ini sangat dipengaruhi oleh partisipasi anggota sekutu tersebut. Pengambilan dana ataupun setoran dari tiap sekutu akan mempengaruhi secara langsung rekening modal. Setiap setoran dicatat langsung pada rekening Modal, tetapi setiap pengambilan dana (uang) oleh masing-masing sekutu dicatat terlebih dulu pada rekening prive. Meskipun pada akhirnya juga akan mengurangi rekening Modal.

Sulitnya melakukan audit rekening modal pada persekutuan, disebabkan luwesnya perubahan-perubahan yang terjadi dalam rekening Modal. Seperti halnya dalam auditerhadap perusahaan perseorangan, maka dalam persekutuan juga sangat mengandalkan pada kecermatan pekerjaan klerikal.

Contoh penyajian rekening modal dalam perusahaan persekutuan adalah sbb:

Modal Usaha:

| | | |
|--------------------------------------|------------------|-------------|
| – Modal Tn Abadi | Rp1.000.000 | |
| – Modal Tn Sipahutar | <u>2.450.000</u> | |
| Jumlah modal PT ABX | | Rp3.450.000 |
| Laba operasi tahun 1987 | Rp450.000 | |
| – Prive Tn Abadi | (140.000) | |
| – Prive Tn Sipahutar | <u>(225.000)</u> | |
| Laba operasi setelah dikurangi Prive | <u>85.000</u> | |
| Total modal usaha | | Rp3.535.000 |

c. Audit terhadap rekening modal pada perseroan

Bentuk perseroan terdiri dari dua macam, yaitu perseroan terbuka dan perseroan tertutup. Perseroan tertutup apabila pemilikan sahamnya bersifat terbatas saja. Untuk perseroan yang dimiliki pemerintah maka bentuk badan hukumnya diberi nama khusus misalnya Perjan, Perum, PN dan PT persero. Perseroan yang bersifat terbuka apabila pemilikan modalnya terbuka untuk semua pihak yang berminat. Saham pada perseroan terbuka diedarkan melalui pasar modal. Struktur rekening modal pada perseroan di Indonesia adalah sbb:

Modal Sendiri:

Modal saham Rp 6.000.000.000. terbagi atas 6.000.000 lembar saham biasa nominal Rp1.000, telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 4.992.000 lembar

Rp4.992.000.000

Agio saham

1.013.200.000

Laba yang ditahan:

| | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| – Cadangan Ekspansi | Rp 500.000.000 | |
| – Cadangan umum | 1.476.541.377 | |
| – Laba belum dibagi | <u>1.889.680.080</u> | |
| Jumlah laba yang ditahan | | <u>3.866.221.457</u> |

Jumlah modal sendiri

Rp9.871.421.457

Informasi mengenai siapa saja pemegang saham perusahaan tersebut dapat dilihat dari daftar penjelasan pos-pos dalam neraca, yang antara lain:

| | |
|----------------------|-----------------------|
| PT KF Malioboro | 2.173.600 lbr 43,54 % |
| PT TIGAKA | 1.778.400 lbr 35,63 % |
| Masyarakat Indonesia | 1.040.000 lbr 20,83 % |

Pengungkapan (*disclosure*) yang dipandang perlu disajikan dalam penjelasan tersebut. Secara lebih rinci diungkapkan kapan perusahaan ini mulai go publik, serta bagaimana perkembangan dari kebijaksanaan tersebut.

Agio saham dijelaskan adanya nilai pasar saham yang saat itu sebesar Rp1.850 per lembar saham. Dengan demikian terdapat agio saham sebesar Rp850 per lembar saham atau sebesar Rp850.000.000 ditambah adanya agio atas saham bonus sebesar Rp163.200.000. Informasi ini memberikan gambaran bagaimana kedudukan saham di bursa efek. Dengan adanya agio tersebut nilai saham perusahaan tersebut dinilai sangat tinggi oleh masyarakat.

Jumlah Laba yang ditahan sebesar 3,8 milyar berasal dari laba operasi dalam tahun 1986 sebesar Rp 1.906.949.191 dan laba yang ditahan dari periode sebelumnya beserta mutasi yang terjadi seperti terlihat dalam laporan laba yang ditahan. Pada tahun tersebut telah dibayarkan deviden kepada para pemegang saham sebesar Rp200 per lembar saham yang terdiri dari deviden interim sebesar Rp90 dan deviden final sebesar Rp110. Dengan demikian besarnya deviden untuk tahun 1986 adalah Rp998.400.000.

d. Audit terhadap Modal Koperasi.

Bentuk badan usaha Koperasi mempunyai karakter khusus, dalam penyajian rekening modalnya. Kekhususannya terlihat dari undang-undang nomor 12 tahun 1967 tentang Koperasi. Garis besar modal Koperasi terdiri dari:

- a. Rekening Iuran wajib
- b. Simpanan wajib
- c. Simpanan suka-rela

Bentuk proses audit untuk koperasi pada dasarnya sama dengan perusahaan lain pada umumnya, namun mengingat adanya kekhasan dalam sistem permodalan dan ruang gerak aktivitasnya diperlukan adanya perlakuan yang bersifat khusus. Oleh karena itu di Indonesia, dibentuk suatu badan yang mengurus audit terhadap koperasi yaitu koperasi jasa audit.

2. Program Audit yang Disarankan

Daftar pengujian substantif yang disarankan antara lain:

- a. Lakukan verifikasi terhadap kecermatan saldo-saldo, berbagai daftar dan buku pembantunya.
- b. Terapkan prosedur analitikal.
- c. Lakukan penelaahan terhadap anggaran dasar dan rumah tangga perusahaan.
- d. Lakukan penelaahan terhadap otorisasi pengeleuaran saham.
- e. Lakukan konfirmasi atas saham yang beredar di pasar.
- f. Lakukan inspeksi buku sertifikat saham.
- g. Lakukan inspeksi sertifikat saham yang berada ditangan bendaharawan perusahaan.
- h. Lakukan vouching jurnal pada rekening utang modal saham.
- i. Lakukan vouching terhadap laba yang ditahan (*retained earnings*).
- j. Bandingkan penyajiannya dengan Standar Akuntansi keuangan yang berlaku.

Rincian program audit tersebut di atas terlihat dalam pembahasan berikut ini.

- a. Lakukan verifikasi terhadap kecermatan saldo-saldo, berbagai daftar dan buku pembantunya.

Langkah awal dalam audit rekening modal saham adalah melakukan verifikasi kecermatan hitungan berbagai daftar pendukung baik perkaliannya, penjumlahan kesamping dan penjumlahan kebawah. Selanjutnya cocokkan hitungan yang sudah diperiksa (dan benar) dengan saldo-saldo yang disajikan dalam statemen keuangan.

- * Lakukan verifikasi terhadap kecermatan saldo-saldo rekening modal saham, jurnal pencatatan transaksi, dan buku-buku pembantu untuk menentukan kecermatan
- * Lakukan pengujian terhadap kecermatan pekerjaan klerikal sehingga pencatatan transaksi modal dan pengungkapannya dapat diyakini kebenarannya.

Langkah audit ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan variable sampling pencatatan dan penyajiannya. Pengujian dalam program ini bermaksud melakukan penilaian terhadap asersi penilaian dan alokasi.

- b. Terapkan prosedur analitisal.

Lakukan analisis adakah angka yang disajikan dalam neraca didukung oleh kebijaksanaan yang dirumuskan oleh manajemen. Penilaian rekening modal saham ataupun pengalokasian pada periode yang diaudit dilakukan dengan prosedur analitisal untuk menentukan kewajaran penyajian rekening modal saham dalam neraca. Proses analitisal ini dilakukan dengan membuat perbandingan diantara berbagai elemen yang terkait dengan penyajian utang jangka panjang. Analisis ratio yang digunakan antara lain:

- * ratio earning per share
- * nilai buku per saham terhadap saham biasa yang beredar
- * ratio return on common stockholders equity
- * ratio total utang terhadap ekuitas
- * ratio kas deviden terhadap penghasilan bersih.

Pengujian yang dilakukan akan menghasilkan asersi eksistensi atau okurensi, kelengkapan, dan penilaian atau alokasi.

- c. Lakukan penelaahan terhadap anggaran dasar dan rumah tangga perusahaan.

Auditor harus memperoleh kopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan dan disimpan sebagai arsip permanen. Dalam rangka audit untuk pertama kalinya, informasi AD dan ART suatu perusahaan memegang peranan sangat vital guna mengetahui tujuan perusahaan beserta kebijaksanaan umum yang ada dalam perusahaan. AD dan ART harus dipelajari isinya dan dicermati makna yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu, Auditor harus melakukan wawancara dengan manajemen untuk mengetahui kandungan isi dokumen tersebut.

Dalam anggaran dasar perusahaan dicantumkan ketentuan mengenai modal saham beserta pengaturan baik secara internal maupun eksternal mengenai hak-hak atas modal

serta kuasa perubahannya. Ini menunjukkan dokumen ini berisi pengaturan secara Juridis terhadap aspek dasar pendirian perusahaan tersebut. Oleh karena itu dalam rangka audit terhadap rekening modal, Auditor harus melakukan langkah-langkah berikut:

- * Lakukan verifikasi apakah anggaran dasar perusahaan memberikan dasar bagi manajemen untuk mengeluarkan berbagai jenis saham yang diedarkan manajemen.
- * Wawancara kepada manajemen kemungkinan perubahan-perubahan yang substansial terhadap AD dan ART perusahaan.

d. Lakukan penelaahan terhadap otorisasi pengeluaran saham.

Semua pengeluaran saham harus didasarkan pada otorisasi dewan komisaris sebagai wakil para pemegang saham. Otorisasi ini dibuktikan dengan notulen rapat dan keputusan-keputusan yang diakui keabsahannya. Keputusan penting yang mengikat biasanya dicatat dan didokumentasikan melalui akta notariel. Dalam program ini, Auditor harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- * Lakukan review untuk menentukan apakah semua saham yang diedarkan telah memperoleh otorisasi dari pemegang saham, yang dibuktikan dengan adanya notulen rapat pemegang saham dan rapat direksi terhadap kebijaksanaan pendanaan.
- * Lakukan wawancara dengan manajemen mengenai otoritas transaksi pengeluaran saham, pembelian saham dan pembayaran deviden saham yang beredar.

e. Lakukan konfirmasi atas saham yang beredar di pasar.

Sumber informasi penting lainnya adalah pihak ketiga yang independen. Dalam hal transaksi saham, juga ada pihak-pihak yang independen yang dapat dimintai keterangannya. Oleh karena itu, Auditor harus melakukan langkah berikut:

- * Lakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang secara langsung berhubungan dengan pengedaran saham-saham perusahaan, para pialang, dan underwriter yang menjamin pengedaran saham di bursa saham.
- * Lakukan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (registrar di pasar modal, pialang dll) untuk menentukan apakah ada elemen modal saham yang belum dinyatakan dalam neraca ataupun statemen penghasilan.

Konfirmasi memberikan pembuktian terhadap asersi eksistensi atau okurensi, kelengkapan, dan hak-hak dan kewajiban.

f. Lakukan inspeksi buku sertifikat saham.

Lakukan pengamatan terhadap penghitungan sertifikat saham yang masih belum beredar, serta saham yang ditarik kembali maupun saham treasury. Auditor harus melakukan pengujian terhadap buku sertifikat saham dengan tujuan:

1. Semua bonggol sertifikat untuk saham yang telah dikeluarkan telah disimpan dan dipelihara dengan baik.
2. Semua sertifikat saham beredar yang batal atau rusak dilekatkan kembali pada bonggol buku sertifikat saham, sehingga tidak mungkin diarkan lagi.
3. Semua sertifikat saham yang belum beredar benar-benar ada.

Disamping langkah-langkah tersebut, Auditor harus pula memperoleh keyakinan terhadap perubahan-perubahan pemilikan saham selama periode yang diaudit, serta harus yakin jumlah saham yang beredar ditambah dengan sertifikat yang belum beredar jumlahnya cocok dengan keaan yang dinyatakan dalam anggaran dasar perusahaan.

- g. Lakukan inspeksi sertifikat saham yang berada ditangan bendaharawan perusahaan.

Seringkali saham yang sudah beredar berada kembali di tangan bendaharawan perusahaan (dengan berbagai alasan). Auditor harus memperoleh keyakinan mengenai saham yang ditangan bendaharawan tersebut, apakah sebagai *treasury stock* atau alasan lainnya. Oleh karena itu, Auditor haru melakukan inspeksi phisik terhadap sertifikat saham yang masih belum beredar dan cocokkan dengan saldo modal saham yang disajikan dalam neraca.

- h. Lakukan vouching jurnal pada rekening utang modal saham.

Setiap perubahan dalam modal saham harus ditelusuri ke dokumen-dokumen pendukung. Dalam hal ini Auditor harus memperoleh keyakinan terhadap perlakuan akuntansi transaksi perubahan modal tersebut, mengingat adanya beberapa alternatif transaksi, yaitu: kemungkinan adanya *stock option*, *stock warrant*, *stock conversion*, atau adanya *stock split*. Setiap aspek kebijakan tersebut akan mempengaruhi posisi penguasaan saham dan proses pengambilan keputusan dalam perusahaan. Demikian halnya, pembuktian adanya kebijaksanaan tersebut juga akan berbeda-beda pula.

- i. Lakukan vouching terhadap laba yang ditahan (*retained earnings*).

Perubahan modal khususnya laba yang ditahan harus diperhatikan dengan cermat. Perubahan ini dapat dideteksi ke dokumen-dokumen pendukung transaksi, oleh karena itu langkah yang sebaiknya ditempuh auditor adalah:

- * Lakukan penelusuran kembali terhadap dokumen transaksi modal saham untuk menentukan bahwa semua elemen modal telah dicatat dan dinyatakan dalam laporan keuangan.
- * Lakukan pengujian apakah saldo utang deviden pada saat tanggal neraca merupakan kewajiban klien yang layak. Auditor harus memperbandingkan dengan deviden yang telah dibayarkan kepada para pemegang saham.

- j. Bandingkan penyajiannya dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Auditor harus melakukan evaluasi apakah penyajiannya rekening modal saham dalam neraca telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan mengevaluasi apakah pengungkapannya lengkap. Pengungkapan yang memadai terhadap segala aspek perubahan modal sangat diperlukan oleh pembaca informasi keuangan.

C. Kertas Kerja yang harus dibuat

Kertas kerja audit untuk keempat jenis rekening modal tersebut berbeda-beda. Berikut ini disajikan salah satu bentuk kertas kerja untuk perusahaan yang berbentuk perseroan. Kertas kerja yang dibuat/dikumpulkan adalah sbb:

1. Kertas kerja utama (*lead shcedule*)
2. Kertas kerja pendukung yang terdiri dari:
 - a. Daftar Pemegang Saham.
 - b. Daftar pembayaran deviden dan utang deviden.
 - c. Surat-surat konfirmasi.
 - d. Analisis terhadap harga pasar saham di bursa saham.
3. Kertas kerja permanen yang terdiri dari:
 - a. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan.
 - b. Hasil audit tahun yang lalu.
 - c. Notulen rapat direksi, rapat dewan komisaris, dan r.u. pemegang saham.
 - d. Surat perjanjian penting lainnya.

Di halaman berikut disajikan salah satu contoh kertas kerja Audit modal saham.

Peraga 7.3 Kertas Kerja Modal Saham

Disiapkan J5 tgl 24/1/94

Diperiksa R5 tgl 29/1/94

PT. METAL INDUSTRI

| | Saham | | |
|---|-----------|---------|-----------|
| | Otorisasi | Beredar | Jumlah |
| Saldo 1/1/93 | 10.000 ✓ | 5.000 ✓ | 500.000 ✓ |
| Penyaluran saham nilai per tunai 4/1/93 | | 1.000 # | 100.000 Ø |
| Saldo 31/12/93 | 10.000 | 6.000 © | 600.000 |

✓ Telusur ke kertas kerja tahun lalu

Telusur ke catatan rapat Dekom 20/12/93

Ø Cek hasilnya ke penerimaan kas

© Konfirmasi ke agent penjualan (lihat P-3)
Penelaahan ke semua masalah papat Dekom & pimpinan sebagai dasar pembuktian Transaksi modal saham. Telusuri hanya terjadi pada tanggal 4/1/93.

SOAL BAB 7

Soal Kelompok A

Dalam kelompok soal berikut ini, Saudara diminta memberikan pendapat salah atau benar atas pernyataan berikut ini. Apabila Saudara berpendapat salah, berilah tanda S, dan apabila benar berilah tanda B dimuka setiap pernyataan.

- ... 1. Salah satu tujuan assersi presentasi dan pengungkapan informasi keuangan adalah agar semua fakta yang berkaitan dengan pengeluaran saham (yang meliputi par atau stated value) telah memperoleh persetujuan terhadap jenis saham dan pengeluarannya, dan jumlah saham yang dipegang sebagai saham treasury atau adanya opsi saham telah diungkapkan.
- ... 2. Salah satu tujuan assersi eksistensi atau okurensi adalah agar rekening utang jangka panjang dan modal saham telah diidentifikasi dan diklasifikasi secara layak dalam neraca dan semua kesepakatan, perjanjian dan rancangan pelunasan terhadap utang jangka panjang telah dijelaskan dan diungkapkan dalam laporan keuangan.
- ... 3. Dalam pembahasan risiko audit beserta penyusunan strategi pengauditan terhadap transaksi pendanaan, Auditor harus mempertimbangkan karakterisasi dan ruang lingkup bisnis klien masing-masing mengingat pendanaan perusahaan besar berasal dari berbagai pihak termasuk masyarakat banyak.
- ... 4. Dalam rangka audit terhadap elemen utang jangka panjang auditor harus melakukan observasi apakah rekkening pembantu dan catatan akuntansi menunjukkan informasi yang sama serta dapat memberikan kejelasan perhitungannya, observasi semacam ini bertujuan untuk memperoleh petunjuk apakah utang jangka panjang dinyatakan *understated*.
- ... 5. Fungsi pengeluaran, pembayaran bunga/deviden, pelunasan obligasi maupun pembelian kembali saham treasury pada dasarnya independen, namun keputusan terhadap hal tersebut langsung berada ditangan direksi, dewan komisaris, atau para pemegang saham; yang oleh karena itu Auditor tidak perlu melakukan analisis terhadapnya.
- ... 6. Auditor perlu mempelajari struktur pengendalian intern terhadap siklus sumber-sumber pendanaan dengan tujuan memperoleh keyakinan terhadap reabilitas catatan akuntansinya dan menentukan tingkat risiko deteksi dalam audit subtansi.
- ... 7. Auditor harus melakukan penilaian atas pengungkapan utang jangka panjang dalam statemen keuangan klien, apakah telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengingat angsuran utang jangka panjang yang segera akan jatuh tempo pada periode akuntansi mendatang, harus disajikan sebagai utang kuren.
- ... 8. Risiko terhadap kemungkinan kesalahan penanganan dan pencatatan transaksi siklus pendanaan biasanya rendah, mengingat semua kebijakan mengenai hal tersebut berada pada pimpinan puncak.

-
-
- ... 9. Fungsi-fungsi yang tidak terkait dalam penanganan transaksi siklus sumber-sumber pendanaan antara lain: (a) fungsi pengeluaran saham dan modal serta (b) pencatatan dan pengakuan transaksi saham dan utang jangka panjang.
- ... 10. Semua bentuk pendanaan yang harus menjadi perhatian Auditor terbatas pada transaksi yang dijual di bursa saham saja, dan tidak perlu memperhatikan adanya sumber pendanaan yang lainnya.

Soal Kelompok B

Soal-soal berikut ini adalah pilihan ganda. Tentukan jawaban yang Saudara anggap paling benar di antara empat alternatif jawaban yang tersedia. Bila tidak ada jawaban yang benar, maka pilihlah alternatif jawaban E dalam lembar jawaban saudara.

1. Dalam audit terhadap elemen sumber-sumber pendanaan perusahaan (financing), auditor akan menemukan dokumen-dokumen berikut ini, **kecuali**:
 - a. deviden kas.
 - b. sertifikat saham.
 - c. buku pembantu modal.
 - d. semua jawaban di atas salah.
2. Fungsi-fungsi yang terkait dalam penanganan transaksi siklus sumber-sumber pendanaan antara lain, **kecuali**:
 - a. fungsi pengeluaran saham dan modal.
 - b. pencatatan dan pengakuan transaksi saham dan utang jangka panjang.
 - c. penerimaan bunga dan deviden.
 - d. pembayaran bunga dan deviden.
3. Dalam rangka membuktikan bahwa saldo pos-pos sumber pendanaan benar-benar ada, auditor harus melakukan langkah-langkah audit:
 - a. melakukan konfirmasi pada para brokers
 - b. melakukan observasi terhadap sertifikat surat-surat berharga yang belum dikeluarkan.
 - c. melakukan wawancara kepada kepala bagian akuntansi terhadap kebijaksanaan pengeluaran surat-surat berharga elemen sumber-sumber pendanaan.
 - d. melakukan penelusuran terhadap catatan rapat pemegang saham.
4. Auditor perlu mempelajari struktur pengendalian intern terhadap siklus sumber-sumber pendanaan dengan tujuan:
 - a. memperoleh keyakinan terhadap reabilitas catatan akuntansinya.
 - b. menentukan tingkat risiko deteksi dalam audit substansi.
 - c. menentukan tingkat risiko pengendalian dalam audit kepatuhan.
 - d. semua jawaban a, b, dan c di atas benar
5. Ruang lingkup audit terhadap siklus sumber-sumber pendanaan meliputi:
 - a. transaksi rekening utang jangka panjang dan modal.
 - b. rekening utang jangka panjang saja.

-
-
- c. rekening utang jangka panjang, rekening modal, dan penghasilan.
d. semua jawaban a, b, dan c di atas tidak ada yang benar.
6. Prinsip akuntansi yang berlaku umum, terhadap penyajian pos modal adalah, **kecuali**:
- pembentukan cadangan modal harus dipisahkan dari rekening modal.
 - rincian dari pos-pos modal beserta penjelasan yang dipandang perlu harus diungkapkan dalam neraca dengan klasifikasi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
 - rincian pos-pos modal beserta kebijaksanaan akuntansinya harus ditelusuri ke catatan akuntansi dan rapat dewan direksi.
 - jawaban a dan b di atas benar
7. Dalam rangka audit terhadap elemen utang jangka panjang auditor harus melakukan observasi apakah rekkening pembantu dan catatan akuntansi menunjukkan informasi yang sama serta dapat memberikan kejelasan perhitungannya. Observasi semacam ini bertujuan untuk memperoleh petunjuk bahwa:
- apakah utang jangka panjang dinyatakan *undarstated*.
 - discount on bond payable*, dinyatakan *understated*.
 - premium on bond payable*, dinyatakan *understated*.
 - semua utang jangka panjang dinyatakan *overstated*.
8. Semua transaksi-transaksi yang membentuk Modal Saham perusahaan, harus ditelusuri ke:
- catatan rapat dewan komisaris.
 - jurnal penerimaan kas.
 - jurnal pengeluaran kas.
 - jumlah sertifikat saham yang beredar.
9. Program audit terhadap utang jangka panjang (**long terms debt**), meliputi langkah sebagai berikut, **kecuali**:
- verifikasi eksistensi terhadap **bondholders**.
 - pengujian terhadap setiap **bond trust indenture**.
 - inspeksi terhadap catatan buku-buku pembantu utang jangka panjang.
 - penyelidikan terhadap kredit rekening penghasilan bunga.
10. Untuk membuktikan eksistensi pemilikan surat-surat berharga, auditor dapat melakukan prosedur berikut, **kecuali**:
- inspeksi surat-surat berharga yang ada.
 - hitung surat berharga yang ada.
 - telusur kembali pencatatannya ke rekening investasi.
 - konfirmasi kepada pihak lain yang berkepentingan.
11. Perbedaan investasi jangka panjang dengan investasi jangka pendek dilihat dari:
- tujuan mengadakan investasi.
 - ujud fisik.

-
-
- c. materialitas dana yang diinvestasikan.
 - d. periode waktu perputaran investasi.
12. Untuk menemukan adanya utang jangka panjang yang tidak dilaporkan kedalam Neraca, auditor harus melakukan prosedur:
- a. Melakukan konfirmasi utang dagang.
 - b. Mempelajari notulen rapat direksi.
 - c. Melakukan penelaahan (review) semua pengeluaran kas setelah tanggal neraca yang berkaitan dengan pembayaran utang perusahaan.
 - d. Menanyakan langsung kepada penasihat perusahaan.
13. Tujuan umum program audit utang jangka panjang adalah sebagai berikut, *kecuali*:
- a. Membuktikan adanya otorisasi penarikan utang jangka panjang.
 - b. Membuktikan apakah semua pasal yang tercantum dalam perjanjian utang jangka panjang dipatuhi.
 - c. Membuktikan kemampuan klien dalam melunasi kewajibannya.
 - d. Menentukan apakah penjelasan mengenai aktiva tetap yang dijaminkan dalam penarikan utang jangka panjang sudah memadai (cukup).
14. Kertas kerja audit untuk perhitungan fisik surat berharga harus memuat informasi berikut, *kecuali*:
- a. nomor sertifikat masing-masing surat berharga.
 - b. jumlah lembar surat berharga atau nilai nominalnya.
 - c. harga pasar surat berharga.
 - d. tanggal pengeluaran surat berharga.
15. Berikut ini daftar kemungkinan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan oleh klien dalam penyajian rekening modal. Yang tidak termasuk dalam daftar kesalahan tersebut adalah:
- a. Prinsip akuntansi yang berlaku umum tidak diterapkan secara konsisten.
 - b. Ketidaktepatan pisah-batas (*cutoff*) pencatatan transaksi.
 - c. Perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh para karyawan klien tidak cermat.
 - d. Sistem pengendalian intern yang tidak dipatuhi.

Bab 8

Audit Terhadap Transaksi Kas

DALAM BAB INI AKAN DIBAHAS MASALAH BERIKUT:

1. Perumusan tujuan audit terhadap saldo rekening kas.
2. Berbagai pertimbangan terhadap resiko pendeteksian terhadap audit saldo rekening kas.
3. Perancangan dan pelaksanaan program audit untuk pengujian subtansi saldo rekening kas.
4. Menguraikan hubungan pengujian subtansi terhadap assersi statemen keuangan untuk saldo kas.
5. Identifikasi hal-hal yang menonjol dalam pengendalian intern dan pengujian subtansi terhadap lapping, petty cash, dan rekening penggajian

A. GAMBARAN UMUM TRANSAKSI SIKLUS KAS DAN HUBUNGANNYA DENGAN SALDO KAS

Dalam rangka operasi penerimaan dan pengeluaran kas, terdapat lima siklus yang secara langsung mempunyai hubungan dengan saldo rekening kas. Kelima siklus tersebut adalah siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus investasi, siklus pendanaan, dan siklus jasa-jasa personel. Siklus produksi tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan penyajian saldo rekening kas, meskipun diakui secara tidak langsung hubungan tersebut ada.

Hubungan dengan berbagai siklus tersebut sangat banyak, ini berarti volume transaksi kas pada umumnya juga akan tinggi. Biasanya transaksi yang mempengaruhi siklus kas mempunyai mutasi yang sangat tinggi, mengingat kas menyangkut aktiva yang terkait dengan pengukuran nilai serta bersifat sangat likwid. Ini berarti risiko melekat (*inherent risk*) dalam siklus ini sangat tinggi. Jadi semakin tinggi volume transaksi yang terbentuk, maka akan meningkat pula risiko yang melekat dalam penyajian rekening kas dalam neraca. Gambaran umum mengenai hubungan antar berbagai siklus transaksi dengan rekening kas disajikan dalam peraga 8.1 di halaman berikut ini.

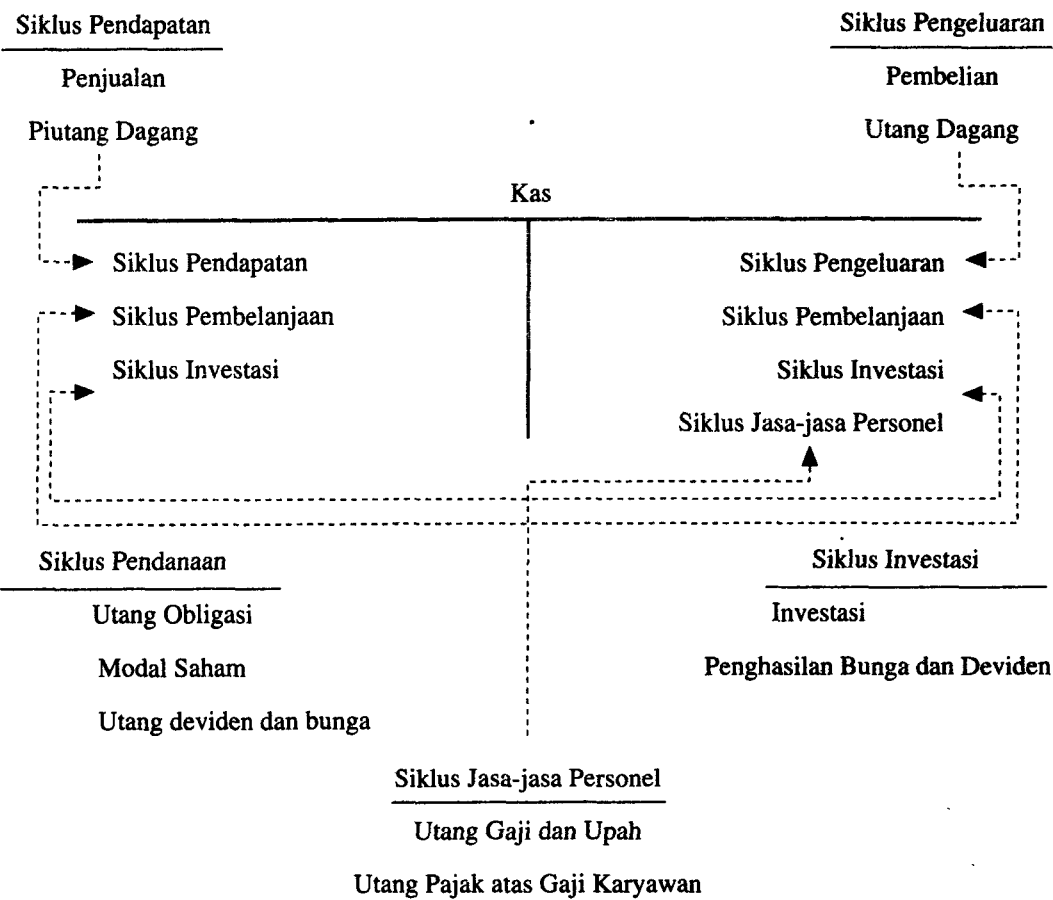
B. TUJUAN AUDIT TERHADAP SALDO REKENING KAS

Saldo kas meliputi kas yang ada ditangan, kas yang ada di bank, dan kas kecil. Dalam rangka memperoleh pembuktian terhadap saldo kas, terlebih dahulu auditor harus merumuskan tujuan audit yang antara lain sebagai berikut:

1. Eksistensi atau Okurensi
 - * Catatan saldo kas pada saat tanggal neraca benar-benar ada.
2. Kesempurnaan
 - * Pencatatan saldo rekening kas meliputi semua transaksi kas beserta pengaruhnya terhadap peristiwa yang membentuknya.
 - * Transfer kas pada akhir tahun di antara bank-bank klien telah dicatat dengan layak
3. Hak-hak dan Kewajiban
 - * Semua saldo rekening kas yang disajikan oleh klien pada saat tanggal neraca merupakan hak yang secara hukum sah.
4. Penilaian atau Alokasi
 - * Pencatatan saldo rekening kas direalisasi oleh jumlah-jumlah yang dinyatakan dalam neraca dan telah cocok dengan daftar pendukungnya
5. Penyajian dan Pengungkapan
 - * Saldo rekening kas telah diidentifikasi dan disajikan dalam neraca dengan layak.
 - * Pembatasan terhadap penggunaan saldo kas yang disajikan dalam neraca telah disajikan dan diungkapkan dengan selayaknya.
 - * Saldo-saldo rekening kompensasi, *lines of credit*, dan utang kontinjensi dengan bank telah diungkapkan dengan layak.

Kelima tujuan audit terhadap siklus tersebut dijabarkan dalam pengujian substansi rekening kas yang akan disajikan pada bagian D.

Peraga 8.1 Hubungan rekening kas dengan siklus transaksi lainnya.



C. PENENTUAN RISIKO PENDETEKSIAN

Auditor dalam rangka pelaksanaan audit terhadap saldo rekening kas menghadapi kemungkinan adanya risiko deteksi yang pada dasarnya dipengaruhi oleh tingkat risiko melekat dan risiko pengendalian. Mengingat transaksi yang terbentuk dalam siklus ini demikian besarnya (berpengaruh terhadap ke lima siklus yang lain) dengan sendirinya risiko melekat yang ada dalam siklus ini juga sangat tinggi. Oleh karenanya tujuan audit untuk memperoleh keyakinan terhadap eksistensi dan peristiwa yang melatarbelakangi pembentukan transaksi, serta kesempurnaan penyajian elemen kas harus mendapat perhatian yang seksama. Sangat berbeda dengan permasalahan dalam pencapaian tujuan memperoleh keyakinan terhadap hak dan kewajiban, maka dalam hal ini tingkat risiko salah saji menjadi sangat rendah. Demikian halnya terhadap tujuan penyajian dan pengungkapannya cenderung berisiko rendah. Namun demikian harus diingat, bahwasannya efektivitas pengendalian

terhadap penerimaan dan pengeluaran kas sangat tergantung pada kelima siklus yang terkait dengan rekening kas.

Memperhatikan hal-hal yang relevan dengan pengujian ini, maka langkah yang harus dipertimbangkan oleh auditor adalah: (1) auditor menentukan perencanaan pendahuluan auditor terhadap risiko deteksi sebagai dasar penentuan strategi audit terhadap setiap asersi kas, (2) menentukan revisi risiko deteksi bilamana tingkat pengujian substantansi yang direncanakan auditor tidak dapat mendukungnya. Perencanaan dan revisi tingkat risiko deteksi yang dapat diterima, akan digunakan sebagai dasar perancangan pengujian substantansi.

D. PENGUJIAN SUBTANSI TERHADAP SALDO REKENING KAS

Pembahasan dalam subbab ini menjelaskan bagaimana seorang auditor merencanakan dan melaksanakan berbagai bentuk pengujian guna mencapai kelima tujuan audit tersebut dalam butir B di atas. Dalam pengujian substantansi terhadap saldo rekening kas, auditor harus memahami ruanglingkup aktivitas transaksi yang mempengaruhi rekening kas. Saldo kas yang disajikan dalam neraca mengandung pengertian, bahwa kas terdiri dari saldo kas yang ada di tangan, kas kecil, dan saldo kas yang ada di bank.

Sebagai contoh, informasi yang diperoleh dari neraca sebuah perusahaan PT SHD menunjukkan bahwa Saldo Kas menurut Neraca Rp27.573.136. Segala informasi yang dinyatakan secara eksplisit dalam neraca tersebut belum tentu dipandang lengkap dan informatif. Oleh karena itu penyajian dan pengungkapan asersi manajemen terhadap saldo kas tersebut dilengkapi dengan penjelasan atas pos-pos neraca. Penjelasan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan terhadap asersi manajemen terhadap saldo rekening kas. Bahkan oleh pihak yang berkepentingan terhadap klien pengungkapan ini dipandang mempunyai arti yang sangat tinggi dalam rangka perumusan keputusan bisnis sepanjang menyangkut perusahaan tersebut. Rincian kas dalam penjelasan pos-pos neraca, adalah sbb:

| | | |
|---|--------------------|---------------------|
| <i>Kas di Yogyakarta dan Jakarta</i> | <i>Rp1.299.616</i> | |
| <i>Bank, meliputi Giro pada BBD Yogyakarta,</i> | | |
| <i>Kebon Sirih dan Imam Bonjol, serta Bank</i> | | |
| <i>Niaga di Yogyakarta</i> | <i>26.273.520</i> | |
| <i>Jumlah Kas - Bank</i> | | <i>Rp27.573.136</i> |

Dengan memperhatikan penyajian dan pengungkapan tersebut di atas, auditor harus menyusun program audit guna memperoleh keyakinan terhadap asersi manajemen tersebut. Program audit yang dirancang harus memperhatikan kemungkinan tidak dapat memperoleh bukti yang meyakinkan diri auditor (detection risks). Bagaimana rancangan program audit yang harus disusun tergantung pada tinggi rendahnya risiko deteksi tersebut. Program pengujian substantansi siklus kas yang dapat dipilih oleh auditor adalah sbb:

- Verifikasi kecermatan saldo rekening kas beserta daftar pendukungnya (tujuan 4)
- Gunakan prosedur analitis (tujuan 1, 2, 3)
- Lakukan penghitungan kembali kas yang ada di tangan (tujuan 1 s.d 4)

-
- d. Buatlah analisis terhadap pengujian cutoff transaksi kas (tujuan 1, dan 2)
 - e. Buatlah konfirmasi rekening koran bank dan saldo pinjaman dari bank (tujuan 1 s.d 4)
 - f. Lakukan konfirmasi terhadap kesepakatan lainnya dengan bank (tujuan 1 s.d 5)
 - g. Siapkan dan review daftar rekonsiliasi bank (tujuan 1 s.d 4)
 - h. Buatlah analisis terhadap cutoff statemen bank (tujuan 1 s.d 4)
 - i. Lakukan penelusuran terhadap transfer bank (tujuan 1 dan 2)
 - j. Siapkan proof of cash (tujuan 1 s.d 4)
 - k. Bandingkan penyajian dalam neraca dengan Prinsip akuntansi yang lazim (tujuan 5).

Pengujian subtansi terhadap saldo rekening kas agar memperoleh derajat kepercayaan yang tinggi terhadap bukti-bukti yang mendukungnya. Auditor memperoleh bukti melalui pemahaman dan kesaksiannya sendiri dan juga melalui komunikasi langsung dengan sumber lain yang independen. Penjelasan pengujian subtansi tersebut dibahas dalam uraian berikut ini.

- a. Verifikasi kecermatan saldo rekening kas beserta daftar pendukungnya

Langkah awal dalam setiap proses audit adalah pengujian terhadap kecermatan hitungan baik dalam buku besar maupun dalam daftar pendukung yang disiapkan oleh klien sendiri. Daftar-daftar tersebut meliputi ringkasan uang yang belum disetor ke bank yang berada di lokasi lain, daftar cek yang masih dalam peredaran, serta semua ringkasan saldo dana yang ada di bank dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam membentuk saldo rekening kas.

Verifikasi kecermatan dilakukan dengan penelusuran saldo Kas ke bukti transaksi dengan prosedur sebagai berikut:

1. **Tracing procedures.** Penelusuran adalah teknik pemeriksaan yang dilakukan dengan mengikuti jejak kembali poses pencatatan dari saldo per laporan keuangan klien diikuti jejak pencatatannya sampai ke dokumen-dokumen yang mendukungnya. Prosedurnya adalah sebagai berikut:

- * Cocokkan saldo kas menurut Neraca dengan rekening kontrol.
- * Apabila langkah pertama telah cocok, ikuti pendebitan sisi debit ke saldo debit jurnal penerimaan kas, dan selanjutnya cocokkan pula saldo kredit kas ke saldo kredit jurnal pengeluaran kas. Apabila langkah tersebut cocok, maka dapat disimpulkan bahwa saldo kas yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan pada rekening kontrol.
Cocokkan pula kedua saldo tersebut dengan rekening pembantu kas.
- * Ambilah sample, baik untuk bukti penerimaan kas, maupun bukti pengeluaran kas, apakah kedua saldo yang tertera dalam jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas tersebut didasarkan pada bukti-bukti.

2. **Audit Sampling.** Sample dapat digunakan dalam pemeriksaan substantif. Hal ini sangat membantu dalam rangka penelusuran kewajaran pencatatan transaksi apakah berdasarkan fakta sebenarnya ataukah tidak.

b. Gunakan prosedur analitikal

Prosedur pengujian analitikal bermanfaat guna memperoleh gambaran mengenai hubungan saldo rekening kas dengan indikator lainnya. Misalnya perbandingan antara saldo kas dengan anggaran, saldo kas periode yang diaudit dengan periode sebelumnya. Prosedur ini sangat berguna untuk mengarahkan pendeteksian problem yang mungkin dihadapi oleh klien dalam saldo kas, serta untuk menunjukkan keberadaan, dan kewajarannya. Dengan kata lain, dengan prosedur ini dapat dilihat asersi penilaian dan alokasi.

c. Lakukan penghitungan kembali kas yang ada ditangan

Semua bentuk penerimaan kas atau dana-dana yang berputar dan belum disetor ke bank masuk dalam kategori *cash on hand*. Auditor mempunyai kewajiban melakukan penghitungan kembali segala bentuk alat pembayaran yang dimiliki klien untuk menentukan apakah dana-dana tersebut memang benar-benar ada. Penghitungan saldo kas ini dimaksudkan agar auditor memperoleh keyakinan (a) bagaimana bentuk pengendalian intern terhadap kas dan elemen-elemennya, (b) penghitungan kembali elemen kas yang telah dilaksanakan oleh kasir, (c) untuk mengetahui mengenai penyetoran semua cek dari pihak lain apakah langsung didepositokan ke bank ataukah tidak.

Agar memperoleh keyakinan terhadap penghitungan dan penyajian rekening kas, auditor harus melakukan penghitungan fisik elemen kas. Dalam penghitungan kas, auditor harus memperhatikan dua hal berikut:

1. Teknik dan prosedur penghitungan kas beserta elemen-elemennya harus memperhatikan beberapa aspek berikut ini:
 - * Penghitungan uang, kas bond, dan surat wessel dilakukan oleh pemegang kas dengan disaksikan oleh auditor. Semua perpindahan dan pemberkasan penghitungan uang harus dalam pengawasan auditor.
 - * Penghitungan kas beserta elemen-elemennya harus dilakukan secara simultan. Sebelum dihitung semua uang tunai dan kas-bon harus disiapkan dulu agar tidak muncul sejumlah uang tunai yang disusulkan sebagai kas pada saat itu.
 - * Uang tunai beserta kas-bon yang dihitung segera dikembalikan kepada pemegang kas sesaat setelah penghitungan kas selesai. Pemegang kas harus menandatangani berita acara penghitungan kas yang menyatakan telah menerima kembali uang tunai beserta kas-bon yang dihitung bersama auditor.
 - * Selama proses penghitungan, karyawan yang tidak ditugasi dilarang memasuki ruang penghitungan.
2. Setelah penghitungan uang dapat diselesaikan dengan baik, auditor harus menyiapkan berkas kertas kerja pemeriksa yang berupa berita acara penghitungan kas. Pembuatan berita acara penghitungan kas harus mempertimbangkan hal-hal berikut,
 - * Berita acara penghitungan kas disiapkan dan dibuat oleh auditor.
 - * Setelah dibaca dan diyakini kebenarannya, maka berita acara ditandatangani oleh pemegang kas dan auditor.

- * Semua kasbon harus dimasukkan dalam berita acara penghitungan kas.
- * Dalam berita acara, harus dimuat secara tegas bahwa dana yang dihitung telah diterima kembali oleh petugas bagian kasa.d. Lakukan pengujian cutoff transaksi kas

Peraga 8.2 Berita acara penghitungan kas

Uang Tunai di Tangan:

| | Nominal | Banyaknya | Jumlah | |
|---|-----------|-----------|------------|--------------|
| | Rp 50.000 | 17 | Rp 850.000 | |
| | 20.000 | 42 | 840.000 | |
| | 10.000 | 61 | 610.000 | |
| | 5.000 | 12 | 60.000 | |
| | 1.000 | 8 | 8.000 | |
| | 500 | 4 | 2.000 | |
| | 100 | 5 | 5000 | |
| Jumlah | | | | Rp 2.370.500 |
| Kas bond (untuk dipertanggungjawabkan) | | | | Rp 450.000 |
| Kas yang ada di tangan | | | | Rp 2.820.500 |
| (Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) | | | | |

Jumlah kas tersebut di atas telah di hitung dengan benar dan telah diterima kembali oleh kasir perusahaan.

Jakarta, 4 Februari 1994

Kasir

Auditor

(.....)

(.....)

Kelayakan terhadap cutoff transaksi penerimaan dan pengeluaran kas mempunyai peran yang sangat penting dalam penentuan saldo kas pada tanggal neraca. Bagaimana cara melakukan cutoff test terhadap rekening kas, telah dibahas pada bab 2 mengenai penerimaan kas dan bab 3 mengenai pengeluaran kas. Rekening koran bank dapat digunakan untuk membantu pelaksanaan pengujian ini. Program audit ini dimaksudkan untuk membuktikan terhadap asersi eksistensi atau okurensi, dan kelengkapannya.

e. Buatlah konfirmasi rekening koran bank dan saldo pinjaman dari bank

Dalam proses audit terhadap saldo rekening kas, auditor harus melakukan konfirmasi kepada bank untuk memperoleh keyakinan apakah saldo rekening kas di bank apakah benar-benar ada. Hal-hal yang akan ditanyakan antara lain: (a) saldo deposit yang ada di bank, (b) besarnya saldo pinjaman (bila ada), dan (c) berbagai bentuk deposit dan pinjaman lainnya. Konfirmasi dari bank merupakan prosedur standar yang harus diikuti dan sudah merupakan praktek yang umum dilakukan dimana-mana. Sebagai akibatnya setiap pasti akan menyediakan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan nasabahnya dalam bentuk apapun. Mengingat permintaan konfirmasi sangat sering terjadi, biasanya pihak bank telah menyediakan formulir guna memberikan tanggapan atas konfirmasi yang diajukan oleh klien untuk suatu kantor akuntan publik. Namun demikian, untuk menjaga kompetensi bukti konfirmasi ini, auditor menghendaki agar tanggapan atas konfirmasi tersebut dikirimkan langsung ke alamat kantor akuntan publik.

Langkah-langkah dan teknik audit yang harus dipertimbangkan dalam meminta surat konfirmasi dari bank adalah:

1. Merancang prosedur konfirmasi terhadap saldo kas di bank yang meliputi,
 - * Surat permintaan konfirmasi kepada bank disiapkan oleh auditor. Surat permintaan konfirmasi merupakan surat resmi lembaga terdiri dari dua kopi yang satu dikirim ke bank, dan lainnya disimpan untuk auditor.
 - * Surat konfirmasi dikirimkan oleh klien dan harus ditandatangani oleh pemegang cek (biasanya direktur keuangan) dan hasilnya langsung dikirimkan kepada auditor.
 - * Konfirmasi diajukan untuk memperoleh informasi tentang saldo klien pada tanggal neraca, kewajiban klien, adanya kewajiban bersyarat, dan informasi penting lainnya.
 2. Tanggapan dari bank berupa surat konfirmasi bank. Auditor dalam merancang prosedur konfirmasi harus pula memahami keterbatasan dan cara kerja yang ada di bank. Mengingat adanya undang-undang yang menyangkut kerahasiaan bank, maka tanggapan bank harus dibakukan dalam bentuk formulir konfirmasi bank. Pada umumnya bank sudah menyiapkan bentuk standar surat konfirmasi yang langsung ditujukan kepada auditor. Prosedur ini sudah merupakan kelaziman yang berlaku dalam sistem perbankan, mengingat pihak bank terikat dalam undang-undang perbankan nasional. Perhatikan contoh yang disajikan peraga 8.3.
- Prosedur konfirmasi ini menunjukkan bagaimana asersi terhadap kas yang ada di bank.

Assersi eksistensi dan okurensi terbukti secara jelas dengan pengakuan pihak bank terhadap saldo uang klien atau kewajibannya. Disamping itu hak dan kewajibannya dapat disaksikan dengan jelas mengingat dalam surat konfirmasi diungkapkan dengan jelas nama kliennya. Dengan pembuktian terhadap kedua assersi tersebut, maka assersi penilaian dan alokasi, serta kesempurnaan saldo kas yang ada di bank tidak diragukan lagi.

f. Lakukan konfirmasi terhadap kesepakatan lainnya dengan bank

Seringkali perusahaan mempunyai kesepakatan yang bersifat khusus dengan pihak bank. Ada perjanjian tertentu untuk saling memberikan jasa diantara kedua belah pihak. Tujuan auditor untuk melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kesepakatan khusus tersebut untuk mengetahui apakah ikatan diantara kedua belah pihak menyebabkan klien tidak bebas menggunakan dana-dana yang dimilikinya. (periksa peraga 8.3)

g. Siapkan daftar rekonsiliasi bank

Daftar rekonsiliasi bank pada umumnya telah disiapkan oleh klien. Kadang kala klien melakukan rekonsiliasi secara periodik (misalnya satu bulan, catur wulan, dan sebagainya). Apabila rekonsiliasi bank telah disediakan klien, maka auditor harus melakukan pengecekan ulang terhadap perhitungan yang dilakukan klien tersebut. Dalam hal klien belum menyiapkan daftar rekonsiliasi bank, maka auditor harus menyiapkannya dengan prosedur berikut ini:

1. Cocokkan saldo akhir catatan bank dengan informasi yang diperoleh dari konfirmasi dengan pihak bank.
2. Verifikasi validitas item yang akan direkonsiliasi, seperti adanya deposit in transit dan adanya *outstanding checks*.
3. Lakukan pencocokan daftar mengenai pembebanan bank, nota kredit dan memo pendebitan, ataupun kesalahan yang mungkin timbul ke dokumen pendukung.
4. Lakukan penyelidikan (*investigation*) daftar lama mengenai cek yang telah lama beredar dan pantas untuk dicurigai.
5. Rekonsiliasi harus dicek kembali oleh auditor

Kertas Kerja Rekonsiliasi memuat proses pencocokan kedua saldo menurut catatan perusahaan dan catatan Bank (Rekening Koran). Biasanya secara periodik pihak klien telah membuat rekonsiliasi sendiri. Hendaknya rekonsiliasi tersebut dibuat oleh pejabat yang independen. Atas dasar rekonsiliasi yang disusun oleh klien (bagian akuntansi) tersebut auditor dapat memeriksa sampai sejauh mana pengendalian internal terhadap kas. Perhatikan contoh kertas kerja rekonsiliasi disajikan berikut ini.

h. Buatlah analisis terhadap cutoff statemen bank

Dalam rangka memperoleh keyakinan terhadap transaksi penerimaan maupun pengeluaran, auditor perlu melakukan analisis terhadap cutoff statemen bank (rekening koran). Proses analisis dilakukan dengan meminta statemen bank setelah tanggal neraca, serta melakukan analisis terhadap mutasi saldo kas di bank yang terjadi setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal cutoff statemen bank tersebut. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui

kemungkinan adanya mutasi sebelum dan setelah tanggal neraca yang tidak dapat terdeteksi dari laporan atau daftar yang dibuat oleh klien.

i. Lakukan penelusuran terhadap transfer bank

Seringkali sebuah perusahaan mempunyai rekening pada beberapa bank sekaligus. Adanya beberapa bank ini seringkali digunakan oleh klien untuk melakukan teknik kitting dalam rangka memperbaiki assersi saldo kas. Oleh karena itu auditor harus membuat daftar mengenai mutasi keseluruhan bank disekitar tanggal neraca, serta mengecek kemungkinan adanya transfer antar bank sebagai modus kitting. Upaya *window dressing* (dengan *kitting*) yang dilakukan klien harus dihindarkan agar penyajian saldo rekening kas dapat memberikan informasi yang wajar.

Peraga 8.4 Contoh Rekonsiliasi Bank

PT Sindikasi Niaga Rekonsiliasi Bank, 31 Desember 1994

| | | | |
|--|-------------------|---|-------------------|
| Saldo menurut catatan Bank | Rp5.388.000 | Saldo menurut catatan Perusahaan | Rp3.294.000 |
| Penambahan: | | Penambahan: | |
| 1. Setoran dalam proses | 1.692.000 | 1. Penagihan Wesel oleh bank termasuk bunga | Rp2.114.000 |
| 2. Koreksi kesalahan Bank Cek PT Siswa Niaga dibebankan pada rekening perusahaan | | 2. Jasa giro | 27.750 |
| | | 3. Koreksi kesalahan catatan bank cek nomor A-233445 | 360.000 |
| | <hr/> Rp7.080.000 | | <hr/> Rp5.795.750 |
| Pengurangan: | | Pengurangan: | |
| Cek dalam Peredaran | | 1. Jasa-jasa bank | Rp14.250 |
| nomor A-233436 | Rp286.000 | 2. Cek kosong | 52.000 |
| A-233439 | 319.000 | | <hr/> 66.250 |
| A-233441 | 83.000 | | |
| A-233444 | 203.500 | | |
| A-233447 | 459.000 | | |
| | <hr/> 1.350.500 | | |
| Saldo yang benar | <hr/> Rp5.729.500 | Saldo yang benar | <hr/> Rp5.729.500 |

✓ Cocok dengan st. Bank 31-12-1994

✓ Cocok dengan Penghitungan Kas 31-12-1994

Teknik kitting digunakan untuk menyembunyikan adanya tindak penggelapan uang atau kelebihan kas di bank untuk saldo yang ada pada saat tanggal neraca. Teknik ini dilakukan dengan cara mentransfer dana dengan cek pada saat tanggal tutup buku ke bank klien lainnya. Proses transfer dana diakhir periode ini memungkinkan saldo rekening bank yang dipindahkan dananya belum sempat dicatat (didebit), sebaliknya saldo pada bank penerima dana sudah terlanjur dicatat. Sebagai akibatnya, saldo pada bank penerimaan akan bertambah dengan jumlah cek yang ditransfer tersebut. Dengan demikian saldo kas secara keseluruhan akan menjadi overstated dengan adanya pemindahan cek tersebut.

Daftar transfer antar bank dibuat oleh auditor berdasarkan informasi yang diperoleh dari laporan bank (bank statemen), konfirmasi dari bank, serta informasi lain yang diperoleh.

Peraga 8.5 Contoh daftar transfer antar bank

| Nomor Check | Rekening Bank | | Jumlah | Tgl. Pengeluaran | | Tgl. Penerimaan | |
|-------------|---------------|-----------|------------|------------------|----------|-----------------|--------|
| | Dari | Kepada | | per buku | per bank | per buku | bank |
| A-41002 | K. Pusat | Payroll | Rp 500.000 | 31/12/93 | 3/1/94 | 31/12/93 | 2/1/94 |
| A-41255 | K. Pusat | Cabang VI | 120.000 | 31/12/93 | 4/1/94 | 2/1/94 | 4/1/94 |
| A-41265 | K. Pusat | Cabang V | 250.000 | 31/12/93 | 2/1/94 | 31/12/93 | 2/1/94 |
| B-45667 | Cabang V | K. Pusat | 225.000 | 28/12/93 | 31/12/93 | 29/12/93 | 2/1/94 |
| C-40238 | Cabang VII | K. Pusat | 250.000 | 31/12/93 | 2/1/94 | 2/1/94 | 2/1/94 |

Teknik kitting ini hanya mungkin terjadi dalam suatu perusahaan yang sistem pengendalian internnya lemah. Kelemahan dalam perusahaan ini ditunjukkan dengan adanya pengaturan seorang individu dapat melakukan pengeluaran cek dan sekaligus mencatat pengeluaran cek tersebut. Hal ini berarti, tidak ada pemisahan fungsi yang memadai terhadap diskripsi tugas para pejabat perusahaan. Kemungkinan lain terjadinya kitting, karena adanya kolusi di antara para pejabat yang terlibat dalam proses pengeluaran maupun pencatatan transaksi kas tersebut. Dalam hal persekongkolan ini, biasanya sangat sulit dideteksi oleh pihak luar perusahaan. Usaha untuk mendeteksi kemungkinan adanya kitting adalah sebagai berikut:

- Buatlah *cutoff bank statement*, dari daftar ini akan terlihat cek yang di clearing ternyata tidak cocok dengan daftar cek yang masih dalam peredaran.
- Membuat cutoff test, dari daftar ini akan diketahui pengeluaran terakhir sebelum tanggal neraca tidak akan dicatat dalam register cek.

j. Siapkan *proof of cash*

Proof of cash adalah rekonsiliasi simultan terhadap transaksi-transaksi bank dan data yang terkait dengan saldo-saldo menurut buku untuk periode waktu tertentu. Periode waktu yang digunakan biasanya satu bulan terakhir atau satu bulan setelah tanggal tutup buku. Pengujian ini sangat diperlukan apabila resiko deteksi dalam hubungannya dengan transaksi bank pada tingkat yang tidak rendah. Mengingat lemahnya sistem kendali dalam perusahaan, maka semua kecermatan pekerjaan hitungan baik total penerimaan dan pengeluaran harus dicocokkan dengan jurnal kas yang terkait. Contoh *proof of cash* adalah sebagai berikut:

Peraga 8.5 Kertas kerja *proof of cash*

PT. METAL INDUSTRI
Prof or Cash. Feburari 31 Desember 1993

| Transaksi | Saldo Perusa- sahan 30/4 | Peneri- maan | Penge- luaran | Saldo per Audil 31/12 |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|
| Saldo Bank Setempat | 1.152.614 | 9.122.746 | 9.072.735 | 1.202.624 |
| Deposit in Transit | | | | |
| Awal (30/11) | 213.208 | (213.208) | | |
| Akhir (31/22) | | 262.699 | | 262.699 |
| Check yang beredar | | | | |
| Awal (30/11) | (272.644) | | (272.644) | |
| Akhir (31/12) | | | 251.744 | (251.744) |
| NSF Checks | | | (2.000) | 2.000 |
| Perbuktian | 1.093.177 | 9.172.237 | 9.049.835 | 1.215.579 |

Dalam melaksanakan program ini auditor harus menyiapkan suatu daftar untuk menunjukkan mutasi saldo-saldo kas dan bank dalam satu bulan sebelum tanggal neraca, dan satu bulan setelah tanggal neraca. Kertas kerja di atas terdiri dari empat kolom: saldo awal, transaksi penerimaan kas, transaksi pengeluaran kas, dan saldo akhir. Dengan melakukan pencocokan terhadap penerimaan dan pengeluaran saldo kas, maka langkah ini dimaksudkan untuk mengecek apakah mutasi yang terjadi benar-benar mencerminkan saldo rekeing kas yang sewajarnya. Langkah-langkah yang diperlukan:

- Dapatkan jumlah yang benar saldo kas menurut bank dan menurut perusahaan dari rekening koran dan catatan buku bank.
- Dapatkan daftar rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir dari rekonsiliasi bank untuk tanggal-tanggal yang direncanakan.
- Lakukan analisis terhadap kecocokan saldo-saldo tersebut, dan tentukan masalah yang menjadi penyebab terjadinya selisih di antara jumlah-jumlah tersebut.

Auditor harus berusaha mencermati terjadinya kesalahan-kesalahan jumlah-jumlah yang tertera dalam setiap kolom tersebut, mengingat hal tersebut dapat menjadi petunjuk kemungkinan adanya unsur tindak pelanggaran hukum. Oleh karena itu, auditor harus melakukan investigasi terhadap temuan tersebut.

Prosedur ini, dimaksudkan untuk memperoleh pembuktian empat assersi statemen keuangan, terkecuali penyajian dan pengungkapan.

- k. Bandingkan penyajian dalam neraca dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Langkah terakhir dalam audit substansi kas ini adalah melakukan identifikasi apakah penyajian elemen kas dalam neraca telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Mengingat penyajian kas sangat dipengaruhi oleh perikatan atau perjanjian khusus dengan pihak lain, banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk mengungkapkan substansi permasalahan tersebut dalam statemen keuangan. Adanya pengikatan penggunaan saldo deposit yang ada di bank menunjukkan keterbatasan wewenang dan penguasaan klien dalam menggunakan dana yang dimilikinya, keadaan ini harus diungkapkan dalam statemen keuangan mengingat klien tidak sepenuhnya berwenang terhadap deposit tersebut.

Dengan memperbandingkan dengan prinsip akuntansi tersebut, dapat diperoleh keyakinan bahwa penyajian dalam laporan keuangan telah wajar atau sebaliknya. Langkah ini dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana assersi penyajian dan pengungkapan dalam statemen keuangan.

6. Pembuatan daftar utama,

Daftar utama didasarkan informasi yang diperoleh dari keseluruhan daftar pendukung. Sebelum daftar utama disusun, senior accountant melakukan pengecekan terhadap keseluruhan kertas kerja yang dibuat oleh para asisten lapangan. Susunan daftar utama adalah sbb:

| Rekening/keterangan | Perusahaan | Penyesuaian | Adnit |
|---------------------|------------|-------------|-----------|
| Kas | 3.402.800 | - | 3.402.800 |
| Kas Kecil | 420.000 | - | 420.000 |
| Securitas Th. Pdh | 4.225.000 | - | 4.252.000 |

Daftar utama tersebut dibuat oleh akuntan senior yang menangani pekerjaan di lapang dengan memperhatikan pekerjaan para assistennya.

7. Pengujian untuk Mendeteksi Lapping

Lapping merupakan tindak kecurangan dengan melakukan manipulasi penerimaan sehingga saldo kas menjadi salah saji. Kecurangan ini berkaitan dengan proses setoran dari penagihan terhadap piutang dari para debitur. Kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurangan ini adalah adanya individu yang menangani dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi penerimaan kas dan pencatatan buku pembantu piutang. Dalam hal terjadi fungsi ganda tersebut, auditor harus segera mengantisipasi kemungkinan terjadinya lapping tersebut.

Prosedur pengauditan yang berkaitan dengan lapping antara lain:

- a. Konfirmasi Piutang Dagang. Sama seperti halnya yang dilakukan dalam audit terhadap piutang dagang, auditor harus memperhatikan jumlah setoran jumlah besar yang mengandung keragu-raguan.
- b. Melakukan penghitungan kas secara mendadak. Penghitungan jumlah uang yang ada di perusahaan sebaiknya dilakukan secara mendadak, dengan maksud agar lapper tidak dapat menyiapkan diri kemungkinan kecurangannya diketahui oleh auditor. Dengan adanya unsur dadakan ini, kecurangan yang ditimbulkan dapat diantisipasi.
- c. Melakukan perbandingan jurnal penerimaan kas harian dengan rincian slip setoran harian yang terkait.

8. Pengauditan terhadap Kas Kecil

Kas kecil dibentuk dengan mentransfer sejumlah dana dari rekening kas yang digunakan untuk membiayai pengeluaran harian dalam jumlah kecil-kecil. Misalnya, dalam suatu perusahaan dibentuk dana kas kecil dengan menggunakan sistem *imprest fund*. Gambaran sistem pengendalian intern terhadap transaksi kas kecil adalah:

- a. Dana kas kecil harus dibatasi dalam jumlah tertentu, sehingga jumlah uang tunai ditambah dengan bukti-bukti pengeluaran kas kecil sama dengan dana yang disalurkan untuk kas kecil.
- b. Dana kas kecil harus dipegang oleh satu orang saja.
- c. Apabila dana tidak digunakan harus disimpan dalam almari penyimpanan khusus.
- d. Pembayaran melalui kas kecil harus benar-benar berjumlah kecil dan harus disertai bukti-bukti yang memadai.
- e. Dana kas kecil tidak boleh dicampur aduk dengan penerimaan atau bentuk aktivitas lainnya.
- f. Semua bukti-bukti pembayaran yang telah dilunasi/dibayar harus diberi cap **LUNAS**
- g. Pengisian kembali kas kecil harus dicek mengenai kewajaran penggunaannya oleh pejabat yang berwenang, serta diotorisasi permohonan dana kas kecil yang baru.

Dalam rangka pengujian substansi terhadap kas kecil, harus dipertimbangkan risiko deteksi yang secara spesifik terlekat dalam sistem pengendaliannya. Pengujian dilakukan dengan cara melakukan penelaahan dokumen pendukungnya, voucher pengisian kas kecil, pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas kecil. Penghitungan jumlah kas kecil yang masih ada ditangan biasanya dilakukan secara simultan dengan penghitungan kas.

SOAL BAB 8

Soal Kelompok A

Dari pernyataan dalam soal-soal berikut ini, tentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Apabila pernyataan tersebut benar salah berilah tanda S, dan apabila benar berilah tanda S dimuka setiap pernyataan tersebut.

- ... 1. Auditor harus memahami bahwasannya penyajian saldo kas dalam neraca berhubungan dengan siklus lainnya, oleh karenanya transaksi dalam siklus yang lain perlu dipertimbangkan dalam penyajian saldo kas tersebut.
- ... 2. Saldo kas kecil merupakan bagian kecil dari saldo kas yang dipegang klien, oleh karena jumlahnya sering dipandang tidak material auditor tidak perlu melakukan perhitungan berapa jumlah kas kecil tersebut mengingat jumlahnya tercermin dari reimbursement voucher yang dikeluarkan pemegang kas.
- ... 3. Dalam melakukan penghitungan kas yang ada ditangan, auditor harus didampingi oleh pemegang kas dan harus membuat berita acara perhitungan kas yang ditandangani keduanya serta memuat klausula semua uang tunai yang dihitung telah diterima kembali oleh pemegang kas tersebut.
- ... 4. Program audit penghitungan kas, rekonsiliasi bank, dan konfirmasi bank bertujuan untuk memperoleh keyakinan terhadap asersi eksistensi dan okuransi saldo kas.
- ... 5. Kas kecil dibentuk dengan mentransfer sejumlah dana dari rekening kas yang digunakan untuk membiayai pengeluaran harian dalam jumlah kecil-kecil, oleh karenanya items pendukungnya tidak perlu dipertimbangkan dalam perencanaan audit.
- ... 6. Sebelum daftar utama disusun, **senior accountant** melakukan pengecekan terhadap keseluruhan kertas kerja yang dibuat oleh para asisten lapangan; pekerjaan ini dapat diwakilkan kepada para pembantu-pembantunya sepanjang Dia telah memberikan petunjuk yang memadai.
- ... 7. *Proof of cash* adalah rekonsiliasi simultan terhadap transaksi-transaksi bank dan data yang terkait dengan saldo-saldo menurut buku untuk periode waktu tertentu yang meliputi periode waktu yang digunakan (biasanya satu bulan terakhir atau satu bulan setelah tanggal tutup buku).
- ... 8. *Proof of cash* merupakan teknik pengujian yang sangat diperlukan apabila resiko deteksi dalam hubungannya dengan transaksi bank pada tingkat yang tidak rendah.
- ... 9. Prosedur pengujian analitikal sangat berguna untuk mengarahkan pendeteksian problem yang mungkin dihadapi oleh klien dalam saldo kas, serta untuk menunjukkan keberadaan, dan kewajarannya.
- ...10. Prosedur pengujian analitikal bermanfaat guna memperoleh gambaran mengenai hubungan saldo rekening kas dengan indikator lainnya; yang dalam hal ini ditunjukkan dengan perbandingan antara saldo kas dengan anggaran, saldo kas periode yang diaudit dengan periode sebelumnya.

Soal-soal Kelompok B

Pilihlah satu jawaban yang benar diantara empat alternatif jawaban berikut ini. Bila tidak ada alternatif jawaban yang tepat pilihlah huruf e dalam lembar jawaban saudara.

1. Tujuan audit untuk menunjukkan assersi eksistensi dan okurensi adalah:
 - A. Catatan saaldo kas pada saat tanggal neraca benar-benar ada.
 - B. Pencatatan saldo rekening kas meliputi semua transaksi kas beserta pengaruhnya terhadap peristiwa yang membentuknya.
 - C. Transfer kas pada akhir tahun di antara bank-bank klien telah dicatat dengan layak
 - D. Semua saldo rekening kas yang disajikan oleh klien pada saat tanggal neraca merupakan hak yang secara hukum sah.
2. Tujuan audit untuk menunjukkan assersi kesempurnaan adalah:
 - A. Catatan saaldo kas pada saat tanggal neraca benar-benar ada.
 - B. Pencatatan saldo rekening kas meliputi semua transaksi kas beserta pengaruhnya terhadap peristiwa yang membentuknya.
 - C. Semua saldo rekening kas yang disajikan oleh klien pada saat tanggal neraca merupakan hak yang secara hukum sah.
 - D. Pencatatan saldo rekening kas direalisasi oleh jumlah-jumlah yang dinyatakan dalam neraca dan telah cocok dengan daftar pendukungnya
3. Berikut ini disajikan beberapa program audit dalam rangka audit terhadap saldo kas:
 - A. Gunakan prosedur analitikal.
 - B. Buatlah analisis terhadap pengujian cutoff transaksi kas.
 - C. Buatlah analisis terhadap cutoff statemen bank.
 - D. Lakukan penulusuran terhadap transfer bank.
4. Dokumen sumber yang utama yang berhubungan dengan saldo akhir didokumentasikan dalam bentuk:
 - A. konfirmasi bank standar
 - B. rekonsiliasi bank
 - C. daftar transfer antar bank
 - D. daftar utama deposit di bank
5. Auditor melakukan penghitungan kas klien harus dikoordinasikan dan dilakukan bersamaan dengan:
 - A. memperlajari struktur pengendalian intern yang berhubungan dengan kas
 - B. dilakukan tutup buku pada saat tanggal neraca
 - C. saat penghitungan surat-surat berharga
 - D. saat penghitungan persediaan
6. Manakah teknik audit yang paling baik digunakan untuk mendeteksi adanya kitting, diantara prosedur berikut ini?
 - A. Melakukan penelahaan slip setoran yang asli.

- B. Melakukan penelaahan rekening koran setelah tanggal neraca dan cek yang sudah diuangkan langsung dari bank.
 - C. Menyiapkan daftar transfer antar bank dari buku-buku catatan klien.
 - D. Menyiapkan rekonsiliasi bank akhir tahun.
7. Kekurangan saldo kas dapat terjadi karena masih dalam proses pengiriman dari suatu lokasi ke tempat yang lain atau dalam proses penukaran wessel menjadi kas. Karena alasan tersebut manakah program audit yang dianggap vital?
 - A. Konfirmasi secara simultan.
 - B. Pembuatan rekonsiliasi bank secara simultan.
 - C. Verifikasi secara simultan.
 - D. Penghitungan kas dengan mendadak secara simultan.
 8. Dalam keadaan yang bagaimanakah auditor harus mengadakan pengujian secara intensip terhadap dana kas kecil sebesar Rp1.000.000?
 - A. Voucher pengisian kembali tidak menggunakan nomor urut tercetak.
 - B. Voucher pengisian kembali dilakukan setiap dua minggu sekali.
 - C. Pemegang kas kadangkala menggunakan dana kas untuk keperluan cek gaji.
 - D. Pemegang kas kecil menguangkan cek pengisian kas kecil.
 9. Manakah cara perlindungan yang paling baik untuk menghindarkan adanya lapping dalam menangani transaksi piutang dagang?
 - A. Pemisahan tugas antara pemegang pencatatan buku besar tidak mempunyai akses ke penerimaan surat.
 - B. Pemisahan tugas pegawai yang mempunyai akses cek dari langganan dan uang yang diterima dari penerimaan uang harian.
 - C. Para pelanggan diminta untuk mengirimkan secara langsung kepada rekening koran di salah satu bank klien.
 - D. Meminta agar pelanggan membayarkan cek secara langsung ke perusahaan yang dialamatkan ke bendaharawan perusahaan.
 10. Manakah diantara transfer kas berikut ini yang memungkinkan terjadinya salah saki kas pada tanggal 31 Desember 1993?

| Daftar transfer antar bank | | | | |
|----------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Transfer | Pengeluaran | | Penerimaan | |
| | Catatan per buku | Pembayaran oleh bank | Catatan per buku | Penerimaan oleh bank |
| A | 1/12/93 | 4/1/1994 | 31/12/1993 | 31/12/1993 |
| B | 4/1/1994 | 5/1/1994 | 31/12/1993 | 4/1/1994 |
| C | 31/12/1993 | 5/1/1994 | 31/12/1993 | 4/1/1994 |
| D | 4/1/1994 | 11/1/1994 | 4/1/1994 | 4/1/1994 |

-
-
11. Dalam rangka audit terhadap elemen saldo kas, auditor akan melakukan program audit berikut ini, **kecuali**:
- A. melakukan konfirmasi ke bank klien mengenai setoran dan pengambilan dana selama eriode yang diaudit.
 - B. Melakukan penulusuran terhadap transfer antar bank klien disekitar hari-hari penutupan buku (tanggal neraca).
 - C. Melakukan prosedur analitikal
 - D. Melakukan pengujian cutoff kas untuk tanggal penutupan buku (tanggal neraca).
12. Berbagai siklus yang terkait dengan besarnya saldo kas dalam neraca antara lain, **kecuali**:
- A. Siklus pengeluaran
 - B. Siklus produksi
 - C. Siklus jasa-jasa tenaga kerja
 - D. siklus investasi
13. Dalam rangka membuktikan bahwa saldo kas pada tanggal neraca benar-benar ada, auditor harus melakukan langkah-langkah audit:
- A. melakukan konfirmasi pada bank mengenai saldo klien pada tanggal neraca.
 - B. melakukan observasi terhadap penghitungan uang yang dilakukan oleh klien.
 - C. melakukan penilaian apakah penyajian dalam laporan keuangan telah sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku.
 - D. menyiapkan *proof of cash*.
14. Bukti-bukti utama yang berkaitan dengan assersi saldo kas pada akhir periode berupa dokumen:
- A. konfirmasi dari pihak bank.
 - B. Rekonsiliasi bank.
 - C. daftar transfer antar bank.
 - D. berita acara penghitungan kas.
15. Untuk dapat membuktikan eksistensi dan okuransi assersi saldo kas, auditor harus melakukan prosedur-prosedur pemeriksaan berikut, **kecuali**:
- A. Lakukan penulusuran terhadap transfer antar bank.
 - B. Lakukan penelaahan terhadap statemen bank bulan sebelumnya dan cocokkan dengan bonggol cek (*souches*) untuk menentukan manakah cek yang masih dalam peredaran.
 - C. Lakukan penghitungan kembali kas yang ada ditangan klien.
 - D. Buatlah rekonsiliasi bank untuk saat tanggal neraca dan lakukan penelaahan terhadapnya.
16. Prinsip akuntansi yang berlaku umum, terhadap penyajian rekening kas dalam neraca adalah, **kecuali**:
- A. Bahwa saldo kas yang disajikan dalam neraca meliputi semua uang yang ada ditangan lien dan di bank (bank-bank).
 - B. Bahwa semua bentuk negotiable instruments telah dimasukkan dalam saldo kas yang disajikan dalam neraca.

-
-
- C. Bahwa semua cek yang masih dalam peredaran telah diperhitungkan sebagai pengurangan terhadap saldo kas.
- D. jawaban a dan b di atas benar
17. Dalam rangka program audit terhadap saldo kas dalam neraca, auditor harus melakukan penghitungan kas yang ada ditangan dan disaksikan oleh kashir. Program ini dilakukan dengan maksud agar:
- A. pekerjaan auditor menjadi lebih ringan.
- B. tidak terjadi salah hitung antara auditor dan klien.
- C. apabila terjadi perbedaan penghitungan dapat segera diselesaikan bersama.
- D. jawaban di atas tidak ada yang benar.
18. Auditor harus melakukan penelusuran saldo kas pada tanggal neraca apakah cocok dengan rekening pembantu dan catatan-catatan akuntansi dengan menunjukkan informasi yang sama serta dapat memberikan kejelasan perhitungannya. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh petunjuk mengenai:
- A. asersi penilaian dan alokasi informasi dalam laporan keuangan.
- B. asersi ketelengkapan informasi dalam laporan keuangan.
- C. asersi penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.
- D. semua jawaban di atas salah.
19. Auditor harus meyakini, bahwasannya elemen-elemen kas mendapat perlindungan yang selayaknya. Program audit terhadap hal tersebut dilakukan dengan:
- A. Apakah terdapat pemisahan tugas dan kewajiban antara fungsi penyimpanan kas dengan fungsi pencatatan.
- B. Apakah pemegang kas memperoleh asuransi yang layak.
- C. Apakah semua dana yang diterima pada suatu hari disetorkan pada hari yang sama, dan apakah pengeluaran kas selalu menggunakan cek.
- D. Semua jawaban di atas benar.
21. Apabila auditor menyusun program audit tersebut, dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan terhadap asersi,
- A. Hak-hak dan kewajiban B. Kesempurnaan
- C. Eksistensi dan okurensi D. Eksistensi atau okurensi dan kesempurnaan

Soal Kelompok B

1. Auditor harus memahami bahwasanya penyajian saldo kas dalam neraca berhubungan dengan siklus lainnya, oleh karenanya transaksi dalam siklus yang lain perlu dipertimbangkan dalam penyajian saldo kas tersebut.
2. Saldo kas kecil merupakan bagian kecil dari saldo kas yang dipegang klien, oleh karena jumlahnya sering dipandang tidak material auditor tidak perlu melakukan perhitungan berapa jumlah kas kecil tersebut mengingat jumlahnya tercermin dari reimbursement voucher yang dikeluarkan pemegang kas.

-
3. Dalam melakukan penghitungan kas yang ada ditangan, auditor harus didampingi oleh pemegang kas dan harus membuat berita acara perhitungan kas yang ditandatangani keduanya serta memuat klausula semua uang tunai yang dihitung telah diterima kembali oleh pemegang kas tersebut.
 4. Program audit penghitungan kas, rekonsiliasi bank, dan konfirmasi bank bertujuan untuk memperoleh keyakinan terhadap asersi eksistensi dan okuransi saldo kas.

Bab 9

Penyempurnaan Pekerjaan Audit dan Tanggungjawab Postaudit

PEMBAHASAN DALAM BAB INI MELIPUTI:

1. Penjelasan mengenai berbagai bentuk tanggungjawab auditor dalam rangka penyempurnaan pekerjaan audit.
2. Menggambarkan secara rinci berbagai prosedur dalam menyempurnakan pekerjaan lapangan.
3. Identifikasi dan evaluasi langkah-langkah terhadap temuan-temuan dalam audit.
4. Identifikasi hal-hal atau permasalahan yang harus dikomunikasikan dengan klien terhadap kesimpulan-kesimpulan audit.
5. Berbagai bentuk tanggungjawab auditor dalam periode **postaudit**

Judul bab ini menggunakan istilah penyempurnaan dengan ide bahwasannya dalam pekerjaan lapangan masih dimungkinkan adanya fakta yang belum lengkap dan sangat tergantung dari informasi mutakhir yang mungkin masih berlangsung atau mungkin akan terjadi. Dalam banyak hal, kadangkala pekerjaan lapangan masih perlu dicek ulang, mengingat ada beberapa informasi penting yang ada ditangan pimpinan puncak. Auditor harus menuntaskan masalah-masalah yang diduga akan muncul tersebut. Dengan demikian dalam pekerjaan audit di lapangan masih dipandang perlu dilengkapi oleh beberapa informasi yang dipandang sangat fatal, dan oleh karenanya masih diperlukan satu tahapan pekerjaan audit dalam rangka penuntasan pekerjaan audit di lapangan, pekerjaan akhir ini disebut penyempurnaan pekerjaan audit.

Pekerjaan dan tanggungjawab auditor tidak hanya berhenti sampai dengan pengumpulan informasi di lapangan telah diselesaikan. Dalam rangka penyempurnaan pekerjaannya, Dia harus memperhatikan kejadian-kejadian setelah tanggal neraca baik yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi informasi yang disajikan dalam statemen keuangan klien. Seorang auditor harus memperhatikan adanya fakta-fakta baru ataupun kejadian baru yang terjadi setelah tanggal neraca tetapi laporan audit belum diserahkan kepada klien. Hal ini disebabkan fakta-fakta baru tersebut dapat menjadikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi tidak relevan atau tidak mempunyai bobot yang layak bahkan mungkin dapat dikategorikan menyimpang dari standar pelaporan yang layak. Mengingat berbagai fakta baru tersebut dapat menyesatkan pembaca laporan audit, dan tentu saja akan berakibat terhadap pembentukan opini auditor.

A. MENYEMPURNAKAN PEKERJAAN AUDIT LAPANGAN

Dalam menyempurnakan pekerjaan lapangan, auditor harus menjalankan prosedur yang spesifik guna memperoleh tambahan bukti audit. Prosedur yang harus dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan terhadap kejadian-kejadian *subsequent*.
2. Membaca catatan berbagai rapat pimpinan.
3. Memperoleh pembuktian terhadap *litigation*, *claim*, dan *assessments*.
4. Meminta surat representasi dari klien.
5. Melakukan prosedur penelaahan analitikal.

Berbagai prosedur tersebut tidak dapat dilaksanakan selama pekerjaan lapangan berlangsung, tetapi merupakan kelanjutan dari pekerjaan lapangan.

Dalam pembahasan ini perlu dijelaskan beberapa istilah penting dalam bahasa Inggris dan ide terjemahannya. Beberapa istilah penting tersebut yaitu *litigation*, *claim*, dan *assessments*. Pengertian *litigation* adalah masalah-masalah yang muncul dalam forum pengadilan, yang disebabkan adanya tuntutan baik dari pihak klien maupun dari pihak luar. Uraian selanjutnya, akan digunakan istilah bahasa Indonesia dengan **perkara pengadilan**. *Claims* adalah tuntutan dari pihak ketiga karena janji-janji yang telah diberikan di masa yang lalu, atau karena klien melakukan kesalahan atau pengingkaran dari suatu kesepakatan.

Dalam buku ini digunakan istilah klaim [serapan dari bhs. Belanda] yang secara kebetulan telah dikenal dalam bahasa Indonesia. *Assessments* adalah pembebanan oleh pihak lain yang timbul dari berbagai bentuk kewajiban baik yang dipaksakan maupun tidak dipaksakan. Bentuk pembebanan ini antara lain berupa kewajiban membayar pajak, pembayaran retribusi, pembebanan karena klien melakukan kesalahan. Oleh karena itu istilah *assessment* diterjemahkan dengan istilah **pembebanan**.

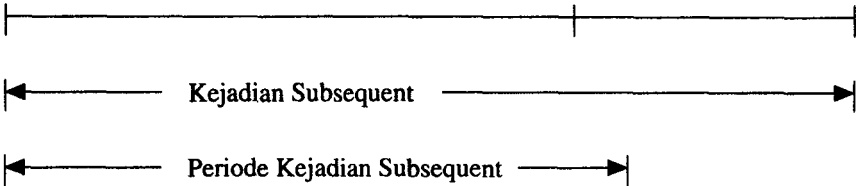
1. Melakukan penelaahan terhadap kejadian-kejadian subsequent.

Tanggungjawab auditor terhadap kewajaran statemen keuangan yang disajikan klien tidak terbatas pada pengujian transaksi-transaksi dan kejadian yang disajikan dalam saldo-saldo rekening sampai dengan saat tanggal neraca. Statements Auditing Standard no 1, mewajibkan pula agar auditor bertanggungjawab terhadap kejadian-kejadian maupun transaksi yang bersifat spesifik yang (a) akan berakibat secara material terhadap statemen keuangan, dan (b) terjadi setelah tanggal neraca tetapi sebelum statemen keuangan auditan dikeluarkan oleh auditor. Kejadian yang bersifat khusus tersebut disebut kejadian-kejadian subsequent.

Untuk menggambarkan bagaimana bentuk kejadian-kejadian subsequent tersebut berikut digambarkan dimensi runtutan waktu kejadian seperti terlihat dalam peraga 9.1 berikut.

Peraga 9.1 Dimensi Waktu Kejadian Subsequent

| Saldo Neraca | Tanggal Pekerja- jaan selesai | Tanggal Penyerahan laporan audit |
|------------------|----------------------------------|--|
| 32 Desember 1993 | 20 Maret 1994 | 30 Maret 1994 |



Dalam gambar tersebut diidentifikasi adanya **periode kejadian-kejadian** dan **kejadian-kejadian subsequent** yang keduanya mempunyai makna yang berbeda. Periode kejadian-kejadian subsequent merupakan dimensi waktu yang diliput oleh tanggungjawab auditor sesuai dengan standar audit berterima umum. Dengan pengertian ini, kejadian-kejadian penting yang terjadi setelah tanggal penyelesaian pekerjaan lapangan sampai penyerahan laporan audit tidak diliput dalam tanggungjawab auditor.

Kejadian-kejadian subsequent, terdiri dari dua tipe yaitu:

- tipe 1, Kejadian-kejadian yang memberikan tambahan pembuktian yang berpengaruh terhadap kondisi yang ada pada saat tanggal neraca dan mempengaruhi penaksiran dalam proses penyiapan statemen keuangan.

tipe 2, Kejadian-kejadian yang memberi pembuktian bahwasannya sampai dengan saat tanggal neraca belum terjadi, tetapi baru muncul setelah tanggal neraca.

Kejadian-kejadian Tipe 1 menghendaki penyesuaian dalam statemen keuangan, sedangkan tipe dua menghendaki pengungkapan (*disclosure*) dalam statement keuangan. Contoh berikut ini dimaksud untuk menggambarkan kedua tipe kejadian-kejadian tersebut.

Contoh kejadian tipe kesatu,

- a. Realisasi pencatatan asset di akhir periode antara piutang dengan sediaan setelah dicatat jumlahnya berbeda.
- b. Penempatan estimasi utang yang dicatat saat akhir periode dengan jumlah yang berbeda terhadap perkara pengadilan dan garansi penjualan produk.

Contoh kejadian tipe kedua,

- a. Penerbitan obligasi jangka panjang, saham preferensi, atau saham biasa.
- b. Pembelian perusahaan yang dilakukan setelah tanggal neraca.
- c. Adanya kerugian luar biasa yang ditimbulkan oleh kebakaran ataupun bencana alam.

Sebagai contoh kasus, salah satu perusahaan debitur klien dinyatakan bangkrut pada tanggal 13 Februari 1994, yang pada saat tanggal neraca per 31 Desember 1993 belum dimasukkan dalam estimasi piutang yang tidak dapat tertagih. Kebangkrutan salah satu debitur klien tersebut mengandung unsur ketidak-pastian dalam laporan keuangan yang diaudit, yang oleh karenanya klien perlu meminta *adjustment* terhadap kemungkinan rugi yang akan dideritanya tersebut. Lain halnya apabila setelah tanggal neraca, diketahui adanya suatu perusahaan yang mengalami kebangkrutan atau kerugian luar biasa yang disebabkan kebakaran, atau bencana alam. Maka terhadap kejadian tersebut diperlukan adanya pengungkapan dalam bentuk catatan kaki.

Prosedur audit terhadap kejadian periode subsequent umumnya dilakukan oleh *auditor in charge*, mengingat informasi yang harus diperoleh biasanya bersumber dari kalangan pimpinan perusahaan. Auditor harus mengidentifikasi dan menilai kejadian subsequent sampai pada tanggal laporan audit, atau sampai pekerjaan lapangan berakhir. Prosedur yang harus ditempuh oleh auditor adalah sebagai berikut:

1. Bacalah berbagai laporan interim yang terakhir dan bandingkan dengan statemen yang sedang dipersiapkan dan buatlah perbandingan lain yang memadai dengan situasi dan kondisi yang ada.
2. Lakukan wawancara dengan manajer yang bertanggung jawab dibidang keuangan dan akuntansi mengenai:
 - a. Adanya utang kontinjensi yang substansial atau komitmen dengan pihak lain yang ada pada saat tanggal neraca atau sampai pada saat wawancara dilaksanakan.
 - b. Adanya perubahan yang substansial dalam *capital stock*, utang jangka panjang, ataupun modal kerja sampai pada saat wawancara dilaksanakan.
 - c. Keadaan sekarang mengenai berbagai daftar yang diperhitungkan sebelumnya sebagai hasil dari data tentatif, data pendahuluan, atau data yang tidak meyakinkan.
 - d. Adanya penyesuaian luarbiasa yang dibuat sampai pada saat tanggal neraca.

-
3. Bacalah catatan rapat-rapat para direktor, pemegang saham, dan berbagai komitee yang relevan.
 4. Lakukan wawancara dengan penasehat hukum klien mengenai perkara pengadilan, klaim, dan pembebanan-pembebanan (*assessments*).
 5. Mintalah surat representasi klien mengenai kejadian-kejadian subsequent yang diperlukan untuk perumusan pendapat karena memerlukan *adjustment* maupun *disclosure*.
 6. Buatlah wawancara tambahan atau lakukan prosedur tambahan yang sangat diperlukan untuk situasi dan keadaan yang ada.

Temuan-temuan yang diperoleh dari langkah-langkah di atas, mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pendapat auditor. Auditor harus mempertimbangkan apakah Dia harus membuat pengungkapan ataukah harus membuat adjustment terhadap statemen keuangan auditan, atau bahkan harus mengubah keputusan terhadap pendapat yang telah dirumuskan.

2. Membaca catatan berbagai rapat pimpinan.

Catatan rapat pemegang saham, dewan komisaris maupun direksi berisi mengenai hal-hal yang sangat penting mengenai kebijakan yang diambil perusahaan. Kadangkala direksi membentuk suatu panitia, konsultan ahli, komisi, dewan penasehat yang ditugasi membantu menyusun perumusan kebijaksanaan manajemen. Keputusan yang diambil dalam berbagai bentuk rapat tersebut terjadi kapan saja, dan tidak tergantung pada kepentingan penyajian informasi keuangan. Auditor harus berusaha memperoleh informasi penting yang tertuang dalam catatan rapat tersebut, guna mendeteksi kebijaksanaan manajemen setelah tanggal neraca yang akan berpengaruh terhadap laporan keuangan yang diaudit tersebut.

Berbagai keputusan yang diambil perusahaan, antara lain: Dewan Komisaris memutuskan mengeluarkan obligasi baru, pembelian saham treasury, pemberian deviden kas, dan lain-lain. Semua keputusan yang diambil oleh manajemen puncak mengandung nilai transaksi yang sangat besar dan berpengaruh untuk jangka waktu yang amat panjang. Ini berarti keputusan manajemen akan menunjukkan arah kebijaksanaan yang diambil dalam rangka mencapai tujuan perusahaan di masa depan. Oleh karena itu, semua jenis keputusan manajemen puncak mempunyai nilai yang sangat strategis, dan perlu dipelajari auditor. Semua keputusan tersebut tertuang dalam notulen rapat, yang dengan sendirinya akan memberikan informasi penting yang dapat mempengaruhi opini pembaca laporan keuangan.

3. Memperoleh pembuktian terhadap perkara pengadilan, klaim, dan pembebanan-pembebanan.

Auditor seringkali menghadapi masalah yang berkaitan dengan utang kontinjensi (*contingent liability*) dalam laporan keuangan klien. Kontinjensi merupakan suatu kondisi atau situasi yang tidak menentu, yang akan memberikan kemungkinan keuntungan (*gains*) atau kerugian (*losses*), yang kesemuanya itu baru dapat terjadi tergantung oleh kejadian dimasa yang akan datang. Keuntungan kontinjensi merupakan klaim kepada pihak lain, yang tidak selayaknya disajikan dalam laporan keuangan, mengingat standar akuntansi keuangan

yang berlaku menggunakan dasar konservatif yang tidak akan diakui bila realisasinya tidak jelas. Sebaliknya kerugian kontinjensi merupakan persoalan yang sangat penting bagi auditor, mengingat kemungkinan timbulnya kerugian tersebut harus segera diakui. Kerugian sebagai akibat adanya kontinjensi diperlakukan dengan cara: (1) diakui sebagai utang kontinjensi, (2) diungkapkan sebagai catatan terhadap statemen keuangan, atau (3) tidak diambil keputusan apapun. Kontinjensi terdiri dari: kemungkinan timbulnya utang pajak, pemberian jaminan terhadap produk, kewajiban terhadap pemberian garansi, perkara pengadilan, klaim, dan pembebanan-pembebanan.

Dengan memperhatikan keadaan tersebut di atas, auditor harus memperoleh bukti-bukti tentang:

- a. Eksistensi terhadap kondisi, situasi, atau seperangkat keadaan yang memberi indikasi ketidakpastian terhadap kemungkinan terjadinya kerugian yang timbul dari perkara pengadilan, klaim, dan pembebanan-pembebanan.
- b. Periode yang menjadi kegiatan legal yang diliput oleh kasus tersebut.
- c. Seberapaakah kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan.
- d. Jumlah atau kisarannya mengenai potensi kerugian yang timbul.

Hal-hal tersebut di atas diperoleh manajemen dengan melakukan analisis terhadap notulen rapat-rapat pimpinan, serta merekonstruksi terhadap kejadian yang mungkin timbul.

Mengingat segala sesuatu yang berkaitan dengan timbulnya kontinjensi hanya diketahui oleh manajemen puncak, maka sumber utama informasi diperoleh dari mereka. Oleh karena itu, auditor harus melakukan tindakan berikut:

- a. Mewawancarai dan mendiskusikan dengan manajemen puncak mengenai masalah yang diidentifikasi tersebut.
- b. Meminta diskripsi dan evaluasi dari manajemen terhadap adanya perkara pengadilan, klaim, dan pembebanan-pembebanan tersebut, dan keberadaannya dalam neraca.
- c. Meminta jaminan dari manajemen (utamanya tertulis) mengenai eksistensi klaim yang mungkin timbul.

Auditor bukanlah pihak yang berkompeten untuk membuat pertimbangan profesional mengenai semua aspek perkara pengadilan, klaim, dan pembebanan-pembebanan. Sebagai akibatnya auditor harus menanyakan secara tertulis mengenai pendapat para ahli hukum klien untuk memperoleh informasi yang menguatkan. Surat semacam itu disebut *letter of audit inquiry* (periksa conyoh di halaman 214). Meskipun ide pertanyaan ini datang dari auditor, tetapi surat kepada konsultan hukum tetap harus dibuat oleh manajemen. Dalam surat tersebut ditanyakan agar tanggapan dari penasihat hukum dikirimkan langsung kepada auditor. Tanggapan secara tertulis yang disampaikan oleh penasihat hukum klien tersebut sangat mempengaruhi penyajian dalam statemen keuangan. Tentunya hal ini akan mempengaruhi opini yang akan disajikan dalam laporan audit nanti.

4. Meminta surat representasi dari klien.

Auditor menghendaki surat pernyataan tertulis dari manajemen guna memenuhi standar

pelaksanaan audit ke tiga. Surat representasi merupakan pelengkap prosedur audit yang dijalanannya dengan maksud:

- * persetujuan terhadap representasi lisan yang diberikan kepada auditor.
- * mengurangi kemungkinan timbulnya salah-tafsir terhadap representasi manajemen.
- * mendokumentasikan terhadap representasi yang telah diberikan.

Surat representasi dari manajemen pada dasarnya merupakan pernyataan klien mengenai masalah-masalah perkara pengadilan, klaim, dan pembebanan-pembebanan tersebut. Surat ini disiapkan oleh staf klien (dengan bantuan staf auditor), yang dikirimkan kealamat auditor, dengan tanggal yang sama dengan tanggal laporan audit. Biasanya surat ini ditandatangani oleh CEO atau setidaknya pimpinan yang membawahi bidang keuangan. Bentuk surat representasi disajikan dalam lampiran bab ini.

5. Melakukan prosedur analitikal.

Pembahasan dalam bab-bab sebelumnya selalu menggunakan prosedur analitikal dengan membuat perbandingan dan ratio dalam rangka pengujian substansi. Di akhir proses audit akuntan publik harus pula melakukan prosedur analitikal ini untuk melakukan penelaahan akhir yang bersifat menyeluruh terhadap statemen keuangan yang diauditnya. Jadi, auditor harus melakukan prosedur analitikal terhadap informasi yang diperoleh dalam periode subsequent. Langkah ini harus dilakukan oleh orang-orang yang berbar-benar mempunyai keahlian dan mengetahui bisnis klien dan lingkungan industri yang mengitarinya. Mereka yang berwenang untuk melakukan penelaahan analitikal menyeluruh adalah para partner atau para manager audit. Semua jenis prosedur analitikal dapat dilakukan, dengan cara membandingkan data perusahaan dengan (a) perkiraan hasil-hasil perusahaan, (b) data industri yang tersedia, dan (c) data nonkeuangan yang relevan seperti jumlah produk terjual, dan jumlah pegawai.

B. EVALUASI TERHADAP PENEMUAN-PENEMUAN PENTING

Auditor mempunyai dua tujuan dalam rangka evaluasi terhadap temuan-temuan dalam proses audit, yaitu: (1) penentuan jenis pendapat akuntan yang akan dinyatakan, dan (2) menentukan apakah standar akuntansi keuangan yang berlaku telah diterapkan. Agar kedua tujuan tersebut dapat dipenuhi, maka auditor harus melakukan langkah-langkah berikut:

1. Membuat penaksiran akhir terhadap **materialitas** dan **risiko audit**.
2. Membuat penelaahan teknis terhadap statemen keuangan.
3. Memformulasikan pendapat dan menuliskan konsep laporan audit.
4. Membuat penelaahan akhir terhadap kertas kerja audit.

Rincian langkah-langkah tersebut dibahas dalam subbab berikut ini.

1. Membuat penaksiran akhir terhadap materialitas dan risiko audit.

Dalam memformulasikan pendapat terhadap statemen keuangan yang disajikan klien, auditor harus menggabungkan bukti-bukti yang dikumpulkan selama proses audit. Salah satu persyaratan dalam memutuskan pendapat adalah penaksiran akhir terhadap materialitas

Peraga 9.2 Peraga *letter of audit inquiry*

[Nama dan alamat penasehat hukum]

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan audit terhadap statemen keuangan kami untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1993, manajemen memandang perlu untuk menjelaskan secara tuntas mengenai masalah kontinjensi yang saat ini sedang saudara tangani dalam rangka penyelesaian secara hukum. Kami telah memberikan penjelasan rinci dan penilaian kami mengenai kontinjensi tersebut, oleh karenanya Manajemen telah menyiapkan dan melengkapi informasi yang dibutuhkan tersebut.

Saudara diminta memberikan penjelasan dan tanggapan secara tertulis mengenai kondisi dan kemajuan penyelesaian perkara pengadilan tersebut. Tanggapan dan penjelasan Saudara akan berguna untuk melengkapi dan mendukung penjelasan yang telah disampaikan manajemen secara lisan.

Kami menyadari bahwasannya informasi yang Saudara sampaikan dapat mempengaruhi pengungkapan dalam statemen keuangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 1993 tersebut. Jika hal tersebut memang merupakan kesimpulannya profesional sebagai konsultan hukum, tentu akan kami pertimbangkan sebagai dasar pengungkapan dalam statemen keuangan kami.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Keuangan

Hindarto, SE

maupun risiko audit. Langkah awal dalam proses ini adalah menentukan seberapa banyak **total salah saji** yang ditemukan dalam keseluruhan pengujian rekening yang **tidak dikoreksi** oleh klien. Dalam beberapa kasus, salah saji yang tidak dikoreksi tidak material dan oleh karenanya auditor tidak meminta untuk dikoreksi. Dalam beberapa kasus yang lain, klien tidak senang atas koreksi yang diminta oleh auditor. Langkah selanjutnya adalah menentukan seberapa materialitas item salah saji yang tidak bersedia untuk dikoreksi tersebut berpengaruh terhadap aktiva lancar dan utang lancar.

Dalam penentuan salah saji setiap rekening, meliputi komponen berikut ini:

- a. mengidentifikasi salah saji yang tidak dikoreksi yang diperoleh dalam detail pengujian transaksi-transaksi dan saldo-saldo.
- b. menaksir proyeksi salah saji yang tidak dikoreksi dengan menggunakan teknik audit sampling.
- c. membuat perkiraan salah saji yang terdeteksi dengan prosedur analitikal dan dikuantifikasi dengan prosedur audit lainnya.

Total dari komponen-komponen untuk setiap rekening tersebut disebut dugaan salah saji. Jumlah keseluruhan salah saji yang diduga tersebut dinamakan dugaan keseluruhan salah saji. Auditor harus memperkirakan dugaan keseluruhan salah saji yang mempengaruhi statemen keuangan periode kini, dan juga dugaan salah saji yang berasal dari periode sebelumnya. Jika salah saji yang material memang benar ada, maka akan menunjukkan suatu kesimpulan statemen keuangan periode kini terdapat salah saji yang material. Kertas kerja analisis terhadap dugaan keseluruhan salah saji disajikan dalam peraga 9.3 di halaman berikut.

Dalam perencanaan audit, secara khusus auditor telah menentukan berapa tingkat risiko audit yang dapat diterimanya. Apabila tingkat dugaan keseluruhan salah saji meningkat, risiko terhadap materialitas salah saji statemen keuangan juga akan meningkat. Apabila auditor menyimpulkan bahwa risiko audit masih pada tingkat yang dapat diterima, dia dapat memformulasikan pendapat dengan dukungan temuannya tersebut. Tetapi apabila auditor mempunyai keyakinan, dengan pertimbangan risiko audit yang ditetapkan menjadi tidak dapat diterima dia harus, (a) melakukan pengujian substantansi tambahan, dan (b) meyakinkan klien untuk membuat koreksi yang diperlukan untuk mengurangi risiko salah saji material pada tingkat yang dapat diterima.

2. Membuat penelaahan teknis terhadap statemen keuangan.

Beberapa Kantor Akuntan Publik mempunyai ceklis detail statemen keuangan, yang akan digunakan untuk penelaahan awal statemen keuangan yang telah diselesaikan. Ceklis yang sudah lengkap kemudian ditelaah oleh manajer dan partner yang ditugasi. Sebelum laporan audit disampaikan pada masyarakat melalui klien, harus juga dilakukan penelaah teknis statemen tersebut oleh partner yang tidak ikut terlibat dalam team audit.

Ceklis meliputi pula masalah-masalah yang berkaitan dengan format dan isi setiap dasar statemen keuangan beserta pengungkapannya. Beberapa KAP membuat diskripsi ceklis untuk perusahaan yang sudah go publik maupun yang belum. Ceklis lengkap dan temuan-

temuan dalam penelaahan tersebut kemudian dimasukkan dalam kertas kerja audit. Ceklis semacam ini biasanya diperiksa oleh akuntan senior guna mengecek apakah langkah-langkah yang ditetapkan sudah dijalankan atau belum.

Peraga 9.3 Kertas Kerja Analisis Dugaan Salah Saji

| W/p No. Rek | Diskripsi | Aktiva | | Utang | | Modal Saham | Pengha- silan slbm Pajak | Pajak Peng- hasilan |
|--------------------------|---|---------|---------|---------|---------|------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| D-1.1590 4590 2295 | Salah saji tak dicatat Akumulasi Depreiasi Depresiasi Utang Pajak Phsl | | 3.5000 | | (1.750) | (3.500) 1.750 | (3.500) | 1.750 |
| C-1.4200 1200 2295 | Salah saji yang Diproyeksi Kos Prd. Terjual Persediaan Utang Pjk Phsil | (8.000) | | 4.000 | | 8.000 (4.000) | 8.000 | (4.000) |
| | Keseluruhan dugaan salah saji | (8.000) | 3.5000 | 2.250 | D. | 2.250 | 4.500 | (2.250) |
| | Saldo akhir dari N. Saldo | 400.000 | 135.000 | 225.000 | 375.000 | 535.000 | 150.000 | 75.000 |
| | Dugaan salah saji diharapkan | 2% | 0,5% | 1% | 0% | 0,4% | 3% | 3% |

3. Memformulasikan pendapat dan menuliskan konsep laporan audit.

Dalam proses pelaksanaan audit, dilakukan berbagai macam pengujian oleh staff yang terlibat dalam penugasan tersebut. Pengujian tersebut dilakukan secara terbatas untuk berbagai jenis rekening beserta lingkupannya. Apabila pengujian tersebut telah diselesaikan, selanjutnya auditor melakukan peringkasan atas temuan-temuannya tersebut.

Dalam penuntasan pekerjaan audit, setiap temuan tersebut sangat penting untuk diringkas dan dievaluasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat terhadap statemen keuangan. Tanggungjawab akhir terhadap langkah ini, berada pada *partner in charge* yang menerima penugasan tersebut. Dalam beberapa kasus, manajer audit membuat perumusan awal agar hal tersebut dapat ditelaah oleh para partner dengan baik.

Sebelum mencapai keputusan akhir untuk merumuskan pendapat akuntan, sebaiknya diadakan pertemuan dengan klien. Dalam pertemuan ini, rancangan laporan audit disampaikan secara lisan kepada klien (d.h.i. manajemen). Auditor menyampaikan temuan-temuan penting yang harus menjadi perhatian klien mengenai hal-hal apa saja yang harus disesuaikan dalam penyajian laporan keuangan klien, demikian pula pengungkapan yang perlu ditambahkan. Dalam hal ini akan terjadi perbedaan pendapat diantara kedua pihak, namun

akuntan harus mengusahakan agar klien dapat menerima kenyataan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku. Dengan demikian auditor akan dengan senang hati menyampaikan pendapat akuntan yang memadai sesuai dengan keadaan dan fakta yang sesungguhnya dalam perusahaan klien.

Dalam pertemuan tersebut, manajemen pada gilirannya berada pada posisi untuk mempertahankan diri terhadap temuan-temuan auditor. Pada akhirnya dicapai kesepakatan umum terhadap perubahan-perubahan yang harus dilakukan dan auditor dapat membuat **unqualified pendapaton**. Apabila kesepakatan tidak dapat dicapai, auditor dapat menyampaikan jenis pendapat lainnya. Komunikasi terhadap pendapat auditor disampaikan melalui laporan audit.

4. Membuat penelaahan akhir terhadap kertas kerja audit.

Penelaahan ini dibuat dalam rangka penilaian pekerjaan yang telah diselesaikan, bukti yang ditemukan, dan kesimpulan yang dicapai oleh pihak yang menyiapkan kertas kerja audit. Penelaahan tambahan terhadap kertas kerja audit dibuat pada akhir pekerjaan lapangan oleh anggota team audit. Tingkatan penelaahan dalam penuntasan pekerjaan audit dapat dilihat dalam tabel berikut:

| | |
|-------------------|---|
| Penelaah | Bentuk Penelaahan |
| Manager | Penelaahan kertas kerja yang dipersiapkan oleh auditor senior dan penelaahan beberapa atau keseluruhan kertas kerja yang telah ditelaah oleh para senior. |
| Partner in charge | Penelaahan kertas kerja audit yang disiapkan oleh manager dan penelaahan beberapa kertas kerja yang terseleksi |

Penelaahan kertas kerja audit yang dilakukan oleh partner dirancang untuk memperoleh jaminan bahwa,

- * Kertas kerja yang dibuat oleh bawahan dilaksanakan dengan cermat dan seksama.
- * Judgments yang dilakukan oleh bawahan menunjukkan keadaan yang masuk akal dan memadai.
- * Penugasan audit telah dituntaskan sesuai dengan kondisi dan syarat-syarat khusus dalam surat perjanjian kerja (*engagement letter*).
- * Semua pertanyaan penting yang timbul dalam proses audit yang berkaitan dengan pengauditan, akuntansi, dan pelaporannya telah memperoleh jawaban yang memadai.
- * Kertas kerja audit dapat mendukung pendapat auditor.
- * Prosedur dan kebijaksanaan pengendalian mutu KAP telah sesuai dengan standar profesional yang berlaku bagi akuntan publik.

Ceklis mendetail yang meliputi masalah-masalah tersebut di atas, digunakan secara umum dalam melakukan penelaahan kertas kerja audit.

Beberapa KAP menghendaki diadakan pendapat kedua terhadap kertas kerja audit oleh partner yang tidak ikut berpartisipasi dalam audit. Pelaksanaan review oleh partner bebas tersebut dengan tujuan memperoleh derajat obyektivitas yang tinggi.

C. MELAKUKAN KOMUNIKASI DENGAN PIHAK KLIEN

Sebelum laporan audit diserahkan, auditor mengkomunikasikan kesimpulan audit kepada klien (komite audit dan manajemen). Ada dua hal yang perlu dikomunikasikan yaitu: (a) struktur pengendalian intern klien, dan (b) perilaku dalam pelaksanaan audit. Komunikasi dengan klien biasanya dalam bentuk surat kepada manajemen (*management letters*).

1. Komunikasi dengan manajemen mengenai struktur pengendalian intern klien.

Dalam rangka pengauditan, auditor menyadari bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan struktur pengendalian intern, mungkin menjadi kepentingan komite audit klien atau individu yang mempunyai otoritas dan tanggungjawab yang sama. SAS nomor 60, menghendaki auditor mengkomunikasikan berbagai kondisi yang harus dilaporkan seperti dinyatakan berikut:

Menunjukkan penyimpangan yang signifikan dalam perencanaan atau operasi struktur pengendalian intern, yang dapat berlawanan dengan kemampuan organisasi untuk mencatat, memproses, meringkas dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam statemen keuangan.

Kondisi yang pantas dilaporkan mungkin menyinggung elemen struktur pengendalian. Penunjukan terhadap kekurangan-kekurangan yang dilaporkan dipengaruhi oleh masalah ukuran perusahaan, kompleksitas operasi, struktur organisasi, dan karakteristik pemilikannya. Contoh-contoh kondisi yang dilaporkan disajikan dalam **Appendix 10 A**. Auditor harus menyadari bahwasannya kondisi yang dilaporkan meliputi pemahaman struktur pengendalian intern, pengujian pengendalian yang dilakukan, pengujian substantif yang dilakukan, atau hal-hal lain yang dilakukan dalam audit.

Dalam komunikasi dengan klien disarankan secara tertulis. Laporan biasanya didistribusikan secara terbatas kepada komite audit, manajemen, dan bagian organisasi lainnya. Tetapi, apabila laporan dimaksudkan untuk kepentingan pemerintah, maka harus ada referensi khusus dimuat dalam laporan tersebut. Hal-hal yang harus dilaporkan antara lain:

- * Menunjukkan tujuan audit adalah melaporkan mengenai statemen keuangan dan bukannya memberikan keyakinan terhadap struktur pengendalian intern.
- * Memasukkan batasan mengenai kondisi terlaporkan.
- * Memasukkan pembatasan dalam pendistribusian

Komunikasi harus dibuat dengan tepat waktu yang dilakukan selama proses audit atau setelah kesimpulan audit ditetapkan.

2. Komunikasi dengan manajemen mengenai perilaku dalam pelaksanaan audit.

Auditor diwajibkan untuk mengkomunikasikan (baik secara lisan maupun tertulis) perilaku dalam audit sebagai pertanggungjawaban untuk mengatur proses penyusunan laporan keuangan. Apabila komunikasi dilakukan secara tertulis harus pula dilibatkan para

pejabat perusahaan yang berwenang, komite audit, dan dewan direktornya. Hal-hal yang perlu untuk dikomunikasikan antara lain:

- a. Bahwa tanggungjawab auditor dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan Standar Profesional Akuntan Publik, yang meliputi jaminan bahwasannya statemen keuangan bebas dari kemungkinan salah saji yang material, penggunaan konsep material, dan
- b. Adanya kebijaksanaan akuntansi penting yang sejak mula dipilih oleh manajemen dan perubahan kebijaksanaannya, metode akuntansi yang digunakan untuk transaksi yang tidak biasa, dan berbagai pengaruh kebijaksanaan dalam bidang yang tidak mempunyai lembaga pengarah atau konsensus.
- c. Pertimbangan manajemen dan penaksiran-penaksiran akuntansi, termasuk didalamnya adalah basis pembuatan judgment dan proses pembuatan penaksiran akuntansi.
- d. Penyesuaian audit yang penting baik secara individual maupun secara keseluruhan mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam proses pelaporan keuangan perusahaan.
- e. Ketidak-cocokan dengan manajemen yang sangat penting dalam statemen keuangan ataupun laporan auditor, dan ketidak-cocokan berakibat pada penerapan prinsip akuntansi dan basis pertimbangan manajemen terhadap penaksiran akuntansi.
- f. Konsultasi dengan akuntan lain mengenai akuntansi dan pengauditan.
- g. Mendiskusikan permasalahan utama dengan manajemen mengingatkan apa yang telah terjadi yang antara lain meliputi prinsip-prinsip akuntansi dan standar pengauditan.
- h. Kesulitan-kesulitan untuk segera menyampaikan hasil audit, karena keterlambatan pihak manajemen yang tidak masuk akal dalam memberikan komentar, penyampaian informasi, ketidak maupun personel klien, kesalahan dafat yang diserahkan dan lain-lain.

Dapat ditambahkan auditor harus mengkomunikasikan kondisi laporan dalam perusahaan mengenai struktur pengendalian intern kepada komite audit.

3. Penyiapan surat kepada manajemen (*management letter*).

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai auditor, manajemen melakukan observasi terhadap operasi dan organisasi klien. Sebagai salah satu kesimpulan dalam audit, auditor banyak memberikan saran-saran untuk manajemen yang disebut **surat untuk manajemen**. Saran-saran ini disampaikan dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi perusahaan itu sendiri. Surat untuk manajemen, merupakan bagian integral jasa-jasa akuntan publik dan sekaligus menunjukkan komitmennya agar klien dapat meningkatkan usahanya serta kemampuannya di masa yang akan datang.

Semua masalah yang disampaikan kepada manajemen telah dicatat dalam kertas kerja audit. Auditor dalam rangka penyampaian surat untuk manajemen tidak boleh terlalu mengatur, yang kesemuanya harus berdasarkan fakta dan penilaian yang obyektif. Surat kepada manajemen berisi:

- a. Masalah struktur pengendalian intern yang tidak bisa dipertimbangkan untuk menjadi kondisi terlaporkan.
- b. Sumber-sumber manajemen, seperti kas, inventories, dan investasi.
- c. Masalah-masalah yang berkaitan dengan perpajakan.

Surat kepada manajemen harus dipersiapkan dengan hati-hati, cermat, terorganisasi, dan ditulis dengan nada yang konstruktif. Pengeluaran surat tersebut secepatnya, akan menciptakan impresi yang mendukung dan mungkin sangat menarik bagi kedua belah pihak dan akan mendapat tanggapan yang positif dari manajemen. Ringkasan dari tanggungjawab auditor disajikan dalam peraga 9.4 berikut ini.

Peraga 9.4 Bagan ringkasan tanggungjawab auditor dalam penyempurnaan audit

| Penyempurnaan Pekerjaan Lapangan | Penilaian Temuan-temuan Audit | Komunikasi dengan Klien |
|--|---|--|
| Membuat penelaahan thd kejadian subsequent | Membuat penaksiran materialitas dan risiko audit | Mengkomunikasikan masalah-masalah struktur pengendalian intern |
| Mempelajari notulen rapat pimpinan | Melakukan penelaahan teknis statemen keuangan | Mengkomunikasikan masalah yang berkaitan dengan perilaku audit |
| Memperoleh pembuktian mengenai perkara pengadilan, klaim, dan pembebanan | memformulasikan pendapat dan menyiapkan draft laporan audit | Menyiapkan surat untuk manajemen |
| Meminta surat representasi dari klien | Melakukan penelaahan akhir terhadap kertas kerja audit | |
| Melakukan prosedur analitis | | |

Sumber: Kell, hal. 702

D. TANGGUNGJAWAB TERHADAP POSTAUDIT

Tanggungjawab terhadap postaudit dimaksudkan untuk membuat pertimbangan berikut ini:

- * kejadian subsequent yang terjadi di antara tanggal laporan audit dan tanggal pengeluaran laporan audit tersebut.
 - * Penemuan terhadap fakta yang ada.
 - * Penemuan prosedur yang dihilangkan.
- Penjelasan terhadap langkah tersebut, diuraikan dalam subbab berikut ini.

1. Kejadian subsequent yang terjadi di antara tanggal laporan audit dan tanggal pengeluaran laporan audit tersebut.

Sebagaimana digambarkan dalam peraga 10.1 interval waktu beberapa minggu antara akhir pekerjaan lapangan dan pengeluaran laporan audit. Dalam periode itu auditor tidak perlu melakukan prosedur tambahan dan jua tidak diwajibkan melakukan wawancara untuk menemukan salah saji yang material. Tetapi bilamana muncul suatu peristiwa yang dapat menjadi perhatian auditor, dia harus mempertimbangkan pembuatan pengungkapan ataupun adjustment dalam statemen keuangan terhadap kejadian tersebut. Jika dalam kejadian tersebut dikehendaki agar dilakukan penyesuaian, dan manajemen sangat menghargai terhadap usulan auditor, maka dia dapat memberikan laporan audit baku. Bilamana pengungkapan baru dikehendaki oleh manajemen sendiri, auditor dapat memberikan laporan baku yang penanganannya disesuaikan dengan tanggal kejadian subsequent.

2. Penemuan terhadap fakta yang ada saat tanggal laporan.

Auditor tidak bertanggungjawab terhadap fakta-fakta post audit yang ditemukan pada saat tanggal laporan audit. Tetapi berdasarkan SAS 1, dinyatakan bahwa: (a) auditor harus memperhatikan adanya fakta-fakta demikian, dan (b) fakta-fakta mungkin akan mempengaruhi laporan yang dikeluarkan, auditor menghendaki seberapa jauh informasi tersebut dapat dipercaya. Apabila investigasi memberikan konfirmasi terhadap eksistensi fakta dan auditor mempercayai bahwasannya informasi adalah penting untuk diyakini menginginkan kepercayaan terhadap statemen keuangan, auditor harus mengambil langkah melindungi kepercayaan terhadap laporan audit.

3. Penemuan prosedur yang dihilangkan.

Setelah tanggal laporan audit, auditor mungkin menyimpulkan satu atau lebih prosedur auditing sesuai dengan keadaan dipandang perlu untuk dihilangkan dalam audit. Standar pengauditan tidak menghendaki auditor berperilaku melakukan penelaahan setiap bentuk pos audit terhadap pekerjaannya. Tetapi penemuan prosedur yang sengaja dihilangkan mengakibatkan post-engagement review harus dilaksanakan dalam rangka program inspeksi pengendalian kualitas, atau dalam rangka *peer review* dari pihak luar.

Dalam rangka penemuan prosedur yang dihilangkan, auditor memahami pentingnya kemampuannya untuk mendukung pendapat yang dikeluarkan dalam statemen keuangan. Penelaahan terhadap kertas kerja audit dan penilaian kembali semua ruang lingkup audit mungkin auditor dapat menyimpulkan bahwa dia dapat mendukung pendapat yang telah

dikemukakan. Sebagai alternatifnya, SAS 46 menunjukkan bahwa jika auditor memutuskan bahwa pendapat tidak dapat mendukung dan apabila dia percaya pada orang yang saat ini berhubungan dengan laporan tersebut, auditor harus segera menghilangkan prosedur atau alternatif prosedur yang akan memberi basis pendapat yang memuaskan.

Apabila basis yang memadai untuk pemberian pendapat benar-benar telah diperoleh dan disertai bukti-bukti yang mendukung untuk penyampaian pendapat, auditor tidak mempunyai tanggungjawab lebih lanjut. Tetapi bilamana prosedur yang dihilangkan benar-benar akan memberikan pengaruh yang material terhadap penyajian statemen keuangan klien, maka Dia harus memberikan catatan terhadap laporan audit yang dibuatnya.

E. KESIMPULAN

Berbagai prosedur telah dilaksanakan dalam proses audit. Namun, auditor juga tidak bisa meninggalkan tanggungjawabnya terhadap proses pelaporan yang menjadi tanggungjawabnya tersebut. Banyak faktor ataupun kondisi yang memerlukan perhatian auditor mengenai peristiwa-peristiwa yang dapat mempengaruhi pendapat yang dirumuskan mula-mula. Hal ini disebabkan, adanya berbagai kondisi yang tidak pasti selama proses audit dilakukan. Oleh karena itu, dalam memformulasikan Pendapat Akuntan, berbagai peristiwa tersebut harus dipertimbangkan masak-masak.

APPENDIX BAB 9

CONTOH BERBAGAI KONDISI YANG MUNGKIN HARUS DILAPORKAN

Berikut ini disampaikan beberapa contoh kondisi yang mungkin harus dilaporkan. Penyajian permasalahan berikut dikelompokkan dengan berbagai kategori kondisi dan contoh kondisinya. Berbagai permasalahan tersebut harus dikomunikasikan dengan manajemen dan komisi audit.

Design Struktur Pengendalian yang tidak sempurna, antara lain:

1. Keseluruhan design struktur pengendalian yang tidak memadai.
2. Konsistensi pemisahan kewajiban tidak memadai dengan tujuan pengendalian.
3. Tidak ditemukan adanya penelaahan dan persetujuan terhadap transaksi, penjumlahan dan posting rekening, dan keluaran sistem yang memadai.
4. Prosedur yang tidak memadai terhadap penjaminan dan penerapan prinsip-prinsip akuntansi.
5. Tidak ditemukan adanya teknik pengendalian lain yang memadai dalam membuat pertimbangan jenis dan tingkat aktivitas transaksi.
6. Ketentuan yang tidak memadai terhadap penjagaan keamanan aktiva perusahaan.
7. Bukti adanya kegagalan sistem untuk menghasilkan output yang sempurna dan cermat yang konsisten terhadap kebutuhan dan tujuan saat ini, dikarenakan oleh design yang cacat/rusak.

Kesalahan dalam Pengoperasian Struktur Pengendalian, yang antara lain:

1. Bukti adanya kesalahan dalam identifikasi untuk pengendalian dalam rangka melindungi dan mendeteksi salah saji terhadap informasi akuntansi.
2. Bukti bahwasannya sistem telah gagal untuk menghasilkan output yang dengan konsisten yang lengkap dan cermat dengan tujuan pengendalian perusahaan karena adanya salah penerapan prosedur pengendalian.
3. Bukti adanya kesalahan pengamanan assets terhadap kerugian, kerusakan, ataupun salah saji.
4. Bukti adanya unsur kesengajaan menghindari struktur pengendalian intern oleh pihak yang bertanggungjawab dengan merusak keseluruhan tujuan sistem.
5. Bukti adanya kesalahan penanganan dari bagian struktur pengendalian intern, seperti tekonsiliasi tidak dibuat tidak tepat waktu.
6. Bukti-bukti adanya kesalahan bertindak yang disengaja oleh pegawai ataupun manajemen.
7. Bukti adanya manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan-catatan akuntansi atau dokumen-dokumen pendukung.
8. Bukti adanya salah penerapan prinsip akuntansi yang disengaja.
9. Bukti adanya salah penyajian oleh klien untuk auditor.
10. Bukti bahwasannya kualifikasi dan latihan pegawai atau manajemen yang kurang agar dapat menyelesaikan fungsi-fungsi yang ditanganinya.

Lain-lain

1. Kesadaran terhadap pengendalian pada tingkat yang tidak memadai dan tidak diketemukan dalam suatu organisasi.
2. Kesalahan untuk menanggapi dan melakukan tindakan koreksi terhadap struktur pengendalian intern yang cacat dan telah diketahui pada masa-masa yang lalu.
3. Bukti yang sangat penting dan berpengaruh luas terhadap adanya transaksi oleh pihak-pihak berkepentingan yang tidak diungkapkan.
4. Bukti terhadap tujuan yang bias atau penyimpangan tujuan yang tidak pantas oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap kebijaksanaan akuntansi.

SURAT REPRESENTASI DARI KLIEN

tanggal laporan audit

[Kepada Kantor Akuntan Publik]

Sehubungan dengan audit yang telah saudara lakukan mengenai statemen keuangan PT ABC untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1993 yang meliputi (..sebutkan format laporannya ...) dalam rangka pernyataan pendapat mengenai kelayakan penyajian statemen keuangan secara keseluruhan (konsolidasi) yang terdiri dari neraca, hasil-hasil operasi, dan aliran kas perlu memberikan representasi kepada saudara. Kami menegaskan dengan segala pengetahuan dan keyakinan kami bahwasannya segala penyajian statemen keuangan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

1. Bahwasannya kami bertanggungjawab terhadap kewajaran keseluruhan statemen keuangan (neraca, statemen penghasilan, statemen aliran kas) serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum di Indonesia.
2. Bahwasannya kami telah menyampaikan keseluruhan,
 - a. Catatan keuangan data yang terkait dengannya.
 - b. Semua notulen rapat pemegang saham, direksi, komite direksi, ataupun ringkasan rapat operasi yang tidak dipersiapkan notulasinya.
3. Bahwasannya kami tidak melakukan,
 - a. Melanggar peraturan yang melibatkan manajemen atau para pegawai yang berperan penting dalam struktur pengendalian intern.
 - b. Melanggar peraturan yang melibatkan karyawan lain sehingga mempengaruhi secara material terhadap penyajian statemen keuangan.
4. Bahwasannya kami tidak berencana atau bermaksud melakukan penilaian atau pengklasifikasian aktiva dan utang yang berpengaruh secara material.

-
-
5. Hal-hal berikut ini telah disajikan secara layak serta telah diungkapkan dalam statemen keuangan,
 - a. Semua transaksi dengan pihak-pihak yang terkait mengenai utang atau piutang, pembelian, penjualan, pinjaman, transfer, perjanjian leasing, dan berbagai bentuk jaminan.
 - b. Modal saham yang dibeli dengan opsi atau perjanjian, atau modal saham yang dicadangkan untuk hak opsi, jaminan, pertukaran, atau berbagai persaratan lainnya.
 - c. Kesepakatan dengan pihak bank yang meliputi saldo kompensasi atau kesepakatan lain yang berkaitan dengan pembatasan-pembatasan terhadap saldo kas dan perjanjian kredit ataupun perjanjian yang sejenis.
 - d. Perjanjian untuk membeli kembali asset yang telah dijual.
 6. Hal-hal berikut tidak ada,
 - a. Peningkaran atau kemungkinan peningkaran terhadap undang-undang atau peraturan pemerintah yang berpengaruh secara material sehingga memerlukan pengungkapan atau penyesuaian dalam statemen keuangan.
 - b. Utang lain-lain yang berjumlah material atau adanya utang kontinjensi yang memerlukan pengungkapan.
 7. Tidak ada penegasan mengenai klaim atau assesements yang disarankan dari penasihat hukum kami yang memerlukan pengungkapan terhadap assersi dalam statemen keuangan.
 8. Tidak ada transaksi yang berjumlah material yang tidak dicatat dengan memadai sehingga statemen keuangan disajikan terlalu rendah.
 9. Semua kekayaan perusahaan dalam keadaan memuaskan, dan tidak ada yang digadaikan atau dijaminkan.
 10. Keputusan yang dibuat sehubungan dengan kerugian yang bersifat material untuk menjaga agar dapat memenuhi, atau ketidak mampuan untuk memenuhi semua komitmen penjualan.
 11. Keputusan yang dibuat untuk kerugian yang material untuk menjaga hasil-hasil komitmen pembelian terhadap kuantitas persediaan yang berbeda dengan persaratan normal atau selisih harga dari harga-harga yang berlaku di pasar.
 12. Kami telah memenuhi segala aspek yang ada dalam perjanjian kontrak yang akan berakibat secara material terhadap statemen keuangan bila tidak dipenuhi.
 13. Tidak ada kejadian-kejadian penting yang terjadi setelah tanggal neraca yang mempengaruhi statemen keuangan sehingga memerlukan pengungkapan ataupun penyesuaian.

Tanda tangan CEO

Tanda tangan Direktur Keuangan

SOAL BAB 9

Soal Kelompok A

Dalam kelompok soal berikut ini, Saudara diminta memberikan pendapat salah atau benar atas pernyataan berikut. Apabila saudara berpendapat salah berilah tanda S dan apabila benar berilah tanda B dimuka setiap pertanyaan.

- ... 1. Pekerjaan dan tanggungjawab auditor tidak hanya berhenti sampai dengan pengumpulan informasi di lapangan telah diselesaikan, tetapi juga meliputi kejadian-kejadian setelah tanggal neraca baik yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi informasi yang disajikan dalam statemen keuangan klien.
- ... 2. Statements Auditing Standard no 1, mewajibkan pula agar auditor bertanggungjawab terhadap kejadian-kejadian maupun transaksi yang bersifat spesifik yang akan berakibat secara material terhadap statemen keuangan, dan terjadi sebelum tanggal neraca tetapi sebelum statemen keuangan auditan dikeluarkan oleh auditor.
- ... 3. Periode kejadian-kejadian subsequent merupakan dimensi waktu yang diliput oleh tanggungjawab auditor sesuai dengan standar audit berterima umum, yang berarti kejadian-kejadian penting yang terjadi setelah tanggal penyelesaian pekerjaan lapangan sampai penyerahan laporan audit tidak diliput dalam tanggungjawab auditor.
- ... 4. Keuntungan kontinjensi merupakan klaim kepada pihak lain yang tidak selayaknya disajikan dalam laporan keuangan, mengingat standar akuntansi keuangan yang berlaku tidak menggunakan dasar konservatip.
- ... 5. Kerugian sebagai akibat adanya kontinjensi diperlakukan dengan cara: (1) diakui sebagai utang kontinjensi, (2) diungkapkan sebagai catatan terhadap statemen keuangan, atau (3) tidak diambil keputusan apapun.
- ... 6. Auditor harus menanyakan secara tertulis mengenai pendapat para ahli hukum klien untuk memperoleh informasi yang menguatkan (disebut *letter of audit inquiry*), jawaban surat tersebut beserta tanggapan dari penasehat hukum tidak perlu dikirimkan langsung kepada auditor.
- ... 7. Salah satu persaratan dalam memutuskan pendapat adalah penaksiran akhir terhadap materialitas maupun risiko audit, langkah awal dalam proses ini adalah menentukan seberapa banyak **total salah saji** yang ditemukan dalam keseluruhan pengujian rekening yang **tidak dikoreksi** oleh klien.
- ... 8. Apabila tingkat dugaan keseluruhan salah saji meningkat, risiko terhadap materialitas salah saji statemen keuangan juga akan meningkat, ini berarti risiko audit masih pada tingkat yang dapat diterima.
- ... 9. Auditor diwajibkan untuk mengkomunikasikan (baik secara lisan maupun tertulis) perilaku dalam audit sebagai pertanggungjawaban untuk mengatur proses penyusunan laporan keuangan yang melibatkan para pejabat perusahaan yang berwenang, komite audit, dan dewan direktornya.

- ... 10. Setelah tanggal laporan audit, auditor mungkin menyimpulkan satu atau lebih prosedur audit tidak sesuai dengan keadaan dan dipandang perlu untuk dihilangkan, standar pengauditan tidak menghendaki auditor berperilaku melakukan penelaahan setiap bentuk pos audit terhadap pekerjaannya.

Soal Kelompok B

Soal-soal berikut adalah pilihan ganda. Pilihlah alternatif jawaban yang Saudara anggap paling benar atau paling tepat. Jika alternatif yang paling benar/tepat tidak ditemukan, maka pilihlah alternatif jawaban yang benar adalah E.

1. Pembuatan surat representasi dari klien sebagai bukti yang memperkuat dimaksudkan untuk, kecuali:
 - A. persetujuan terhadap representasi lisan yang diberikan kepada auditor.
 - B. mengurangi kemungkinan timbulnya salah-tafsir terhadap representasi manajemen.
 - C. mendokumentasikan terhadap representasi yang telah diberikan.
 - D. sebagai alat *position defence*.
2. Dalam rangka untuk memperoleh keyakinan mengenai peristiwa subsequent, auditor harus memperoleh bukti-bukti tentang, kecuali:
 - A. Eksistensi terhadap kondisi, situasi, atau seperangkat keadaan yang memberi indikasi ketidakpastian terhadap kemungkinan terjadinya kerugian perusahaan yang timbul dari *littigation, claims, and assessments (LCA)*.
 - B. Periode yang menjadi kegiatan legal yang diliput oleh kasus tersebut.
 - C. Menentukan seberapa besar kemungkinan kerugian yang diditita klien.
 - D. Jumlah atau kisarannya mengenai potensi kerugian yang timbul.
3. Di akhir proses audit, auditor harus menjalankan prosedur yang spesifik guna memperoleh tambahan bukti audit dalam rangka mentuntaskan pekerjaan lapangan. Prosedur yang harus dijalankan adalah sebagai berikut, kecuali:
 - A. Melakukan penelaahan terhadap kejadian-kejadian subsequent.
 - B. Membaca catatan berbagai rapat pimpinan.
 - C. Meminta surat *audit inquiry* dari penasehat hukum klien.
 - D. Melakukan prosedur penelaahan analitis.
4. Tipe ke dua terhadap kejadian subsequent adalah kejadian-kejadian yang memberi pembuktian bahwasannya pada saat tanggal neraca belum terjadi, tetapi baru muncul setelah tanggal neraca. Kasus berikut ini menunjukkan adanya kasus tersebut, kecuali:
 - A. Penempatan estimasi utang yang dicatat saat akhir periode dengan jumlah yang berbeda terhadap litigation dan garansi produk.
 - B. Penerbitan obligasi jangka panjang, saham preferensi, atau saham biasa.
 - C. Pembelian perusahaan yang dilakukan setelah tanggal neraca.
 - D. Adanya kerugian luar biasa yang ditimbulkan oleh kebakaran ataupun bencana alam.

-
-
5. Bersamaan dengan penyelesaian pekerjaan auditor, klien diminta untuk memberikan surat representasi dari klien yang berisi:
- A. Penegasan bahwasannya klien tidak bertanggungjawab terhadap penyimpangan-penyimpangan dari peraturan dan ketentuan yang dilakukan oleh para pegawai bawahan.
 - B. Penegaskan dengan segala pengetahuan dan keyakinannya bahwasanya segala penyajian dan pengungkapan statemen keuangan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
 - C. Bahwasannya klien bertanggungjawab terhadap hasil-hasil yang dinyatakan dalam laporan audit terbatas untuk periode yang diaudit.
 - D. Pengakuan yang dinyatakan secara tertulis mengenai seluk beluk kebijaksanaan akuntansi yang ditetapkan oleh manajemen beserta pertimbangannya.
6. Di akhir proses audit akuntan publik harus pula melakukan prosedur analitikal ini untuk penelaahan akhir yang bersifat menyeluruh terhadap statemen keuangan yang diauditnya. Langkah ini harus dilakukan oleh:
- A. asisten auditor.
 - B. auditor in charge bersama dengan manajer keuangan klien.
 - C. partner akuntan publik atau manajer audit.
 - D. siapa saja boleh.
7. Dalam rangka pelaksanaan tugas, auditor melakukan observasi terhadap operasi dan organisasi klien. Sebagai salah satu kesimpulan dalam audit, auditor memberikan saran-saran yang disampaikan dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi perusahaan itu sendiri. Saran-saran untuk manajemen tersebut adalah:
- A. **surat untuk manajemen.**
 - B. *client representation letters.*
 - C. *known misstatement.*
 - D. *inquiry report.*
8. Dalam beberapa kasus, klien tidak senang atas koreksi yang diminta oleh auditor. Langkah selanjutnya adalah menentukan seberapa materialitas item salah saji yang tidak bersedia untuk dikoreksi tersebut berpengaruh terhadap aktiva lancar dan utang lancar, dengan prosedur berikut, kecuali:
- A. mengidentifikasi salah saji yang tidak dikoreksi yang diperoleh dalam detail pengujian transaksi-transaksi dan saldo-saldo.
 - B. menaksir proyeksi salah saji yang tidak dikoreksi dengan menggunakan teknik audit sampling.
 - C. menaksir besaran salah saji dalam terhadap laporan audit.
 - D. membuat perkiraan salah saji yang terdeteksi dengan prosedur analitikal dan dikuantifikasi dengan prosedur audit lainnya.
9. Manakah di antara prosedur berikut ini yang akan digunakan dalam langkah awal penelaahan kejadian subsequent?
- A. Penelaahan cutoff statemen bank terhadap suatu periode setelah tanggal neraca.

-
-
- B. Wawancara dengan penasehat hukum klien mengenai sengkera pengadilan.
 - C. Penyelidikan berbagai kondisi yang dilaporkan sebelum berkomunikasi dengan klien.
 - D. Analisis terhadap transaksi dengan pihak-pihak yang berhubungan untuk menemukan kemungkinan adanya unsur tindak penyalahgunaan.
10. Auditor harus memberi perhatian terhadap berbagai tahapan penyempurnaan pekerjaan audit yang meliputi pengujian setelah tanggal neraca. Periode subsequent merupakan perluasan tanggal,
- A. laporan auditor.
 - B. Penelaahan akhir terhadap kertas kerja audit.
 - C. Statemen keungan yang dikeluarkan pada masarakat.
 - D. Peyerahan laporan audit kepada klien.
11. Klien menghendaki pembelian 25 % saham yang beredar setelah tanggal neraca dan sebelum pekerjaan lapangan disempurnakan. Auditor harus,
- A. Memberi saran kepada manajemen untuk melakukan adjustment neracanya guna mencerinkan pembelian tersebut.
 - B. Mengeluarkan proforma statemen keuangan untuk menunjukkan pengaruh akuisisi sebagaimana jika terjadi pada akhir periode.
 - C. Menyarankan manajemen agar menunjukkan pengungkapan dalam catatan terhadap statemen keuangan.
 - D. Pengungkapan akuisisidalam paragraph pendapat dalam laporan audit.
12. Auditor harus meminta klien mengirim letter of inquiry kepada penasehat hukum yang memberikan nasehat mengenai masalah pengadilan. klaim, dan penaksiran. Alasan utama untuk memenuhi permintaan ini agar memberikan,
- A. Memberikan informasi mengenai kasus tersebut sampaia saat itu.
 - B. Memberikan bukti-bukti yang mendukung.
 - C. Memperkirakan jumlah rupiah kemungkinan menderita kerugian.
 - D. Pendapat dari seorang ahli mengenai kemungkinan kerugian, pendugaannya, dan penjejakannya.
13. Auditor mengeluarkan laporan audit dengan menggunakan tanggal ganda terhadap kejadian subsequent setelah pekerjaan lapangan disempurnakan tetapi sebelum laporan audit dikeluarkan. Auditor bertanggungjawab terhadap kejadian selamama periode subsequent untuk menyempurnakan pekerjaan lapangan sebagai,
- A. Terbatas hanya kejadian yang spesifik yang dinyatakan.
 - B. Terbatas hanya kejadian yang benar terjadi sebelum tanggal pengeluaran laporan audit.
 - C. Memperluas kejadian-kejadian subsequent yang diukur dari saat tanggal pengeluaran laporan audit.
 - D. Memperluas semua kejadian-kejadian yang benar terjadi sejak pekerjaan lapngan diseselesaikan.

-
-
14. Enam bulan sejak laporan audit terhadap statemen keuangan yang dibuat klien, auditor menemukan bahwa petugas yang menangani pekerjaan audit ternyata salah dalam menangani konfirmasi kepada beberapa pelanggan yang mempunyai saldo piutang yang sangat material. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh auditor adalah:
- A. Meminta ijin kepada klien untuk menangani kembali piutang dagang yang dikonfirmasi tersebut.
 - B. Melakukan prosedur alternatif untuk memperoleh basis yang memuaskan terhadap *unqualified opinion*.
 - C. Menaksir seberapa pentingnya prosedur yang dihilangkan untuk melihat kemampuan auditor dalam mendukung pendapat yang telah dikeluarkan tersebut.
 - D. Melakukan wawancara dengan person yang sekarang ini bertugas dan bertanggungjawab terhadap laporan audit dengan *unqualified opinion*.
15. Dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis dengan klien, serta meningkatkan apresiasi klien terhadap kemanfaatan audit, maka auditor membuat surat untuk klien yang berisi hal-hal berikut, kecuali:
- A. Masalah struktur pengendalian intern yang tidak bisa dipertimbangkan untuk menjadi kondisi dilaporkan.
 - B. Sumber-daya manajemen, seperti kas, inventories, dan investasi.
 - C. Masalah-masalah yang berkaitan dengan perpajakan.
 - D. Kebijaksanaan akuntansi klien yang tidak disetujui oleh auditor.

Bab 10

Pelaporan Terhadap Statemen Keuangan Auditan

PEMBAHASAN DALAM BAB INI MELIPUTI HAL-HAL BERIKUT,

1. Menjelaskan butir-butir laporan baku dalam suatu penugasan audit.
2. Cara penyiapan laporan audit.
3. Penjelasan mengenai hal-hal yang mengakibatkan auditor harus menyimpang dari laporan baku.
4. Menjelaskan pengaruh setiap kejadian terhadap bentuk serta isi laporan audit.
5. Identifikasi dan koreksi terhadap laporan audit dibawah standar.
6. Mendiskusikan pemilihan pertimbangan-pertimbangan pelaporan khusus lainnya.

Laporan auditor pada umumnya disampaikan kepada individu atau kelompok yang memberi tugas pekerjaan audit. Proses penyiapan laporan audit disebut pelaporan yang meliputi beberapa tahapan antara lain: pengumpulan bukti-bukti audit, analisis data, penyimpulan, penulisan rancangan naskah laporan, diskusi naskah laporan dengan klien, dan penulisan laporan akhir. Dalam diskusi dengan klien dibahas mengenai statemen keuangan audit, yaitu statemen keuangan klien yang telah diaudit oleh auditor. Statemen keuangan audit berbeda dengan statemen keuangan yang dihasilkan oleh klien, mengingat statemen keuangan klien mungkin berbeda dengan hasil audit.

Dalam hal perusahaan perseroan (*corporation*) biasanya disampaikan pada dewan direksi (atau *stockholders*) dan untuk persekutuan disampaikan kepada partner atau langsung si pemilik. Agar dapat menyesuaikan diri dengan tanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya, auditor harus, (1) benar-benar memahami empat standar pelaporan audit, (2) mengetahui secara tepat susunan kata (*wording*) dalam laporan audit baku (laporan bentuk baku), beserta kondisi yang harus disampaikannya, (3) mengetahui bermacam-macam bentuk penyimpangan dari standar pelaporan dan keadaan yang melatarbelakanginya, dan (4) mengetahui dengan benar terhadap berbagai laporan khusus yang dibutuhkan. Keempat topik masalah tersebut akan dibahas dalam bab ini secara rinci.

A. STANDAR PELAPORAN

Tahap akhir proses pengauditan adalah menyajikan laporan audit kepada klien. Laporan audit harus disajikan sesuai dengan standar pelaporan yang memuat empat ketentuan-ketentuan sebagai berikut (PSA nomor 29):

1. Laporan harus menyatakan bahwa *statemen keuangan* [sic: statemen keuangan] telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Bahwa *statemen keuangan* telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi tersebut dan diterapkan secara konsisten dengan periode sebelumnya.
3. Bahwa pengungkapan yang disajikan dalam *statemen keuangan* [sic: statemen keuangan] klien telah menggambarkan posisi *statemen keuangan* yang cukup masuk akal.
4. Bahwa laporan akuntan harus mengungkapkan pendapat akuntan mengenai *statemen keuangan* yang diperiksanya, atau sebaliknya bila akuntan tidak memberikan pendapat atas *statemen keuangan* tersebut. Dalam segala hal apabila nama akuntan dikaitkan dengan sesuatu *statemen keuangan*, maka harus dijelaskan posisi akuntan dalam hubungan dengan *statemen keuangan* tersebut, serta sampai sejauh mana akuntan telah menguji *statemen keuangan* dan sampai sejauh mana derajat tanggungjawabnya.

Tujuan diterapkannya standar tersebut untuk menghindarkan kesalahan interpretasi terhadap tingkat tanggungjawab akuntan dalam hubungannya pencantuman nama akuntan publik dalam *statemen keuangan* tersebut. Keempat butir standar pelaporan tersebut menyangkut bentuk, ruanglingkup dan bahasa yang digunakan dalam laporan akuntan. Latarbelakang perumusan standar tersebut dijelaskan dalam pembahasan berikut ini.

1. Standar pelaporan pertama

Standar pelaporan yang pertama menyatakan, bahwa:

“Laporan harus menyatakan bahwa statemen keuangan [sic: statemen keuangan] telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.”

Standar tersebut menghendaki agar auditor secara eksplisit menyatakan, bahwa statemen keuangan klien disajikan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Standar ini menghendaki agar pendapat auditor menyampaikan pernyataan secara obyektif tentang fakta yang terkait dalam statemen keuangan klien. Maksud standar ini, tidak hanya prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), prinsip mengenai kos, tetapi meliputi pula metode yang diterapkan klien. Sebagai contoh penerapan metode FIFO, LIFO, dan lain-lainnya.

Konsekuensi dari laporan audit yang memberikan pernyataan disajikan secara layak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam laporan audit, adalah auditor harus memperoleh pembuktian mengenai hal-hal berikut ini:

- * Prinsip-prinsip akuntansi yang dipilih dan digunakan telah berlaku umum.
- * Prinsip-prinsip akuntansi diterapkan untuk suatu kondisi yang memadai.
- * Statemen keuangan beserta catatan yang terkait, merupakan sesuatu yang bersifat informatif yang dapat dimanfaatkan, dimengerti, dan diinterpretasikan.
- * Semua informasi yang disajikan dalam statemen keuangan diklasifikasi dan diringkas berdasarkan pertimbangan yang masuk akal.
- * Semua statemen mencerminkan kejadian dan transaksi yang disajikan dalam bentuk, neraca, hasil-hasil operasi, dan aliran kas dengan masuk akal dan batas-batas kepraktisan.

Butir ke tiga dan ke empat berhubungan secara langsung dengan pengungkapan informatif yang memadai yang dalam hal ini mempunyai kaitan erat dengan standar pelaporan yang ke tiga.

Dalam membahas prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum mengandung pengertian adanya petunjuk yang luas cakupannya dan juga hal-hal yang bersifat khusus mengenai konvensi khusus, aturan-aturan, dan berbagai prosedur yang melekat dengannya. Dalam kenyataannya tidak ada buku yang mengkompilasikan semua prinsip-prinsip dan standar tersebut. Sumber-sumber yang digunakan untuk memenuhi pembentukan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah:

- * Prinsip akuntansi yang telah diumumkan oleh lembaga yang mempunyai otoritas dalam penyusunan standar akuntansi, yaitu Komite Prinsip Akuntansi dan Komite Kode Etik IAI.
- * *Pronouncement* (keputusan yang diumumkan) yang dibuat oleh badan yang terdiri dari para ahli akuntansi yang meliputi, *due process procedure*, usulan terhadap prinsip akuntansi yang didistribusikan secara luas untuk dikomentari masyarakat, untuk ... pembentukan prinsip akuntansi atau penjelasan praktis yang ada bahwa hal tersebut telah berlaku.

-
-
- * Berbagai praktik dan keputusan IAI yang secara luas diakui telah berlaku umum, karena telah dapat mewakili praktik yang berlaku dalam suatu industri pada umumnya, atau pengetahuan yang diaplikasikan untuk keadaan khusus mengenai hal-hal yang diumumkan telah berlaku umum.
 - * Berbagai literatur akuntansi lainnya.

Sumber-sumber tersebut di atas disusun kembali oleh badan yang mempunyai otoritas dalam penyusunan standar yaitu Komite Prinsip Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia. Hasil-hasil yang dikerjakan oleh badan tersebut diumumkan secara resmi untuk dijadikan standar profesional. Standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, antara lain:

1. Standar Akuntansi Keuangan
2. Interpretasi terhadap pernyataan Standar Akuntansi
3. GAS, beserta interpretasinya.

Dengan adanya prinsip-prinsip akuntansi yang secara resmi diakui, maka penyimpangan dari standar yang ditetapkan dapat dikategorikan sebagai salahsaji.

2. Standar Pelaporan kedua

Standar pelaporan yang ke dua menyatakan, bahwa:

“statemen keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi tersebut dan diterapkan secara konsisten dengan periode sebelumnya.”

Berdasarkan standar pelaporan kedua tersebut, laporan berisi bahasa yang bersifat khusus, sehingga pembaca dapat menyimpulkan bahwa praktik akuntansi diterapkan dengan konsisten. Tujuan standar ini adalah, (1) memberi jaminan daya banding statemen keuangan di antara periode akuntansi tertentu tidak berpengaruh secara material sebagai akibat perubahan-perubahan prinsip akuntansi, dan (2) menjelaskan bahwa apabila ada perubahan yang mempengaruhi secara material akan dinyatakan dalam statemen keuangan.

Dengan dua tujuan yang dipertimbangkan tersebut, standar mengenai konsistensi tidak dapat diterapkan untuk proses audit pada perusahaan yang beroperasi dalam tahun pertama. Dalam praktik, perubahan-perubahan prinsip akuntansi dapat mempengaruhi terhadap konsistensi suatu statemen keuangan yang disajikan klien. Berbagai bentuk perubahan kebijaksanaan akuntansi yang mempengaruhi konsistensi, antara lain:

- * Perubahan dalam prinsip itu sendiri, seperti perubahan dari *sales basis* menjadi *production basis* dalam pencatatan pendapatan.
- * Perubahan dalam metode penerapan suatu prinsip, misalnya perubahan dari metode depresiasi garis lurus menjadi metode jumlah angka tahun.
- * Perubahan dalam pelaporan entitas, misalnya penyajian statemen konsolidasi yang menempatkan statemen perusahaan secara individual atau perubahan khusus untuk suatu perusahaan anak yang akan mempengaruhi konsolidasi group.
- * Koreksi terhadap kesalahan suatu prinsip misalnya, perubahan dari suatu prinsip yang tidak berlaku menjadi satu prinsip-prinsip yang berlaku umum.

-
- * Perubahan dalam prinsip yang tidak dapat dipisahkan dari perubahan dalam penaksiran, misalnya perubahan dari kapitalisasi dan amortisasi kos menjadi pencatatan sebagai biaya bilamana keuntungan di masa datang sekarang menjadi ragu-ragu.

Standar konsistensi tidak diperluas terhadap pengaruh dalam aspek komparabilitas perubahan yang tidak mempengaruhi konsistensi, yang antara lain:

- * Perubahan dalam kondisi bisnis, yang meliputi akuisisi (atau penjualannya) perusahaan anak.
- * pengenalan adanya *produk line* baru.
- * bencana alam (kebakaran, banjir, dan lain-lain).
- * Perubahan akuntansi yang disebabkan oleh estimasi akuntansi.
- * Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi prinsip-prinsip akuntansi.
- * Klasifikasi dan reklasifikasi.
- * Berbagai variasi format statemen aliran kas.
- * Transaksi atau kejadian yang secara mutlak berbeda.

3. Standar Pelaporan ketiga

Standar pelaporan yang ke tiga menyatakan, bahwa:

“Pengungkapan yang disajikan dalam *statemen keuangan* klien telah menggambarkan posisi *statemen keuangan* yang cukup masuk akal.”

Susunan kata yang secara eksplisit dalam laporan audit tidak dinyatakan sebaliknya, pembaca laporan dapat menyimpulkan bahwa standar pelaporan yang berkaitan dengan pengungkapan telah dilaksanakan. Maksud kalimat yang menyatakan: **“disajikan secara layak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum”** menyangkut luasnya pengungkapan yang memadai. Apabila statemen keuangan dan catatan yang menyertainya gagal mengungkapkan informasi seperti yang dikehendaki oleh prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, maka statemen tersebut tidak menyajikan informasi keuangan dengan layak.

Pengungkapan informatif meliputi sesuatu yang material dan berhubungan dengan suatu bentuk, *arrangement*, dan isi statemen keuangan dan catatan yang menyertainya. Badan-badan yang mempunyai otoritas selalu memasukkan terhadap persyaratan pengungkapan dalam setiap keputusan yang diumumkannya. Luasnya pengungkapan yang bersifat informatif terhadap kejadian subsequent dan bagian informasi yang dilaporkan.

4. Standar Pelaporan ke Empat

Standar pelaporan yang ke empat menyatakan, bahwa:

“Bahwa laporan audit harus mengungkapkan pendapat akuntan mengenai statemen keuangan yang diperiksa, atau sebaliknya bila akuntan tidak memberikan pendapat atas *statemen keuangan* tersebut. Bilamana pendapat secara keseluruhan tidak dapat dinyatakan, harus dijelaskan alasannya. Dalam segala hal apabila nama akuntan

dikaitkan dengan sesuatu *statemen keuangan*, maka harus dijelaskan posisi akuntan dalam hubungan dengan *statemen keuangan* tersebut, serta sampai sejauh mana akuntan telah menguji laporan akuntan dan sampai sejauh mana derajat tanggungjawabnya.”

Standar ke empat ini bertujuan untuk melindungi kemungkinan salah penafsiran terhadap derajat tanggungjawab akuntan publik dalam kaitan pencantuman nama dirinya dalam statemen keuangan klien. Standar ini mempengaruhi secara langsung terhadap bentuk, isi, dan bahasa yang digunakan dalam laporan audit. Beberapa pertimbangan dalam penerapan standar ini antara lain,

1. Pernyataan pendapat akuntan

Standar ini menghendaki auditor menyatakan pendapat atau menjelaskan bahwa pendapat tersebut tidak dapat dinyatakan. Dalam beberapa kasus alasan pendapat yang dinyatakannya tersebut dijelaskan dalam laporan audit. Pendapat akuntan ada empat macam, yaitu:

1. *Unqualified opinion* (disebut wajar tanpa pengecualian), yang menyatakan bahwa statemen keuangan klien telah menyajikan dengan wajar (*fair*) terhadap hasil operasi perusahaan dan perubahan dalam posisi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten.
2. *Qualified opinion* (disebut wajar dengan pengecualian), yang menyatakan pengecualian suatu subyek yang dinyatakan sebagai pengecualian, maka statemen keuangan disajikan secara layak.
3. *Adverse opinion* (pendapat tidak wajar) yang menyatakan kebalikan dari pernyataan wajar, ini berarti statemen keuangan tidak menyajikan secara wajar.
4. *Disclaimer of opinion* (menolak berpendapat) yang menyatakan bahwa auditor tidak dapat mengemukakan pendapatnya atas statemen keuangan klien tersebut.

Didalam menyatakan pendapatnya terhadap statemen keuangan klien, akuntan harus menggunakan standar akuntansi keuangan sebagai acuan. Tanpa menggunakan acuan tersebut auditor tidak akan dapat memberikan pendapat secara uniform terhadap statemen keuangan. Klasifikasi pendapat akuntan disajikan dalam gambar 10.1.

Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified opinion*), artinya: (a) bebas dari keragu-raguan dan ketidakjujuran, dan (b) lengkap informasinya. Kondisi yang harus dipenuhi untuk mendukung opini tersebut antara lain:

- a. Statemen keuangan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Perubahan penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dari periode ke periode dijelaskan dengan cukup memadai.
- c. Informasi yang mendukungnya telah cukup digambarkan dan dijelaskan didalam statemen keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Peraga 10.1. Skema klasifikasi pendapat akuntan



Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified opinion*), artinya pendapat yang memberikan pernyataan pengecualian kecuali suatu kondisi atau permasalahan untuk atau tergantung pada kondisi tertentu. Pendapat ini diberikan apabila,

- Luas pemeriksaan akuntan sangat dibatasi oleh klien.
- Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur pemeriksaan yang penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor.
- Statemen keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam perusahaan klien tidak diterapkan secara konsisten
- Terdapat ketidakpastian yang luar biasa yang mempunyai pengaruh terhadap statemen keuangan dan tidak dapat diperkirakan dengan baik pada tanggal pembuatan statemen keuangan
- Auditor tidak bebas dalam hubungannya dengan klien.

Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*), menyatakan bahwa statemen keuangan yang disajikan klien tidak disajikan secara wajar. Ide dasar dalam proses audit, auditor harus menyajikan mengenai kewajaran statemen keuangan yang diauditnya. Hal ini sehubungan tujuan utama pengujian dan penilaian statemen keuangan untuk menentukan seberapa jauh kewajaran suatu statemen keuangan yang disajikan oleh klien. Namun demikian, mengingat

auditor tidak dapat menemukan penyajian statemen keuangan klien tidak dapat memenuhi standar kewajaran yang ditetapkan oleh profesi, maka auditor harus memberikan pernyataan sebaliknya (yang dalam bahasa inggris disebut *adverse*). Kebalikan dari pendapat wajar dalam bahasa Indonesia disebut **tidak wajar**.

Menolak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*), merupakan suatu pernyataan bahwa akuntan publik tidak memberikan pendapat mengenai kewajaran statemen keuangan secara keseluruhan. Kondisi ataupun alasan utama yang menyebabkan auditor merumuskan pendapatnya tersebut, antara lain:

- a. pembatasan baik oleh klien maupun keadaan,
- b. adanya ketidak pastian yang luar biasa, dan
- c. Auditor tidak bebas dalam hubungannya dengan klien.

Kondisi yang melatar-belakangi antara *adverse opinion* dan *disclaimer of opinion* adalah sama, hanya saja dalam hal akuntan mengetahui sampai sejauh mana ketidakwajaran statemen keuangan yang disajikan oleh klien, maka tingkat risiko audit yang dikandung dalam pendapat juga akan berbeda pula.

2. Statemen keuangan

Statemen keuangan merujuk pada standar ke dua ini, yang diterapkan untuk statemen secara individual seperti neraca, demikian halnya untuk satu set statemen-statemen dasar yang lengkap (neraca, statemen penghasilan, statemen pendapatan yang ditahan, dan statemen aliran kas). Dalam beberapa kasus statemen dasar mungkin digabungkan dengan statemen perubahan dalam rekening *stockholder equity*. Statemen keuangan mungkin diperuntukkan bagi satu entitas, statemen konsolidasi, dan statemen untuk beberapa periode akuntansi yang disajikan dengan membuat perbandingan antara periode yang sekarang dengan periode sebelumnya. Oleh karena itu pendapat auditor dinyatakan untuk statemen keuangan yang dinyatakan dalam paragraf awal dalam laporan audit.

Dengan merujuk pada standar pelaporan ke empat untuk kata "*taken as a whole*" (menerima secara keseluruhan) mengandung makna yang sangat penting bagi auditor. Hal ini mempunyai makna yang sangat penting bagi auditor dalam beberapa aspek. Pertama, bahwasannya pendapat auditor berkaitan dengan statemen individual, keseluruhan, kondisi sekarang ini. Sebagai contoh, posisi keuangan untuk neraca dan hasil operasi untuk statemen penghasilan. Auditor dalam melaksanakan pekerjaan auditnya, tidak bermaksud memberikan pendapat secara individual terhadap berbagai statemen tersebut. Kedua, bahwa auditor tidak dilarang untuk memberikan pendapat yang berbeda terhadap statemen klien, termasuk dalam satu statemen keuangan yang lengkap. Sebagai contoh auditor memberikan pernyataan pendapat tanpa pengecualian terhadap neraca dan memberikan jenis pendapat yang lain untuk penghasilan, laba ditahan, dan statemen aliran kas.

3. Karakteristik audit

Berkaitan dengan pernyataan (atau penolakan) pendapat yang berkaitan dengan statemen keuangan, auditor menghendaki untuk memasukkan dalam statemen keuangan petunjuk yang jelas mengenai karakter audit yang dilakukannya. Hal ini dijelaskan dalam paragraf

ruang lingkup laporan auditor dengan menggunakan kalimat, “yang sesuai dengan standar pengauditan yang berlaku umum”. Dengan kalimat demikian dapat diinterpretasi bahwa audit dilaksanakan dengan standar profesional yang telah dibentuk.

Paragraf ruang lingkup juga menunjukkan bahwasannya audit meliputi (1) pengujian bukti berdasarkan prosedur pengujian yang dilakukan, dan (2) menerima prinsip akuntansi yang digunakan, penaksiran penting oleh manajemen, dan semua penyajian statemen keuangan secara keseluruhan.

4. Hubungan dengan statemen keuangan

Kantor akuntan publik mungkin berhubungan dengan statemen keuangan yang diaudit atau tidak diaudit. Segala hal yang berkaitan dengan pencantuman nama kantor akuntan publik dilakukan atas dasar pengikatan dengan klien, yang pelaksanaan tugas tersebut didasarkan standar profesional akuntan publik yang ditetapkan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan laporan audit, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan dukungan terhadap laporan audit didasarkan pada pengikatan antara dua pihak dengan pertimbangan profesional.

5. Derajat tanggungjawab akuntan publik

Persaratan akhir laporan audit baku adalah auditor harus menunjukkan derajat tanggungjawab mengenai pendapat yang telah diungkapkannya. Hal ini dinyatakan dengan kata-kata “kami telah mengaudit”, “audit kami”, dan “menurut pendapat kami”. Penggunaan kata-kata tersebut tanpa maksud membuat pengecualian bahwa auditor menganggap telah sepenuhnya atau bertanggungjawab dengan selengkapnyanya untuk pekerjaan yang dilakukan dan pendapat yang dinyatakannya. Apabila lebih dari seorang auditor yang terlibat dalam audit dan masing-masing auditor beranggapan hanya untuk masing-masing pekerjaan dan pendapatnya, laporan audit harus menunjukkan pembagian tanggungjawab yang ada, yang akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya.

B. LAPORAN AUDIT BAKU

Laporan audit baku menggunakan bahasa standar seperti disajikan dalam peraga 10.3 yang disajikan di halaman berikut. Laporan audit baku tersebut digunakan untuk statemen keuangan auditan yang hanya meliputi satu periode akuntansi saja. Apabila statemen keuangan klien menyangkut 2 periode akuntansi yang bersifat komparatif, maka bahasa yang digunakan dalam laporan audit baku juga akan berbeda pula (periksa contoh yang disajikan dalam PSA nomor 29). Semua laporan audit baku tersebut dinyatakan untuk pendapat akuntan tanpa pengecualian. Apabila jenis pendapat yang akan disampaikan berbeda, maka bahasa yang digunakan dalam laporan audit juga akan berbeda pula.

Laporan auditor pada umumnya disampaikan kepada individu atau kelompok yang memberi tugas pekerjaan audit. Dalam hal perusahaan perseroan (*corporation*) biasanya disampaikan pada dewan direksi (atau *stockholders*) dan untuk persekutuan disampaikan kepada partner atau langsung si pemilik. Laporan audit baku harus diberi tanggal pada saat pekerjaan audit diselesaikan. Disamping itu, laporan audit harus ditandatangani oleh salah

satu dari partner mewakili Kantor Akuntan Publik. Laporan audit baku bentuk baku menurut PSA nomor 29 adalah sebagai berikut.

Peraga 10.2. Laporan Audit bentuk baku

[Pihak yang dituju auditor]

Kami telah mengaudit perusahaan xyz tanggal 31 Desember 19x3 serta laporan rugi laba, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Statemen keuangan adalah tanggungjawab manajemen perusahaan. Tanggungjawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas statemen keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa statemen keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam statemen keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat manajemen, serta penilaian terhadap penyajian statemen keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, *statemen keuangan* yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan xyz tanggal 31 Desember 19x3, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

[Tanda tangan, nama, dan nomor register negara auditor]

[Tanggal laporan audit]

C. PENYIMPANGAN DARI LAPORAN AUDIT BAKU

Penyimpangan dari standar pelaporan dilakukan bilamana auditor membuat kesimpulan tentang, (1) diperlukannya bahasa penjelasan yang harus ditambahkan pada laporan untuk menyatakan pendapat tanpa pengecualian, atau (2) terdapat jenis pendapat yang berbeda harus dinyatakan dalam statemen keuangan.

1. Bahasa penjelasan terhadap pendapat tanpa pengecualian

Berbagai keadaan yang terjadi harus ditambahkan dalam paragraf penjelasan tetapi auditor tetap memberikan pernyataan pendapat tanpa pengecualian terhadap statemen keuangan klien. Tujuan penjelasan tambahan tersebut untuk menyampaikan fakta atau beberapa fakta yang ditemukan dalam proses audit atau terhadap statemen keuangan yang diaudit. Berikut ini disajikan daftar beberapa masalah yang harus dijelaskan dalam laporan audit guna mendukung pendapat tanpa pengecualian:

- a. Tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diumumkan yang disebabkan keadaan yang tidak umum.
- b. Prinsip-prinsip akuntansi tidak konsisten yang beralasan untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- c. Ketidakpastian yang beralasan menyebabkan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum.
- d. Keragu-raguan yang bermakna terhadap status kehidupan suatu entitas yang berkelanjutan dan oleh karenanya beralasan menjadi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- e. Memberikan penekanan pada sesuatu masalah oleh auditor.
- f. Sebagian pendapat akuntan didasarkan atas laporan auditor lain.

2. Jenis pendapat lainnya

Auditor mungkin berpendapat, bahwa pendapat tanpa pengecualian tidak dapat diberikan. Dengan demikian auditor harus memberikan jenis pendapat lain yang antara lain sebagai berikut:

- a. **Pendapat dengan pengecualian**, yang menyatakan bahwa pengecualian terhadap sesuatu permasalahan yang harus dinyatakan sebagai pengecualian, statemen keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum.
- b. **Pendapat tidak wajar** yang menyatakan bahwa statemen keuangan tidak menyajikan secara layak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- c. **Menolak berpendapat** yang menyatakan bahwa auditor tidak dapat mengemukakan pendapatnya atas statemen keuangan yang disajikan klien.

Semua pendapat yang dinyatakan oleh auditor tersebut harus dijelaskan dalam paragraf penjelasan mengenai alasan-alasan kenapa pendapat tersebut diberikan.

Perumusan pendapat auditor didasarkan atas pertimbangan profesional (*judgment*) auditor, dengan menggunakan pertimbangan materialitas suatu permasalahan. Didalam merumuskan pendapatnya, auditor harus dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apakah dengan melalui pengujian-pengujian yang dilakukan statemen keuangan memang telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku ?
- b. Apakah statemen keuangan disiapkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, demikian halnya dengan pengungkapannya apakah telah dipandang cukup ?

-
-
- c. Apakah prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum telah diterapkan dengan konsisten?
 - d. Apakah statemen keuangan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak menentu (*uncertainty*) dan bersifat luar biasa ?

Apabila pertanyaan tersebut memperoleh jawaban yang negatif untuk satu atau dua pertanyaan dan secara keseluruhan penyajian statemen keuangan tidak dipengaruhi, maka pendapat pengecualian yang dapat diberikan terhadap statemen keuangan klien. Apabila secara material pertanyaan tersebut memperoleh jawaban positif maka akuntan pemeriksa dapat, memberikan *unqualified opinion*.

Apabila diperoleh jawaban negatif dan auditor dapat mempertanggungjawabkan pendapatnya, akuntan dapat memberikan *adverse opinion* yang secara keseluruhan mempengaruhi statemen keuangan. Apabila keempat pertanyaan menunjukkan jawaban yang negatif maka secara keseluruhan akuntan tidak akan dapat memberikan pendapat terhadap statemen keuangan klien.

D. BERBAGAI KEADAAN YANG MEMPENGARUHI PENYIMPANGAN DARI LAPORAN AUDIT BAKU

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai berbagai keadaan yang menyebabkan auditor menyimpang dari laporan audit baku. Daftar berikut ini, menunjukkan berbagai keadaan ataupun fakta yang mengharuskan auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, dan menolak berpendapat, antara lain:

1. Ruang lingkup pemeriksaan dibatasi.
2. Tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
3. Prinsip-prinsip akuntansi tidak konsisten yang beralasan untuk tidak menyesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
4. Pengungkapan yang tidak memadai.
5. Ketidakpastian yang beralasan menyebabkan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
6. Keragu-raguan yang sangat penting terhadap status berkelanjutan suatu entitas yang beralasan menjadi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
7. Adanya suatu keadaan yang menyebabkan pendapat akuntan sebagian didasarkan pada laporan auditor lain.

Pengaruh dari berbagai keadaan di atas akan dijelaskan dalam uraian berikut ini.

1. Ruang lingkup pemeriksaan dibatasi.

Dalam pelaksanaan audit dilaporkan, auditor berusaha untuk memperoleh pembuktian yang seluas-luasnya mengenai berbagai keadaan ataupun situasi yang menunjang penyajian statemen keuangan klien. Agar memperoleh keyakinan terhadap pendapat yang dinyatakannya, berbagai prosedur harus dilakukan oleh para asisten auditor. Apabila, dalam melaksanakan tugasnya tersebut para pelaksana tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan program audit yang ditetapkan, maka auditor berkesimpulan terdapat pembatasan ruang lingkup audit.

Klien mungkin melakukan pembatasan ruang lingkup audit yang antara lain: (a) pemberian persetujuan melakukan konfirmasi piutang dagang, (b) penandatanganan *client representation letter*, dan (c) persetujuan mewawancarai dengan pihak diluar lembaga klien. Pembatasan ruang lingkup audit tersebut tidak memungkinkan auditor melakukan pengujian yang dipandang perlu.

Akibat dari pembatasan tersebut terhadap laporan audit, adalah pemberian pendapat dengan pengecualian atau menolak memberikan pendapat. Apabila auditor memberikan pendapat dengan pengecualian, maka auditor harus melakukan:

- * Penjelasan terhadap pembatasan yang dikemukakan dalam paragraf ruang lingkup.
- * Memberikan penjelasan yang sebenarnya mengenai pembatasan tersebut dalam paragraf penjelasan.
- * Memberikan pendapat dengan pengecualian di dalam paragraf pendapat dengan merujuk pada paragraf penjelasan.

Apabila kesimpulan dalam audit adalah menolak memberikan pendapat, maka auditor harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

Paragraf pengenalan (introductory) dimodifikasi.

- * Paragraf ruang lingkup dihilangkan
- * Paragraf penjelasan dimasukkan dalam paragraf pengenalan
- * Paragraf ketiga dan penyimpulan memberikan pernyataan mengenai penolakan memberikan pendapat.

Dalam menuliskan susunan kata dalam paragraf pendapat, tidak dimulai dengan kata-kata "Menurut pendapat kami", tetapi "Kami telah mengaudit.....". Alasan penggunaan kata-kata tersebut adalah opini tidak akan dinyatakan.

2. Tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Apabila auditor memberikan kesimpulan bahwasannya terdapat kondisi yang tidak biasa dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diumumkan maka hal ini harus menjadi perhatian mengingat penyajian statemen keuangan dapat menjadi salah saji. Oleh karena itu auditor harus menggunakan standar pelaporan dengan diberi kalimat penjelasan. Isi laporan audit dengan pendapat tanpa pengecualian, adalah:

- a. paragraf baku pengenalan dan ruang lingkup audit.
- b. paragraf penjelasan yang mendahului paragraf pendapat menjelaskan keadaan dan kenyataan bahwa penerapan prinsip-prinsip alternatif dapat dibenarkan.
- c. Pendapat tanpa pengecualian dalam paragraf pendapat.

Tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum akan mempengaruhi secara material terhadap statemen keuangan yang akan menghasilkan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar. Dalam hal ini, auditor harus mempertimbangkan beberapa fakta berikut: (1) besaran jumlah rupiah yang dipengaruhi, (2) pentingnya daftar tersebut bagi klien, (3) seberapa besar akibat yang dapat ditimbulkan oleh salah saji, (4) pengaruh salah saji suatu statemen secara keseluruhan.

Apabila auditor memberikan pendapat dengan pengecualian, maka auditor harus memberi pernyataan mengenai:

- a. Pengungkapan dalam paragraf penjelasan mendahului paragraf pendapat terhadap keseluruhan alasan substantif pernyataan tersebut.
- b. Apabila dimungkinkan pengungkapan dalam paragraf penjelasan secara langsung pengaruh terpenting mengenai hal-hal yang dikecualikan dalam neraca, statemen penghasilan, serta statemen aliran kas. Apabila hal-hal tersebut tidak mungkin diungkapkan, maka laporan audit tetap harus dinyatakan.
- c. Menyatakan pendapat dengan pengecualian dalam paragraf pendapat dengan merujuk pada paragraf penjelasan.

Apabila auditor berkesimpulan memberikan pendapat tidak wajar, maka Dia akan menyatakan:

- a. Apabila dimungkinkan pengungkapan dalam paragraf penjelasan alasan substantif mengenai penolakan pendapat dan masalah terpenting mengenai hal-hal yang menyebabkan dikeluarkannya pendapat tidak wajar tersebut.
- b. Paragraf pendapat harus menyatakan, karena adanya hal-hal yang sangat berpengaruh tersebut sebagaimana dijelaskan dalam paragraf penjelasan, statemen keuangan tidak disajikan dengan wajar.

Perlu diingat, jika keadaan yang secara langsung menjadi penyebab pendapat tidak wajar selain mengenai pembatasan ruang lingkup dan ketidaksesuaian dengan Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, maka keadaan tersebut harus dijelaskan secara terpisah dalam paragraf penjelasan.

3. Prinsip-prinsip akuntansi tidak konsisten.

Pengaruh perubahan prinsip-prinsip akuntansi terhadap laporan audit, sangat tergantung pada seberapa perubahan tersebut telah diperhitungkan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut akan tetap dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, apabila:

- a. Prinsip-prinsip yang baru diterapkan merupakan prinsip-prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- b. Perubahan prinsip akuntansi telah diungkapkan dalam statemen keuangan dan juga telah diperhitungkan seberapa akibat perubahan tersebut dalam statemen keuangan.
- c. Manajemen benar-benar mempunyai alasan kenapa prinsip-prinsip baru tersebut diterapkan.

Perubahan-perubahan dalam prinsip akuntansi tetap tidak menutup auditor memberi pernyataan pendapat tanpa pengecualian. Hal tersebut harus dinyatakan alasannya, dan dinyatakan tersendiri dalam paragraf penjelasan mendahului paragraf pendapat akuntan.

Selain hal tersebut, auditor mungkin pula memberi pendapat dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar. Alasan auditor memberikan penilaian tersebut harus dijelaskan dalam paragraf penjelasan.

4. Pengungkapan yang tidak memadai

Jika statemen keuangan dan catatan-catatan yang melengkapinya, ternyata gagal mengungkapkan informasi seperti yang dikehendaki oleh prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, maka statemen-statemen tersebut tidak menyajikan secara wajar. Dalam kasus demikian, auditor harus menyatakan pendapat dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar, karena alasan tidak sesuai dengan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Jika perusahaan mengeluarkan statemen keuangan yang berisi penyajian posisi keuangan dan hasil-hasil operasi, tetapi menghilangkan statemen aliran kas yang terkait, maka auditor akan menyimpulkan bahwa hal ini menghndaki pendapat dengan pengecualian.

Jika mungkin, informasi penting harus dibuat untuk satu atau lebih paragraf penjelasan dalam laporan audit, dengan pengecualian kalau pengurangan dari laporan diakui oleh standar profesional auditor yang berlaku. Pengurangan yang dapat diterima; apabila auditor tidak menghendaki adanya (a) statemen aliran kas yang hal ini dihilangkan oleh klien, dan penghilangan sebagian informasi. Dalam dua kasus tersebut, auditor harus mengidentifikasi penghilangan data dalam paragraf penjelasan, dan menyatakan pendapat dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar terhadap statemen keuangan tersebut.

5. Ketidakpastian yang beralasan

Pengertian ketidak pastian (uncertainty), digunakan untuk menjelaskan keadaan yang menyebabkan daftar statemen keuangan tidak dapat memberikan penalaran terhadap penaksiran yang digunakan dalam statemen yang telah dikeluarkan. Ketidak pastian ini dalam artian yang luas, dan tidak terbatas sebagaimana terlihat dalam utang kontinjensi. Unsur ketidakpastian menyangkut hasil-hasil yang tidak dapat diketahui/dipastikan seperti adanya tuntutan pengadilan, dan lain-lain.

6. Keragu-raguan yang bermakna mengenai keadaan masa depan suatu entitas

Dalam proses audit, pada umumnya suatu perusahaan dianggap berjalan terus-menerus sehingga dianggap adanya kontinuitas operasi. Dalam hal ini auditor bertanggungjawab untuk melakukan evaluasi apakah suatu entitas berkemampuan untuk berjalan terus-menerus dalam periode yang masuk akal, tidak hanya berkaitan dengan statemen keuangan yang diaudit. Dalam hal ini sebenarnya tidak perlu merencanakan prosedur audit yang secara khusus untuk memenuhi maksud trsebut. Biasanya, prosedur pengauditan yang ada dapat menghasilkan suatu kesimpulan mengenai hal tersebut. Sebagai contoh, kondisi atau kejadian tersebut dapat diketahui dengan: (a) penelaahan terhadap kepatuhan pada perjanjian pinjaman dengan pihak lain, (b) membaca notulen rapat dewan direksi, dan (c) wawancara dengan penasehat hukum mengenai perkara pengadilan, klaim, dan pembebanan-pembebanan. Informasi mengenai hal tersebut dapat diketahui dengan melihat:

- a. Kecenderungan (trends) yang negatip terhadap kerugian operasi yang berulang-ulang, modal kerja yang tidak tercukupi, aliran kas dalam operasi yang negatip, dan ratio keuangan kunci yang terbalik.

-
-
- b. Adanya indikasi kemungkinan kesulitan keuangan, seperti kegagalan memenuhi perjanjian pinjaman, restrukturisasi piutang, dan tidak adanya kepatuhan dengan persyaratan modal usaha.
 - c. Masalah-masalah internal, seperti pekerjaan yang disetop, ketergantungan yang sangat penting untuk keberhasilan suatu proyek, dan komitmen jangka panjang yang tidak ekonomis.
 - d. Masalah-masalah eksternal, seperti kehilangan atau kerugian dari bencana alam, dan lain-lain.

Dalam hal ini auditor menghendaki pertimbangan perencanaan manajemen yang berkaitan dengan kesepakatan yang mempengaruhi kebalikan dari kelanjutan kondisi dan kejadian-kejadian tersebut. Manajemen membuat perencanaan untuk (1) dispose terhadap assets, (2) meminjam uang dan struktur pinjaman, (3) mengurangi atau memperlambat pengeluaran, atau (4) menaikkan porsi kepemilikan.

7. Pendapat akuntan sebagian didasarkan pada laporan auditor lain.

Apabila klien mempunyai beberapa cabang ataupun anak perusahaan pengauditan dapat memerlukan partisipasi kantor akuntan lain. Hal ini berarti ada suatu kondisi yang beralasan untuk menyusun laporan audit dengan mendasarkan laporan auditor lain. Apabila pengauditan melibatkan lebih dari satu kantor akuntan publik, maka salah satunya bertindak sebagai *principals* (auditor utama). Biasanya, kantor akuntan publik yang bertugas untuk mengaudit kantor pusat atau perusahaan induk bertindak selaku auditor utama.

Dengan kondisi tersebut di atas, auditor utama harus memutuskan dapatkah menerima tanggungjawab auditor lain sehubungan dengan penyajian statemen keuangan kliennya tersebut.

Keputusan tidak perlu membuat referensi. Akuntan pemeriksa (principal) tidak perlu membuat referensi sepanjang (1) auditor yakin terhadap independensi maupun reputasi kantor akuntan lain dalam profesinya, (2) scope pemeriksaan maupun pengujian yang dilakukannya tidak memperoleh pembatasan dari klien-nya tersebut. Apabila terdapat kondisi yang sebaliknya terhadap dua kondisi tersebut, maka akuntan wajib membuat referensi. Kondisi yang memenuhi persyaratan untuk tidak membuat referensi adalah:

1. Auditor lain tersebut mempunyai hubungan kerja atau sebagai akuntan korespondensi yang diyakini mutu pekerjaannya.
2. Pekerjaan auditor lain tersebut dalam pengarahannya dan pengendalian auditor utama.
3. Auditor utama melakukan penelaahan terhadap program audit dan kertas kerja yang dibuat oleh auditor lain tersebut.

Disamping hal tersebut, dapat pula diputuskan untuk tidak membuat referensi apabila porsi statemen keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan lain proporsinya tidak material dibandingkan dengan keseluruhan entitas yang diaudit oleh auditor utama. Dengan menerima tanggungjawab auditor lainnya, maka nama kantor akuntan publik lain tidak perlu dinyatakan dalam laporan auditnya.

Keputusan membuat referensi. Apabila terdapat kondisi yang sebaliknya dari situasi yang digambarkan dalam pembahasan di atas, maka auditor dapat memutuskan untuk membuat referensi. Dalam hal ini harus dijelaskan porsi statemen keuangan yang diuji oleh auditor lain tersebut, mengenai seberapa material untuk dapat diterima dengan sepenuhnya.

Dengan keputusan ini, auditor harus melakukan wawancara dengan auditor lain tersebut, mengenai reputasi pekerjaan kantor akuntan publik lain tersebut dan meminta surat referensi terhadap independensi dirinya terhadap klien. Ini berarti profesionalitas auditor lain menjadi jaminan terhadap kerjasama sesama akuntan publik. Dalam hal, auditor lain adalah akuntan publik di luar negeri, surat representasi harus menjelaskan mengenai standar audit dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Bahasa penjelasan untuk pendapat tanpa pengecualian. Apabila auditor memutuskan untuk membuat referensi terhadap pekerjaan auditor lain, maka dalam laporan audit harus dijelaskan bagian yang menjadi tanggungjawab masing-masing auditor. Pengaruh dalam laporan audit terhadap pendapat tanpa pengecualian adalah sebagai berikut:

1. Dalam *paragraf* pendahuluan, luasnya bagian statemen keuangan yang diuji oleh kantor akuntan lain harus diungkapkan dengan jelas.
2. Dalam *paragraf* ruang lingkup, laporan auditor lain harus dimasukkan. Bagi auditor utama hal ini merupakan sumber dan sebagai dasar yang masuk akal dalam merumuskan pendapat secara keseluruhan.
3. Dalam *paragraf* pendapat, perlu dibuat referensi oleh kantor akuntan lain tersebut.

Auditor dapat pula memutuskan memberikan jenis pendapat lainnya, tergantung keadaan yang melingkupi laporan audit.

8. Ringkasan keadaan yang mempengaruhi laporan auditor

Berbagai keadaan yang dapat mempengaruhi laporan audit telah diuraikan dalam beberapa *paragraf* di atas. Secara garis besar ringkasan dari berbagai pengaruh beserta akibatnya digambarkan dalam *peraga* 10.3 berikut ini.

Peraga 10.3 Modifikasi dari laporan audit baku

| faktor penyebab | kemungkinan modifikasi |
|---|---|
| Prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten. | |
| Berpengaruh secara material terhadap statemen keuangan. | Pendapat dengan kualifikasi |
| Diperkirakan akan terjadi kesalahan yang material di masa yang akan datang. | Tanpa pengecualian, dengan anggapan terdapat pengungkapan yang dipandang cukup. |

Statemen keuangan disajikan
tidak sesuai dengan GAAP

Ketidak sesuaian dgn GAAP

Qualified atau adverse opinion

Disclosur tidak cukup

Qualified atau adverse opinion

departure from a promulgated
accounting principle

Separate explanatory paragraf

Pengujian tidak dapat menggu-
nakan GAAS (NPA)

Klien membatasi ruang lingkup
pemeriksaan.

Qualified opinion or disclaimer
(umumnya disclaiermer).

Adanya keadaan yang membatasi
ruang lingkup pemeriksaan.

Qualified opinion or disclaimer.

Ketidakpastian yang tidak
biasa.

Qualified opinion (atau, dalam ru-
yang lingkup terbatas, disclaimer)

E. JENIS-JENIS LAPORAN KHUSUS YANG DIPERTIMBANGKAN

Bagian ini membahas tanggungjawab pelaporan yang berhubungan dengan empat situasi tambahan yang antara lain: (1) pelaporan untuk Akuntan Publik yang tidak independen, (2) keadaan yang berkaitan dengan statemen keuangan komparasi, (3) informasi yang berkaitan dengan statemen keuangan audit, dan (4) Statemen keuangan yang disiapkan untuk digunakan di negara lain. Keempat jenis laporan khusus dibahas secara rinci dalam uraian berikut.

1. Pelaporan untuk Akuntan Publik yang Tidak Independen

Suatu kantor akuntan publik mungkin melakukan pengauditan terhadap statemen keuangan yang dirinya tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Sebagai contoh, Akuntan Publik mempunyai hubungan kepentingan keuangan kepada kliennya, selaku direktur, pemegang saham, ataupun kreditor. Apabila secara nyata hubungan tersebut menunjukkan tingkat kemerdekaan menjadi diragukan, maka standar pengauditan yang berlaku umum tidak dapat diterapkan pada dirinya.

Akuntan Publik menyadari bahwa dirinya menyimpang secara material dari standar audit yang berlaku umum, akan: (1) menegaskan dalam revisi terhadap statemen keuangan, (2) menjelaskan penyimpangan dalam penolakan, atau (3) menolak dihubungkan dengan statemen keuangan.

2. Keadaan yang berkaitan dengan statemen keuangan komparasi

Klien mungkin menyajikan statemen keuangan komparatif, sehingga statemen keuangan periode yang diaudit akan dibandingkan dengan statemen keuangan periode sebelumnya. Apabila auditor harus membandingkan dengan periode sebelumnya, maka harus dilakukan penyesuaian dengan keadaan tersebut, yang antara lain: (1) memberikan pendapat yang berbeda, (2) memperbaharui pendapat auditor sebelumnya, dan (3) merubah auditor yang ditugasi.

Memberikan pendapat yang berbeda. Auditor mungkin menyatakan pendapat tanpa pengecualian terhadap satu statemen dan dapat memberi pendapat jenis lain untuk statemen periode yang lain. Misalnya, dalam statemen komparasi, pendapat lain diberikan untuk periode terdahulu, sedangkan pendapat tanpa pengecualian untuk periode yang sekarang (terakhir). Dalam paragraf ruang lingkup harus dimulai dengan kata "Kecuali terhadap penjelasan dalam paragraf ini" Paragraf berikutnya berisi pendapat tidak ajar terhadap hasil operasi dan alirannya tahun sebelumnya. Paragraf terakhir berisi pendapat tanpa pengecualian yang diidentifikasi terhadap statemen keuangan masing-masing tahun.

Memperbaharui pendapat. Auditor yang terakhir mungkin akan memperoleh pembuktian bahwasannya pendapat atas statemen keuangan tahun sebelumnya seharusnya berbeda dengan pendapat mula-mula yang diberikan oleh akuntan terdahulu. Kejadian ini terjadi dalam hal keadaan berikut:

- Penyelesaian kembali ketidakpastian setelah tanggal neraca yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- Ditemukan adanya unsur ketidakpastian yang sebetulnya terjadi pada periode yang lalu, tetapi tidak dapat diketahu secara pasti pada saat itu. Sehingga pendapat auditor saat itu menjadi tidak tepat.
- Menyatakan kembali bahwa statemen periode sebelumnya dibawa agar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Keputusan untuk memperbaharui pendapat statemen keuangan tahun sebelumnya, harus dijelaskan dalam paragraf penjelasan.

Merubah auditor yang ditugasi. Menambah persyaratan pelaporan, harus cocok dengan perubahan auditor untuk periode yang diliput oleh statemen komparasi. Jika laporan audit terdahulu tidak disajikan, dan bukan merupakan kasus yang umum, maka hal ini menyebabkan auditor pengganti merubah laporan baku untuk menjelaskan keadaannya. Mengingat berbagai situasi dan keadaan yang ada pada kantor akuntan publik yang mengaudit, maka informasi penjelasan harus ditambahkan dalam paragraf pengantar atau dalam paragraf tersendiri. Hal-hal berikut ini harus dijelaskan oleh auditor pengganti:

- Bahwasannya statemen keuangan tahun sebelumnya di audit oleh kantor akuntan publik lain.
- Tanggal laporan audit terdahulu.
- Jenis laporan audit yang dikeluarkan.
- Jika laporan audit berbeda dengan laporan baku, penjelasan substantif harus disampaikan mengenai hal tersebut.

Tidak diperlukan ada perubahan yang perlu ditambahkan dalam paragraf ruang lingkup dan pendapat dalam laporan.

3. Informasi yang berkaitan dengan statemen keuangan auditan

Informasi yang berkaitan dengan statemen keuangan mencakup informasi tambahan yang ditetapkan oleh FASB dan GASB, dan informasi tambahan yang dihasilkan oleh manajemen. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh auditor, yaitu kebutuhan adanya *suplementaray information*, dan *voluntary informastion provided by management*. Kedua jenis informasi tersebut dapat dihasilkan bersamaan dengan proses audit, yang pada dasarnya merupakan fungsi pelayanan akuntan publik. Segala informasi yang diketahui oleh auditor sangat diperlukan guna memperbaiki dan mengembangkan perusahaan.

4. Statemen keuangan yang disiapkan untuk digunakan di negara lain

Laporan auditor untuk statemen keuangan yang dipersiapkan untuk disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku bagi negara lain sangat tergantung pada maksud penggunaan statemen keuangan itu sendiri. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- * Jika statemen keuangan hanya digunakan di luar negeri, maka laporan audit harus (a) disesuaikan dengan style laporan audit yang dimodifikasi sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di negara yang dituju, atau (b) sesuai dengan standar pelaporan di negara yang dituju.
- * Jika statemen keuangan juga digunakan di Indonesia dan di luar negeri sekaligus, maka statemen keuangan untuk kepentingan luar negeri harus diberi pendapat dengan pengecualian, atau tidak wajar yang kesemuanya itu sangat tergantung sejauh mana penyajian untuk kepentingan luar negeri dapat diterima sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Dalam membuat modifikasi ini perlu diperhatikan,

- * paragraf pengenalan, statemen keuangan harus menyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum di (sebutkan nama negaranya).
- * paragraf ruang lingkup, menunjukkan bahwa pengauditan disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dan juga standar audit yang berlaku di negara yang dituju.
- * paragraf pendapat, memberikan pernyataan kesesuaian dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di negara yang dituju.

SOAL BAB 10

Soal-soal kelompok A

Dalam kelompok soal berikut ini, Saudara diminta memberikan pendapat salah atau benar atas pernyataan berikut. Apabila berpendapat salah, berilah tanda S, dan apabila betul berilah tanda B dimuka setiap pertanyaan.

- ... 1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified opinion*), artinya: (a) bebas dari keragu-raguan dan ketidakjujuran, dan (b) lengkap informasinya, salah satu kondisi yang harus dipenuhi untuk mendukung opini tersebut adalah statemen keuangan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- ... 2. Berkaitan dengan pernyataan (atau penolakan) pendapat yang berkaitan dengan statemen keuangan, auditor menghendaki untuk memasukkan dalam statemen keuangan petunjuk yang jelas mengenai karakter audit yang dilakukannya, hal ini dijelaskan dalam paragraf ruanglingkup laporan auditor dengan menggunakan kalimat, “yang sesuai dengan standar pengauditan yang berlaku umum di Indonesia”.
- ... 3. Dalam rangka general audit, Auditor memberikan pendapat dengan pengecualian yang disebabkan oleh adanya pembatasan terhadap ruang lingkup audit, situasi semacam ini harus dijelaskan dalam paragraf penjelasan mendahului paragraf pendapat dan hanya berisi tentang paragraf luas pemeriksaan dalam laporan audit
- ... 4. Standar pelaporan yang pertama menghendaki bahwa “laporan harus menyatakan statemen keuangan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum”, yang oleh karenanya tidak perlu dinyatakan secara eksplisit dalam laporan audit baku.
- ... 5. Auditor yang terakhir mungkin akan memperoleh pembuktian bahwasannya pendapat atas statemen keuangan tahun sebelumnya seharusnya berbeda dengan pendapat mula-mula yang diberikan oleh akuntan terdahulu, kejadian ini terjadi dalam hal keadaan penyelesaian masalah tanggal neraca yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- ... 6. Auditor mungkin menyatakan pendapat tanpa pengecualian terhadap satu statemen dan tidak dapat memberi pendapat jenis lain untuk statemen periode yang lain.
- ... 7. Apabila terdapat kondisi yang sebaliknya dari situasi yang digambarkan dalam paragraf penjelasan, maka auditor dapat memutuskan untuk membuat referensi dan harus pula dijelaskan porsi statemen keuangan yang diuji oleh auditor lain tersebut, mengenai seberapa material untuk dapat diterima dengan sepenuhnya.
- ... 8. Kantor akuntan publik yang bertugas untuk mengaudit kantor pusat atau perusahaan induk bertindak selaku auditor utama, dengan kondisi tersebut di atas, auditor utama harus memutuskan dapatkah menerima tanggungjawab auditor lain sehubungan dengan penyajian statemen keuangan kliennya tersebut.
- ... 9. Jika statemen keuangan hanya digunakan di luar negeri, maka laporan audit harus disesuaikan dengan style laporan audit yang dimodifikasi sesuai dengan prinsip-

prinsip akuntansi yang berlaku umum di negara yang dituju, atau sesuai dengan standar pelaporan di negara yang dituju.

- ... 10. Jika statemen keuangan juga digunakan di Indonesia dan di luar negeri sekaligus, maka statemen keuangan untuk kepentingan luar negeri harus diberi pendapat dengan pengecualian, atau tidak wajar yang kesemuanya itu sangat tergantung sejauh mana penyajian untuk kepentingan luar negeri dapat diterima sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Soal Kelompok B

Soal pilihan ganda berikut ini mengandung empat alternatif jawaban. Saudara diminta untuk menentukan alternatif jawaban yang paling tepat untuk setiap pertanyaan. Jika tidak ada alternatif jawaban yang saudara anggap paling tepat, pilihlah jawaban E.

1. Dari pernyataan-pernyataan berikut ini, manakah yang memenuhi persyaratan pemberian pendapat auditor terhadap konsistensi penyajian statemen keuangan,
 - A. Koreksi kesalahan statemen keuangan tahun lalu yang disebabkan kesalahan perhitungan dalam kapitalisasi bunga.
 - B. Perubahan dari metode kos ke metode ekuiti dalam akuntansi investasi dalam modal saham.
 - C. Perubahan penaksiran dalam penyisihan biaya jaminan.
 - D. Perubahan metode depresiasi yang tidak mempengaruhi statemen keuangan periode ini, tetapi akan mempengaruhi periode akuntansi yang akan datang.
2. Standar pelaporan yang pertama menghendaki bahwa "laporan harus menyatakan statemen keuangan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum". Hal ini merupakan penaksiran yang menghendaki, bahwa,
 - A. statemen oleh auditor mengenai fakta.
 - B. pendapat yang dikemukakan oleh auditor.
 - C. pernyataan tidak langsung mengenai pengukuran kewajaran penyajian.
 - D. merupakan pengukuran tujuan kepatuhan.
3. Klien melakukan pembatasan dengan melarang observasi penghitungan fisik persediaan yang meliputi rekening sebesar 35 % dari total aktiva. Prosedur alternatif tidak dapat dilakukan oleh auditor, meskipun demikian auditor tetap memperoleh pembuktian mengenai pos lainnya yang disajikan dalam statemen keuangan. Dengan keadaan tersebut, auditor harus menyampaikan pendapat:
 - A. pendapat dengan pengecualian.
 - B. menolak memberikan pendapat.
 - C. pendapat tanpa pengecualian dengan disertai paragraf penjelasan secara terpisah.
 - D. pendapat tanpa pengecualian dengan disertai penjelasan yang disajikan dalam paragraf ruang lingkup.

-
-
4. Manajemen Hill Company memutuskan tidak memperhitungkan transaksi yang material dengan ketentuan yang dikemukakan dalam standar akuntansi keuangan. Alasan untuk itu telah dijelaskan dalam catatan terhadap statemen keuangan, dan manajemen secara jelas menunjukkan keadaan yang tidak biasa yang apabila mengikuti standar akuntansi keuangan justru akan menjadi salah saji. Laporan audit harus memasukkan hal tersebut dalam paragraf penjelasan yang terpisah yang memuat:
- A. Pengecualian terhadap subyek tersebut dalam pendapat dengan pengecualian.
 - B. Subyek tersebut dijelaskan dalam laporan audit dan digunakan sebagai dasar pemberian pendapat dengan pengecualian.
 - C. Pendapat tidak wajar.
 - D. Pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Statemen keuangan suatu perusahaan untuk kepentingan masyarakat telah menyatakan dengan tepat terhadap neraca dan hasil-hasil operasi tetapi statemen aliran kas dihilangkan, dalam hal ini auditor akan memberikan pendapat:
- A. Pendapat tanpa pengecualian yang disertai paragraf penjelasan
 - B. Menolak memberikan pendapat
 - C. Memberikan pendapat tidak wajar
 - D. Memberikan pendapat dengan pengecualian
6. Dalam rangka general audit, Auditor memberikan pendapat dengan pengecualian yang disebabkan oleh adanya pembatasan terhadap ruang lingkup audit. Situasi ini harus dijelaskan dalam paragraf penjelasan,
- A. mendahului paragraf pendapat dan hanya berisi tentang paragraf luas pemeriksaan dalam laporan audit
 - B. mengikuti paragraf pendapat dengan mengacu paragraf ruang lingkup dan paragraf pendapat.
 - D. mengikuti paragraf pendapat dan mengacuhkannya pada paragraf ruang lingkup.
 - D. mendahului paragraf pendapat dan mengacu baik kepada paragraf ruang lingkup maupun paragraf pendapat.
7. Laporan audit menunjukkan penggunaan prinsip akuntansi yang menyimpang dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan kata-kata berikut: "Menurut pendapat kami, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, statemen keuangan yang disajikan berikut ini telah menyajikan secara wajar". Hal ini memberi petunjuk tentang,
- A. pendapat tidak wajar.
 - B. pendapat dengan pengecualian.
 - C. pendapat tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan.
 - D. contoh terhadap pelaporan yang tidak memadai.
8. Apabila auditor utama memutuskan untuk membuat referensi terhadap pengujian yang dilakukan oleh auditor lain, laporan audit auditor utama harus menunjukkan secara jelas

mengenai hal tersebut dalam paragraf pendahuluan, ruang lingkup dan pendapat, mengenai:

- A. besaran porsi statemen keuangan yang diuji oleh auditor lain.
 - B. menolak tanggungjawab mengani bagian yang telah diuji oleh auditor lain tersebut.
 - C. nama auditor lainnya
 - D. pembagian tanggungjawab.
9. Dalam menghadapi statemen keuangan komparasi, auditor biasanya merubah opini yang telah dikemukakan terdahulu terhadap statemen keuangan periode sebelumnya, apabila:
- A. statemen keuangan tahun lalu dengan pendapat tanpa pengecualian dan untuk tahun ini pendapat dirubah yang disebabkan tidak ada konsistensi.
 - B. statemen keuangan terdahulu dinyatakan ulang dengan memberikan penjelasan dalam paragraf penjelasan.
 - C. statemen keuangan tahun sebelumnya dinyatakan kembali telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
 - D. tidak perlu dinyatakan dalam laporan audit.
10. Auditor terdahulu, terpuasi setelah melakukan komunikasi dengan auditor pengganti dan mengeluarkan kembali laporan karena audit klien menghendaki statemen keuangan komparatif. Auditor pendahulu akan membuat:
- A. surat pernyataan tidak bertanggungjawab terhadap laporan audit periode ini.
 - B. rujukan opini yang telah dinyatakan dalam laporan audit terdahulu.
 - C. rujukan bagi auditor terhadap permasalahan krusial yang timbul.
 - D. catatan bagi pemegang saham klien.
11. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified opinion*), artinya: (a) bebas dari keragu-raguan dan ketidakjujuran, dan (b) lengkap informasinya. Kondisi yang harus dipenuhi untuk mendukung opini tersebut antara lain, *kecuali*:
- A. Statemen keuangan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
 - B. Perubahan penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dari periode ke periode dijelaskan dengan cukup memadai.
 - C. Informasi yang mendukungnya telah cukup digambarkan dan dijelaskan didalam statemen keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
 - D. Prinsip akuntansi yang digunakan dalam perusahaan klien tidak diterapkan secara konsisten.
12. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified opinion*), artinya pendapat yang memberikan pernyataan pengecualian kecuali suatu kondisi atau permasalahan untuk atau tergantung pada kondisi tertentu. Pendapat ini diberikan apabila, *kecuali*:
- A. Luas pemeriksaan akuntan sangat tidak dibatasi oleh klien.

-
-
- B. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur pemeriksaan yang penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor.
- C. Statemen keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- D. Terdapat ketidakpastian yang luar biasa yang mempunyai pengaruh terhadap statemen keuangan dan tidak dapat diperkirakan dengan baik pada tanggal pembuatan statemen keuangan.
13. Apabila kesimpulan dalam audit adalah menolak memberikan pendapat, maka auditor harus melakukan hal-hal sebagai berikut dalam penyajian statemen keuangan, *kecuali*:
- A. Paragraf pengenalan (introductory) dimodifikasi.
- B. Paragraf ruang lingkup ditambah dengan pertimbangan penolakan tersebut.
- C. Paragraf penjelasan dimasukkan dalam paragraf pengenalan.
- D. Paragraf ketiga dan penyimpulan memberikan pernyataan mengenai penolakan memberikan pendapat.
14. Pengertian ketidak pastian (*uncertainty*), digunakan untuk menjelaskan keadaan yang menyebabkan daftar statemen keuangan tidak dapat memberikan penalaran terhadap penaksiran yang digunakan dalam statemen yang telah dikeluarkan. Sifat ketidak pastian ini adalah:
- A. dalam artian yang luas, dan tidak terbatas sebagaimana terlihat dalam utang kontinjensi.
- B. menyangkut hasil-hasil yang tidak dapat diketahui/dipastikan seperti adanya tuntutan pengadilan, dan lain-lain.
- C. terbatas sebagaimana terlihat dalam utang kontinjensi.
- D. keragu-raguan mengenai keadaan masa depan suatu entitas.
15. Apabila klien mempunyai beberapa cabang ataupun anak perusahaan pengauditan dapat memerlukan partisipasi kantor akuntan lain. Hal ini berarti ada suatu kondisi yang beralasan untuk menyusun laporan audit dengan mendasarkan laporan auditor lain. Apabila pengauditan melibatkan lebih dari satu kantor akuntan publik, maka:
- A. salah satunya bertindak sebagai *principals* (auditor utama).
- B. semua Auditor klien tersebut mempunyai kedudukan yang sama.
- C. Auditor salah satu kantor cabang bertindak sebagai *principals* (auditor utama).
- D. Auditor kantor pusat bertindak sebagai *principals* (auditor utama).

